

David Efendi

POLITIK ELITE MUHAMMADIYAH

Studi Tentang Fragmentasi
Elite Muhammadiyah

REVIVA
CENDEKIA

Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai politik elite MD serta memahami bagaimana implikasinya terhadap dinamika internal organisasi dan eksternal politik Indonesia dalam panggung politik di negeri ini. Kegagalan politik tahun 2004 tidak menjadikan elite MD trauma untuk melakukan manuver dalam Pemilu 2009, meski memunculkan kubu anti politik praktis yang menguat pasca kekalahan MAR. Beberapa argumen tentang signifikansi studi ini dilakukan antara lain, *pertama*, banyak pertanyaan mendasar yang betul-betul mengganggu mengenai optimisme kelompok *civil society* untuk membangun demokrasi. Akan tetapi, kelompok-kelompok CSO (*Civil Society Organization*) seperti NU dan MD selalu kandas, dalam mengusung kandidat dalam kontes pemilu langsung, untuk membentuk rezim yang 'lebih baik'. Apakah memang elit-elitnya sudah kehilangan karisma, atau mesin ormas ini nyaris lumpuh diterjang badai liberalisme politik yang didorong oleh partai politik, tim sukses dan tentu pemodal yang berkuasa dibalik kisah-kisah dramatis demokrasi elektoral. Atau, apakah fragmentasi politik kelompok santri ini semakin membingungkan basis massanya? *Kedua*, dalam arena politik Pemilu 2009, penulis melihat betapa kuat fragmentasi itu terlihat di tubuh elite baik antar elite MD lama versus baru pasca Muktamar 2005, atau antara elite yang mengklaim MD murni, ideologis, puritan, versus MD yang pro politik praktis atau *high politics*, dengan berbagai penafsiran yang melegitimasi tindakan para elite. Penulis ingin membuktikan bahwa sejarah politik adalah sejarah kekuasaan. Sejarah kekuasaan adalah sejarah sekelompok masyarakat yang jumlahnya sedikit, yang kemudian disebut elite, yang berkuasa.



David Efendi, SIP, M.A., M.A. adalah dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan area spesialisasi desentralisasi politik, politik regional/teritorial, kajian elit, oligarki dan dinasti politik serta pada bidang minor meliputi pemilu dan perilaku politik, partisipasi masyarakat, agama dan politik, antropologi dan etnografi politik. Luasnya minat kajian terbentuk karena penulis mengambil banyak waktu untuk menyelesaikan sarjana Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada, juga Master of Art (M.A.) program Ilmu Politik UGM, serta mengambil Master Ilmu Politik yang kedua di Universitas Hawaii at Manoa, Amerika Serikat. Karya skripsi S1 diterbitkan oleh PolGov UGM (2010) dengan judul *The Decline of Bourgeoisie: Runtuhnya Pedagang Pribumi Kotagede*. Buku yang sekarang hadir ini adalah tesis M.A. di UGM. Tesis M.A. yang kedua, berjudul *Local Politic and Identity: Resistance to Liberal Democracy in Yogyakarta Special Regions*, dalam proses alih bahasa dan diharapkan segera terbit.

Selain mengajar di kampus, penulis juga aktif sebagai peneliti, baik dari kampus di dalam negeri maupun bekerja sama dengan kampus/lembaga luar negeri. Pada tahun 2014 penulis terlibat penelitian di Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM terkait isu ekonomi politik dan dinamika Pemilu 2014, bekerja sama dengan Flinders University (Australia) dan Australian National University. Kegiatan lain penulis adalah pengasuh Rumah Baca Komunitas yang menjadi ventilasi dan apresiasi para pegiat gerakan literasi di Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya. Penulis dapat ditemui melalui email: defendi83@gmail.com atau FB: David Efendi untuk mendiskusikan banyak hal demi pembangunan bangsa dan peradaban



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

POLITIK ELITE MUHAMMADIYAH

**Studi Tentang Fragmentasi
Elite Muhammadiyah**

David Efendi

POLITIK ELITE MUHAMMADIYAH

**Studi Tentang Fragmentasi
Elite Muhammadiyah**

**REVIVA
CENDEKIA**

David Efendi, SIP., M.A., M.A.
POLITIK ELITE MUHAMMADIYAH
Studi Tentang Fragmentasi
Elite Muhammadiyah
Penerbit, 2014
...xviii+177 hal.; 14 x 21cm.

Diterbitkan oleh:
REVIVA CENDEKIA

Penulis:

David Efendi

Editor:

Arief Budiman Ch.

Cover dan Lay Out :

adimpaknala@gmail.com

ISBN 978-602-99149-8-9

Cetakan pertama, Agustus 2014

Cetakan kedua, Juli 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

*“Tulis dan Pelajarilah
dengan segala kesungguhan sebelum segalanya lenyap”*
(Andi Depu)

*“Kebanyakan pemimpin-pemimpin belum menuju baik dan
enaknya segala manusia, baru memerlukan kaumnya,
kaumnya pun tiada diperdulikan. Jika badannya sendiri yang
sudah mendapat kesenangan, pada perasaannya sudah berpahala,
sudah dapat sampai maksudnya.”*
(KHA. Dahlan)

*“Sebuah Muhammadiyah yang tidak mampu memberi solusi
terhadap masalah-masalah Indonesia
bukanlah Muhammadiyah yang sebenarnya”.*
(Ahmad Syafii Ma’arif)

Persembahan untuk,

DERRIDA HAFIZ HANAFI
dan
IQRA GARDA NUSANTARA

Kata Pengantar Penulis

“Perubahan adalah bentuk perlawanan terhadap Penindasan”.

Syukur dan sujudku, untukmu Ya Rabb, yang selalu hadir menyapaku penuh cinta dan kasih sayang, tak terkirakan. Kata pengantar ini agak berkesan lantaran banyak pihak yang mewarnai karya tulis ini. Inilah saatnya penulis memberikan apresiasi yang setimpal kepada semua yang memberikan kontribusi.

Pada saat pengantar ini ditulis, Sleman bagian lereng merapi di guyur hujan hari ini. Waktu saya menuliskan kata pengantar ini. Ada yang teringat waktu dulu, bagaimana menjalani proses kuliah dengan berbasah-basah, mandi keringat bercampur hujan karena tidak punya jas hujan. Karena keterbatasan sumber dana akhirnya harus bekerja serabutan menjadi apa saja yang halal, bekerja untuk siapa saja asal tidak melanggar hak orang. Apakah ini pragmatis? Bukan, ini bagian dari perjuangan!

Suatu pagi yang cerah, menyeletuklah dari bibir Uminya Hafiz, ketika sepulang penutupan program pelatihan Bahasa IFP cohort VIII di LBI UI Jakarta. “Bi, gimana tesis di UGM? Apa mungkin bisa selesai sekalian agar tidak sia-sia?”. saya kaget sekaget-kagetnya dalam otakku berputar-putar mencari jawabannya. Keadaan memang buruk, uang tidak ada dan benar-benar terimbas bank century, krisis global di segala bidang. Lalu sejeurus kemudian muncul jawaban dari langit, “Insyallah bisa Mi”. Umi-nya Hafiz itu tersenyum, lalu pergi ke sekolah, dimana ia mengajar TK BIAS Fullday school. Sebagai konsekuensinya, saya harus menemui dosen untuk konsultasi. Mas Nanang saya temui, dan menyatakan siap membimbing meski saya belum memberikan draft apa pun terkait proposal.

Wahai Hafiz, “malaikat” subuhku, Ayah berhutang budi kepadamu, engkau yang selalu membangunkan Tahajud dan Shubuh. Karya tulis ini, memang untukmu, dan hanya untukmu. Semoga membangkitkan semangat belajarmu kelak, Nak.

Terima kasih yang tiada terkira kepada dua dosen pembimbing saya: pertama, Mas Nanang yang mengatakan bahwa saya bisa menyelesaikan tesis dalam waktu sebulan, terima kasih telah banyak mengorbankan banyak waktu untuk saya. Kedua, Mas AAGN Ari Dwipayana, M.Si., selain yang memotivasi saya menulis tentang Kota Gede untuk skripsi, beliau juga *friendly* berkomunikasi dalam *Facebook* dan mendiskusikan kemungkinan tesis saya selesai secepatnya, beliau bersedia jadi pembimbing sesuai dengan permintaan secara kultural, semacam persahabatan. Selain itu, saya berterima kasih kepada Dr. Purwo Santoso (hampir profesor), yang memberikan kemudahan bagi saya untuk aktif kembali setelah cuti 1,5 semester dengan membuat surat pencabutan yang kemudian dikabulkan oleh Prof. Dr. Pratikno, dekan Fisipol UGM, sekaligus beliau adalah yang bersedia memberikan rekomendasi kepada saya yang akhirnya lolos seleksi beasiswa IFP Ford Foundation, sehingga minggu depan saya harus terbang ke Honolulu, dimana Obama pernah menapaki jalan di sana. *Thank so much, Mr. Dean*. Untuk dosen penguji Ratnawati, M.Si. dan Sigit Pamungkas, M.A., saya sampaikan *matur nuwun sanget*, Mbak dan Mas.

Terima kasih atas *support*-nya Mas Triyanto dan Mbak Erry, *Jazakumullah* karena yang membantu membayar SPP S-2 saya, juga untuk segala hal kebaikan Mas, saya akan ikhtiar melakukan apa yang Mas contohkan agar bisa membantu yang membutuhkan. *Matur sembah nuwun* untuk Ibunda Trias Setiawati (calon doktor), Bapak Muntaha, dan adik-adikku: Tia, Oni, Zaim, Dina, Mamal, kalian penuh kehangatan, empati, simpati, dan harapan. Terima kasih juga atas data-data, pinjaman buku, diskusi, dan akses internet gratisnya.

Terima kasih kepada Ibu Musrifah, ibunda saya yang dampak doanya masih terasa hingga saat ini, dan juga semoga engkau berada di tempat yang penuh rahmat di sisi Allah, matur nuwun *Mbah*-nya Hafiz, Kasmian, yang ada di negeri seberang, Malaysia sebagai TKI, atas bantuan dananya yang sangat penting di masa-masa penuh krisis ini. Semoga menjadi amal sholeh panjenengan. Amin.

Terima kasih atas bantuannya: Viva Yoga Mauladi, Drh., M.Si., anggota DPR RI dari PAN, BPH UMS, Bapak Sayuti, M.Pd., Bapak Marpuji Ali, STIKES Aisyiyah Yogyakarta. Semoga apa yang diberikan mendapatkan balasan yang lebih baik. Amin.

Kepada para penjaga perpustakaan Polokda, PP Muhammadiyah Cik di Tiro, LPI PP Muhammadiyah, Mas Adim yang banyak memberikan bantuan, materi, data, dan desain *power point*-nya. *Thanks* berat untuk semuanya, juga kepada penjaga toko buku Social Agency, Gramedia, dan pameran buku di Mandala Bakti Wanitatama. Jazakumullah.

Teman-teman “*colaps state class*”, seangkatan dan senasib-seperjuangan: Bang Risal yang membantu diskusi proposal tesis, juga Mbak Yaya, Dang Ridho, Mbak Ira, Misrina, Mr. Jarwo Abbas, Pak Frenky, Pak Domi di Timur Leste, Arif Flores, Ramly, Achild, Mas Aan, walau kita ‘berbeda pendapatan’, kita akan tetap pertahankan gang kita dengan tetap berkomunikasi, nomor HP jangan ganti, FB jangan dimatikan, email jangan dijual. *Keep in touch please!* Terima kasih atas *support*-nya dalam upayaku yang hampir gagal. *Thanks so much guys*. Spesial untuk Mbak Nur (sekretaris Plod), terima kasih atas semua keramahan dan bantuannya.

Terima kasih tiada batas kepada keluarga besar aktivis Muhammadiyah dalam Majelis Reboan, alumni IPM, anggota milis alumni irm-ipm, atas segala informasi yang telah diberikan kepada saya. *Special thanks*, untuk Mas Adim, Mas Aisy, Mudzakkir, MasMulyadi, yang merupakan teman diskusi yang sangat hangat dan panas! *Jazakumullah*, Mas Danan yang membantu banyak hal.

Semoga karya ini membawa manfaat bagi pengembaraan intelektual penulis pribadi, menjadi inspirasi bagi keluarga dan pembaca sekalian. Karena niat baik akan berbuah baik, dan niat perlawanan akan membuahkan suatu pengalaman termahal yang kita akan dapatkan. “Entah esok hari, atau lusa nanti,” kata Iwan Fals.

Padepokan KH Dahlan 103, 1 Januari 2014

Penyusun,

David Efendi

Daftar Isi

Kata Pengantar Penulis [≡] ix

Daftar Isi [≡] xii

Daftar Tabel [≡] xv

Glosarium [≡] xvi

BAB. I. PENDAHULUAN [≡] 1

1. Teori Elite [≡] 10

2. Fragmentasi Elite [≡] 13

3. Politik Santri [≡] 20

A. Definisi Konseptual [≡] 24

1. Elite dan Elite Survival [≡] 24

2. Muhammadiyah [≡] 24

3. Elite Muhammadiyah [≡] 24

4. Fragmentasi Elite [≡] 24

5. Politik Praktis [≡] 25

6. Pemilu [≡] 25

B. Definisi Operasional [≡] 25

Fragmentasi Elite [≡] 25

BAB. II. PERANG PENGARUH DAN MODALITAS ELITE MUHAMMADIYAH [≡] 32

A. Teori Modalitas Sosial [≡] 35

B. Modalitas Elite Muhammadiyah (terseleksi) [≡] 41

1. Modalitas Sosial [≡] 41

a. Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA [≡] 41

b. Prof. Dr. A. Syafii Maarif, MA [≡] 42

c. Prof.Dr.M. Amien Rais, MA. [≡] 44

- d. Dr.Haedar Nashir, M.Si. [≡] 45
- e. Prof.Dr.Yunahar Ilyas, Lc. [≡] 46
- 3. Modalitas Politik [≡] 47
- 4. Modalitas Ekonomi [≡] 52

BAB. III. SPEKTRUM FRAGMENTASI POLITIK ELITE MUHAMMADIYAH [≡] 64

- A. Fragmentasi Sebagai Dampak Menguatnya Tarikan Politik [≡] 64
 - 1. Spektrum Fragmentasi Politik Muhammadiyah [≡] 70
 - a. Kelompok Fundamentalis Politik [≡] 70
 - b. Kelompok Moderat Pasif [≡] 75
 - c. Kelompok Moderat Aktif [≡] 75
 - d. Kelompok Khittoiis [≡] 77
 - e. Kelompok Apolitik [≡] 80
 - 2. Spektrum Fragmentasi Internal/Ideologi Muhammadiyah [≡] 82
 - a. Muhammadiyah Puritan/Konservatif [≡] 88
 - b. Muhammadiyah Liberal Progresif [≡] 90
 - f. Kategorisasi Lainnya [≡] 94
- B. Faktor-faktor Penyebab Fragmentasi [≡] 95
 - 1. Faktor 1: Kontinuitas Sejarah [≡] 96
 - 2. Faktor 2: Intervensi Ideologi Asing [≡] 102
 - 3. Faktor 3: Desain Organisasi yang Inklusif dan Otonom [≡] 103
 - 4. Faktor 4: Pragmatisme Politik Elite [≡] 106

BAB. IV. METODE DAN IMPLIKASI POLITIK ELITE MUHAMMADIYAH DALAM PEMILU 2009 [≡] 109

- A. Pendahuluan [≡] 109
- B. Metode Politik Elite Muhammadiyah [≡] 112
 - B.1. Metode Kelompok Khittoiis dan Moderat Pasif [≡] 120
 - 1. Media yang Digunakan [≡] 125
 - a. Media Internal Muhammadiyah [≡] 126
 - b. Media Massa Publik [≡] 127
 - 2. Pengaruh terhadap Keputusan Organisasi [≡] 128

3. Hubungan dengan Partai Politik	[≡]	132
4. Respon terhadap Politik dan Pemilu	[≡]	1334
B.2. Metode Kelompok Fundamentalisme Politik	[≡]	138
1. Media yang Digunakan	[≡]	138
2. Pengaruh terhadap keputusan Organisasi	[≡]	139
3. Hubungan dengan Partai Politik	[≡]	141
a. Hub. Elite Muhammadiyah dengan PAN	[≡]	141
b. Hub. Elite Muhammadiyah dengan PMB	[≡]	143
c. Hub. Elite Muhammadiyah dg. Partai Politik Lainnya	[≡]	144
4. Respon terhadap Pemilu 2009	[≡]	145
5. Pemilu 2009: Berebut Pengaruh Antar Elite	[≡]	152
a. Deklarasi DS sebagai Capres PMB	[≡]	152
b. DS ke JK, MAR Merapat ke Cikeas	[≡]	155
B.3. Metode Politik Kelompok Moderat Aktif	[≡]	158
1. Media yang Digunakan	[≡]	158
2. Pengaruh terhadap Keputusan Organisasi	[≡]	158
3. Hubungan dengan Partai Politik	[≡]	158
4. Respon terhadap Pemilu 2009	[≡]	160
B.4. Metode Politik Kelompok Apolitis	[≡]	162
1. Media yang Digunakan	[≡]	162
2. Pengaruh terhadap Keputusan Organisasi	[≡]	162
3. Hubungan dengan Partai Politik	[≡]	163
4. Respon terhadap Pemilu dan Tim Sukses	[≡]	163
C. Implikasi Politik Elite Muhammadiyah	[≡]	163
1. Implikasi terhadap Institusi Muhammadiyah	[≡]	164
2. Implikasi Internal terhadap Warga Muhammadiyah	[≡]	166
3. Implikasi Eksternal terhadap Politik Indonesia	[≡]	168
BAB. V. KESIMPULAN [≡] 172		
DAFTAR PUSTAKA [≡] 178		

Daftar Tabel

Tabel I.1 Review Literatur	[≡]	9
Tabel II.1 Modalitas Bordeaux	[≡]	40
Tabel II.2 Modalitas Elite Muhammadiyah	[≡]	61
Tabel II.3 Posisi, Reputasi dan Pengaruh	[≡]	63
Tabel IV.1 Daftar Politisi Muhammadiyah (DPR RI)	[≡]	135
Tabel IV.2 Daftar Politisi Muhammadiyah (DPD RI)	[≡]	136
Tabel IV.3 Metode Politik/Manufer dan Implikasi	[≡]	170

Glosari

AMM	: Angkatan Muda Muhammadiyah
'Aisyiyah	: Organisasi Otonom khusus yang mewadai kelompok Perempuan Muhammadiyah
ASM	: Ahmad Syafi'i Ma'arif
BS	: Bambang Sudibyo
BP	: Bank Persyarikatan, milik Muhammadiyah
CDCC	: Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations
Dakwah	: penyampaian misi ajaran tertentu (Islam)
DS	: Din Syamsuddin
Elite	: kelompok yang jumlahnya terbatas dan berpengaruh
Golkar	: Partai Golongan Karya
Hanura	: Partai Hati Nurani Rakyat
JK-Win	:Jusuf Kalla-Wiranto
JPPR	: Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
IPM	: Ikatan Pelajar Muhammadiyah, bagian Organisasi Otonom Muhammadiyah
IMM	: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, bagian Organisasi Otonom Muhammadiyah
Islam-Kejawen	: Agama "campuran" Islam dan Hindu
Khittoh	: Keputusan Organisasi Muhammadiyah yang mengikat organisasi dan pengurusnya untuk melakukan atau melarang.
KIB	: Kabinet Indonesia Bersatu, jilid 1 dan 2.
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Madrasah	: tempat menuntut ilmu agama Islam tingkat dasar
Majelis	Kelompok lembaga, institusi pembantu di Muhammadiyah

MAR	: Muhammad Amien Rais
Masyumi	: Partai Politik Islam terbesar pada Pemilu 1955
MD	: Muhammadiyah
Mega-Pro	: Megawati SP-Prabowo Subianto
MPP	: Majelis Pertimbangan Partai
Marmud	: Marhenis-Muhammadiyah
MR	: Majelis Reboan
Muhammadiyah	: organisasi da'wah Islam yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta.
Mubaligh	: juru dakwah dalam Islam
Muktamar	: Forum permusyawaratan tertinggi di Muhammadiyah
MUNU	: Kependekan dari Muhammadiyah-NU, salah satu varian
MTDK	: Majelis Tabligh dan Da'wah Khusus PP Muhammadiyah
NA	: Nasyiatul 'Aisyiyah, bagian organisasi otonom Muhammadiyah
NGO	: Non-Government Organization
PAM	: Perhimpunan Amanat Muhammadiyah
PAN	: Partai Amanat Nasional
PGAN	: Pendidikan Guru Agama Negeri
Parmusi	: Partai Muslimin Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PMB	: Partai Matahari Bangsa
Politik Praktis	: Politik kepartaian, politik untuk berebut kekuasaan formal
Politik Kebangsaan	: Upaya memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM), hak politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hak adat tanpa harus menjadi partai atau bagian partai politik
Khittah	: Sejenis Garis Besar Haluan organisasi
PP	: Pimpinan Pusat

PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PSAP	: Pusat Studi Antar Peradaban
PKS	: Partai Keadailan Sejahtera
Ortom	Organisasi Otonom di bawah persyarikatan Muhammadiyah
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PM	: Pemuda Muhammadiyah (Organisasi Otonom Muhammadiyah)
PTM	: Perguruan Tinggi Muhammadiyah
SB	: Sutrisno Bachir
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SK/SI	: Surat keputusan/surat intruksi
Santri	kaum yang taat agama (islam)
Tanwir	: Forum Persmusyawaratan Muhammadiyah tertinggi di bawah Muktamar
Transformasi	perubahan bentuk, keadaan, sosial politik, ekonomi, dan budaya
Tabligh	: Menyampaikan dakwah Islam, Muhammadiyah
UM	: Universitas Muhammadiyah
YI	: Yunahar Ilyas

BAB I

PENDAHULUAN

“Silakan ada perbedaan, ada fragmentasi politik, tapi perlu bersatu dalam isu-isu strategis kebangsaan.”
(Din Syamsuddin)¹

“Muhammadiyah rileks menghadapi Pemilu 2009. Tanwir tidak akan membahas pemilihan umum, sebab kita akan fokus pada penguatan internal organisasi dan mendorong visi dan karakter kebangsaan. Lebih pada aspek moralitas.”
(Haedar Nashir)²

A. Latar Belakang

Dua kutipan di atas merupakan ilustrasi penting untuk mendeskripsikan bagaimana elite-elite Muhammadiyah (MD) berbeda sikap dalam merespon dinamika politik yang kemudian mempertegas fragmentasi (perpecahan) di tubuh elite MD, yang terbagi menjadi kubu politis dan non-politis, kelompok struktural dan kultural, yang kemudian menjelma dalam konteks Islam politik dan Islam kultural. Bahkan, lebih kompleks

¹ Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2010 tentang perlunya koalisi partai Islam, Sinar Harapan, 12 Desember 2008 yang dipublikasikan kembali dalam Majalah Tempo pada 5 April 2009.

² Haedar Nashir, ketua PP Muhammadiyah, diberitakan dalam website resmi Muhammadiyah, www.muhammadiyah.or.id, Senin, 2 Maret 2009. Dalam berita tersebut dikutipkan lebih panjang, “Muhammadiyah rileks saja menghadapi Pemilu 2009. Tanwir tidak akan membahas pemilihan umum, sebab kita akan fokus pada penguatan internal organisasi dan mendorong visi dan karakter kebangsaan. Lebih pada aspek moralitas”.

dari yang digambarkan di sini, mengingat adanya dimensi yang sangat banyak di internal MD, mulai dari struktur, ortom, lingkungan politik, sejarah yang berbeda-beda. Tidak sesederhana itu, sebab secara pemikiran Islam juga terfragmentasi atas kelompok konservatif-fundamentalis dan kelompok liberal-progresif (Pradana Boy, 2008).³ Walau banyak faksi, Profesor Kim, seorang Indonesianis, meyakini bahwa di MD bisa mewa-dahi banyak kelompok meski saling berlawanan.⁴ Namun, penulis mencu-rigai adanya banyak masalah dibalik fragmentasi elite itu mengingat kon-teks politik yang penuh ketidakpastian.

Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman secara men-dalam mengenai politik elite MD serta memahami bagaimana implikasinya terhadap dinamika internal organisasi dan eksternal politik Indonesia dalam panggung politik di negeri ini, khususnya dalam pentas Pemilu 2009. Kegagalan politik tahun 2004 tidak menjadikan elite MD trauma untuk melakukan manuver dalam Pemilu 2009, meski memunculkan kubu anti politik praktis yang menguat pasca kekalahan MAR.⁵ Beberapa argumen tentang signifikansi studi ini dilakukan antara lain, *pertama*, banyak pertanyaan mendasar yang betul-betul mengganggu mengenai optimisme kelompok *civil society* untuk membangun demokrasi. Akan tetapi, kelompok-kelompok CSO (*Civil Society Organization*) seperti NU dan MD selalu kandas, dalam mengusung kandidat dalam kontes pemilu langsung, untuk membentuk rezim yang 'lebih baik'. Apakah memang elit-elitnya

³ Tesis yang ditulis oleh Pradana Boy ZTF di ANU. Dalam penelitiannya yang berjudul '*In Defence of Pure Islam: The Conservative-Progressive Debate Within Muhammadiyah*', Boy dengan tegas dan berani menggambarkan bahwa ada pertarungan antara kubu konservatisme dan kubu progresifisme di Muhammadiyah

⁴ Peneliti dari Kangwon National University, Kim Hyung-Jun mengatakan, Muham-madiyah merupakan organisasi yang unik. Hasil penelitiannya mengungkapkan, Muhammadiyah dapat menampung hal-hal yang saling berlawanan. Muhammadiyah punya banyak kelebihan, tetapi tidak mau menampilkannya. Barangkali karena pengaruh sosok pendirinya, KH Ahmad Dahlan, yang berkarakter *sepi ing pamrih rame ing gawe*. Baca Kompas, 16 Mei 2010 dan Muhammadiyah.or.id http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1990&Itemid=2

⁵ Dawam Raharjo, Muhammadiyah dalam Kubangan Krisis, 2010, *Makalah*, tidak dipublikasikan.

sudah kehilangan karisma, atau mesin ormas ini nyaris lumpuh diterjang badai liberalisme politik yang didorong oleh partai politik, tim sukses dan tentu pemodal yang berkuasa dibalik kisah-kisah dramatis demokrasi elektoral. Atau apakah fragmentasi politik kelompok santri ini semakin membingungkan basis massanya? Ini merupakan beberapa pertanyaan kunci dalam studi ini.

Kedua, dalam arena politik Pemilu 2009 penulis melihat betapa kuat fragmentasi itu terlihat di tubuh elite baik antar elite MD lama versus baru pasca Muktamar 2005, atau antara elite yang mengklaim MD murni, ideologis, puritan, versus MD yang pro politik praktis atau *high politic*, dengan berbagai penafsiran yang melegitimasi tindakan para elite. Ini merupakan sumbangan penting dalam kajian elite, mengingat kajian elite kepemimpinan dalam ormas masih jarang dilakukan, dibanding kajian terkait elite politik dalam artian elite yang memerintah.⁶ Penulis ingin membuktikan bahwa sejarah politik adalah sejarah kekuasaan. Sejarah kekuasaan adalah sejarah sekelompok masyarakat yang jumlahnya sedikit, yang kemudian disebut elite, yang berkuasa. Begitu juga, sejarah kekuasaan di sisi lain adalah sejarah borjuasi⁷ dalam pandangan Marxian ketika dihubungkan dalam bingkai masyarakat industri-kapitalis.⁸ Untuk memperoleh kekuasaan bisa dengan jalan kekerasan. Atau, menurut Geertz, dengan menjual simbol tertentu (agama, budaya, dan sebagainya).

Sebagai salah satu orang yang pernah aktif di MD, penulis merasa terganggu dengan banyak spekulasi tentang gagalnya politik MD dalam ranah politik, termasuk dua kali pemilu yaitu Pemilu 2004 yang lalu. Muhammadiyah sekuat tenaga menghibahkan “kader terbaiknya” untuk bangsa yaitu M. Amien Rais (MAR) yang akhirnya kandas di babak

⁶ Bahwa dalam masyarakat boleh dibedakan menjadi dua kelas yaitu elite atas dan bawah. Elite atas terbagi atas elite yang memerintah dan elite yang tidak memerintah. Baca TB. Bottomore dalam buku *Elite dan Masyarakat* (Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2005) hlm.

⁷ Kata *bourgeoisie* yang selanjutnya ditulis borjuasi. Dan *bourgeois* ditulis borjuis.

⁸ Dalam pandangan Weber ada tiga tahapan masyarakat yaitu masyarakat tradisional, pra industrialis dan masyarakat industri-kapitalis. Masyarakat industri kapitalis dicirikan dengan pola pikir rasional, individualis, kuasa modal, dan kompetisi.

Banyak orang mengatakan bahwa mobilisasi SDM, material dan finansial yang dilakukan MD dalam mengusung MAR sebagai calon presiden tidak sedikit, tenaga AMM dan energi organisasi nyaris terkuras habis untuk kemenangan MAR. Dengan hasil yang sangat buruk, kekalahan ini mengakibatkan 'trauma' di MD. Tapi, nampaknya trauma itu mudah sirna, sehingga pada Pemilu 2009 kembali diujicobakan.

pertama, dan lagi gagal keduanya dalam Pemilu 2009 yang konon elit MD secara simbolis mendukung dua pasang calon presiden yaitu pasangan Mega-Pro dan JK-Win.⁹

Sebagaimana kata Thomas Carlyle bahwa sejarah adalah “riwayat hidup para pembesar”, maka bisa dikatakan para elite itulah penentu sejarah. Sepanjang sejarah peradaban sedikit saja nama orang yang kita kenal. Dalam sejarah Islam dikenal perjuangan Muhammad, sejarah Katholik dikenal elite gereja di Roma-Italia.¹⁰ Dalam

konteks MD, sangat mungkin paradigma kekuasaan dimaknai dalam perspektif berbeda oleh para elitnya. MD sendiri sebagai organisasi kelas menengah (awalnya) yang dihuni berbagai kelompok elite dengan kepentingan yang beragam. Secara teoritis, kaum elite adalah kelompok yang gemar mencari keuntungan.

Banyak orang, termasuk elit MD, mengatakan bahwa mobilisasi sumber daya manusia, material dan finansial yang dilakukan MD dalam mengusung MAR sebagai calon presiden tidak sedikit, tenaga Angkatan Muda Muhammadiyah dan energi organisasi nyaris terkuras habis untuk

⁹ Mega-Pro (Megawatai SP-Prabowo Subianto), JK-WIN (Jusuf Kalla-Wiranto). Dalam hal ini mudah terbaca karena hanya terdiri dari tiga pasangan calon, sedangkan MD dalam hal ini Pimpinan Pusat (PP) atau lebih spesifik lagi manufer Dien Syamsuddin (DS) yang mengundang dua pasangan calon secara otomatis bisa disebut politik asal bukan SBY. Salah satu hal yang menarik adalah konfigurasi atau fragmentasi politik elit MD ini dicurigai membawa dampak yang serius terhadap identitas MD.

¹⁰ Lebih lanjut misalnya, dalam kontelasi politik internasional, kita mengenal dua individu yang paling kontradiktif yaitu George W. Bush dan Saddam Hussain sebagai dua aktor yang menyebabkan meletusnya perang maut yang berakibat terpuruknya perekonomian dunia dan terlepasnya jutaan nyawa manusia. Seolah dua orang itu saja yang menentukan dengan cara apa pembantaian massal dipraktikkan. Inilah yang disebut sejarah perang, damai, kekuasaan adalah sejarah segelintir elite.

pemenangan MAR yang memang merupakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Dengan hasil yang sangat buruk, kekalahan ini mengakibatkan banyak ‘trauma’ di organisasi terbesar kedua tersebut. Tapi, nampaknya trauma itu mudah sirna, dalam kasus beberapa petinggi ormas tersebut, sehingga pada Pemilu 2009 kembali diujicobakan.

Ada dua alasan mendasar mengapa penulis mengambil judul tersebut di atas. *Pertama*, berbicara faksionalisme atau fragmentasi dalam partai politik mungkin biasa-biasa saja, tetapi mendiskusikan tema tersebut dalam konteks *civil society* (MD) mungkin belum banyak yang mengkajinya, sehingga penulis ingin menganalisis terkait pola fragmentasi, sebab dan implikasi dalam perspektif yang lebih kaya. Persoalan politik di MD memang tidak pernah usai diperdebatkan. Belum lama ini terjadi adu argumen mengenai “kegagalan” politik elite MD yang dinilai secara naif, yaitu gagal, sebab memang bukan habitatnya di dunia politik. Sementara, kubu yang lain mengatakan kegagalan ini karena MD tidak solid, tidak ada kesatuan komando yang jelas (kolektif kolegal), atau misalnya MD tidak bisa bermain di level media, di level *grass root* MD dipimpin oleh elit-elit yang mempunyai loyalitas beragam baik kepada partai atau kepada ikatan emosional. Selain itu, ada juga yang beragumen bahwa MD tidak mempunyai formulasi dalam politik kekuasaan. Bahkan, sebaliknya, dalam batas tertentu MD menghalangi warganya untuk terlibat politik praktis.¹¹

Kedua, signifikansi riset ini adalah untuk memperluas kajian mengenai teori elite yang dikontekstualisasikan di negara berkembang, negara yang sedang membangun demokrasi dalam terminologi Huntington, tentu saja pengaruh elite bisa jadi berubah sebagaimana transformasi politik yang menyelimutinya. Legitimasi kekuasaan elite mungkin sebagian telah usang, sehingga digantikan modalitas yang sama sekali baru untuk meraih kekuasaan. Keruntuhan politik elite bisa jadi dimulai dari runtuhnya politik aliran yang minus kepemimpinan karismatik. Atau, memang persebaran

¹¹ Pertarungan antara kubu kultural dan struktural yang saling memanfaatkan legitimasi organisasi dalam bentuk keputusan-keputusan organisasi. Dalam Pemilu 2004 ada khittah Denpasar yang mendukung MAR, dan juga caleg-caleg Muhammadiyah. Dalam Pemilu 2009 ada instruksi PP Muhammadiyah untuk menjaga keutuhan Muhammadiyah.

power di tubuh ormas berbasis agama ini sangat merata dan tidak terpusat sehingga keragaman ini berdampak pula terhadap bentuk respon politiknya?¹² Benarkah demikian?

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada upaya untuk menjawab pertanyaan pokok yaitu: (1). Bagaimana bentuk fragmentasi elite Muhammadiyah dalam Pemilihan Umum 2009? (2). Mengapa terjadi fragmentasi politik elite Muhammadiyah. Lalu, pertanyaan inti dikembangkan untuk menjawab pertanyaan, modalitas apa yang digunakan oleh elite Muhammadiyah untuk melegitimasi manufer politiknya, serta bagaimana implikasi yang disebabkan oleh fragmentasi elite Muhammadiyah tersebut dalam Pemilu 2009?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami bagaimana bentuk atau spektrum fragmentasi elit politik Muhammadiyah serta aktor-aktornya di Muhammadiyah terutama pada Pemilu 2009.
2. Mengetahui basis modalitas elite dalam tindakan politiknya.
3. Memahami implikasi apa yang disebabkan oleh fragmentasi elite Muhammadiyah baik internal maupun eksternal.
4. Memahami bagaimana elite-elite Muhammadiyah melakukan strategi politik di tengah gelombang liberalisasi politik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

D.1. Manfaat Akademik, antara lain:

1. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu politik terutama yang menyangkut kajian elite dan perannya dalam politik Indonesia.
2. Memberikan sumbangan untuk diskusi akademik dalam kerangka

¹² Muhammadiyah dikendalikan oleh 13 orang elite kepemimpinan yang seringkali suaranya berbeda-beda menyikapi masalah sosial dan politik. Sebagai konsekuensi logisnya adalah lemahnya karismatik dalam organisasi ini dan kecenderungan fragmentasi yang menguat.

pengembangan ilmu-ilmu politik dan sosial yang lebih empirik dengan belajar dari kasus-kasus yang hendak dikaji.

3. Memberikan perspektif baru mengenai kajian elit di kelompok *civil society* yang dirasa selama ini kurang mendapat perhatian dari para sarjana Ilmu Politik.

D.2. Manfaat Praksis, antara lain:

1. Mendapatkan penjelasan mengenai pola atau bentuk fragmentasi politik elit Muhammadiyah
2. Mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana elit-elit Muhammadiyah melakukan strategi untuk *survive* di tengah gelombang liberalisasi politik.
3. Mendapatkan penjelasan mengenai korelasi antara fragmentasi elit di Muhammadiyah dengan kegagalan politik pada Pilpres 2009.
4. Mendapatkan penjelasan mengenai praktik politik elite Muhammadiyah dari model monolitik ke lingkungan baru yang multipartai.
5. Mengetahui dinamika politik elit Muhammadiyah dalam bursa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009.
6. Mengetahui bagaimana elit-elit Muhammadiyah melakukan strategi politik untuk *survive* di tengah gelombang liberalisasi politik.

E. Review Literatur

Studi tentang latar belakang berdirinya Muhammadiyah, telah banyak ditulis dan dibahas, antara lain ialah yang dikemukakan oleh HAMKA (1908-1981), sebagai seorang penulis dan pemikir yang kreatif, mengemukakan ada tiga faktor yang mendorong lahirnya gerakan ini. *Pertama*, keterbelakangan dan kebodohan ummat Islam Indonesia dalam hampir semua bidang kehidupan. *Kedua*, suasana kemiskinan yang parah yang diderita ummat dalam suatu negeri kaya seperti Indonesia. *Ketiga*, kondisi pendidikan Islam yang sudah sangat kuno, seperti yang terlihat pada pesantren.¹³

Karena sudah terlampau banyak kajian mengenai sisi sejarah MD dalam perspektif dakwah Keislaman sehingga dalam konteks ini penulis berusaha menyajikan data-data seputar sejarah politik MD dan bagaimana

¹³ Bambang Siswoyo, Skripsi, *Relasi Muhammadiyah dengan Negara*, UIN Suka, 2004, hlm. 3

proses-proses transformasi yang dialami oleh organisasi tersebut. Setidaknya ada tiga fase MD dalam dinamika politik, yaitu masa Hindia Belanda dimana MD baru menginjakkan kakinya di Indonesia melalui sosok KHA. Dahlan. Fase kedua, MD dalam dinamika politik Orde Lama, diikuti fase berikutnya MD dan politik Orde Baru, lalu MD pada era Reformasi sampai sekarang dengan menjadikan pemilu sebagai momentum utamanya karena, mau tidak mau, pemilu akan menguras banyak energi Muhammadiyah sekaligus menggoda elit-elitnya untuk terlibat dalam setiap denyut nadi politik di tanah air ini.

Ada beberapa karya tulis yang pernah membahas seputar tema komunikasi yang dilihat dari berbagai perspektif politik, teori elite, media, dan wacana dalam khasanah pancaroba politik di Indonesia, yang penulis anggap relevan untuk dijadikan kerangka teori dan bahan acuan untuk penulisan tema yang sama, meski dalam konteks yang lebih luas atau lebih spesifik.

Nakamura (1983) mengamati perkembangan MD dalam perspektif antropologi, memfokuskan perhatian pada realitas lokal yang dihadapi gerakan itu di Kotagede, Yogyakarta. Nakamura berusaha membuktikan bahwa MD mewakili proses perubahan keagamaan yang berlangsung akibat interaksi antar berbagai unsur internal masyarakat Jawa. MD dikatakan sejak awal bukan corak gerakan politik. Namun demikian, secara kritis, sebenarnya ada berbagai aktivitas yang selalu bersinggungan dengan politik. Selain itu, kajian kontemporer dilakukan oleh Jurdi (2008) tentang Muhammadiyah yang ditulis setebal 520 halaman dengan batasan waktu dan spektrum yang luas 1966-2006. Saya belum menemukan kajian secara spesifik bagaimana elit melakukan upaya untuk *survival of the fittes* dalam panggung politik yang ujungnya juga panggung ekonomi.¹⁴

Untuk memudahkan membaca hasil-hasil kajian terdahulu berikut ringkasan sebagaimana tabel I.1.

Dari beberapa literatur buku tersebut, penulis belum menemukan penelitian yang spesifik mengenai komunikasi Politik MD secara organisatoris

¹⁴ Syarifudin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik 1966-2006*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Tabel I.1

Judul Karya	Penulis	Kesimpulan	Kekurangan
Muhammadiyah The Political Behaviour of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism	Alfian (1989)	Ada tiga wajah Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu Islam di Indonesia, yakni sebagai <i>a religious reformist</i> , <i>agent of changes</i> dan <i>a political force</i> . ¹⁵	Dimensi lokalitas lebih kuat dari pada melihat elite secara umum. Setting kolonial bukan kontemporer
Menggugat Muhammadiyah	Abdul Munir Mulkhan	Muhammadiyah harus melakukan otokritik secara menyeluruh termasuk dalam hal pelurusan persepsi tentang hubungan Muhammadiyah dan Partai Politik. Politik santri menjadi titik pokok pembahasan	
The Crescent Aries Over the Banyan Three: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (1976)	Mitsuo Nakamura, ¹⁶	Muhammadiyah yang multi wajah dalam artian yang netral, untuk menunjukkan bahwa sebuah organisasi atau gerakan Islam modernis tidaklah dapat ditilik dari satu sisi dengan satu wajah tetapi memerlukan pendekatan yang holistik.	Lokalitas
Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006	Syarifudin Jurdi	Studi yang paling komprehensif mengenai dinamika Muhammadiyah dan politik, banyak aspek politik, kekuasaan ¹⁷	Kurangnya ruang penjelasan peran politik Muhammadiyah mendatang dengan berkaca pada Pemilu 2009

¹⁵ Alfian. *Muhammadiyah The Political Behaviour of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

¹⁶ Mitsuo Nakamura, *The Crescent Aries Over the Banyan Three: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. Alih Bahasa oleh M. Yusron Asrofi, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1983.

¹⁷ Buku ini termasuk aspek-aspek keterlibatan aktif Muhammadiyah dalam proses politik. Sebagai hasil penelitian, buku ini bersifat historis dan kontekstual mengenai keterlibatan Muhammadiyah dalam politik di Indonesia periode otoriter (1966-1998) dan periode transisi Orde Baru (1998-2006).

Tabel I.1 (lanjutan)

Elit Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik	Syarifuddin Jurdi	Bagaimana elite lokal Muhammadiyah secara spesifik di Bima Nusa Tenggara Timur dalam panggung politik pada era reformasi dengan nuansa otonomi daerah dan kebebasan dalam demokrasi babak baru di Indonesia ¹⁸ .
Muhammadiyah, Islam dan Runtuhnya Orde Baru (Studi Tentang Perubahan Perilaku Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998).	Suwarno ¹⁹ (2000),	Dinamika internal Muhammadiyah sangat dipengaruhi oleh tampilnya M. Amien Rais sebagai elit Muhammadiyah menandai terjadinya perubahan kepemimpinan dalam Muhammadiyah dari kepemimpinan ulama' kepada cendekiawan, dan menggiring Muhammadiyah lebih berorientasi politis vis a vis pemerintah. M. Amien Rais juga membawa Muhammadiyah kepada sikap kooperatif, tetapi sangat kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan rezim Orde Baru.

dengan melibatkan aktor-aktor kunci baik di level nasional maupun lokal dengan melihat persoalan fragmentasi di tubuh elite mengenai sikap dan pemikiran keagamaan dan politik. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya konfigurasi elit dalam komunikasi politik yang dilakukan secara organisasi dalam pemenangan sebuah kontes politik kekuasaan (pemilu) yang tentu saja akan berhadapan dengan mesin partai yang pragmatis dan nir-ideologis sementara ormas semacam MD tentu mencoba istiqomah dalam ideologi dalam tindak tanduk yang masuk atau menyerempet tembok politik.

F. Kerangka Teori

F.1. Teori Elit

Satu kerangka konseptual yang sangat penting untuk diperhatikan adalah mengenai siapa elit? Dalam konteks ini siapa sebenarnya yang disebut

¹⁸ Syarifudin Jurdi, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik, Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.

¹⁹ Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

elite Muhammadiyah itu? Hal ini penting sekali untuk membangun kesepahaman dalam kerangka analisis pada karya ini sehingga tidak mengakibatkan generalisasi yang berlebihan.

Mas'ood dan Mc.Andrews (2001), memberikan penjelasan yang sangat penting dalam pengantar tulisan Robert D. Putnam mengenai elite. Putnam setelah melakukan kajian yang cukup panjang mengenai teori-teori elite, lalu memunculkan pemahaman baru mengenai elite politik, kekuasaan, dan pengaruh politik. Putnam mengkritik dikotomi stratifikasi sosial klasik yang hanya membagi menjadi dua lapisan yaitu elite pemilik kekuasaan dan massa yang tidak memiliki kekuasaan.²⁰

Putnam menunjukkan adanya tiga cara untuk mengetahui siapa yang berpengaruh besar atau berkuasa dalam suatu masyarakat politik, yaitu dengan menggunakan analisa posisi, analisa reputasi, dan analisa keputusan. Ketiganya, menurut Mas'ood, memiliki kelebihan dan kekurangan tapi sesuai dengan definisi kekuasaan, maka Putnam lebih memilih atau menganjurkan analisa keputusan.²¹

Secara terminologi dalam *Dictionary of Sociology* yang ditulis David Jery dan Julia Jery menjelaskan secara ringkas bahwa:

*Elite is literally the "best" or most talented members of society (e.g. educational elite), however in sociology the term most usually refers to political elite. Here, the assumption of elite theory has been that a division between elites and a masses is an inevitable feature of any complex modern society, and that aspirations of radical democrats that the people as whole could rule is mistaken.*²²

Hal yang serupa juga pernah dilacak T.B. Bottomore, telah digunakan pada abad ke-17 untuk menggambarkan barang-barang dengan kualitas sempurna. Penggunaan itu kemudian diperluas untuk merujuk pada

²⁰ Definisi klasik yang dirumuskan oleh Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, TB Bottomore, Robert Michels, Dorso, Dahl, dkk. Sedangkan enam kelompok elite ala Putnam dalam piramida itu antara lain, mulai dari yang tertinggi: kelompok pengambil keputusan, kaum berpengaruh, aktivis, publik peminat politik, kaum pemilih, dan non-partisan.

Baca, Mohtar Mas'ood dan Collin Mc.Andrews dalam *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001, hlm.76

²¹ *Op cit*, 76

²² David Jery dan Julia Jery, Collins, *Dictionary of Sociology*, British: Harper Collins Publishers, 1991, hlm.188.

kelompok-kelompok sosial yang unggul, misalnya unit-unit militer kelas satu atau bangsawan yang tinggi. Oxford English Dictionary (1823), kemudian memasukkan entri “elite” merujuk pada eksistensi kelompok-kelompok sosial.²³ Sementara, Soerjono Soekanto membatasi pengertian elite sebagai:

“kelompok orang-orang yang dalam situasi sosial tertentu menduduki posisi tertinggi, dianggap mempunyai kekuasaan besar dan hak istimewa, kadang-kadang diartikan sebagai golongan aristokrat yang berkuasa yang berkuasa karena faktor keturunan. Sering kali juga diartikan sebagai posisi-posisi dalam struktur sosial yang relatif tinggi, sehingga mereka yang menduduki posisi tersebut juga mempunyai kedudukan yang tinggi”.²⁴

Elite selalu merupakan kelompok yang terbatas secara kuantitatif dan sangat menonjol dalam peran di level atas. Elite dalam konteks penelitian ini adalah elite agama, intelektual, atau kepengurusan di level pusat yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah. Dalam organisasi MD, kepemimpinan dipegang oleh 13 orang dengan latar belakang yang tidak monolitik atau seragam.

Para ilmuwan yang mengkaji dan menteorisasikan konsep elite di antaranya seperti Pareto, Mosca, Michels, dan Darso yang mengatakan bahwa dimana dan kapan saja dalam masyarakat selalu dipimpin oleh sekelompok individu kecil yang berkuasa. Pareto memahami elite lebih pada kekuasaan politik atau kelompok yang memerintah dan elite yang tidak memerintah dengan kedudukan atau jabatan puncak dalam masyarakat, sedangkan Suzanna Keller lebih melihat tingkat pengaruh dan dampak yang diakibatkan oleh elit sehingga mereka bisa bertahan. Sementara Haryanto (1990) menjelaskan bahwa elite itu senantiasa merujuk pada seseorang atau kelompok yang mempunyai keunggulan tertentu dimana dengan keunggulan tersebut yang bersangkutan dapat menjalankan peran yang berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu.²⁵

²³ T.B. Bottomore, *Elite dan Masyarakat* (Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006), hlm. iii.

²⁴ *Kumpulan Istilah-istilah Sosiologi*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, 1977, hlm. 51

²⁵ Haryanto, *Elit, Massa dan Konflik*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial, UGM Yogyakarta, 1990, hlm. 6.

Kebiasaan melakukan pengelompokan sosial dalam masyarakat berdasarkan kategori tertentu memang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam konstruksi pikiran masyarakat. Dan sebenarnya dalam banyak hal elit merupakan borjuasi sehingga untuk mengatakan elite ekonomi maka sebutan yang paling cocok di negara perdagangan dan industri adalah borjuasi sebagai pemilik modal.²⁶

Untuk melihat kelompok elite dalam MD sangat tepat meminjam definisi elite yang ditulis oleh J.W. Schoorl:

“bahwa yang dimaksudkan dengan elite ialah posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi-posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas.”²⁷

Dalam konteks Muhammadiyah, definisi spesifik tentang elite lebih dekat dengan apa yang disebut sebagai “*A group or class of persons or a member of such a group or class, enjoying superior intellectual, social, or economic status. ‘In addition to notions of social equality there was much emphasis on the role of elites and of heroes within them’*” (Times Literary Supplement).²⁸ Karena, dalam MD, selain elite dalam puncak kepemimpinan di level pusat, secara kultural juga ada kekuatan kharisma yang melekat pada sosok tertentu baik di level nasional atau lokal, seperti elite dalam pimpinan universitas atau lembaga pendidikan sebagaimana yang disinggung Schoorl. Selain itu, mobilitas elite di MD sangat ditentukan oleh latar belakang dan capaian ketinggian pendidikan. Bisa dilihat berapa banyak profesor yang bisa menjadi ketua umum atau 13 ‘dewa’ MD.

F.2. Fragmentasi Elite

Mendefinisikan mengenai fragmentasi elit sebenarnya gampang-gampang sulit. Gampang dalam arti kata yang diadopsi dari istilah ilmu

²⁶ Pengertian elite juga dikemukakan Mills, yaitu mereka yang menduduki posisi atas dalam institusi ekonomi, militer dan politik, membentuk kurang lebih elite kekuasaan yang terintegrasi dan terpadu, yang keputusan-keputusan pentingnya menentukan struktur dasar dan arah masyarakat. Lebih lanjut, Mills mengungkapkan bahwa elite kekuasaan bukanlah suatu klik yang tertutup atau statis dengan seperangkat kebijaksanaan yang benar-benar terpadu.

²⁷ J.W. Schoorl. *Op. Cit.* lihat juga dalam Haryanto. *Ibid.* Hlm. 68.

²⁸ <http://www.answers.com/topic/elite>

alam, sulit karena dalam teori politik dan ilmu sosial tidak banyak dikenal istilah fragmentasi akan tetapi lebih populer dengan terminologi seperti faksionalisme, diferensiasi sosial, stratifikasi, pluralitas, dan sebagainya. Azra (2010) membantu memberikan gambaran bahwa fragmentasi politik atau elite kerap kali dekat dengan kontestasi dan konflik dalam negara seperti Indonesia beberapa tahun terakhir ini.²⁹ Untuk mendefinisikan istilah fragmentasi, penulis memilih untuk membatasi definisi tersebut dengan istilah lainnya, bahwa fragmentasi merupakan ketidaksatuan, keberagaman, dan perpecahan baik dalam wujud nyata (*manifest*) atau laten dalam alam pikiran, ideologi, dan afiliasi politik. Dalam Kamus Encarta, misalnya, fragmentasi dijelaskan sebagai *the loss of unity and cohesion and the breakup of something into isolated and often conflicting elements*.³⁰ Bisa diartikan sebagai kondisi yang tidak menyatu atau kehilangan koherensi satu dengan lainnya. Dalam Kamus Prinseton, kata fragmentasi diartikan sebagai *the disintegration of social norms governing behavior and thought and social relationships*. Sedangkan terfragmentasi (*fragmented*) berarti keadaan yang disebut: *having been divided; having the unity destroyed*.³¹ Untuk menunjukkan arti fragmentasi tersebut, media sering menggunakan struktur kalimat misalnya: fragmentasi partai politik, fragmentasi hukum, fragmentasi gerakan dan sebagainya untuk mengkontraskan dengan kata kesatuan, integrasi, homogenitas, keseragaman, dan keutuhan. Itulah pemahaman fragmentasi yang akan digunakan dalam konsep karya tulis ini.

Fragmentasi merupakan ekspresi dari faksionalisme meskipun hal ini merupakan istilah yang berbeda, sebab fragmentasi itu spontan dan temporer, sedangkan faksionalisme berlangsung lebih lama.³² Fragmentasi juga bisa jadi mengarah kepada faksionalisme yang berlaku juga dalam organisasi non-

²⁹ Azumardi Azra, Resonansi, Demokrasi Revisited, *Republika*, 9 Juni 2010.

³⁰ Microsoft® Encarta® Reference Library 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. All rights reserved.

³¹ www.wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn

³² Faksionalisme diartikan sebagai perjuangan golongan atau kelompok dalam memperebutkan kekuasaan sedangkan faksi adalah golongan atau kelompok orang, khususnya di partai politik yang sering berdebat untuk kepentingan mereka; juga disebut fraksi. Sumber: B.N. Marbun S.H, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.162)

politik sekalipun. Untuk memperjelas definisi tersebut perlu juga menengok konsep faksionalisme yang banyak digunakan dalam kajian politik kepartaian. Dalam MD fragmentasi itu terlihat dalam organisasi otonom, ideologi, sikap dan pemikiran politik, dan yang terakhir adalah polarisasi dan keberagaman (*fragmented*) dukungan terhadap kandidat presiden pada Pemilu 2009.

Secara etimologi, faksionalisme yang dipaparkan pada *Kamus Ensiklopedia Baru* oleh Weber memberikan dua arti untuk kata “faksi”³³: *pertama*, Suatu kelompok atau kombinasi yang bertindak bersama dan biasanya terhadap pihak yang lebih besar (seperti di dalam suatu negara, partai politik, atau gereja). Arti *kedua*, sebagai perselisihan dalam suatu kelompok (Latin *-factio* ‘tindakan membuat dari kata *Facere* ‘membuat, melakukan’)

Menurut Harold Lasswell, dalam buku berjudul *Ensiklopedia Ilmu Politik*, faksionalisme dari sudut pandang Ilmu Politik dijelaskan:

“Istilah faksi secara umum digunakan untuk menganggap unsur pokok kelompok suatu unit yang lebih besar yang bekerja untuk kemajuan personal-personal atau kebijakan-kebijakan khusus. Faksi ini muncul dalam usaha untuk kekuatan dan merepresentasikan satu pembagian tentang rincian aplikasi dan bukan tentang prinsip.”³⁴

Lasswell memaparkan bahwa faksi merupakan aksi dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk memajukan kebijakan dan personal dalam suatu unit lebih besar seperti dalam suatu negara atau kelompok kepentingan. Zariski mendefinisikan faksionalisme dalam internal partai politik sebagai berikut:

“Faksi itu sinonim dengan ‘kombinasi partai, kelompok, atau kelompok apapun yang mempunyai anggota-anggota yang memiliki rasa identitas umum dan tujuan umum diorganisir untuk bertindak secara kolektif sebagai satu blok yang berbeda dalam partai untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan”³⁵

³³ *Webster's New Encyclopedic Dictionary*. New Revised Edition, Cologne: Köhnenmann, 1996

³⁴ Dikutip dalam *Muller-Rommel Innerparteiliche Gruppierungen in der SDP*. Opladen Westdeutscher Verlag. 1982

³⁵ Zariski, Raphael: *Party Factions and Comparative Politics: Some Preliminary Observations*, dalam *Midwest Journal of Political Science*, 1960.

Dari mengambil definisi-definisi oleh Zariski, Beller, dan Belloni dapat disimpulkan bahwa faksi ada pada pengelompokan internal partai³⁶ yang dicirikan antara lain: *pertama*, ada untuk periode waktu tertentu, memiliki suatu minimum organisasi, memperlihatkan suatu kesadaran kelompok yang umum; *kedua*, secara aktif mencapai tujuan-tujuan politik, tujuan kebijakan, tujuan personal, atau tujuan khusus kelompok dalam suatu partai; dan terakhir adalah bisa dilihat sebagai suatu blok dalam partai.³⁷

Sebagaimana massa yang sangat beragam, elite meskipun sekelompok kecil juga tidak berarti satu suara atau satu kepentingan sehingga wajar kalau dalam elite juga terfragmentasi berdasarkan profesi, latar belakang, atau kepentingannya. Sebagaimana T.B. Bottomore (1966) mengutip dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh ilmuwan sebelumnya mengenai elite:

“...beberapa kelompok elite penting telah digolongkan dalam penelitian tentang industrialisasi baru-baru ini. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ada lima tipe ideal elite yang biasanya dan dengan berbagai cara mengambil kepemimpinan proses industrialisasi yaitu (1) elite dinasti; (2) elite kelas menengah; (3) intelektual revolusioner; (4) administrator kolonial; (5) pemimpin nasionalis.”³⁸

Di Indonesia masa lampau (yang sangat mungkin masih membekas hingga sekarang), misalnya, pernah dikaji oleh Abd. Kappi (1988) yang kemudian melakukan kategorisasi kelompok elite ke dalam beberapa macam antara lain; *pertama*, elite bangsawan. Istilah bangsawan menggambarkan sekelompok manusia yang memiliki posisi dan fungsi tertentu dalam masyarakat feodal di masa lalu. Status ini diperoleh secara turun-

³⁶ Dikutip dalam Patrick Kollner and Matthias Basedau, *Factionalism in Political Parties: an Analytical Framework for Comparative Studies*, German Overseas Institute (DUI), Hamburg, 2005.

³⁷ Ciri informal pengelompokan internal partai adalah sebagai suatu peraturan, tetapi tidak selalu suatu sifat faksi tersebut. Kelompok-kelompok yang disebutkan dalam partai seperti (asosiasi pemuda) bisa bertindak sebagai faksi jika kelompok itu memperlihatkan ciri-ciri yang disebutkan di atas (khususnya pencapaian tujuan-tujuan politik khusus).

³⁸ Bottomore, *op cit.*, hlm 119, yang ia kutip dari Clark Kerr, Jhon T. Dunlop, Frederick H. Harbison dan Charles A. Myers, *Industrialism and Industrial Man*, bab 3. ‘*The Industrializing Elites dan Their Strategies*’, hlm. 50.

temurun/keturunan bangsawan akan menyandang gelar bangsawan.³⁹ Gelar yang diperoleh demikian disebut *ascribed status* atau status natural (alamiah).⁴⁰ Posisi bangsawan dalam sejarahnya juga sangat erat dengan posisi sebagai priyayi dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan.⁴¹ *Kedua*, kelompok elite agama, yaitu sekelompok orang yang karena peranannya dalam bidang agama dan kemasyarakatan mendapatkan posisi yang tinggi dalam masyarakat. Misalnya, di Aceh ulama menduduki strata sosial yang atas. *Ketiga*, elite birokrasi yang karena jabatannya dalam pekerjaan yang berkaitan dengan birokrasi kekuasaan.⁴² Mereka melakukan pekerjaan administrasi pemerintahan atau tugas yang berkaitan dengan itu yang sifatnya sangat hierarkis dan rumit.⁴³

Perspektif lain mengatakan bahwa dalam melihat elite setidak-tidaknya ada dua perspektif penting yang akan digunakan; *pertama* dari perspektif pluralis dan *kedua* dari perspektif Marxian.⁴⁴ Kaum pluralis, baik yang diklasifikasikan sebagai pluralis klasik seperti Laswell, Truman dan Dahl, maupun neo-pluralis seperti C.Wright, Mills dan G. William Domhoff menganggap bahwa di setiap masyarakat keputusan-keputusan penting dilakukan oleh kelompok kecil, yang disebut kaum elite. Elite dalam identifikasi Laswell adalah mereka yang memiliki dan mendapatkan lebih dari apa yang dimiliki dan didapatkan oleh orang lain. Kelompok yang memiliki dan mendapatkan lebih ini, dalam pandangan Pareto, ada yang memegang kekuasaan (*governing elite*) dan ada yang berdiri tegak di luar kekuasaan (*non-governing elite*).

³⁹ Abd. Kappi dalam M. Masyhur Amin, dkk, *Kelompok Elite dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita dan YIIS, 1988, hlm. 70-71

⁴⁰ Mayor Polak, *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*, Jakarta: Balai Buku Ikhtiar, 1971, hlm. 156.

⁴¹ Priayi diartikan sebagai orang penting, orang berpangkat, dan bukan orang kebanyakan. Mengenai literatur ini dapat dibaca dalam buku *Priayi Abangan*, karya Sapardi Joko Damono, hlm. 302

⁴² *Op cit.*, M. Masyhur Amin, hlm. 70

⁴³ Hal sesuai dengan karakteristik birokrasi yang dikemukakan oleh Weber yaitu hierarkis, impersonal, dan tidak ada mekanisme *voice and exit*.

⁴⁴ Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004, hlm.14

Dalam pandangan kaum Pluralis, elite merupakan kelompok kepentingan kelas sosial ekonomi (borjuasi). Elite menjadi kelompok kepentingan yang bersatu atas dasar kesamaan kultural dan tidak ada hubungannya dengan perjuangan kelas. Kekuasaan yang dihasilkan oleh elite sebagai akibat dari tawar menawar antar kelompok kepentingan yang lain seperti organisasi pengusaha, pedagang, kelompok etnis, partai, ormas dan sebagainya. Sementara kubu Marxian menolak kalau elite hanya dilihat dari pembagian kelompok kepentingan karena pengelompokan dalam masyarakat tidak bisa dipisahkan dari hubungan produksi. Dalam masyarakat senantiasa terdiri dari dan berhadapan antara pemilik atau penguasa produksi dan yang tidak mempunyai alat produksi. Dalam pandangan Marxian, perjuangan kelas akan dimenangkan oleh kaum proletar kelas yang tidak menguasai alat produksi, setelah mengalahkan kelas borjuasi, sebagai pemodal atau yang menguasai produksi.

Elite terpolarisasi ke dalam beberapa wajah seperti elite intelektual, elite ekonomi (borjuis), elite agama, elite birokrasi, elite militer, dan sebagainya. Elite juga mengalami perubahan bentuk dan karakter dalam masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari golongan tersebut. Eksistensi demokrasi membuat kompetisi antarpolar elite itu bisa terjadi dan bisa melibatkan rakyat kebanyakan. Dengan atau tanpa demokrasi, kaum elite-lah yang tetap menentukan. Itu kira-kira pandangan teori elite yang digagas oleh Pareto, Mosca, Michel atau Mill. Intinya, elite yang minoritas jumlahnya, menentukan mayoritas keputusan.

Elite selalu merupakan kelompok yang terbatas secara kuantitatif dan sangat menonjol dalam peran di level atas. Elite dalam konteks penelitian ini adalah elite agama, intelektual, atau kepengurusan di level pusat yang tergabung dalam organisasi MD. Di dalam organisasi MD kepemimpinan dipegang oleh 13 orang dengan *background* yang tidak monolitik atau seragam.

Hal ini ternyata menyumbangkan definisi dan pemahaman tersendiri mengenai apa itu fragmentasi elite? Setidaknya sebagai definisi awal fragmentasi elite bisa dikatakan sebagai sekumpulan elite yang mempunyai persepsi, paradigma, dan pemikiran yang berbeda, termasuk pilihan afiliasi

dalam politik praktis/politik kepartaian. Hal ini juga yang berkontribusi atas pembagian kelompok dalam dua katup yaitu sekelompok santri (Islam) ada dalam jalur politik formal (Islam Politik) atau jalur kultural (Islam Kultural).⁴⁵

Di Indonesia masa lampau, pernah dikaji oleh Abd. Kappi (1988) yang kemudian melakukan kategorisasi kelompok elite ke dalam beberapa macam antara lain; *pertama*, elite bangsawan. Istilah bangsawan menggambarkan sekelompok manusia yang memiliki posisi dan fungsi tertentu dalam masyarakat feodal di masa lalu. Status ini diperoleh secara turun-temurun/keturunan bangsawan akan menyandang gelar bangsawan.⁴⁶ Gelar yang diperoleh demikian disebut *ascribed status* atau status natural (alamiah).⁴⁷ Posisi bangsawan dalam sejarahnya juga sangat erat dengan posisi sebagai priyayi dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan.⁴⁸ *Kedua*, kelompok elite agama, yaitu sekelompok orang yang karena peranannya dalam bidang agama dan kemasyarakatan mendapatkan posisi yang tinggi dalam masyarakat. Misalnya, di Aceh ulama menduduki strata sosial yang atas. *Ketiga*, elite birokrasi yang karena jabatannya dalam pekerjaan yang berkaitan dengan birokrasi kekuasaan.⁴⁹ Mereka melakukan pekerjaan administrasi pemerintahan atau tugas yang berkaitan dengan itu yang sifatnya sangat hierarkis dan rumit.⁵⁰

⁴⁵ Ada dua model Islam atau politik santri yaitu pertama, Islam Kultural yaitu kelompok Muslim yang mempromosikan Islam dengan cara mempengaruhi keadaan negara dengan nilai umum Islam (substansi). Sedangkan kelompok kedua disebut Islam Politik yang mengacu pada Muslim yang mempromosikan Islam di level negara dengan pendekatan formalisasi agama melalui jalur resmi hukum. Islam, menurut mereka, harus dipertimbangkan sebagai satu-satunya sumber perundang-undangan.

⁴⁶ Abd. Kappi dalam M. Masyhur Amin, dkk, *Kelompok Elite dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita dan YIIS, 1988, hlm. 70-71.

⁴⁷ Mayor Polak, *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*, Jakarta: Balai Buku Ikhtiar, 1971, hlm. 156.

⁴⁸ Priayi diartikan sebagai orang penting, orang berpangkat, dan bukan orang kebanyakan. Mengenai literatur ini dapat dibaca dalam buku *Priayi Abangan*, karya Sapardi Joko Damono, hlm. 302

⁴⁹ *Op cit.*, M. Masyhur Amin, hlm. 70

⁵⁰ Hal sesuai dengan karakteristik birokrasi yang dikemukakan oleh Weber yaitu hierarkis, impersonal, dan tidak ada mekanisme *voice and exit*.

Untuk *survive* banyak cara yang dilakukan oleh elit merespon situasi yang berkembang dalam konteks penelitian ini yaitu bagaimana elit merespon liberalisasi dalam politik dan ekonomi serta budaya yang seringkali mengancam eksistensi elit sekaligus memberi peluang untuk bertahan dan mengembangkan pengaruhnya. Pengaruh adalah sangat penting untuk strategi *survive* para elit sehingga untuk mempertahankan pengaruh bisa diarah dari berbagai ragam metode baik secara kultural maupun struktural. Dalam era liberalisasi politik, orang dengan mudah akan meraih pengaruh dan kehilangan pengaruh. Kontestasi yang bebas mensyaratkan banyak tindakan yang seringkali disebut makar, keluar dari peraturan organisasi, atau melanggar khittah.

F.3. Politik Santri

Sebagaimana model kategorisasi Geertz yang membagi masyarakat menjadi tiga kelompok besar yaitu priyayi, santri, dan abangan. Para sarjana, peneliti dan ilmuwan sering menuliskan bahwa kubu Santri di Indonesia yang paling kuat adalah dari kalangan NU yang tradisional dan MD yang modern. Meski ini problematik dan *debatable* dalam pendahuluan ini sangat dibatasi untuk berpanjang lebar mendiskusikannya.⁵¹ Mulkhan (2003) membagi kelompok santri menjadi dua yaitu Islam politik dan Islam etik,⁵² hal serupa pernah dilakukan oleh Nakamura (1983).

Pengalaman panjang partai Islam dalam perjalanan politik di republik ini kiranya penting untuk dijadikan bahan renungan dalam melihat MD. Abdul Munir Mulkhan, mantan anggota PP Muhammadiyah memberikan catatan bahwa hanya Masyumi yang pernah berjaya dalam pemilu pertama 1955 di mana MD sebagai anggota istimewa. Namun, prestasi ini baru terjadi sekali di tengah pemilih yang mayoritas muslim tapi minoritas santri.⁵³

⁵¹ Geertz, Santri Priyayi Abangan,

⁵² Abdul Munir Mulkhan, *Moral Politik Santri, Agama dan Pembelaan Kaum Tertindas*, (Jakarta: Erlangga, 2003) hlm.137

⁵³ Abdul Munir Mulkhan, makalah, *Muhammadiyah Rindu Kuasa?*, dalam seminar Muhammadiyah dan Peran Politik Kebangsaan, 22 April 2009, di Yogyakarta.

MD dan NU sering dikategorikan sebagai dua kelompok santri yang berbeda haluan dalam memandang modernitas. Kuntowijoyo pernah mengaktegorikan MD sebagai ‘muslim tanpa masjid’ yang berisi kelompok intelektual. Sementara Munir Mulkan membagi MD dalam laporan risetnya menjadi tiga kategori: Islam-Iklas, Muhammadiyah-NU (Munu), Muhammadiyah-Nasionalis atau disebut juga Muhammadiyah Markhenis. Sebetulnya pembelahan jauh lebih kompleks sekarang adalah konfigurasi berdasar ideologis, politik, sosiaologis. Ada istilah Muhammadiyah konservatif, puritan, fundamentalis, Salafi, Muhammadiyah progresif, ada Muhammadiyah liberal, ada pula Muhammadiyah ideologis, Muhammadiyah politisi, ada Muhammadiyah borjuis, ada Muhammadiyah proletar, dan sebagainya. (dibahas dalam bab berikutnya).

MD sering ‘diklaim’ sebagai gerakan sosial Islam yang memiliki *concern* terhadap kaum tertindas atau *mustadh’afin* dan memiliki prestasi gemilang dalam poses transformasi kultural umat, dalam konteks Indonesia mungkin organisasi MD-lah yang patut disebut.

Sejak awal didirikan oleh Kyai Ahmad Dahlan, organisasi Islam terbesar ini telah menegaskan dirinya sebagai gerakan sosial Islam liberatif yang lebih berwatak puritan. Meskipun dalam perspektif teori gerakan masih ada perdebatan, apakah organisasi ini lebih disebut sebagai gerakan Islam atau gerakan sosial-Islam.⁵⁴ Agama dalam pemahaman keagamaan organisasi ini dikonstruksi sebagai rasionalisasi hidup sehingga keimanan dan keshalehan yang diamalkan tidak hanya bersifat vertikal atau transenden semata akan tetapi juga bersifat horisontal. Dalam artian, visi keagamaan yang dibangun oleh gerakan ini memiliki kepedulian terhadap pergulatan kehidupan kemanusiaan. Inilah mungkin yang megidentikan surat *al-maun* adalah “ayatnya” MD. Begitu juga surat Ali-Imran ayat 104 identik ayatnya MD.

Sebagai organisasi Islam terbesar, MD memiliki tanggung jawab moral untuk mengarahkan masa depan negeri ini. Apalagi tema dalam tanwir adalah membangun visi dan karakter bangsa. Sebuah momentum yang cukup tepat bagi Muhammadiyah untuk berkontribusi dalam menuntun

⁵⁴ Moeslim Abdurrahman: 2003

jalannya demokrasi di negeri ini. Selain itu, kader-kader MD sudah tersebar di berbagai sektor pemerintahan sehingga kualitas dan kapabilitas mereka perlu dikembangkan ke jenjang yang lebih luas lagi. Kader MD juga kader bangsa, sehingga bukan menjadi sesuatu yang mengherankan jika ada kader MD yang ‘menghibahkan’ dirinya untuk berkontestasi politik di tingkat nasional.

Terkait hubungan MD dan politik, dalam salah satu keputusan Mukhtar pada tahun 1990 disebutkan bahwa dalam bidang politik, MD berusaha sesuai dengan khittahnya, yaitu: dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya, MD harus dapat membuktikan secara operasional dan secara kongkrit riil, bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, material dan spiritual yang diridhai Allah SWT. Dalam melaksanakan usaha itu, MD tetap berpegang teguh pada kepribadiannya.

Usaha MD dalam bidang politik tersebut merupakan bagian dari gerakannya dalam masyarakat, dan dilaksanakan berdasar landasan dan peraturan yang berlaku dalam MD. Dalam hubungan ini Mukhtar MD ke-38 telah menegaskan bahwa:⁵⁵

1. MD adalah Gerakan Dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari sesuatu partai politik atau organisasi apapun.
2. Setiap anggota MD, sesuai dengan hak asasinya, dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain, sepanjang tidak menyimpang dari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam hal ini penulis terinspirasi untuk mengutip agak panjang bagaimana pandangan Amien Rais mengenai kiprah MD, sebagaimana kutipan berikut:

⁵⁵ Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya

“Menurut teori al-Qur’an, orang mukmin seyogyanya menjadi pemimpin, bukan hanya menjadi *pak turut*. Menjadi imam *lil mu’miniin* dan imam *lin-naas* (al-Furqon: 74 dan al-Baqarah: 124). Qur’an juga menyuruh kita untuk membangun kekuatan multidimensional untuk memenangkan perjuangan *fi sabilillah* (al-Anfal:60). Cara mencapai tujuan perjuangan, yakni membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, tentu dengan kerja keras dan kerja total atau *jihad* (antara lain: al-Hujurat 15; al-Maidah 54; al-Maidah 35; at-Taubah 24 dan puluhan ayat lainnya).

Tidak bisa tidak, kelompok yang dapat membangun peradaban utama masa depan adalah mereka yang memegang kunci-kunci pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kekuatan ekonomi, perdagangan-perbankan, politik, penegakan hukum, media-massa dan memiliki kekuatan intelektual yang unggul. Dan jangan pernah dilupakan pentingnya perjuangan politik, karena pemegang kekuasaan politikal yang mengatur distribusi kekuatan nasional yang pada gilirannya sangat strategis untuk membangun peradaban baru.

Sayang sekali setelah seratus tahun, Muhammadiyah belum ikut memegang kunci-kunci pengembangan kehidupan nasional, kecuali hanya sesekali kader Muhammadiyah menjadi menteri kabinet, atau memegang pos-pos penting lainnya. Demikian juga situasi yang dihadapi oleh Umat Islam Indonesia pada umumnya, tidak berbeda jauh dengan Muhammadiyah.”

Dan, satu lagi pernyataan yang sangat keras dilontarkan oleh Amien Rais menyikapi serentetan kegagalan MD mengusung dirinya dan Partai Amanat Nasional menjadi partai papan atas adalah:

“Mungkin, karena agak sulit, perjuangan untuk ikut memegang kunci-kunci atau pos-pos strategis itu, lantas muncul semboyan bahwa dakwah kultural akan bisa menutup kelemahan-kelemahan selama ini. Saya kadang khawatir, jangan-jangan gagasan dakwah kultural sedikit banyak merupakan gagasan pelarian.”⁵⁶

Terkait politik santri ala Muhammadiyah banyak ragam penjelasan yang dapat dikaji mulai peran dalam Masyumi, Parmusi, pendirian PAN, pencalonan Amien Rais sebagai presiden sampai pendirian PMB dan pertemuan dua pasang capres di kantor PP Muhammadiyah. Salah satu bentuk manufer elite

⁵⁶ Amien Rais, makalah dengan judul “*Umat Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Pembangunan Peradaban Utama di Indonesia*”. Disampaikan pada Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah 1430 H di UMY.

adalah bagaimana Dien Syamsuddin menggalang dukungan melalui PMB dan safari politik ke wilayah-wilayah dan pendekatan kepada partai besar.

G. Definisi Konseptual

G.1. Teori Elite

Elite selalu merupakan kelompok yang terbatas secara kuantitatif dan sangat menonjol dalam peran di level atas suatu komunitas atau masyarakat. Sedangkan elite survival adalah bagaimana strategi politik, sosial, budaya dan ekonomi agar sekumpulan atau individu elite bisa bertahan atau bertransformasi menghadapi situasi baru terutama menyangkut persoalan ekonomi politik.

G.2. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar makruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.⁵⁷ Pemahaman lain seperti yang dituliskan oleh Purwo Santoso, bahwa MD secara politik didefinisikan sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengandung elemen organisatoris, kekuatan politik, dan kapasitasnya memobilisasi massa yang dimilikinya.⁵⁸

G.3. Elite Muhammadiyah

Merupakan sekumpulan orang atau individu yang sedang atau pernah menjabat/berada di pucuk atas pimpinan organisasi baik di level pusat atau wilayah/daerah. Namun, dalam konteks karya ini dibatasi pada elite di level pusat yang mempunyai reputasi, pengaruh, dan berperan dalam pembuatan kebijakan organisasi yang berpengaruh pada pilihan-pilihan politik anggota.

G.4. Fragmentasi Elite

Fragmentasi elite diartikan sebagai keragaman, ketidaksatuan, atau perpecahan dalam persepsi, paradigma, dan pemikiran dan pilihan afiliasi dalam

⁵⁷ Bahasa Arab, artinya mencegah kejahatan dan mengajak kebaikan yang dilandasi semangat al-Qur-an surat Ali Imran ayat 104, (baca AD/ART Muhammadiyah)

⁵⁸ Purwo Santoso, *makalah*, disampaikan dalam Baitul Arqom MPKSDI tanggal 27-29 Juli 2001, Peran Muhammadiyah di Era Otonomi Daerah, hlm. 2.

politik praktis/politik kepartaian yang berbeda (heterogenitas).

G.5. Politik Santri

Merupakan politik yang diorganisir oleh sekelompok santri (Islam) baik melalui jalur politik (Islam politik) atau jalur kultural (Islam kultural).⁵⁹ Islam kultural juga disebut Islam etis.

G.6. Politik Praktis

Dalam khittahnya, MD mengatakan tidak berpolitik praktis. Karena itulah definisi di sini menjadi bermakna bahwa politik praktis yang dimaksud adalah bahwa MD tidak mempunyai partai politik dan tidak ada hubungan organisatoris dengan partai politik mana pun (menjaga jarak yang sama dengan partai politik). Tidak 'berpolitik praktis' atau tidak 'berafiliasi politik' dalam MD bukan berarti tidak mau tahu atau bungkam, buta dengan persoalan politik.

G.7. Pemilu (Pemilihan Umum)

Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945; adapun pelaksanaan pemilu diselenggarakan dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan berdasarkan atas asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.⁶⁰ Pemilu yang dijadikan *setting* adalah pemilu 2009 yang mencakup pemilu legislatif (5 April 2009) dan presiden-wakil presiden (8 Juli 2009).

H. Definisi Operasional

Fragmentasi Elit

Adapun indikator dari fragmentasi elite antara lain:

1. Adanya kekuasaan atas wacana yang berada tidak dikuasi oleh

⁵⁹ Ada dua model Islam atau politik santri yaitu *pertama*, Islam kultural yaitu kelompok muslim yang mempromosikan agama Islam dengan cara mempengaruhi keadaan negara dengan nilai Islam (substansi). Sedangkan kelompok *kedua*, yaitu Islam politik yang mengacu pada muslim yang mempromosikan Islam dalam level negara secara formalisasi agama. Islam, menurut mereka, harus dipertimbangkan sebagai satu-satunya sumber undang-undang.

⁶⁰ Pemilu di Indonesia terbagi menjadi setidaknya dua bagian yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden serta pemilukada (pemilihan umum kepada daerah).

- kelompok individu/orang/elite.
2. Adanya upaya saling berebut pengaruh publik/jamaah atas isu tertentu dengan berbagai cara untuk mensosialisasikan.
 3. Ada elite yang *fragmented* dan diikuti oleh jamaah (pendukung) yang terfragmentasi juga baik yang fanatik atau yang bukan.
 4. Adanya sikap saling 'menghargai' meski ada perbedaan yang bersifat prinsipil dalam kelompok.
 5. Adanya respon massa terhadap perpecahan di tubuh elite baik respon positif maupun yang negatif.
 6. Adanya ketidakpastian sikap massa yang diakibatkan kurang lengkapnya informasi yang diperoleh.
 7. Adanya politisasi organisasi untuk melegitimasi tindakan kelompok tertentu dalam menghadapi kontestasi dalam pemilu.
 8. Adanya respon organisasi sebagai institusi untuk setidaknya meminimalisir dampak fragmentasi politik sebagai pembelajaran terhadap anggota dan simpatisan atau dalam rangkaih membatasi ruang gerak politik pengurusnya

I. Metode Penelitian

I.1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-diskriptif, yang dilatarbelakangi pemikiran rasional dan obyektif. Tujuan penelitian dengan metode kualitatif lebih menitikberatkan untuk memahami dan menjelaskan situasi tertentu, bukan hanya mencari sebab akibat terhadap fenomena yang diteliti. Penafsiran atas realitas dan wacana dapat dilakukan dengan menggunakan analisis kritis. Penelitian kualitatif sendiri dipergunakan karena lebih menekankan kualitas analisa dan bukan data yang bersifat statistik.⁶¹

⁶¹ Bambang Puwoko, Materi Kuliah, 1997. Sedangkan menurut Nawawi, penelitian diskriptif diartikan sebagai prosedur atau cara memecahkan masalah masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta. Hal senada juga dijelaskan oleh Surakhmad, bahwa tipikal penelitian diskriptif selalu memusatkan pada masalah aktual dan dimulai dengan pengumpulan data kemudian dianalisis. Hadari Nawawi dan Matini Hadri, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992, hal. 7.

Ciri lain penelitian deskriptif adalah penelitian dilakukan dengan mengakumulasi data dasar yang diperoleh melalui sumber-sumber, baik dari lapangan maupun kepustakaan. Kemudian data tersebut digunakan peneliti untuk mencoba menggambarkan fenomena-fenomena yang ada sekaligus menerangkan hubungan-hubungan yang terbentuk antar fenomena tersebut. Selain itu, biasanya penelitian ini untuk menguji hipotesis apabila digunakan hipotesis.

Ada beberapa model penelitian deskriptif, namun penulis menggunakan model *case study* (studi kasus). Menurut Yin (dikutip Susilo, 1998:1), *case study* memiliki tiga ciri yaitu: (1) *Investigate a contemporary phenomenon within its real life context; when*. (2) *The boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and in which* (3) *multiple sources of evidence are used*.⁶²

I.2. Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.⁶³ Selain itu, data yang diperoleh juga terbagi ke dalam jenis data primer dan data skunder.⁶⁴

⁶² Beberapa alasan memilih studi kasus sebagai metode dalam penelitian ini antara lain; *pertama*, sepengetahuan penulis, di Indonesia belum banyak penelitian mengenai komunikasi dalam tubuh Ormas untuk pemenangan kandidat presiden dalam pemilu. *Kedua*, penulis ingin memperoleh pemahaman masalah secara lebih mendalam, sehingga mampu membedakan mana opini yang spekulatif dan mana yang mempunyai basis argumen mengenai *elite survival* dalam politik Muhammadiyah pada Pemilu 2009.

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (edisi revisi), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 157.

⁶⁴ Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya berupa benda, dokumen sejarah, situs, manusia. Termasuk dalam sumber data primer ini adalah kesaksian orang atau sekelompok orang berupa pernyataan baik lisan dan tertulis. Data sekunder didapat dari pengamatan dan pencatatan informasi, berita, dan keterangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data sekunder berasal dari data historis yang faktual berupa laporan media massa, dokumen-dokumen dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial/keagamaan serta referensi pustaka lain yang dapat digunakan untuk memahami, membandingkan serta mempertajam analisis.

I.3. Teknik Pengumpulan Data

Karena obyek penelitian ini merupakan satu peristiwa yang sudah terjadi maka data dikumpulkan dan disistimatisasikan dengan beberapa teknik pengumpulan data yang paling memungkinkan untuk dijadikan dasar-dasar argumentasi sebagai berikut:

a. Teknik Kajian Pustaka

Teknik kajian pustaka (*library research*) ini dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan tema kajian yang hendak diteliti, baik berupa buku klasik, opini media, atau dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh organisasi sebagai bahan untuk klarifikasi atau penguat argumen analisis. Hal ini ditujukan untuk memperkaya bahan kajian sehingga akan menunjang proses analisa data dan kajian teoritis secara lebih mendalam dan komprehensif. Selain hal tersebut untuk menyisir data juga akan disarikan dari isu dan materi liputan berita dan opini dalam media massa baik cetak maupun media *online* (muhammadiyah.or.id).

Karena studi ini dilakukan terhadap organisasi modern yang mempunyai saluran komunikasi yang berkala seperti majalah Suara Muhammadiyah dan ortom-ortomnya,⁶⁵ berita resmi organisasi sebagai keputusan permusyawaratan yang disepakati secara struktural-organisatoris untuk dijadikan rujukan berbagai tindakan politik di berbagai level misalnya dalam konteks pilkada atau pilgub.

b. Teknik Wawancara Mendalam (*Deep Interview*)

Wawancara perlu dilakukan meski penelitian ini lebih dominan oleh kegiatan telaah kepustakaan. Hal ini dimaksudkan untuk verifikasi data yang tercantum baik dalam publikasi media cetak atau antar narasumber yang berbeda perspektif. Adapun teknik wawancara adalah *semi-struktur interview*. Yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan⁶⁶ kepada responden dan dilakukan secara

⁶⁵ Suara Muhammadiyah atau SM merupakan satu-satunya majalah resmi Muhammadiyah yang beredar secara nasional, oplah lebih dari 20 ribu eks, dan menjadi saluran komunikasi organisasi yang paling tua, sebab terbit sejak tahun 1915.

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (cet. Ke-10). (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 229.

informal (*opened interview*).⁶⁷

Melihat unit penelitian ini organisasi, dengan fokus pada kajian pustaka (*library research*), maka wawancara dilakukan untuk keperluan *cross check* dan informasi terhadap data-data pustaka dan hasil pengamatan peneliti. Individu yang menjadi sasaran wawancara disebut informan. Wawancara ini dilakukan terhadap elite pimpinan Muhammadiyah pusat. Penentuan ini didasarkan bahwa mereka adalah penentu kebijakan dalam pergerakan MD yang dianggap dapat memberikan keterangan tentang hal yang diwawancarakan.

Proses wawancara dilakukan dengan wawancara tak berstruktur (*un-structured interview*), yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan⁶⁸ atau dilakukan secara informal (*opened interview*).⁶⁹ Isi wawancara akan berusaha mengungkap pendapat dan pengetahuan informan dan memperoleh klarifikasi dari beberapa kesimpulan awal. Selain itu wawancara ini juga diharapkan menjadi proses diskusi antara peneliti dan informan.

I.4. Teknik Analisis Data

Untuk menyusun kronologis dari peristiwa politik yang nyata dan juga digunakan untuk menginterpretasikan data yang dilacak dari relasi antara elite dan massa organisasi diperlukan data yang beragam dan analisis yang tepat sehingga mungkin sering harus melakukan *crosscheck* antara data satu dengan lainnya.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.⁷⁰ Analisis merupakan proses mengorganisasikannya data ke dalam bentuk, kategori, dan satuan-satuan uraian dasar. Kemudian

⁶⁷ *Op. cit.*, Lexy J. Moleong, hlm.13.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (cet. Ke-10). Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 229.

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.13.

⁷⁰ Lexy J. Moleong, hlm. 247

data tersebut dikategorikan, selanjutnya dilakukan *cross check* untuk melihat validitas data. Data yang diperoleh dari lapangan dan dari kajian pustaka akan dianalisa dengan menggunakan analisa deskripsi interpretatif yang disajikan dalam bentuk narasi.

Adapun rincian prosedur dalam penelitian kualitatif ini sebagai berikut: *pertama*, peneliti mengumpulkan data-data yang diperoleh dari *library research* dan dari observasi di lapangan. *Kedua*, penilaian data berpegang ada prinsip validitas, reliabilitas, dan otentisitas sehingga data yang relevan saja yang digunakan. *Ketiga*, menafsirkan dan menginterpretasikan data. Peneliti berusaha menafsirkan dan menginterpretasikan data seobyektif mungkin dengan analisis multi perspektif dengan teoritisasi yang dipakai dalam penelitian ini. *Keempat*, penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul, dinilai, dokumen (SK, Berita Resmi Muhammadiyah, Keputusan Permusyawaratan). Selain itu data untuk memperkuat literatur juga dapat digali dari pemikiran elite MD baik yang ada di media atau hasil wawancara.

Unit penelitian ini adalah kelompok, yakni organisasi MD. Dalam hal ini dokumen resmi persyarikatan MD yang ada di Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang ditelaah terhadap pola-pola komunikasi politik yang dilakukan elit dan MD hubungannya dengan proses politik sebelum dan sesudah Pemilu Presiden 2009.

I.6. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel ditentukan untuk mempermudah melakukan wawancara terkait dengan data yang dibutuhkan. Dalam penentuan sampel perlu diperhatikan bahwa sampel harus mewakili kelompok-kelompok yang diperlukan misalnya kelompok MD yang politisi, akademisi, budayawan, atau yang kelompok ideologis yang puritan atau menjauhi politik praktis (apolitis, apatis). Karena teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* maka diharapkan orang yang terpilih selain karena ketokohan, kepakaran juga mempunyai informasi yang kaya mengenai tema kajian yang diteliti sehingga terkumpul beragam perspektif sehingga memenuhi syarat untuk penelitian deskriptif.

I.7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Yogyakarta dan Jakarta sebagai lokasi kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sebagai “pusat pemerintahan”, manajemen, koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi organisasi secara *struktural*, dengan asumsi bahwa mesin organisasi berjalan dengan baik dan segala hal terkait politik selalu dikoordinasi secara struktural dari pusat hingga ke ranting.⁷¹ Selain itu, di level pusat ini dianggap elite yang mempunyai pengaruh dalam Pemilu 2009 yang memang mengalami dinamika baik secara individual atau organisasi/kelompok elite tertentu.[]

⁷¹ Dalam struktur organisasi Muhammadiyah terdiri dari lima level yaitu pusat (berkantor di ibu kota Jakarta dan Yogyakarta), wilayah (setingkat propinsi), daerah (kabupaten), cabang (kecamatan), dan ranting (kelurahan/desa) serta cabang istimewa (PCIM) yang berada di luar negeri.

BAB II

MODALITAS ELITE

MUHAMMADIYAH

“(Habitus \times Modal)+Ranah=Praktik”
(Pierre-Felix Bourdieu, 1930-2002)¹

*“Jika Bangsa ini tersungkur,
Muhammadiyah akan turut tersungkur”*
(Ahmad Syafii Maarif)²

“Muhammadiyah berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan da'wah amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia...”

(Khittah Denpasar 2002)³

Bourdieu (1986) dan Putnam (1976) akan membantu menjelaskan mengenai teoritisasi modal yang sangat penting dalam kajian ekonomi-politik atau antropologi-sosial-politik dewasa ini sebagaimana banyak dikutip para ilmuwan dan peneliti. Jika Bourdieu banyak menitik beratkan

¹ Richard Harker, dkk (ed), dalam judul buku pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu, *(Habitus \times Modal)+Ranah=Praktik*, terj. (Yogyakarta: Jalasutra, 1990).

² Ahmad Syafii Maarif, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, dalam tulisan, *Potret Politik Muhammadiyah*, 2010.

³ Keputusan Tanwir Muhammadiyah di Denpasar tahun 2002.

pada bahasa dan kuasa simbolik Putnam akan banyak memberikan teori mengenai social capital atau yang dikenal dengan modal sosial. Modalitas ini yang akan digunakan para elite sebagai basis legitimasi tindakan untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Menurut Bordin, “Pada tingkatan individu, habitus juga berarti sistem perilaku dan disposisi yang relatif permanen dan berpindah dari satu objek ke objek lainnya, yang secara simultan mengintegrasikan antara seluruh pengalaman sebelumnya dari cara-cara individu melihat dan menilai benda dengan tindakan.”⁴

Sementara konsep kekuasaan dalam pandangan Putnam masih kontroversial⁵ yang harus dipahami dalam batasan dua pengertian yang dipahami kalangan awam dan ilmuwan sosial yaitu: Pertama, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain, dan kedua, kekuasaan sebagai kemampuan mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif.⁶ Sementara secara umum di negara berkembang basis legitimasi kekuasaan dapat diperoleh dari faktor turunan (*ascribed status*), atau pencapaian-pencapaian (*achieved status*) dalam bidang pendidikan sebagaimana yang nampak di dalam kelompok elite Muhammadiyah.⁷ Sebagaimana yang disinggung Neil (1960,1964) bahwa dari perluasan dan perkembangan pendidikan inilah ditemukan selain akar perubahan sosial juga menentukan beragamnya formasi elite di Indonesia.⁸ Elite intelektual ini berbeda dengan elit lama: elite keturunan bangsawan dan

⁴ Richard Harker, dkk. (ed), dalam judul buku pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierre Bourdieu, (*Habitus x Modal*)+*Ranah=Praktik*, terj. (Yogyakarta: Jalasutra, 1990), hlm. x.

⁵ Tentang literatur konsep kekuasaan, pengaruh dan sebagainya, lihat Robert Dahl, “Power” dalam *International Encyclopedia of Social Science*.

⁶ Mohtar Mas’oed, Colling McAndrews, dalam *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 80.

⁷ Lebih jelas untuk melihat asal-usul atau sumber kekuasaan baca Benedict Anderson, *Imagined community*, juga buku AAGN Ari Dwipayana, *Bangsawan dan Kuasa, kembalinya Para Ningrat di Dua Kota*, (Yogyakarta: Ire Press, 2004). Baca juga buku dalam *Pluralisme Borjuis, Kritik atas Nalar Pluralisme Cak Nur*, karya Nur Khalik Ridhwan.

⁸ Robert van Neil, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm.75, 88-89.

administratur.⁹ Lebih detail Neil menjelaskan:

“Bila di tahun 1990 kelompok priyayilah yang menjadi kaum bangsawan dan administratur, menjelang tahun 1914 kelompok ini bertambah dengan pagawai pemerintah, teknisi, dan cendekiawan yang kemudian terjadi kompetisi antara elite tersebut yaitu priyayi lama dan priyayi baru dengan kekuatan jarak sosial (elite-massa) itu mereka jadikan senjata.”¹⁰

Diakui atau tidak, MD awalnya dihuni oleh golongan priyayi kemudian lambat laun bergeser pada kelompok cendekiawan, birokrat, dan sebut saja PNS. Sebagaimana yang tergambar dalam Profil Muhammadiyah yang merupakan kumpulan kelas menengah pribumi.¹¹

Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa studi fragmentasi elite dalam hal ini dibatasi oleh sekelompok elite yang paling mewarnai opini publik dan wacana yang berkembang dalam pentas Pemilu 2009, yang dalam hal ini diwakili oleh sekumpulan elit yang terrepresentasi dari kelompok elite lama yang menjabat sebagai Dewan Penasehat PP Muhammadiyah, yaitu Amien Rais dan Syafii Maarif yang memang dua-duanya pernah menjadi ketua umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin yang menjabat sebagai ketua umum yang terpilih dalam Mukthamar tahun 2005 di Malang, serta kubu yang diwakili oleh Haedar Nashir yang menginginkan MD menjadi gerakan pembaharuan dan bukan bergerak dalam politik praktis, sebagaimana yang dilakukan oleh Amien Rais atau Din Syamsuddin yang sama-sama dianggap mengingkari apa itu *high politic* dan apa itu yang disebut *alocative politic* yang mereka usung sendiri.

Mendiskusikan mengenai modalitas merupakan sebuah upaya untuk memetakan secara komprehensif mengenai apa yang dimiliki oleh elit-elit di level pusat Muhammadiyah tersebut yang menjadi faktor pendukung dari perilaku politik dan menjadi justifikasi setiap tindakan politik yang menyangkut hajat hidup warga Muhammadiyah khususnya dan warga Indonesia pada umumnya yang bersimpati pada ketokohan mereka.

⁹ *Op cit*, hlm. 89.

¹⁰ *Op cit*, hlm. 75.

¹¹ Baca Spirit Pencerahan Muhammadiyah dalam *Profil Muhammadiyah 2010* yang diterbitkan oleh LPI PP Muhammadiyah. Bisa dilihat juga dalam *Profil Muhammadiyah*, 2005.

A. Teori Modalitas

Dalam sistem pemilihan umum langsung seperti yang diterapkan Indonesia, setidaknya dibutuhkan tiga modal (*capital*) sebagai prasyarat agar seorang kandidat dapat terpilih. Ketiganya saling membutuhkan, meski bukan berarti akan gagal total jika kekurangan salah satunya. Kekurangan pada salah satu modal, mungkin bisa ditutup oleh kelebihan pada modal yang lain. Ketiganya adalah modal sosial (*social capital*), modal ekonomi (*economic capital*), dan modal budaya (*cultural capital*).¹² Pembagian modal menjadi tiga aspek ini merujuk pada teori Bourdieu (1977, 1986) yang mencoba memahami bagaimana relasi perbedaan, kuasa, dan dominasi diciptakan dan dipertahankan, dan bagaimana aktor-aktor sosial beroperasi dalam setting relasional tersebut. Bagi Bourdieu, ketiga bentuk modal tersebut menjelaskan struktur dan dinamika masyarakat yang terdiferensiasi. Dengan kata lain, perbedaan akses terhadap ketiga modal tersebut akan sangat menentukan keberhasilan seseorang dalam mendapatkan peluang-peluang ekonomi, sosial, dan politik.

Ini bisa digunakan untuk membantu menjelaskan sepak terjang elite dan politisi Muhammadiyah dengan menggunakan kaca mata ketersediaan dan ketiadaan tiga modal ala Bourdieu. *Pertama*, adalah ketersediaan modal sosial (*social capital*). Menurut Putnam, modal sosial merujuk pada kerangka-kerangka organisasi kemasyarakatan, seperti jejaring, norma-norma, sikap saling mempercayai (*trust*) yang memungkinkan terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan (1993, 1995). Definisi lain, modal sosial dipahami sebagai suatu konsep dengan berbagai definisi yang saling terkait, yang didasarkan pada nilai jaringan sosial (Portes, 1998:1).¹³ Konsep yang mendasari modal sosial sudah lama. Para filsuf

¹² Richard Harker, dkk (ed.), dalam judul buku pengantar Paling Komprehensif Kepada Pemikiran Pierro Bourdieu, (*Habitus x Modal*)+*Ranah=Praktik*, terj. Yogyakarta: Jalasutra, 1990, hlm. 76.

¹³ Sementara berbagai aspek dari konsep ini telah dibahas oleh semua bidang ilmu sosial, sebagian menelusuri penggunaannya di masa modern kepada Jane Jacobs pada tahun 1960-an. Namun, ia tidak secara eksplisit menjelaskan istilah modal sosial melainkan menggunakannya dalam sebuah artikel dengan rujukan kepada nilai jaringan. Uraian mendalam yang pertama kali dikemukakan tentang istilah ini dilakukan oleh Pierre Bourdieu pada 1972 (meskipun rumusan jelas dari karyanya dapat ditelusuri ke tahun

yang menekankan hubungan antara kehidupan masyarakat yang pluralistik dan demokrasi termasuk James Madison (*The Federalist*), Alexis de Tocqueville (*Democracy in America*), dan banyak penulis lainnya dalam tradisi pluralis yang dominan dalam ilmu politik Amerika.¹⁴

Membicarakan modal sosial, Muhammadiyah sebenarnya bisa dikatakan unggul karena struktur dan jejaring organisasi Muhammadiyah telah lama dikenal karena efisien dan efektif (pusat sampai ranting). Ini agak berbeda dengan budaya organisasi di lingkungan NU, di mana kekuatan utamanya bukan terletak pada struktur organisasi, namun tersebar pada kiai-kiai lokal. Karena itu, sejarah membuktikan bahwa tidak sulit bagi partai-partai politik yang pernah didirikan oleh warga Muhammadiyah (Masyumi, Parmusi, PAN, dan PMB) untuk mendirikan cabang hingga tingkat paling bawah.

Namun, persoalan mendasar terkait dengan jejaring organisasi Muhammadiyah adalah kesulitan untuk mentransformasikannya menjadi jejaring organisasi politik. Terlalu sulit untuk mengubah budaya, ritme, dan etos kerja jejaring organisasi Muhammadiyah yang selama ini bergerak dalam bidang sosial dan keagamaan untuk dalam waktu singkat berubah menjadi struktur dan jejaring politik. Etos organisasi kemasyarakatan (jika berbicara ideal) adalah keikhlasan dan pengabdian, yang tidak berorientasi profit. Sementara etos organisasi politik adalah persaingan (untuk memperebutkan akses kekuasaan), dengan capaian-capaian material yang bersifat seketika. Dalam bahasa Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, imbalan ber-Muhammadiyah adalah *ajrun* (pahala ukhrawi), sedangkan imbalan dalam dunia politik adalah *ujrah* (insentif material).¹⁵

1984). James Coleman mengambil definisi Glenn Loury pada 1977 dalam mengembangkan dan mempopulerkan konsep ini. Pada akhir 1990-an, konsep ini menjadi sangat populer, khususnya ketika Bank Dunia mendukung sebuah program penelitian tentang hal ini, dan konsepnya mendapat perhatian publik melalui buku Robert Putnam pada tahun 2000. Sumber: Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Modal_sosial

¹⁵ Pramono U. Thanthowi, opini, Kegagalan Politisi Muhammadiyah, What Went Wrong, Suara Muhammadiyah yang dipublikasi di <http://suara-muhammadiyah.com/2010/?p=632>, juga dalam edisi cetak majalah *Suara Muhammadiyah* dengan judul dan penulis yang sama dalam SM edisi: No.II/TH. Ke-94 tanggal 1-15 Juni 2009, hlm. 52-53

Kesulitan untuk mentransformasikan jejaring MD menjadi jejaring politik yang efektif terkait dengan banyak hal. Yang pertama, Muhammadiyah dalam sejarah sama sekali tidak pernah berubah menjadi partai politik. Ini berbeda dengan NU yang pernah menjadi partai politik sejak 1952 hingga 1983 (kurang lebih 31 tahun). Paling jauh, Muhammadiyah “hanya” pernah menjadi anggota istimewa Masyumi (1945-1959). Dalam penggalan-penggalan sejarah selanjutnya, terlihat bahwa hubungan antara Muhammadiyah dengan Parmusi, PAN, dan PMB berbeda-beda dalam derajat kedekatannya, namun tidak pernah melebihi hubungan antara Muhammadiyah dan Masyumi (praktis keterlibatan organisasi).

Kedua, ketersediaan modal ekonomi (*economic capital*). Seseorang bisa memiliki modal ekonomi karena hasil usahanya sendiri atau warisan dari leluhurnya. Masuk dalam kelompok ini adalah konglomerat, pengusaha, saudagar, dan pekerja profesional. Dalam konteks pemilu, modal ekonomi tidak selalu berarti modalnya sendiri. Seorang kandidat bisa juga menggunakan modal ekonomi orang lain. Dan hal ini banyak terjadi, di mana seorang kandidat mencari bantuan dari (atau malah ditawarkan oleh) pengusaha, bandar, broker. Namun risikonya jelas, jika terpilih maka kandidat tersebut harus mengembalikan pinjaman. Pengembalian ini bisa secara langsung, yang biasanya “memaksa” mereka untuk mengambil jalan yang melanggar hukum, seperti menerima gratifikasi, bonus, komisi, upeti, dan sebagainya. Pengembalian juga bisa secara tidak langsung, yakni melalui pembagian proyek atau kemenangan tender.

Harus diakui, ketersediaan modal ekonomi menjadi persoalan bagi sebagian besar elite dan aktivis Muhammadiyah yang berniat merebut kekuasaan politik. Hal ini disebabkan budaya kewirausahaan (*entrepreneurship*) telah lama lenyap dari lingkungan Muhammadiyah. Jika pada masa awal berdiri Muhammadiyah banyak didukung oleh para pengusaha dan saudagar, maka sejak akhir abad ke-20 para pengurus dan aktivis Muhammadiyah sebagian besar terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), guru, dosen, dan (belakangan) aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dikategorikan sebagai kelas menengah (*middle class*), lebih tepatnya lagi kelas menengah bawah

(*lower middle class*). Kelompok masyarakat dalam kelas ini sudah bisa dikatakan hidup layak, namun belum bisa jika disebut mewah atau kaya.

Kelompok masyarakat dalam kelas ini belum cukup memiliki modal ekonomi untuk bertarung dalam pemilihan umum. Karena modal ekonomi yang dibutuhkan oleh seorang kandidat untuk menang dalam pemilu legislatif April 2009 lalu sangat besar. Ditambah lagi dengan penggunaan sistem suara terbanyak.¹⁶

Ketiga, ketersediaan modal budaya (*cultural capital*). Penulis lebih memilih terminologi modal simbolik untuk menggantikan istilah modal budaya. Modal budaya, merujuk pada Bourdieu, terkait dengan tingkat dan jenis pendidikan, kemampuan mengapresiasi seni, pengalaman budaya, dan keagamaan. Termasuk dalam kelompok ini adalah cendekiawan, intelektual, akademisi, budayawan, seniman, dan tokoh agama (khususnya yang melekat padanya citra selebritis). Berbicara mengenai modal budaya (khususnya capaian-capaian akademis), rasanya tidak perlu diperdebatkan mengenai keunggulan elite Muhammadiyah dibanding elit kader organisasi lain- yang masuk ke ranah politik. Modal budaya menjadi penting bagi siapa pun yang berniat aktif dalam dunia politik, karena politik membutuhkan aktor-aktor yang berwawasan luas dan kadar intelektualitas yang memadai, terutama untuk memahami, menganalisis, dan mencari solusi atas berbagai masalah. Tanpa itu, para pengambil kebijakan (*decision makers*) tidak akan mampu menawarkan kebijakan yang baik bagi masyarakat luas (*public good*).

Dalam hal ini juga perlu memahami apa itu kekuasaan dan berasal darimana sebenarnya baik pada kekuasaan formal(kenegaraan), atau kekuasaan dalam artian kepemimpinan elit sosial seperti dalam Muhammadiyah. Satu gambaran umum ini kiranya bisa menjelaskan. Pada tataran paling sederhana, “kekuasaan” itu dapat digambarkan ketika kapasitas A untuk membuat B melakukan apa yang A kehendaki terhadap B, juga bila B tidak menghendakinya. Dari definisi ini pun segera tampak, kekuasaan

¹⁶ Sekedar contoh, banyak sumber menyebutkan bahwa partai Gerindra telah menghabiskan biaya kampanye tidak kurang dari Rp. 300 milyar, dan hanya berhasil mendapatkan 30 kursi DPR pusat. Artinya, jika dirata-rata maka satu kursi menghabiskan biaya kurang lebih Rp. 10 milyar. Angka sebesar itu tentu saja di luar imajinasi sebagian besar kader dan aktivis Muhammadiyah yang bertarung dalam pemilu legislatif lalu.

punya sumber/bentuk jamak, bukan tunggal. Ada kekuasaan yang berakar pada uang (bisnis), hukum (DPR/pemerintah), informasi (media), senjata (militer), doktrin (agama), Pemilu (legitimasi), dan sebagainya. Masing-masing kategori tidak lebih penting dibanding lainnya. Dari mana kapasitas itu datang? Dari pemilikan/kontrol sumber daya secara asimetris: uang, senjata, doktrin, hukum, dan sebagainya. Dengan demikian terlihat bahwa watak kekuasaan bersifat jamak alias tidak tunggal tergantung dari mana sumber dan bentuk kekuasaan itu muncul dalam masyarakat.¹⁷

Sebagain besar elite Muhammadiyah memiliki modal budaya yang cukup untuk bertarung memperebutkan pengaruh, jabatan-jabatan politik, dan menentukan keputusan politik. pertanyaannya, apakah dengan hanya mengandalkan modal budaya ini elite Muhammadiyah akan berhasil masuk ranah politik? Jawabannya adalah belum. Artinya, modal gelar dan intelektualitas saja belum cukup. Untuk berhasil, setidaknya masih diperlukan dua modal yang lain.

Menurut Klinken (2007), pada saat transisi Orde Baru, simbol-simbol agama merupakan hal paling populer dan memiliki kekuatan luar biasa untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan sebagaimana ia tuliskan:

“Agama sejak dulu dikaitkan secara erat dengan naik turunnya institusi-institusi. Identitas-identitas religius berkembang menjadi lebih kuat dalam periode pascaotoriter di Indonesia. Dengan intensitas yang melebihi etnisitas yang secara aktif ditekan Orde Baru, pengalaman religius berkembang dengan mantab tetapi juga lebih ortodoks dalam lingkaran-lingkaran kelas menengah pada dekade-dekade sebelumnya.”¹⁸

Politik agama menjamur di Indonesia dengan pula beredarnya buku-buku Islam radikal yang menjadi mainstream panjang tentang politik agama di Indonesia (Baswedan 2004; Bruinessen 2002, Effendy 2003; Fealy 2003). Lalu Klinken lebih jauh menjelaskan kisah fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Ia mengungkapkan:

¹⁷ B. Herry-Priyono, peneliti, staf pengajar pada program pascasarjana STF Driyarkara, Jakarta. makalah dalam Seminar Nasional “Rekonstruksi Kepemimpinan dari Perspektif Psikososial”, di Unika Soegijapranata, Semarang, 24 Mei 2003. Dapat dibaca di URL Source: <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/01/Bentara/580407.htm>

¹⁸ Geery van Klinken, *Perang Kota Kecil, Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2007) hlm. 36.

“Partai-partai politik Islam menjamur selama tahun-tahun reformasi yang penuh gejolak itu, sehingga memperburuk fragmentasi yang sudah terjadi pada komunitas Islam dan memunculkan kelompok sektarian yang berharap akan menanggung keuntungan dari situasi itu. Kelompok-kelompok yang paling militan bermunculan dalam momen karisma ini, dan kadang mereka bertindak sebagai alat bagi salah satu faksi elite politik yang lain (Hasan, N. 2002).”¹⁹

Untuk memudahkan memahami teori modalitas tersebut dalam konteks elit Muhammadiyah berikut disarikan dari teori modalitas Bourdieu sebagaimana yang terpapar dalam tabel II.1 di bawah ini.

Tabel II.1. Modalitas Bourdieu

Jenis Modal	Cakupan Modal; meliputi
Modal Sosial (<i>social capital</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan (dalam dan luar negeri) 2. Status dalam masyarakat (pendidikan, agama, dll) 3. Keturunan (bangsawan, penguasa) 4. Kekuatan Pengaruh dalam masyarakat 5. Pengurus organisasi besar dan terhormat
Modal Politik (<i>political capital</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Politik (posisi) 2. Pengalaman mengorganisasi massa 3. Keturunan (bangsawan, penguasa) 4. Kekuatan terhadap pengambilan keputusan publik 5. Reputasi dan legitimasi
Modal Ekonomi (<i>economical capital</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan (finansial, material) 2. Keturunan (bangsawan, penguasa) 3. Kekuatan Pengaruh dalam masyarakat 4. Kelas Menengah santri 5. Birokrat pemerintahan
Modal Simbolik (Modal Budaya)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gelar pendidikan (tinggi) 2. Citra dan simbol agama 3. Penghargaan terhadap karya seni/budaya/dakwah kultural

¹⁹ *Op cit.*, hlm. 37.

B. Modalitas Elite Muhammadiyah (Terseleksi)²⁰

B.1. Modalitas Sosial Elite Muhammadiyah

a. Prof. Dr. Din Syamsuddin, MA (DS)

Prof. Dr. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A., lebih dikenal dengan nama Din Syamsudin, lahir di Sumbawa Besar, 31 Agustus 1958. Latar belakang pendidikan masa kecil DS banyak dihabiskan di NU,²¹ kemudian melanjutkan di Pondok Pesantren Modern Gontor Jawa Timur (1975), kemudian IAIN Jakarta, Sarjana Muda, Fakultas Ushuluddin (BA, 1980), University of California Los Angeles (UCLA), USA, Interdepartmental Programme in Islamic Studies (MA, 1988), dan Ph.D di universitas yang sama (1991) dalam politik Islam.²²

Pengalaman Organisasi diawali sebagai Ketua IPNU Cabang Sumbawa (1970 - 1972), Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, IAIN Jakarta (1980-1982), Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM, 1985), Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (1989-1993), Wakil Ketua Majelis Pemuda Indonesia (1990-1993), Wakil Ketua PP Muhammadiyah (2000-2005), Sekretaris Dewan Penasihat ICMI Pusat (1990-1995), Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2000-2005). Karena dinamika kehidupan tersebut, kiprah Din Syamsuddin bisa dibilang unik kalau tidak dibilang MUNU.

Ketika terpilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah pada Muktamar ke-45 di Malang (periode 2005-2010), Din Syamsuddin senantiasa istiqomah mengabdikan amal dakwahnya. Sosok dan pemikiran yang humanis demokratis kian tampak jelas dalam langkah-langkah gerakannya yang tak henti menerjang sekat-sekat “kekakuan dan kebekuan” gerakan dakwah Islam sehingga bisa diterima kalangan secara luas termasuk kelompok fundamentalis Islam. Dalam waktu bersamaan, dengan sikapnya

²⁰ Pilihan elite didasarkan atas kebutuhan untuk analisa dan dirasa merepresentasikan kelompok-kelompok politik dan kultural atau yang ada diantara keduanya dalam Muhammadiyah kekinian. Klasifikasi ini murni dilakukan untuk memudahkan analisa posisi, reputasi, dan keputusan ala Robert D. Putnam.

²¹ Alur kiprah kepemimpinannya di Muhammadiyah terbilang unik karena berangkat dari pendidikan dasar di MI NU dan MTs NU di Sumbawa Besar

²² sumber: Profil 1 Abad Muhammadiyah, Yogyakarta: PP Muh. 2010. hal 54-55.

yang jernih tapi berani, Din Syamsuddin gencar menyuarakan perlunya Islam membuka diri terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan ber dunia sebagai manifestasi Islam *rahmatan lil'alam*.

Sampai sekarang (2009, ed.) DS masih menjabat sebagai: Ketua Umum, PP Muhammadiyah (2005-2010), Wakil Ketua Umum MUI Pusat (2005-2010), Wakil Ketua Dewan Penasihat ICMI Pusat (2005-2010), Ketua, Indonesian Committee on Religions for Peace/ICoRP (2000-sekarang), Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilisations/CDCC (2007-sekarang). Dalam jaringan internasional DS juga mempunyai kesibukan yang cukup banyak yaitu menjadi; Chairman, World Peace Forum/ WPF, President, Asian Committee on Religions for Peace/ACRP, based in Tokyo (2004-sekarang), Honorary President, World Conference on Religions for Peace/ WCRP, based in New York (2006-sekarang), Member, World Council of World Islamic Call Society, based in Tripoli (2005-sekarang), Vice Secretary General, World Islamic People's Leadership, based in Tripoli (2005-sekarang), Member, Strategic Alliance Russia based Islamic World (2006-sekarang), Member, UK-Indonesia Islamic advisory Group (2006-sekarang).

Selama memimpin Muhammadiyah, DS cenderung menampilkan langgam kepemimpinan yang akomodatif-rekonsiliatif, sembari terus berikhtiar meredakan ketegangan antar pemeluk agama serta mencari corak gerak perjuangan yang kontributif dan saling mendamaikan. Paling tidak, buah dari ikhtiar itu sudah terlihat dalam bingkai hubungan antara Muhammadiyah dan NU yang cenderung lebih kondusif sebagai dua ormas utama pilar bangsa. Selain itu, Di bawah kepemimpinan DS, Muhammadiyah turut berperan dalam upaya mengatasi konflik di Thailand Selatan. Bahkan, Raja Bhumibol sendiri meminta secara langsung agar Muhammadiyah ikut membantu penyelesaian konflik antara warga Muslim dan pemerintah tersebut.

b. Prof. Dr. Achmad Syafii Maarif, MA. (ASM)

Guru besar Ilmu Sejarah ini dilahirkan di Sumpurkudus, Sumatera Barat, 31 Mei 1935. Sejak kecil Syafii Maarif memang sudah bergumul

dengan pengetahuan tentang agama Islam. Hal itu berkat pendidikan dari almarhum orangtuanya, Makrifah, dan dipertajam dengan pendidikan yang dijalani kemudian, yang akhirnya membentuk dirinya hidup secara kental dalam tradisi Islam.

Setamat Sekolah Rakyat Ibtidaiyah di Sumpurkudus(1947), ia melanjutkan studinya ke Madrasah Mu'allimin Lintau, Sumatera Barat. Kemudian dilanjutkan ke Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah di Yogyakarta tamat tahun 1956. Melanjutkan ke perguruan tinggi bukanlah hal yang mudah bagi ASM setelah menamatkan studinya dari Madrasah Mu'allimin Yogyakarta, karena setelah kedua orangtuanya meninggal dunia pembiayaan untuk melanjutkan studinya nyaris terputus. *"Saya terdampar di pantai karena belas kasihan ombak,"* katanya suatu saat mengilustrasikan perjalanan hidupnya dalam sebuah wawancara dengan Majalah KUNTUM. Berkat bantuan dari saudaranya, Syafii Maarif akhirnya bisa melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Surakarta.

Baru satu tahun kuliah, pemberontakan PRRI/Permesta meletus dan menyebabkan terputusnya jalur hubungan Sumatera-Jawa. Dengan demikian, bantuan biaya kuliah dari saudaranya terputus, sehingga ia memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah. Setelah putus kuliah, ia menyambung hidup sebagai guru desa di wilayah Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

Motivasi belajar yang dimiliki Syafii Maarif memang sangat tinggi. Sambil bekerja ia kembali melanjutkan kuliah di Jurusan Sejarah, karena tidak mungkin lagi kembali ke Fakultas Hukum. Gelar Sarjana Muda berhasil diraihinya dari Universitas Cokroaminoto pada tahun 1964, dan gelar Sarjananya diperoleh dari IKIP Yogyakarta pada tahun 1968.

Kepakarannya di bidang sejarah semakin teruji, setelah memperoleh gelar Master pada Departemen Sejarah Ohio State Universitas, Amerika Serikat. *"Pilihan yang tak sengaja itu ternyata telah menuntun saya menemukan hikmah kemanusiaan,"* kata Syafii Maarif dalam sebuah wawancara dengan KOMPAS. Baginya, sejarah berbicara tentang kemanusiaan secara totalitas. Gelar Doktoratnya di peroleh pada tahun 1993 dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, di Program Studi Bahasa dan Peradaban Timur Dekat.

“Sudah 25 tahun terakhir, perhatian terhadap sejarah, filsafat, dan agama melebihi perhatian saya terhadap cabang ilmu yang lain. Namun saya sadar sepenuhnya, bahwa semakin saya memasuki ketiga wilayah itu semakin tidak ada tepinya. Tidak jarang saya merasa sebagai orang asing di kawasan itu, kawasan yang seakan-akan tanpa batas. Terasalah kekecilan diri ini berhadapan dengan luas dan dalamnya lautan jelajah yang hendak dilayari.” Kalimat yang rendah hati itu pernah diucapkannya pada pembuka Pidato Pengukuhan Guru Besar-nya di IKIP Yogyakarta. *“Rendah hati adalah refleksi dari iman,”* kata Syafii.

Keterlibatannya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan sebuah keharusan sejarah. Ketika reformasi di Indonesia sedang bergulir, Amien Rais yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah harus banyak melibatkan diri dalam aktivitas politik di negeri ini untuk menjadi salah satu lokomotif pergerakan dalam menarik gerbong reformasi di Indonesia. Muhammadiyah harus diselamatkan agar tidak terbawa oleh kepentingan-kepentingan jangka pendek. Pada saat itulah, ketika Muhammadiyah harus merelakan Amien Rais untuk menjadi pemimpin bangsa, maka Syafii Maarif menggantikannya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebagai salah seorang Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ia terpilih dan dikukuhkan sebagai Ketua PP Muhammadiyah melalui Sidang Pleno Diperluas yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia harus melanjutkan tongkat kepemimpinan Muhammadiyah sampai Muktamar Muhammadiyah ke-44 tahun 2000 di Jakarta.

c. Prof. Dr. M. Amin Rais, M.A. (MAR)

Tokoh Reformasi Indonesia (1998) ini dilahirkan di Surakarta, 26 April 1944. Orang tuanya sebenarnya menginginkannya menjadi kiai dan melanjutkan pendidikan di Mesir, sehingga pendidikan yang ditanamkan oleh orang tuanya sangat kental dengan nilai-nilai agama, baik di pendidikan dasar (SD Muhammadiyah I Surakarta) maupun di pendidikan menengah (SMP dan SMA).

Pendidikan tingkat sarjana diselesaikan oleh Amien Rais di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL Universitas Gadjah Mada pada

tahun 1968, sementara ia juga menerima gelar Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1969. Pada saat mahasiswa inilah ia banyak terlibat aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Ketua III Dewan Pimpinan Pusat IMM) dan Himpunan Mahasiswa Islam (Ketua Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam HMI Yogyakarta). Studinya dilanjutkan pada tingkat Master di bidang Ilmu Politik di University of Notre Dame, Amerika Serikat, dan selesai pada tahun 1974. Dari universitas yang sama ia juga memperoleh *Certificate on East-European Studies*. Sementara itu, gelar Doktoratnya diperoleh dari Universitas Chicago, Amerika Serikat, pada tahun 1981 dengan disertasinya yang cukup terkenal, yaitu Gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ia juga pernah mengikuti *Post-Doctoral Program* di George Washington University pada tahun 1986 dan di UCLA pada tahun 1988. Perjalanan pendidikannya tersebut telah memberinya banyak pengalaman dan kemampuan kognitif-analitis, dan mengantarkannya menjadi salah seorang intelektual terkemuka di negeri ini, bahkan di berbagai belahan dunia yang lain. Tugas-tugas intelektualisme pun ia lakukan, baik transformasi keilmuan (mengajar di berbagai universitas) dan juga melakukan kritik atas fenomena sosial yang sedang berlangsung.

d. Dr. Haedar Nashir, M.Si. (HN)

Dr. Haedar Nashir lahir di Bandung, 14 Juli 1963 merupakan tokoh Muhammadiyah yang lama bergerak di lingkungan Muhammadiyah, sejak di usia yang belia sudah menjadi ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM). Banyak orang menilai, Haedar adalah kader asli Muhammadiyah yang tidak terkontaminasi oleh sumber-sumber organisasi lainnya. Beliau tercatat sebagai dosen FISIP UMY, karier di Muhammadiyah juga diikutinya mulai dari sebagai anggota Muhammadiyah di Cabang Ngampilan Yogyakarta. Ada pun riwayat pendidikannya dimulai dari SD/MI Ciparay Bandung, Ponpes Cintawana, Tasikmalaya, SMA Negeri X Bandung, gelar sarjana didapatkan dari STPMD Yogyakarta, adapaun pasca sarjana dan doktornya didapatkan dari UGM jurusan Sosiologi.

Kegiatan organisasi di Muhammadiyah dirintisnya sejak menjadi pengurus PP IPM 1983-1986 (sebagai Ketua I, Bidang Pengkaderan), PP Pemuda Muhammadiyah 1985-1990 di Departemen Kader, Sekretaris Badan Pendidikan Kader PP Muhammadiyah 1985-1995, Ketua BPK-PAMM PP Muhammadiyah 1995-2000, Sekretaris PP Muhammadiyah, 2000-2005. Salah satu kegiatan yang ditekuni adalah menulis melalui corong majalah Suara Muhammadiyah, pemikirannya dikenal luas oleh warga Muhammadiyah di daerah dan pelosok desa.

Nama istrinya Dra. St. Noordjannah Djohantini, juga merupakan aktivis tulen di lingkungan Muhammadiyah semenjak dari IPM, NA, dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Umum PP 'Aisyiyah (2005-2010).

e. Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc. (YI)

Yunahar Ilyas lahir di Bukittinggi, 22 September 1956. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Taluk I di Bukittinggi, lulus tahun 1968, lalu melanjutkan di PGAN selama 4 tahun di Bukittinggi, sementara Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 6 tahun di Padang, lulus tahun 1974. Kemudian melanjutkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang, Jurusan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, lulus Sarjana Muda (*Bachelor of Art*) tahun 1978. Setelah itu, beliau melanjutkan studi di Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Su'ud Riyadh Saudi Arabia, Fakultas Ushuluddin, lulus *Lisance* (Lc) tahun 1983. Selanjutnya, pendidikan pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus Strata Dua (Magister Agama Islam) Aqidah dan Filsafat tahun 1996, dan lulus Strata Tiga (Program Doktor) Ilmu Agama Islam tahun 2004.²³

Dalam organisasi, Yunahar pernah menjadi Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang 1977-1979, Ketua Umum DPC IMM Kota Padang 1977-1979, Wakil Ketua DPD IMM Sumbar 1978-1979, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Riyadh, Saudi Arabia tahun 1982-1983, Wakil Ketua Divisi Pembinaan Umat ICMI

²³http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1343&Itemid=2

Orwil DIY 1991-1995. Di Muhammadiyah, Yunahar pernah menjabat Wakil Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1995-2000, Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2000-2005, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2005-2010, Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat 2005-2010.

B.2. Modalitas Politik

a. Prof. Dr. Din Syamsuddin, M.A. (DS)

Din Syamsuddin, ketika menjadi tokoh Muda Muhammadiyah, pernah diramalkan oleh Leonard Binder, profesornya di UCLA dan Chicago, akan bersaing dalam arena politik dengan Amien Rais.²⁴ Ramalan tersebut tidak sepenuhnya meleset ketika kita melihat perang pengaruh di pentas Pemilu 2009. Jauh hari sebelumnya, DS mengkritik politik ‘muadzin’ yang dilakukan oleh Amien Rais meneriaki kebobrokan Orde Soeharto.

DS sempat bersinggungan dengan dunia politik praktis sebelum menjadi Ketua PP Muhammadiyah (2005). Dinamika kehidupan politiknya tergambar dari keterlibatan di partai politik di era Orde Baru. Pengalaman dalam Partai Politik dan Birokrasi berawal sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan DPP GOLKAR (1993-1998), Wakil Sekjen DPP GOLKAR (1998-2000), Wakil Sekretaris Fraksi Karya Pembangunan MPR-RI (1998), Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan MPR-RI (1999).²⁵

Di kancah internasional, sebagai cendekiawan muslim yang konsen mendorong demokratisasi, Din Syamsuddin turut mengawal arah perkembangan dan kemajuan proses demokrasi di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini. Ikhtiar mulia ini tercermin dalam statemennya:

“Kemenangan politik Islam di Indonesia tidak hanya ditandai oleh perolehan suara partai-partai Islam dan penguasaan posisi politik kenegaraan. Tapi pada sejauhmana nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran dan persamaan dapat menjadi bagian dari watak bangsa. Ini yang harus terus diperjuangkan bersama seluruh komponen bangsa”.²⁶

²⁴ Hariyanto Y. Thohari, Makalah, *Muhammadiyah dari Dahlan sampai Amien Rais*, 2001

²⁵ Diolah oleh David Efendi dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁶ PP Muhammadiyah, Profil Muhammadiyah 2010, LPI PP Muh., edisi terbaru 2010.

Selain itu, DS menorehkan kiprah dalam usahanya merajut relasi konstruktif dan menyuarakan urgensi hubungan damai antarpemeluk agama melalui berbagai forum yang dimotorinya, seperti World Peace Forum (WPF), Asian Committee on Religions for Peace (ACRP) Tokyo, World Conference on Religions for Peace (WCRP) New York, World Council of World Islamic Call Society, Tripoli, World Islamic People's Leadership Tripoli, Strategic Alliance Russia based Islamic World, dan UK-Indonesia Islamic Advisory Group.

Negara-negara maju, seperti AS, Uni Eropa, Cina, India dan Jepang, harus ikut berinvestasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Ketidadaan perdamaian dan krisis-krisis global selama ini harus diakui adalah akibat kegagalan sistem dunia yang didukung negara-negara maju. Demikian ditegaskan Din di New York, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Kehormatan WCRP dan Presiden ACRP pada momentum World Summit on Peace (WSP) dan International Leadership Conference (ILC) dihadapan lebih dari 300 tokoh dunia dari berbagai negara (2009). Selama memimpin Muhammadiyah, Din Syamsuddin cenderung menampilkan langgam kepemimpinan yang akomodatif-rekonsiliatif, sembari terus berikhtiar meredam ketegangan antar pemeluk agama serta mencari corak gerak perjuangan yang konstruktif dan saling mendamaikan. Paling tidak, buah dari ikhtiar itu sudah terlihat dalam bingkai hubungan antara Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama yang cenderung lebih kondusif sebagai dua ormas utama pilar bangsa. Selain itu, Di bawah kepemimpinan Din, Muhammadiyah turut berperan dalam upaya mengatasi konflik di Thailand Selatan. Bahkan Raja Bhumibol sendiri meminta secara langsung agar Muhammadiyah ikut membantu penyelesaian konflik antara warga Muslim dan pemerintah tersebut.

Dengan usahanya yang gigih, Din Syamsuddin dapat dikata telah mampu pula membuktikan kepada dunia bahwa Persyarikatan Muhammadiyah bukan hanya ormas Islam terbesar di dunia dilihat dari spektrum amal usahanya. Namun juga, mampu meneguhkan eksistensi dan peran kekinian Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan dan pencerahan menuju masyarakat utama yang menjunjung tinggi perdamaian dan kebersamaan umat manusia semesta

Ada dua kesulitan yang dihadapi Din Syamsuddin di saat menghadapi pemilu 2009 terkait modalitas politik yang sangat rendah bila dibandingkan dengan elite Muhammadiyah lama yaitu Amien Rais. Pertama, secara internal struktural, ketiadaan pengalaman Muhammadiyah menjadi partai politik tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap fleksibilitas struktur Muhammadiyah ketika digunakan sebagai kendaraan politik. Ini berbeda dengan struktur dan jejaring NU yang lebih fleksibel dalam berkiprah dalam ranah politik, karena pernah dalam waktu yang lama berfungsi sebagai partai politik.

Kedua, kesulitan untuk mentransformasikan jejaring Muhammadiyah menjadi kendaraan politik juga terkait dengan pola kaderisasi organisasi otonom (IPM, IMM, NA, dan Pemuda Muhammadiyah). Sejak awal masuk dalam Muhammadiyah, aktivis organisasi otonom selalu didoktrin bahwa mereka (secara gradual, dan bukan diversifikasi) adalah kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa. Secara spesifik, mereka selalu dijejali pemahaman bahwa kader ortom adalah pelangsong dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah.²⁷

Menyoroti secara khusus mengenai kesulitan (untuk tidak mengatakan kegagalan) dalam mentransformasikan jejaring Muhammadiyah menjadi jejaring politik yang efektif, menurut saya, ini menjadi pelajaran penting bagi aktivis Muhammadiyah di masa mendatang yang berniat masuk dalam arena politik. Pelajaran itu yakni bahwa *nature* dari Persyarikatan Muhammadiyah adalah organisasi kemasyarakatan, *civil society*, dimana keterlibatan para anggotanya didasarkan pada norma-norma kesukarelaan, aktivitas organisasinya didasarkan pada prinsip-prinsip pengabdian, dan orientasi capaian-capaiannya adalah immaterial.

DS, kiprah politik islamnya dapat ditunjukkan dalam kapasitasnya sebagai Presiden Kehormatan WCRP dan Presiden ACRP pada momentum World Summit on Peace (WSP) dan International Leadership

²⁷ Orientasi kekaderan yang terlalu sempit seperti ini tentu saja membuat karakter aktivis ortom menjadi terlalu berorientasi ke dalam (*inward looking*). Ini mengakibatkan terjadinya proses involusi (perkembangan ke dalam) yang semakin akut, semakin kerdil, dan semakin gagap dengan pertarungan di arena publik yang lebih luas.

Conference (ILC) dihadapan lebih dari 300 tokoh dunia dari berbagai negara (2009) di New York menyatakan, “Negara-negara maju, seperti AS, Uni Eropa, Cina, India dan Jepang, harus ikut berinvestasi dalam menciptakan perdamaian dunia. Ketiadaan perdamaian dan krisis-krisis global selama ini harus diakui adalah akibat kegagalan sistem dunia yang didukung negara-negara maju. Demikian ditegaskan.”

b. Prof. Dr. Syafii Maarif, M.A.

Orang kebanyakan bilang Syafii Maarif sangat polos dalam politik meski mempunyai pengetahuan yang luas dalam perpolitikan nasional atau internasional. Tentang politik internasional, ia mempunyai otoritas sebagai sejarawan, murid Fazlurrahman di Chicago. Tapi otoritas intelektual sama sekali berbeda dengan otoritas kekuasaan formal. Syafii tidak banyak berpengaruh terhadap pilihan-pilihan politik warga Muhammadiyah.

Hubungan dengan politisi dijalani sebagai urusan sosial dakwah sebagaimana kesediaan beliau menjadi penasehat di Baitul Muslimin Indonesia di lingkungan PDIP dan dekat secara personal dengan Taufiq Kiemas yang banyak membantu Syafii Maarif dan Madrasah Muallimin karena Buya adalah ketua panitia pembangunan gedung Muallimin Muhammadiyah pasca gempa Yogyakarta 27 Mei 2006 yang lalu. Selain itu, Syafii Maarif juga menjadi salah satu pendiri Nasional Demokrat bersama Surya Paloh. Bagi Syafii, suara-suaranya yang banyak diekspresikan di media massa dan tulisan, siapa pun berhak berhubungan dengan dirinya sebagai sosok manusia.

c. Prof. Dr. M. Amien Rais, M.A.

Kritiknya yang sangat vokal sangat mewarnai opini publik di Indonesia. Sepulang dari studi di Amerika, ia terkenal sebagai pakar politik Timur Tengah, dan melontarkan kritik yang sangat tajam terhadap kebijakan politik luar negeri Amerika, sebuah negeri tempat ia sendiri belajar banyak tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Kondisi politik dan perekonomian di Indonesia yang sudah mulai membusuk dan sangat tidak sehat bagi demokratisasi mendorong Amien Rais bersuara keras pada tahun 1993 (Sidang Tanwir Muhammadiyah di Surabaya) dengan isu suksesi kepresidenan, sebuah isu yang janggal pada saat itu karena kepemimpinan

Orde Baru masih sangat kuat. Pembusukan politik dan ekonomi pada dasawarsa kedua tahun 1990-an mendorongnya kembali menggulirkan gagasan tentang suksesi, bahkan lebih luas lagi, yaitu reformasi politik di Indonesia. Berawal dari kasus Freeport dan Busang, ia mulai menggulirkan perubahan sosial yang mendasar di negeri ini. Bahkan, ia akhirnya menjadi orang terdepan dalam meruntuhkan kebobrokan politik Orde Baru.

Keterlibatannya di Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dimulai sejak Muktamar Muhammadiyah tahun 1985 di Surakarta sebagai Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Sementara pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 tahun 1990 di Yogyakarta, ia terpilih sebagai Wakil Ketua PP Muhammadiyah. Namun, meninggalnya Azhar Basyir sebagai Ketua PP Muhammadiyah kemudian mengantarkannya untuk menggantikan kepemimpinan dalam PP Muhammadiyah. Muktamar Muhammadiyah ke-43 kembali mengamanatinya untuk menjadi Ketua PP Muhammadiyah.

Lagi-lagi, sejarah bangsa ini mengharuskannya meninggalkan jabatan Ketua PP Muhammadiyah untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi bagi ummat dan bangsa ini. Setelah tumbangunya Rezim Orde Baru dan situasi politik yang semakin meresahkan, ia mendirikan Majelis Amanat Rakyat (MAR), dan atas desakan dari masyarakat yang menginginkan perubahan atas paradigma politik di Indonesia ia kemudian mendirikan partai politik bernama Partai Amanat Nasional, yang pada Pemilu 1999 menduduki posisi ke-5 dalam perolehan suara. Namun, posisi ini akhirnya cukup bisa mengantarkannya sebagai Ketua Lembaga tertinggi Negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekali lagi, ia juga menggulirkan gagasan Poros Tengah yang mencoba membangun jalan tengah dari dua titik ekstrim dalam kubu politik di Indonesia pasca-pemilu 1999, yang ternyata juga cukup berpengaruh bagi upaya merajut kembali hubungan Muhammadiyah-NU dengan mencalonkan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI ke-4, dan ternyata juga berhasil.

d. Dr. Haedar Nashir, M.Si. (HN)

HN tidak dikenal sebagai elite Muhammadiyah yang suka bermanufer. Sehari-hari cukup mengurus Muhammadiyah, mengajar di UMY sebagai

dosen, dan berurusan dengan buah naga sebagai kegiatan rutinnya. Keberpihakan Pak Haedar kepada Muhammadiyah dan khittahnya merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai anak didik Muhammadiyah. Gaya politik Pak Haedar adalah politik kebangsaan atau *high politics* versi revisi sebagaimana yang digambarkan HN di dalam buku *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pembaharuan* terbitan Suara Muhammadiyah.

B.3. Modalitas Ekonomi

a. Prof. Dr. Din Syamsuddin, M.A. (DS)

Tidak banyak sumber yang bisa mengakses basis ekonomi DS selain sebagai akademisi/dosen di UIN Syarif Hidayatullah, UHAMKA, UM Jakarta, dan Universitas Indonesia,²⁸ dan menjadi Dewan Pengawas HSBC Amanah Syariah sebagai seorang pakar syariah Indonesia terkemuka bersama H. M.A. Sahal Mahfudh (Ketua), Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin dan Ir. H. Adiwarmanto A. Karim, MBA. Dewan pengawas ini didirikan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, melengkapi standar tertinggi HSBC terhadap panduan manajemen resiko internal, audit dan sistem pengawasan.²⁹

DS berkesempatan pula menjalankan tugas kenegaraan, sebagai Anggota Dewan Riset Nasional, Dirjen Binapenta Departemen Tenaga Kerja RI. Menjadi Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

Sebagai basis penopang kehidupan keluarga DS berprofesi sebagai dosen/guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1982-sekarang). Selain di UIN juga di UMJ, UHAMKA, UI, (1982-2000). Pernah juga menjadi anggota Dewan Riset Nasional (1993-1998). Pekerjaan lain yang pernah digeluti adalah Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Depnaker RI (1998-2000).

²⁸ Karena ketekunan belajar dalam ghirah Islam yang pantang surut itu, berhasil mengantarkan Din menempuh studi pasca sarjana Interdepartmental Programme in Islamic Studies di University of California Los Angeles (UCLA) hingga meraih gelar Master dan Doktor (1996).

²⁹ <http://www.detikfinance.com/read/2008/03/18/165836/910314/5/hsbc-syariah-tawarkan-deposito-3-mata-uang-asing>

Yang terakhir adalah jabatan di HSBC sebagai pengawas Syariah Amanah HSBC terhitung semenjak tahun 2006 sampai sekarang (2010).

b. Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, M.A. (ASM)

Bicara ketersediaan modal ekonomi dari ASM agak rumit. Sependek pengetahuan saya, ASM sebagai guru besar ilmu sejarah di UNY sekaligus menyerukan berbagai pemikiran dalam seminar-seminar dan tentu saja dilukiskan dalam karya-karya buku bacaan yang sampai sekarang sudah puluhan yang terbit. Ia bisa dibilang sebagai penulis yang produktif di media massa. Barangkali ini yang menjadi jalan keluar baginya untuk memberikan warna dalam hasanah pemikiran. Setahu saya, rumah miliknya baru beberapa tahun saja terwujud, setelah malang melintang menjadi ‘kontraktor’.

c. Prof. Dr. M. Amien Rais, M.A. (MAR)

Tidak berbeda dengan elite Muhammadiyah lainnya, basis ekonomi awalnya selain sebagai keturunan orang kelas menengah, MAR juga memilih jalan akademisi sebagai dosen Fisipol UGM, khususnya jurusan Hubungan International. Kariernya melenggak-lenggok, menjadi Ketua PP Muhammadiyah, mendirikan PAN serta merintis sekolah *fullday* yang bernama Budi Mulia. Kecurigaan saya, bahwa selama ini MAR bisa memutar berbagai anak buah di jabatan penting di KIB ke-2. Namun, sekolah Budi Mulia adalah sekolah elite, dengan biaya masuk dan seolah yang tinggi tentu MAR dan keluarga bisa bernafas lega.

d. Dr. Haedar Nashir, M.Si. (HN)

Haedar mempunyai seorang istri yang juga keturunan suadagar besar di Yogyakarta. Basis ekonomi mandiri HN adalah sebagai penulis dan dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Karier di Majalah Suara Muhammadiyah sangat penting sebagai pimpinan.

e. Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc.

Riwayat pekerjaan Yunahar Ilyas adalah sebagai guru Madrasah

Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (1984-1990), dosen dan pejabat di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (1987-sekarang) dan Program Pascasarjana (S2) Universitas Muhammadiyah Surakarta (2006-sekarang). Selain itu, Yunahar Ilyas menjadi salah satu pengasuh di Pondok Pesantren (Mahasiswa) Budi Mulia Yayasan Shalahuddin Yogyakarta (1990-sekarang), Sekretaris Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY (1987-1994) dan Wakil Kepala LPPI (1996-1999). Pernah menjadi Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2003-2007).

B.4. Modalitas Simbolik

a. Prof. Dr. Din Syamsuddin, M.A.

Alur kiprah kepemimpinannya di Muhammadiyah terbilang unik karena berangkat dari pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah NU di Sumbawa Besar. Saat itu, Din Syamsuddin juga berkesempatan memimpin Ikatan Pelajar NU Cabang Sumbawa (1970-1972). Setamat dari Ponpes Modern Gontor, Din melanjutkan studi Ilmu Perbandingan Agama dan mendapat gelar sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (1980). Dalam kuasa simbolik yang digambarkan Bourdieu, Din Syamsuddin paling unggul dibanding elite Muhammadiyah di angkatan bahkan seniornya, sebab DS adalah jebolan pesantren dan studi agama secara penuh (*kaffah*).

Din bisa jadi merupakan salah satu orang Muhammadiyah yang cukup populer di kalangan pengurus dan warga Muhammadiyah di daerah-daerah. Din rajin untuk turun ke bawah, menyampaikan ceramah dan peninjauan. Persis yang dilakukan oleh Amien Rais ketika menjadi Ketua PP Muhammadiyah beberapa tahun sebelumnya.

Di berbagai forum Muhammadiyah, termasuk misalnya forum Mukhtar Muhammadiyah, Din mendapat sambutan yang cukup ramai dari para peserta Mukhtar dan para Penggembira. Apalagi, Din terlihat paling aktif melakukan komunikasi dengan peserta Mukhtar dibanding tokoh-tokoh Muhammadiyah lainnya. Dia termasuk tokoh yang ringan langkah. Pergaulannya juga luas, kalangan nasional maupun internasional.³⁰

Ketekunan belajar dalam ghirah Islam yang pantang surut itu, berhasil mengantarkan Din menempuh studi pascasarjana Interdepartmental Programme in Islamic Studies di University of California Los Angeles (UCLA) hingga meraih gelar Master dan Doktor (1996). Sekembali ke tanah air, Din Syamsuddin sempat bersinggungan dengan dunia politik praktis hingga memimpin Litbang Golkar. Sebagai akademisi, Din Syamsuddin mengajar di berbagai perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah, UM Jakarta, UHAMKA dan Universitas Indonesia. Din berkesempatan pula menjalankan tugas kenegaraan, sebagai Anggota Dewan Riset Nasional, Dirjen Binapenta Departemen Tenaga Kerja RI. Menjadi Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Sebagai cendekiawan muslim yang konsen mendorong demokratisasi, Din Syamsuddin turut mengawal arah perkembangan dan kemajuan proses demokrasi di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia ini. Ikhtiar mulia ini tercermin dalam statemennya, “Kemenangan politik Islam di Indonesia tidak hanya ditandai oleh perolehan suara partai-partai Islam dan penguasaan posisi politik kenegaraan. Tapi pada sejauhmana nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran dan persamaan dapat menjadi bagian dari watak bangsa. Ini yang harus terus diperjuangkan bersama seluruh komponen bangsa”.

Di kancah internasional, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menorehkan kiprah dalam usahanya merajut relasi konstruktif dan menyuarakan urgensi hubungan damai antarpemeluk agama melalui berbagai forum yang dimotorinya, seperti World Peace Forum (WPF), Asian Committee on Religions for Peace (ACRP) Tokyo, World Conference on Religions for Peace (WCRP) New York, World Council of World Islamic Call Society, Tripoli, World Islamic People’s Leadership Tripoli, Strategic Alliance Russia based Islamic World, dan UK-Indonesia Islamic Advisory Group.

Ketika terpilih menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah dalam Muk-tamar ke-45 di Malang (periode 2005-2010), Din Syamsuddin senantiasa

³⁰ <http://cybernews.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Politics&y=cybernews|0|0|2|7916>

istiqomah mengabdikan amal dakwahnya. Sosok dan pemikiran yang humanis demokratis kian tampak jelas dalam langkah-langkah gerakannya yang tak henti menerjang sekat-sekat “kekakuan dan kebakuan” gerakan dakwah Islam. Dengan sikapnya yang jernih tapi berani, Din Syamsuddin gencar menyuarakan perlunya Islam membuka diri terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan ber dunia sebagai manifestasi rahmatan lil’alamin.

Hampir semua PDM masih menjagokan DS untuk memimpin Muhammadiyah lima tahu ke depan. Kritik yang bisa disampaikan kepada DS adalah tidak lenturnya beliau dalam menyikapi keadaan politik tanah air. Ini tentu bisa diperdebatkan. Memang beliau pernah turun ke jalan dan berorasi bersama Franky Sahilatua dan Usman Hamid dari KontraS dalam kasus “cicak vs buaya” dan Bank Century. Menurut Ketua PWM Jateng, semestinya beliau menyampaikan komentar atas kasus tersebut cukup dari dalam kantor PP saja dan tidak perlu turun ke jalan.

Ketika ditanya para wartawan tentang tidak masuknya kader Muhammadiyah dalam kabinet SBY –menurut Ketua PWM— DS semestinya cukup mengatakan, “Itu hak prerogatif Presiden.” Akan tetapi DS menjawabnya, “Muhammadiyah tidak perlu mengemis-ngemis jatah menteri.”

Sekalipun dianggap tidak luwes dalam berpolitik, DS mendapat banyak pujian dan belum ada tokoh yang mampu menyaingi kepiawaian DS. DS memiliki banyak kelebihan di bidang komunikasi kepada warga Persyarikatan, dan diterima banyak kalangan. Kapasitas keilmuannya juga mumpuni.

Sepertinya Muhammadiyah akan kembali dipimpin oleh DS. Beberapa orang yang masuk dalam struktur PP yang sekarang ini, seperti Haedar Nashir dan Yunahar Ilyas, ternyata belum memiliki kemampuan seperti DS. Haedar Nashir adalah seorang ideolog yang memiliki analisa tajam. Ia pandai merumuskan pandangan Muhammadiyah jauh ke depan. Adapun Yunahar Ilyas, ia seorang mubaligh yang cakap, akan tetapi seringkali mengeluarkan statemen yang tidak semestinya keluar dari seorang pemimpin. Kalimat seperti, “..yang tetap merokok, silakan keluar dari

Muhammadiyah!” tidak semestinya terlontar dari seorang pemimpin. Jika Yunahar menjadi ketua umum, maka pihak yang sangat senang adalah—ini sangat mengejutkan saya— PKS. Sejak dulu saya tidak berani mengambil kesimpulan seperti itu, sekalipun saya merasakan adanya irisan antara Yunahar Ilyas dan PKS. Ternyata para pemimpin Muhammadiyah se-Kedu sudah menyimpulkan hal tersebut.³¹

b. Prof. Dr. Achamd Syafii Maarif, M.A.

ASM adalah orang yang menolak simbol dan menekankan substansi. Ia tidak terlalu percaya dengan karisma, keturunan bangsawan. Ia dikenal sebagai sosok inklusif dalam beragama dan nasionalis (Muhammadiyah Demokrat). Tidak ada simbol lain selain Syafii Maarif yang dipanggil buya dan kuatnya tradisi intelektual dalam hidupnya. Di usia yang senja tetap produktif menulis di media massa dan menulis buku. Beliau juga bersedia menjadi penasihat siapa saja baik partai yang agamis atau yang mengaku nasionalis.

Pendidikan tinggi sang tokoh ditempuh di Barat sehingga dicurigai pembawa virus liberal dalam Muhammadiyah. Bahkan, lantaran kapasitasnya, ia pernah malang-melintang di banyak negara untuk mengajar, khususnya di bidang kajian keislaman dan sejarah, seperti di Universitas McGill, Kanada, dan sejumlah kampus kenamaan di luar negeri, tak terkecuali di universitas almamaternya, Universitas Chicago, Amerika Serikat. Tentu saja, ia mengajar dalam bahasa Inggris. Tapi, pada saat berada di negeri sendiri, ia jarang berbahasa atau menggunakan istilah asing.

Sebaliknya, sejarawan tiga zaman ini justru giat mencetuskan, setidaknya gemar mempopulerkan, beberapa kosa kata atau istilah-istilah yang menyegarkan, serangkaian terminologi yang di negara-negara Barat telah lama digunakan, dan sangat baik untuk dimengerti publik Indonesia, seperti: membumikan (Al-Quran), mencerahkan, pusat kesadaran. Sebagian orang menggunakan istilah *landing to earth*, atau *down to earth*, untuk mengartikan “membumikan”.³²

³¹ <http://hi-nan.com/web/?q=node/355>

Meski berpembawaan serius, ia juga seorang humoris. Sang tokoh menyukai sastra, hal yang membuat ia lentur dalam mengapresiasi kenyataan hidup. Ketika sang tokoh mengenang masa-masa kecil sebagai seorang yatim piatu di era sulit akibat pecah sejumlah pemberontakan di daerah, namun ia bertekad bulat untuk meneruskan sekolah hingga ke jenjang yang tinggi, ia berucap, “Saya terdampar di pantai karena belas kasihan ombak.”

Syafii Maarif adalah figur ilmuwan yang selalu menempatkan kekuatan religi dalam setiap pergulatan dengan ilmunya. Ia sejarawan dan ahli filsafat, tetapi di tengah masyarakat (setidaknya masyarakat Yogyakarta) dia lebih dikenal sebagai seorang agamawan. “*Tidaklah kamu diberi ilmu, kecuali sedikit saja,*” kata Syafii Maarif mengutip sebuah ayat suci Al-Quran. Ini adalah nasehat untuk meredam ambisi dan rasa ingin tahu manusia untuk tidak melangkahi kawasan luar batas kemampuan manusia. Dalam pengertian itulah, maka ia yakin bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan ada tanda-tanda keberadaan Tuhan. “*Kita harus percaya pada realitas yang ada di luar jangkauan manusia,*” demikian ia menekankan. Alam semesta dan seluruh muatannya tidak bisa menjelaskan dirinya. Ia diam seribu bahasa mengenai asal-usul kejadian dan keberadaannya. Hanya wahyu yang kemudian menolong otak manusia dan persepsinya guna memahami semua fenomena itu. Hanya lewat agama, manusia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tujuan eksistensi manusia dan tentang makna kematian. Filsafat, apalagi sejarah, tidak mampu melakukannya.

Membaca buku adalah kesibukan harian yang dilakukan Syafii Maarif, selain menjalankan aktivitasnya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan staf pengajar di IKIP Yogyakarta. Tidak heran kalau dia fasih menyitir ungkapan yang berharga dari kalangan ilmuwan, dan juga kaya dengan ungkapan-ungkapan puitis yang bermakna cukup mendalam.

c. Prof. Dr. M. Amien Rais, M.A.

MAR sangat senang dengan simbolis sehingga ia menerima penganugerahan gelar Kanjeng Pangeran (KP) dari SIKS Paku Buwono XII

³² Agung Y Achmad, Peradaban Titik Koma, Majalah *Tempo*, 7 Juni 2010, hlm. 24.

kepadanya, Akbar Tanjung, A.M. Fatwa, Wiranto, dan tokoh lainnya. Dibanding tokoh lainnya, foto Amien Rais lebih jauh mencolok dalam liputan media.³³

Dalam citra dunia internasional, *“He is a skilled orator with a high media profile, gaining prominence for his vocal opposition to former President Suharto in 1997 and for challenging Suharto in 1998”*, demikian tulis situs web BBC (31/7/2001) mengenai Amien Rais. Keunggulan Amien Rais sebagai *“high profile media”*.³⁴ Dia menjadi ‘buron’ jurnalis ketika menggerakkan reformasi sehingga menyabet gelar bapak reformasi, lokomotif reformasi, kader terbaik Muhammadiyah, satrio piningit, dan sebagainya.

Imam Baehaqi (2002) menuliskan mengenai politik yang diwariskan oleh kosmologi Jawa Mataram yang paternalistik yang digambarkan bagaimana seorang tokoh publik (simbolik) secara efektif menjadi kunci afiliasi politik bagi warga masyarakat ketika reformasi mulai bergulir,³⁵ begitu juga MAR membangun legitimasi atau modalitas agama dengan menjadi pakar politik timur tengah lantaran menulis disertasi Ikhwanul Muslimin dan sempat mondok di Universitas Al-Azhar Kairo. Publik Muhammadiyah tahu sepenggal informasi bahwa MAR jebolan Al-Azhar sehingga mempunyai basis legitimasi untuk bicara Islam dan agama. Tentu saja selain menjadi simbol “imam” politik (*symbol*) warga Muhammadiyah semenjak kesuksesan beliau meruntuhkan Soeharto dan mendirikan PAN, menjadi ketua MPR, komandan poros tengah, sampai MPP PAN sekarang. Ia tetap menjadi imam politik warga Muhammadiyah.

d. Dr. Haedar Nashir, M.Si. (HN)

HN, dalam pandangan banyak aktivis Muhammadiyah, adalah simbol dan penjaga ideologi. Istilah saya, HN adalah elite Muhammadiyah dengan

³³ <http://amienrais.blogspot.com/>

³⁴ Menjelang Pilpres 2004 surat kabar Suara Merdeka, mewartakan judul, “Beskapan, Amien Rais kunjungi Gesang”. Kebetulan esok harinya, 1/10, adalah hari ulang tahun pencipta lagu “Bengawan Solo” yang legendaris itu. Dalam silaturahmi di Gg. II, Kampung Kemlayan, Singosaren, Solo, Amien Rais telah memberikan tali asih sebesar 20 juta rupiah kepada Gesang.

³⁵ Imam Baehaqi (ed), dalam *Agama dan Relasi Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2002) hlm.34-35

khittah. Sangat taat pada garis haluan organisasi. Simbol ini juga menguntungkan sebagai intelektual produk dalam negeri yang jauh dari label ‘sepilis’ sebagaimana dilabelkan kelompok Paman Sam, minus DS dan MAR.

HN yang merupakan sekretaris PP Muhammadiyah 2000-2005 akan memperoleh suara terbanyak. Namanya juga cukup populer di kalangan pengurus wilayah dan daerah Muhammadiyah. Setiap surat resmi PP Muhammadiyah yang diberikan ke pelosok tanah air, HN selalu menandatangani. Selain itu, HN juga memiliki nilai positif. Ia yang menempati rangking satu dalam pemilihan sidang Tanwir dikenal sebagai *low profile* dan cenderung tidak menggunakan cara politis. HN juga termasuk pendiam. Saat tampil di podium, gaya bicaranya pelan dan teratur, tidak meledak-ledak.

Dengan gayanya yang terkesan santai, HN bisa saja memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan saat Muktamar di Malang tahun 2005. Biasanya, dalam tradisi Muhammadiyah, orang dengan karakter seperti HN ini akan dipilih oleh peserta Muktamar. Apalagi, HN juga sudah mendapat dukungan secara implisit dari Ahmad Syafii Maarif, yang juga punya banyak pendukung.

e. Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Lc.

Simbol Islam dan pendidikan timur tengah yang sering dikontraskan dengan kelompok Paman Sam di lingkungan elite Muhammadiyah menjadi satu kekuatan yang *marketable*, sehingga popularitas YI cepat berkibar. Kelompok Islam puritan, konservatif, dan juga kelompok HTI, MUI, tertarik mendekatnya sebagai bagian dari kelompoknya, mengingat di Muhammadiyah sedang didominasi kelompok ‘liberal’ semenjak Muktamar Jakarta tahun 2000 yang dianggap sebagai kemenangan kubu Islam liberal.³⁶

Popularitas YI melejit karena pengalaman memberikan ceramah agama Islam di masjid-masjid, kampus-kampus dan kantor-kantor di Yogyakarta, Solo, Semarang, Cilacap, Jakarta, Bandung, Surabaya, Balikpapan, Bontang,

³⁶ Diolah dari berbagai sumber, media, diskusi, salah satunya YI sering dikutip dalam media HTI di website. Meski atas nama MUI, YI tidak bisa lepas dari latar Muhammadiyah dan pekerjaan utamanya yang menjadi pengajar dan mendapat gelar profesor di UMY.

Martapura, Palangkaraya, Makassar, Palu, Denpasar, Mataram, Padang, Bukittinggi, Padangpanjang, Batusangkar, Payakumbuh, Sawahlunto, Pekanbaru, Batam, Palembang dan beberapa kota lainnya. Juga di forum-forum internasional di Jerman Barat, Jepang, Amerika, China, dan sebagainya. Kegiatan serupa juga ditekuni oleh elite Muhammadiyah lainnya seperti Muhammad Muqodas, Dahlan Rais, dan elit-elit yang ada di majelis-majelis dan lembaga PP Muhammadiyah.

C. Ringkasan: Modalitas Elite Muhammadiyah

Sebagai ringkasan, di penghujung bab ini penulis bermaksud membantu memudahkan pembacaan modalitas elit di Muhammadiyah barangkali tabel berikut ini dapat membantu memahami kompleksitas atau varietas/kemajukan modal yang dimiliki elit Muhammadiyah.

Tabel II.2 Modalitas Elite Muhammadiyah

Modalitas Elit (Bourdeu)	Politik	Ekonomi	Simbolik
MAR (Muhammad Amien Rais)	a. Pendiri PAN b. Mantan Ketua PP Muhammadiyah c. Penasehat PP Muh d. Ketua MPP PAN e. Mantan Ketua MPR f. Pernah di HMI, IMM, KAHMI, ICMI	a. Pemilik Yayasan Budi Mulia b. Komisaris ADiTV	a. Tokoh kritis, reformasi b. Dianggap punya otoritas agama sebab alumni al Azhar c. Jebolan Chicago University dan pakar politik timur tengah d. Dari Jawa/Solo e. Mendapat gelar Kanjeng Pangeran dari Kraton Solo (2003)
DS (Din Syamsuddin)	a. Mantan pengurus Golkar b. Ketua Umum PP Muhammadiyah c. Pendiri CDCC, Orbit d. Dekat dengan AMM Jakarta e. Mantan Ketua PC IPNU Sumbawa f. Mantan Sekjen MUI	a. Mantan Komisaris BP b. Pengawas Syariah HSBC Amanah Syariah Indonesia c. Mantan Dirjen Tenaga Kerja (orde baru)	a. Dari Luar jawa/sumbawa b. Alumni Ponpes Gontor c. Dikenal sbg MUI/ulama d. Politik Islam dari UCLA, USA

Modalitas Elit (Bourdeu)	Politik	Ekonomi	Simbolik
ASM (Syafii Maarif)	a. Mantan Ketua PP Muhammadiyah b. Penasehat PP Muhammadiyah c. Penasehat Baitul Muslimin Indonesia d. Pendiri Maarif Institute	a. Guru besar ilmu Sejarah UNY b. Penulis produktif	a. Alumni sekolah Kader Muallimin Muh. b. Pejuang Kemanusiaan dan anti korupsi c. Tokoh pluralisme dan liberalisme d. Etnis minangkabau e. Jebolan Chicago, murid Fazlurrahman
HN (Haedar Nashir)	a. Ketua PP Muh b. Dekat dengan AMM c. Mantan Ketua IPM, d. Mantan aktivis LSM e. Tidak menjadi anggota parpol	a. Penulis buku b. Dosen UMY c. Istrinya adalah anak saudagar besar batik /tenun d. Bisnis Perkebunan Buah Naga	a. Dari Jawa Barat b. Tidak punya <i>track record</i> dalam belantara politik
YI (Yunahar Ilyas)	a. Ketua PP Muh b. Dekat dengan PKS, HTI, c. Ketua MUI Pusat	a. Mantan Dekan FAI UMY b. Dosen UMY c. Guru Muallimin d. Penceramah/seminar	a. Alumni King Saud University Riyadh b. Dari Sumatra Barat b. Dikenal sebagai sosok ulama

Dari tabel di atas dapat terlihat siapa elite Muhammadiyah yang mempunyai basis legitimasi *power* yang paling kuat dan bagaimana hal itu bekerja untuk mobilisasi untuk kepentingan politik pada Pemilu 2009. Nampaknya Amien Rais tetap berada di posisi puncak dalam modal politik, ekonomi, dan sosial yang juga berarti menunjukkan posisi, reputasi, radius pengaruh terhadap pengambilan kebijakan organisasi dan politik sebagaimana analisa yang ditawarkan oleh Robert Putnam.³⁷ Hal tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel II.3 berikut.

³⁷ Diambil dari Robert D. Putnam, "Introduction", dalam *The Comparative Study of Political Elites* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1976) dalam Mohtar Mas'ood dan Colin McAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,) hlm. 91-94.

Tabel II.3 Posisi, Reputasi, dan Pengaruh Keputusan

Nama Elite	Posisi, Reputasi, dan Pengaruh Keputusan
MAR	a. Ia adalah <i>the strong man</i> di PAN, melebihi Ketua Umum PAN dalam pengaruh pengambil keputusan (<i>decision maker</i>). b. Agama Islam, lintas agama (PAN). c. politik warga secara luas mengikuti aliran struktur Muhammadiyah.
ASM	a. Khasanah wacana perdebatan intelektual dan media. b. Elite angkatan Muhammadiyah kritis (JIMM) dan ortom progresif. c. Dapat diterima dalam forum lintas agama.
DS	a. Elite yang dekat saja. b. warga terbatas jamaahnya yang rada fundamental di luar PKS.
HN	a. Sebagai salah satu ketua PP, ia mempengaruhi pembuatan keputusan organisasi (administrator). b. Sangat diperhitungkan dalam AMM terutama di Yogyakarta.
YI	a. Mempunyai pengaruh dalam dinamika kelompok konservatif Muhammadiyah di beberapa majelis dan kelompok akademisi di PTM. b. Karena simbol keulamaan (pendidikan) menjadi mudah diterima di kelompok-kelompok Muhammadiyah daerah yang sealiran. c. Dekat dengan PKS, HTI, ketua MUI. d. Menggunakan MUI untuk artikulasi politik Islam.
BS	a. Tidak banyak pengaruh dalam politik, tapi sewaktu menjadi Mendiknas cukup berperan dalam dinamika dan dukungan finansial lembaga pendidikan Muhammadiyah. b. Di internal elite Muhammadiyah, BS dianggap tidak memperjuangkan Muhammadiyah dalam politik kekuasaan.

BAB III

SPEKTRUM

FRAGMENTASI POLITIK

ELIT MUHAMMADIYAH

“Memang betul bahwa Muhammadiyah tidak campur tangan dalam politik, tetapi anggota-anggotanya terlibat”

(G.H. Bousquet, Orientalis Prancis)¹

“Mungkin karena agak sulit perjuangan untuk ikut memegang kunci-kunci atau pos-pos strategis itu (politik), lantas muncul semboyan bahwa dakwah kultural (Muhammadiyah) akan bisa menutup kelemahan-kelemahan selama ini. Saya kadang khawatir, jangan-jangan gagasan dakwah kultural sedikit banyak merupakan gagasan pelarian.”²

(M. Amien Rais)

A. Fragmentasi Sebagai Dampak Menguatnya Tarikan Politik

Persaingan individu itu sejatinya merupakan hal yang lumrah, namun karena ada perbenturan nilai yang diyakini individu, tafsir terhadap keputusan organisasi menjadikan konflik berubah menjadi fragmentasi dan faksionalisme dalam berbagai organisasi di Indonesia, termasuk Muhammadiyah (MD). Fenomena yang terjadi adalah perang-

¹ Ahmad Syafii Maarif, 'Potret Politik Muhammadiyah' dalam pengantar buku, 'Syarifudin Jurdi yang berjudul *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik 1966-2006* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. vii

² Amien Rais, makalah, "Umat Islam Indonesia, Muhammadiyah dan Pembangunan Peradaban Utama di Indonesia", disampaikan pada Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah 1430 H di UMY.

kan antara kelompok politisi, *civil society*, saudagar/pedagang menjadi penguasa seperti juga yang terjadi di negara-negara demokrasi, seperti Amerika Serikat, Italia, Inggris dan seterusnya, banyak pengusaha yang mampu membuktikan kemampuannya sebagai kepala pemerintahan. Dunia usaha -meminjam Alexis de Touqville- adalah panggung kedua setelah negara, dan *civil society* adalah panggung ketiga. Banyak orang mengklaim menjadi bagian dari panggung ketiga (*civil society*) dan untuk itu merasa “berhak” menyerang rival organisasi atau politiknya, meminjam istilah Alexis de Touqville, sebagai *kind of individualism*.³ Tumbuhnya individualisme yang memercikkan persaingan individu dalam tubuh organisasi.

Dalam bagian ini akan dibahas beberapa hal diantaranya mengenai spektrum fragmentasi elite, faktor yang menyebabkan serta *setting* bagaimana elite MD mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perubahan (*transformation*) politik dalam skala yang lebih luas serta bagaimana kelompok-kelompok elite MD terfragmentasi dalam ragam kepentingan yang menjadikan konfigurasi dan pembelahan kelompok kepentingan semangat meluas dan dalam batas-batas tertentu dianggap tidak terpetakan. Karena itulah signifikansi dari bagian ini adalah membuka fakta mengenai “faksi-faksi”, atau “fragmen-fragmen” di dalam MD yang tercermin baik dalam tindak-tanduk ibadah syariah dan ibadah-politik-nya.

Sebagai pemahaman dasar adalah bahwa MD sebagai gerakan⁴ sosial-keagamaan yang dirintis dan didirikan Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Kauman Yogyakarta, merupakan organisasi masya-

³ Tom Murphy, O. Carm, *An Angel and A Brute: Self-Interest and Individualism in Tocqueville's America*, tanpa tahun dalam <http://www.brtom.org/sjc/sjc4a.html>

⁴ Istilah gerakan bentuk jamak dari pergerakan yang berarti perkumpulan, baca Badudu-Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 452. Hal ini disebabkan dalam sejarah Indonesia ditunjukkan berbagai macam bentuk gerakan. Namun, istilah pergerakan disini biasanya dikonotasikan pada gerakan-gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Inilah arti yang sering dikembangkan dalam kalangan sejarawan. Patut dicatat dalam penelitian ini, penyusun tidak selalu mengaitkan masalah pergerakan itu hanya dengan perjuangan kemerdekaan, melainkan dapat juga merupakan aktualisasi dari kesadaran beragama. Muhammad Damami, *Akar Gerakan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2000), hlm.14.

rakat yang bercita-cita mewujudkan masyarakat utama dengan menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam. MD sebagai gerakan dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu, senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilih, yaitu masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut.⁵ Menurut Nakamura (1983), gerakan etis (non-politik) inilah yang menjadikan MD bertahan sampai sekarang, yang hampir seratus tahun usianya.⁶

Catatan sejarah menunjukkan bahwa elite MD tidak pernah lepas dari persoalan politik. Misalnya, Ahmad Dahlan sendiri menjadi anggota dan melakukan komunikasi politik dengan pemerintah Hindia Belanda melalui Budi Utomo, dengan kepentingan agar mendapat restu mendirikan MD. Dalam perkembangannya juga terlibat politik kepartaian di Masyumi, Parmusi, atau dalam era reformasi, ada istilah politik kementerian yang mana MD selalu menempatkan orang tertentu untuk duduk di kabinet.⁷

Setiap gerakan Islam memiliki strategi untuk tetap *survive*, ada kalanya gerakan Islam itu mengambil haluan yang murni kultural dan adakalanya menghimpitkan diri dengan kekuasaan politik, tidak sedikit dari gerakan Islam yang dalam periode tertentu berubah menjadi partai politik dan pada periode yang lain tetap sebagai gerakan Islam. Itu mencerminkan dinamika gerakan Islam dan itu dipandang sebagai strategi yang tepat untuk tetap eksis. MD pernah mengalami fenomena seperti itu, ketika gerakan ini menjadi anggota istimewa partai Masyumi pada tahun 1960-an, MD pernah memberikan penghargaan yang tinggi kepada Soekarno dalam bidang Tauhid.⁸

⁵ Tim Penyusun Profil Muhammadiyah, *Profil Muhammadiyah 2000* (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000), hlm.72.

⁶ Mitsuo Nakamura, yang dikutip oleh Hajriyanto Y. Thohari dalam makalah, Keterlibatan Muhammadiyah dalam Politik, *Kumpulan Makalah MPKSDI*, 2001

⁷ Sebagaimana definisi R.M. Perloff bahwa komunikasi politik sebagai proses dengan mana pemimpin, media, dan warganegara suatu bangsa bertukar dan menyerap makna pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik dalam R.M. Perloff, *Political Communication: Politics, Press, and Public in America* (Mahwah (N.J.) and London: Lawrence Erlbaum, 1998), p.8.

⁸ *Op cit.*, Syafii Maarif, dalam Pengantar buku karya Syarifuddin Jurdi, hlm. 6

Untuk bisa melihat persoalan lebih dalam mengenai fragmentasi dan faksi dalam tubuh elit MD, sekiranya pembahasan dalam bagian berikut akan membantu untuk menempatkan obyek analisis penelitian sehingga tidak terjadi *misunderstanding* mengenai bagaimana sebenarnya konteks fragmentasi dan batas-batas apa fragmentasi ini menjadi persoalan internal maupun eksternal MD. Apa benar fragmentasi ini menjadi MD mengalami kemunduran dalam politik diplomasi, politik akomodatif atau politik adiluhung, yang terakhir ini didefinisikan dengan istilah baru politik kebangsaan.⁹

Mengkaji elite politik selalu menarik mengingat kajian demikian memiliki keterkaitan dengan konstruksi budaya yang dapat membedakan satu komunitas dengan komunitas lainnya. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai komunitas elite tentu mengundang perhatian sekaligus perdebatan yang menarik dari berbagai kalangan masyarakat, terutama ilmuwan sosial yang selama ini memang lebih memfokuskan perhatian pada masalah sosial politik dan kekuasaan. Perhatian dan perdebatan mengenai elite justru akan semakin membantu memperluas dan memperkaya teori mengenai elite.¹⁰

Dalam konteks negara berkembang, sebenarnya lebih tepat yang dikatakan Weber bahwa elite itu heterogen di setiap lapisan. Organisasi atau lembaga non-pemerintah bisa juga menciptakan kelompok elit yang mempunyai karisma dan pengaruh, seperti yang ditunjukkan MD dan NU dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan pengaruh kepada pilihan politik massa dan juga penguasa. Menurut David Jarry dan Julia Jarry, asumsi teori elite membagi kaum elite dan rakyat jelata merupakan ciri yang tidak terelakkan dalam masyarakat modern yang kompleks

⁹ Baca Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2010). Hlm. 251-261

¹⁰ Pengertian elite secara meluas sering diartikan sebagai “orang-orang yang menentukan” baik dalam bidang ekonomi atau kekuasaan lainnya. Elite yang jumlahnya sedikit dipahami sebagai kelompok pengambil keputusan yang menentukan dalam masyarakat; atau dalam arti ekstrim bisa jadi keputusan yang diambil para elite itu “mematikan”. Secara sederhana, elite diartikan sebagai anggota masyarakat yang paling berbakat, misalnya elite pendidikan, elite agama, dan elite organisasi. Namun, dalam perspektif sosiologi, elite itu lebih banyak ditujukan kepada elite politik (*political elite*).

dimanapun juga meski akhir-akhir ini konsep itu mulai direvisi seiring stratifikasi sosial yang berubah. Menurut mereka, asumsi yang mengatakan bahwa rakyat secara keseluruhan yang menjalankan pemerintahan adalah sesuatu yang keliru. Hal ini justru menggambarkan bagaimana posisi elite itu ditempatkan pada wilayah yang sungguh bermakna politik, walaupun diakui munculnya elit-elit yang terspesialisasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pembahasan mengenai fragmentasi elite MD ini akan penulis mulai dengan drama kubu Yogyakarta dengan kubu Jakarta menjelang Mukhtar ke-43 di Banda Aceh. Perseteruan itu dimulai oleh pernyataan Dr. Affan Gafar, Ketua Majelis Hikmah PP Muhammadiyah dengan Dien Syamsuddin (DS) sebagai kubu atau poros Jakarta. Drama ini sampai sekarang selalu terjadi di tubuh MD secara pasang naik dan pasang surut.¹¹

Affan Gafar¹² dengan berani mengeluarkan pernyataan yang dianggap partisan terhadap calon tertentu, dalam hal ini, pada waktu itu adalah Amien Rais. Gafar mengkategorikan elite MD menjadi tiga kelompok yaitu; yang mencari makan dari Muhammadiyah, yang mencari legitimasi, dan yang ikhlas. Dengan menyebut Amien Rais dalam kategori ketiga, pernyataan ini oleh beberapa elit MD Jakarta dipersoalkan dan dianggap sebagai tuduhan tidak berdasar.

Sebagai basis argumentasinya adalah bahwa sumber otoritas yang mereka miliki.

“Orang seperti Amien Rais kan punya sumber otoritas bagi dirinya. Sebab dia adalah ilmuwan, dosen, dan doktor ahli ilmu politik Timur Tengah. Jadi, dia punya sumber otoritas yang lainnya. Begitu juga dengan Syafii Maarif. Tetapi dia tidak akan memanfaatkan MD untuk kepentingan diri sendiri. Namun, ada kelompok lain, mereka menggunakan MD sebagai sumber otoritas.

¹¹ Setiap menghadapi Mukhtar, elite Muhammadiyah seperti terbelah. Ada kubu Jakarta dan ada kubu Yogyakarta. Gesekan kedua kubu menghangat lagi menjelang Mukhtar ke-43, awal Juli ini (2000), di Banda Aceh. Pemicunya, polemik Doktor Din Syamsuddin, 38 tahun, mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah yang belakangan masuk pengurus DPP Golkar, dengan Doktor Afan Gaffar dari kubu Yogyakarta.

¹² Dr Afan Gaffar, 54 tahun, membuat geger Muhammadiyah, menjelang Mukhtar awal Juli 2000. Afan, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, yang juga anggota Majelis Hikmah PP Muhammadiyah itu.

Contohnya Watik (maksudnya Dr. Ahmad Watik Pratiknya, kini staf ahli Menteri P dan K). Dia itu kan Sekjen Muhammadiyah, setelah ketemu Menteri Habibie, lantas meninggalkan tugas sebagai Sekjen Muhammadiyah. Dengan demikian kan orang itu menggunakan MD hanya sebagai batu loncatan. Din Syamsudin juga begitu, kan. Din, kalau bukan Ketua Pemuda Muhammadiyah, kan tak ada apa-apanya di Golkar. Jadi, dia menggunakan Muhammadiyah sebagai sumber otoritas.¹³

Pernyataan Afan Gaffar itu mempunyai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu beliau mengatakan bahwa secara teoretis setiap organisasi itu ada kelompok yang oportunis, ada yang mengambil manfaat dari organisasi, dan ada kelompok yang *fully committed*. Itu sudah jelas sekali dasar teori dan metodologinya. Dan saya juga punya informasi lengkap, saya bergaul dengan orang MD, dan saya berkecimpung di Muhammadiyah sejak 1985. Itu semuanya saya tahu atas dasar pengamatan, bukan saya buat-buat.

Atas polemik tersebut, DS menjawab bahwa Gaffar disebut bukan pengamat netral tapi menjadi partisan. MD perlu *high leadership*, bukan *high politic*. Din Syamsuddin menilai dalam konteks MD, Gaffar bukan pengamat netral. Ia menjagokan seseorang. Afan sudah menjadi partisan. Dan bagi DS, ini merupakan dinamika internal sebuah organisasi besar. Apalagi Muktamar berkaitan dengan kelanjutan kepemimpinan organisasi. Tapi orang sering keliru memandang Muhammadiyah. Kepemimpinan pusat di MD tak terlalu sentral karena unit-unit di bawahnya cukup independen. Tanpa Pimpinan Pusat (PP) pun bisa jalan.

Kemudian, PP merupakan kepemimpinan kolektif. Hak ke-13 anggotanya relatif sama. Mereka mandataris Muktamar. Top figur tak bisa membongkar kepengurusan seperti di organisasi lain. Maka, kalau digambarkan seolah-olah ada persaingan merebut kursi ketua itu oleh beberapa kalangan dianggap DS tidak relevan untuk MD. Dan DS

¹³ Beliau memberikan contoh lain, seperti ada tokoh Muhammadiyah seperti Lukman Harun mengusulkan agar anggota pleno PP Muhammadiyah itu digaji. Dia mengusulkan begitu karena sudah lama di situ. Dia tak punya sumber otoritas yang lain kecuali Muhammadiyah. Cendekiawan bukan, ulama juga tidak. Tanpa Muhammadiyah, dia itu tak akan memiliki otoritas seperti yang sekarang.

menolak pendikotomian Yogya-Jakarta, atau atas dasar etnis. Sebab sangkaan itu tak realistis. Ini merupakan warisan Mukhtamar terdahulu.

Menurut DS, dia tidak melihat adanya pertentangan kepentingan, baik yang individual maupun kelompok. Yang ada ialah pertentangan ide. Ada yang menginginkan figur ulama sebagai pemimpin, ada pula yang berpendapat perlunya pemimpin yang mumpuni dalam urusan manajemen karena Muhammadiyah merupakan organisasi amal-usaha.

Ada yang menghendaki MD tampil sebagai pelopor demokratisasi, mewujudkan *civil society*. Jadi, dia harus kritis pada pemerintah. Tapi ada yang berpandangan bahwa MD tidak perlu memasuki arena politik. Cukup mengalokasikan nilai-nilai saja. Terlihat, sejak awal DS berbeda gagasan dengan M. Amien Rais (MAR) sehingga DS, dalam wawancara dengan Gatra, mengungkapkan tentang ketidaksependapatannya juga dengan MAR. Beliau mengatakan:

“Saya melihat Muhammadiyah sebagai gerakan amal yang bisa menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat, sebagaimana masa lampau Muhammadiyah menjadi agen reformasi dan transformasi. Jadi, kemitraan dengan pelbagai pihak sangat dibutuhkan. Ya, saya tak sependapat. Kita tahu bahwa wilayah politik itu sangat riskan dan sulit diprediksi. Oleh karena itu, perlu penyikapan yang cerdas dan cangguh. Tak berarti saya menolak substansi yang dibawa Mas Amien. Tapi kalau itu dilakukan tanpa pertimbangan matang, Muhammadiyah hanya akan menjadi muadzin, bukan imam.”¹⁴

Dalam bagian ini akan dijelaskan bagaimana elite Muhammadiyah terfragmentasi secara politik dan ideologi dengan spektrum yang cukup beragam sebagaimana uraian berikut akan mendeskripsikan secara detail.

A.1. Spektrum Fragmentasi Politik Muhammadiyah

a. Kelompok Fundamentalis Politik

Di bawah Orde Baru, seolah aktivis Muhammadiyah seperti berada di luar pagar politik, meski secara sembunyi-sembunyi berada dalam Golkar, PPP dan PDI (PDI-P). Reformasi menggoda elite Muhammadiyah untuk mendirikan partai politik, seperti PAN (Partai Amanat

¹⁴ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1995/06/30/0000.html>

Nasional). Sementara aktivis NU mendirikan PKB, aktivis lainnya mendirikan beberapa partai, PBB, PKS, PBR. Sejak awal kemerdekaan Muhammadiyah adalah anggota istimewa Masyumi hingga menjelang partai itu bubar. Di saat hampir bersamaan NU menjadi partai setelah memisahkan diri dari Masyumi.

Banyak pengamat melihat bahwa keikutsertaan politik gerakan Islam dalam dunia politik bisa mempersulit pertumbuhan demokrasi. Kaum santri meletakkan keterlibatannya dalam dunia politik sebagai pemenuhan ajaran dan jalan pengabdian pada Tuhan (sabilillah). Perdebatan hubungan Islam dan politik, khususnya keterlibatan gerakan Islam dan kaum santri dalam dunia politik tidak pernah selesai dan terus mewarnai serta diperdebatkan dalam mimbar politik lokal atau nasional.

Menurut Mulkhan (2008), fokus perdebatan demikian bersumber dari dua pandangan dasar. *Pertama*, melihat dunia politik sebagai wilayah profan yang terbuka bagi partisipasi publik tanpa memandang kualitas keberagamaan atau kesantrian. *Kedua*, melihat dunia politik sebagai realisasi kebenaran ajaran agama (Islam) yang absolut dan hanya dikuasai sekelompok elite keagamaan dengan beragam sebutan seperti ulama, *wilayatul faqih* atau *ahlul halli wal aqdi*.¹⁵

Kata ‘fundamentalis’ disini dipinjam dari terminologi yang mengkategorikan kelompok Islam kedalam berbagai jenis mulai konservatif, fundamentalis, radikal, ekstrimis, revivalis dan islamis. Berbagai jenis itu di Muhammadiyah terwakili berdasarkan konteks lokal dan latar belakang pendidikan antara Timur Tengah/Malaysia, dan Barat yang mewarnai hasanah perdebatan sekaligus perebutan pengaruh di Muhammadiyah. Tapi tidak seketat yang digambarkan, sebab ada beberapa nama yang lulusan Barat tapi cara pandanganya lebih condong ke fundamental, seperti Din Syamsuddin, tapi keunikannya, cara berpolitik DS terlihat pragmatis. DS mempercayai bahwa tindakannya akan benar setelah hasilnya terlihat, tapi seringkali gagal di tengah jalan. Pendapat yang mengkategorikan DS sebagai pragmatis atau fundamentalis politik banyak dilakukan oleh anak-anak muda Muhammadiyah baik yang menjadi akademisi atau sedang

¹⁵ Munir Mulkhan, “Syahwat” Politik Kaum Santri, Opini *Kompas*, 6 Desember 2008

studi di luar negeri.¹⁶

Fundamentalis politik atau disebut juga kubu pragmatisme politik. Kelompok ini direpresentasikan Din Syamsuddin, dan beberapa tokoh lain seperti Bambang Sudibyo, Amien Rais, Imam Daruqutni, Muslim Abdurrahman, dan sebagainya. Dalam sejarah perpolitikan dan kepartaian seperti tokoh-tokoh MD di Masyumi, tapi bedanya mereka tidak pragmatis, mereka sangat ideologis tapi mereka yakin bahwa perjuangan Islam harus lewat negara, tidak ada kata tidak seperti Mas Mansur, Kasman Singodimedjo, dan Agus Salim. Dalam Pemilu 2009, kubu ini berjuang mati-matian untuk meyakinkan massa Muhammadiyah terhadap pilihan tertentu dengan cara-cara yang halus dan tidak mendikte, karena warga Muhammadiyah dianggap sudah cerdas membaca ke mana arah politik elite mereka. Namun, hal ini tidak bekerja dengan baik, sehingga harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kekalahan kelompok ini dalam Pemilu 2009 adalah yang kedua kali setelah Pemilu 2004 yang MD melalui Khittah Denpasar menyokong kader terbaiknya, MAR, menjadi salah satu capres.

MD memberikan kontribusi besar lahirnya Partai Amanat Nasional pada awal-awal reformasi. Pilihan PAN menjadi partai inklusif mengakibatkan MD mengalami transformasi besar mengenai pandangan politiknya terutama kalangan yang selama ini hanya mengenal Masyumi-Parmusi, PPP, PBB yang selalu membawa nuansa Islam. Akan tetapi bagi warganya yang selama ini berafiliasi ke Golkar menjadikan ini pilihan rasional artinya berpindah dari Golkar ke PAN bukanlah hal yang sangat berbeda secara ideologi bahkan bisa menjadi tempat untuk melakukan mobilisasi vertikal dalam karier politik.

Kelompok elit MD yang progresif dan liberal banyak memberikan dukungan bagi perlunya PAN membuka diri dengan dunia luar. Lagi pula, kalkulasi politik dalam pemilu (demokrasi prosedural) yang dihitung adalah kuantitas pendukung, bukan tingkat kualitas orangnya sehingga tidak ada perlunya partai warga MD ini menjadi eksklusif. Banyak kele-

¹⁶ Baca Amika Wardana dalam The Jakartapost.com dengan judul tulisan *What can we hope from Muhammadiyah?* Dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/21/what-can-we-hope-muhammadiyah.html>

mahan terdapat pada kelompok ini sehingga beberapa kelompok jamaah MD yang salafi, atau tarbiyah dan puritan lebih condong pada keinginan untuk bergabung dan berafiliasi dengan Partai Keadilan atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kubu politik mendapat angin segar dari sidang Tanwir (sidang tertinggi di bawah Mukhtamar) di Denpasar pada tahun 2002 adalah menghasilkan Khittah Perjuangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang memungkinkan elite MD terjun dalam politik praktis, sebagai bagian dari sumbangsih MD dalam bidang politik. Karena itu, muncul wacana perlunya didirikan amal usaha politik, yang direspon dengan mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB), sementara yang di partai lain juga semakin antusias karena mendapat legitimasi organisasi yang ditumpangi untuk mobilisasi suara dalam pemilu.¹⁷

Pasca reformasi, MD kembali dihadapkan kepada dilema politik. Sebab, di satu sisi Khittah Ujung Pandang menjadi dasar kebijakan organisasi yang harus ditaati, namun pada sisi lain realitas perpolitikan di tanah air menghendakinya supaya terlibat langsung dalam politik praktis. Sewaktu kepemimpinan Ahmad Syafii Maarif (ASM) dalam dua periode (1998-2000 dan 2000-2005), Persyarikatan MD digiring jauh ke dalam politik praktis. Sidang Pleno Diperluas PP Muhammadiyah tanggal 9-10 Februari 2004 di Yogyakarta telah memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Amien Rais sebagai calon presiden (capres). Secara otomatis, keputusan Pleno Diperluas ini telah menggiring Muhammadiyah supaya

¹⁷ “Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. *Pertama*, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (*real politics*, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. *Kedua*, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (*high politics*) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*)”. Sumber: *Berita Resmi Muhammadiyah*, Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar-Bali. Tanwir merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah Mukhtamar dan di atas Musyawarah Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting.

mendukung partai yang mengusung MAR sebagai capres (PAN). Yang cukup ironis, keputusan ini justru muncul setelah beberapa pejabat tinggi partai tersebut memberikan tekanan secara bertubi-tubi kepada jajaran PP Muhammadiyah.

Politisi Muhammadiyah tersebar di beberapa partai politik seperti Masyumi, Parmusi, pada era orde lama, PAN, PPP, Golkar, PDIP, Hanura, PKB, PK/ PKS, dan PMB pasca Orde Baru. Hal ini sebagai implikasi pembebasan warga MD berpolitik praktis yang tidak melanggar aturan organisasi MD. Namun, kenyataannya, perangkapan jabatan tidak bisa dihindarkan. Antara PKS dan MD berpolemik dalam rentang waktu yang cukup lama, sementara presiden PKS dan sekjen merupakan anggota Lembaga Hikmah (Anis Matta) dan Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (Hidayat Nur Wahid). Ada informasi yang mengatakan bahwa Yunahar Ilyas sangat dekat dengan kubu Muhammadiyah-PKS.¹⁸

Kelompok ini bukannya tanpa perlawanan dari kelompok kultural yang memegang ‘mantra’ AD ART Muhammadiyah, Khittah, politik adiluhung, politik kebangsaan, dan berbagai bentuk surat instruksi organisasi dalam menyikapi kiprah politik elitnya yang dianggap kebablasan atau membahayakan organisasi.

Penggambaran mengenai keragaman sikap politik kaum elite MD merupakan barang yang bukan sama sekali baru, misalnya Dr. Afan Gaffar, guru besar Ilmu Politik UGM yang merangkap sebagai anggota Majelis Hikmah PP Muhammadiyah pernah mengeluarkan statemen kontroversial mengenai varian elite MD yang terbagi atas tiga golongan, yaitu: elit yang mencari makan dari Muhammadiyah, elit yang mencari legitimasi, dan yang terakhir adalah elit yang ikhlas.¹⁹ Varian-varian MD lainnya kemudian bermunculan termasuk Muhammadiyah-politisi dan Muhammadiyah-ideologis yang anti terhadap kelompok yang mencoba membawa MD dalam panggung politik praktis. Fenomena ini mempunyai runtutan sejarah

¹⁸ Baca Hajriyanto Thohari dalam makalah *Muhammadiyah dan Politik*, yang menggambarkan persebaran elite Muhammadiyah di partai-parai nasional atau berbasis agama.

¹⁹ Artikel, ‘Muhammadiyah Siap Kongres di Aceh’, dalam wawancara Din Syamsuddin dan Afan Gaffar di Majalah *Gatra* tanggal 1 Juli 1995

yang cukup panjang dalam metamorfosis elite tradisional menjadi elite modern, yang merupakan pertarungan perebutan pengaruh dan upaya melestarikannya.²⁰

b. Kelompok Moderat Pasif

Dari penelusuran di beberapa ensiklopedia, dalam terminologi agama dan politik, moderat diartikan sebagai posisi yang tidak partisan, ekstrim, atau radikal,²¹ atau dalam terminologi yang sederhana, moderat berarti bukan bagian dari kelompok politik tertentu. Hal ini sesuai dengan pandangan organisasi Muhammadiyah, dalam hubungannya dengan politik kekuasaan yang dapat dilihat dalam AD/ART, Khittah Perjuangan, Khittah Ujung Pandang, yang menyatakan mengambil jarak yang sama dengan partai politik dan menyatakan bukan bagian dari partai politik.

Kubu ini sering mengatakan di tempat umum bahwa Muhammadiyah dan dirinya adalah '*ummatan washatan*', berada di tengah-tengah umat dan tidak menghendaki perpecahan atau 'pertengakaran'. Keyakinan mereka adalah bahwa dakwah jauh lebih penting dari urusan dunia politik. Mereka juga berkeyakinan bahwa "politik itu memecah dan dakwah itu merangkul".

Kelompok ini banyak di Muhammadiyah dan sering dikritik DS sebagai kelompok *silent majority* yang tidak memberikan dampak perubahan ke kondisi yang lebih baik. DS yang politiknya sangat kentara dan disebut beberapa kalangan sebagai kubu fundamentalis politik setelah ikut andil besar dalam pendirian Partai Matahari Bangsa pada tahun 2006.

c. Kelompok Moderat Aktif

Muhammadiyah sejak awal ditempatkan sebagai organisasi yang membawa nilai-nilai universal Islam dalam setiap amal usahanya, mencerminkan bahwa kelompok ini dianggap berada dalam kategori Islam moderat meski hal ini sangat *debatable*, sebab karena inklusifisme menjadikan organisasi ini sarang berkembangnya kelompok radikal, fundamentalis

²⁰ Ketika kekuasaan tidak dipahami sebagai *zero sum game* (tidak dapat dibagi), ketika kekuasaan terbagi dalam ragam yang cukup luas (Weberian).

²¹ *Oxford English Dictionary* (<http://dictionary.oed.com>), <http://dictionary.oed.com>

di dalamnya, sehingga orientasi politik elite Muhamamdiyah tidak serta merta moderat tapi bisa terbelah menjadi banyak kelompok, mulai yang sangat setuju terhadap politik sebagai lahan dakwah sampai yang sangat apatis, lantaran merasa tidak ada keuntungan berpolitik.

Satu hal yang membedakannya dengan moderat pasif adalah kelompok ini aktif mencari, mengumpulkan berita dan menganalisanya sebagai bahan untuk menentukan pilihan politik sadarnya dan para pengikutnya. Kelompok ini mungkin banyak direpresentasikan oleh kelompok-kelompok yang berada di tengah, yaitu kubu yang pernah mendukung MAR jadi capres karena alasan situasional, seperti Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif. Termasuk kategori kelompok ini misalnya Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Drs. Muhammad Muqodas, Lc., M.Ag., dan Prof. Zamroni, PhD.

Istilah Muhammadiyah Etik diadopsi dari istilah gerakan Etik yang dikatakan oleh Nakamura (1986) bahwa Muhammadiyah bukan gerakan politik sebagaimana Wiliam Liddle melabeli NU yang pernah menjadi partai politik. Kelompok ini percaya pada gerakan kultural sebagai metode alokasi nilai (politik alokatif ala David Easton) sering dilawankan dengan Muhammadiyah-politisi yang merasa perlu menjadi pemegang kekuasaan secara politik formal. Haedar Nashir sering disebut sebagai kubu kultural Muhammadiyah, gawang ideologi Muhammadiyah yang juga representasi Yogyakarta. Sementara, kubu politisi dilekatkan dengan MAR yang memang turun gunung mendirikan partai lalu diikuti ratusan elit Muhammadiyah di daerah. Sementara DS (eks Golkar), Dahlan Rais (mencalonkan DPD tahun 2004, tapi gagal), dan Hajriyanto Y. Thohari sebagai politisi Golkar yang menjabat di struktur Muhammadiyah. Kedua kubu ini menjadikan dinamika politik elit Muhammadiyah sangat terlihat. Amien Rais yang masih mengendalikan PAN juga elit PP Muhammadiyah sebagai penasehat PP Muhammadiyah, sementara DS yang menyatakan kampanye politik alokatif juga sering menghimpitkan MD dalam posisi politik praktis. Kelompok Muhammadiyah Moderat ini juga bisa dibilang ideologis ini ada di beberapa majelis seperti tarjih, tabligh dan da'wah khusus yang seringkali berteriak pembersihan Muhammadiyah dari kubu liberal dan politisi serta kelompok-kelompok yang berteriak pluralisme.²²

Dalam kelompok ini juga dihuni kaum akademisi Muhammadiyah seperti yang terlihat di 13 anggota PP Muhammadiyah seperti Zamroni, Ph.D, (UNY), Fasichul Lisan (Unair), Muhammad Muqodas (UIN Sunan Kalijaga), Dahlan Rais (UNS), dan lain-lain, Sedangkan kelompok intelektual juga terbagi menjadi yang politis dan non politis atau kritis yang kedua ini banyak tokoh elit intelektual Muda Muhammadiyah baik yang bergabung di JIMM atau di NGO. Kelompok ini tidak segan-segan melakukan kritik terhadap kebijakan MD melalui wacana-wacana media atau kelompok-kelompok diskusi seperti Majelis Reboan di Yogyakarta yang dihimpun dari berbagai kelompok aktivis muda MD. Salah satu jaringan kelompok ini sudah melahirkan buku yang diberi judul Muhammadiyah Progresif, Manifesto Pemikiran Anak Muda Muhammadiyah.²³

d. Kelompok Khitois

Khittois merujuk pada salah satu bentuk keputusan organisasi Muhammadiyah yang tertinggi, baik di Tanwir atau Mukhtamar, yang biasa menyangkut hal-hal mengenai hajat hidup warga Muhammadiyah secara umum atau warga dalam arti luas, termasuk di dalamnya adalah sikap politik organisasi/Persyaraikatan. Banyak warga yang mentaati khittah dan banyak pula yang tidak tahu menahu, dan ironisnya elite yang tahu proses pembuatan keputusan malah sering berperilaku yang berlawanan terhadap khittah perjuangan organisasi yang telah disepakati. Kelompok khittois mendeskripsikan posisi kelompok yang *sami'na waatho'na* terhadap keputusan organisasi dan secara *kaffah* akan melaksanakannya.

Kelompok ini cenderung fleksibel tetapi punya basis argumen, perspektif dan prinsip. Apa kata organisasi dia akan taat "*sami'na wa atho'na*" (kami dengar, kami taat). Artinya, mereka selalu menggunakan khittah sebagai tolok ukur perjuangan dalam ranah politik. Pengikut kubu ini jumlahnya cukup banyak karena kata-kata Muhammadiyah tidak berpolitik praktis itu cukup kuat tertanam di Muhammadiyah, apalagi dimanfaatkan

²² Majalah *Tabligh* edisi Februari, 2010.

²³ Baca buku *Muhammadiyah Progressif, Manifesto Pemikiran Kaum Muda*, JIM-LESFI, Jakarta, 2007.

oleh politisi yang aktif di partai-partai besar, menengah, dan sebagainya. Dalam praktis tindakan politik, mereka cenderung menjaga jarak dan tidak mau terjebak dalam “lumpur” politik yang dianggapnya penuh intrik. Kelompok yang menonjol adalah termasuk Haedar Nashir, Rosyad Sholeh dan beberapa elit Muhammadiyah di ranah lokal. Kelompok ini juga mengklaim bahwa berdakwah lewat Muhammadiyah juga tidak kalah mulia dengan berjuang di tempat lain seperti arena politik dan bahkan melalui organisasi Islam ini jauh lebih bisa membuktikan teologi keikhlasan atau yang kerap disebut teologi al-Maun, sementara di ranah politik banyak hal selalu dikonversikan dengan nilai anggaran mata uang.

Dengan khittah Muhammadiyah tersebut, organisasi Islam dengan jumlah massa terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama ini mengeluarkan sejumlah keputusan penting yang berbau politik dalam sidang pleno diperluas yang diselenggarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Kota Jogja, 9-10 Februari 2004. Salah satu keputusan pentingnya, organisasi itu mendukung sepenuhnya langkah Prof. Dr. H. M. Amien Rais selaku kader terbaik dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah serta tokoh reformasi untuk memperjuangkan kelanjutan reformasi dan penyelamatan bangsa dalam pemilihan presiden pada Pemilu 2004.

Sejak dulu elit organisasi ini tidak pernah satu suara menyangkut pandangan politik terutama apabila menyangkut politik kekuasaan atau dalam hiruk pikuk pemilihan umum di Indonesia. Selalu ada perdebatan yang sengit dalam tubuh organisasi ini, misalnya ketika mencalonkan M. Amien Rais (MAR). Lalu muncul perdebatan: mengapa harus MAR, bukan Syafi'i atau yang lain? Menurut Haedar Nashir, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, dipilihnya MAR, karena tokoh itu menempati posisi yang strategis. Selain sudah mempunyai basis dukungan yang jelas dari PAN, MAR dinilai satu dari sedikit tokoh nasional yang bersih dari KKN, dan tentu karena dia tokoh Muhammadiyah.

MAR adalah Ketua Partai Amanat Nasional (PAN), salah satu partai yang lahir pasca reformasi yang menandai transformasi besar politik di Muhammadiyah (anggota, elitnya). Partai ini dianggap “anak angkat” Muhammadiyah, dan menurut Syafi'i Maarif, Ketua PP Muhammadiyah, 70% aktivisnya berasal dari Muhammadiyah. Partai yang memperoleh

suara 7,3 persen pada Pemilu 1999 ini secara resmi mencalonkan MAR sebagai presiden. Berbagai kampanye telah dilakukan MAR, termasuk kampanye ke kantong-kantong masyarakat non-muslim. Ia akan bersaing memperebutkan suara mayoritas dalam Pemilu 2004 untuk mengalahkan para calon lain dari partai-partai besar pada Pemilu 1999, antara lain Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mencalonkan Megawati --kini Presiden RI, dan Partai Persatuan Pembangunan. Di Indonesia, jumlah pemilih diperkirakan 142 juta orang.²⁴

Keputusan Muhammadiyah itu tidak secara eksplisit mendukung MAR dalam pencalonannya sebagai presiden. Toh, suara protes sudah terdengar kencang dari sejumlah orang. Tak hanya dari anggota Muhammadiyah yang aktif di partai politik non-PAN, juga dari cendekiawan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. Prof. Dr. Nurcholish Madjid, cendekiawan terkemuka Indonesia, misalnya -kurang lebih- memandang bahwa keputusan itu bisa membuat tokoh-tokoh di luar Partai Amanat Nasional merasa tak memperoleh payung spiritualitas lagi di Muhammadiyah.²⁵

Ada perdebatan, memang, bahwa KHA Dahlan melakukan aksi dan strategi politik dalam pendirian Muhammadiyah pada awal tahun 1912 tersebut. Hal ini penting untuk melihat bagaimana latar belakang politik Muhammadiyah. Sebagai kelompok di zaman pergolakan politik tentu strategi politik menjadi satu-satunya pilihan untuk tetap *survive* dan berkembang. Ini jalan politik yang menjadi pilihan.²⁶

²⁴ <http://www.infoanda.com/linksfollow.php?lh=VIUPV1NRCgVa>

²⁵ Pengamat politik lain, Saiful Mujani dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, berpendapat bahwa keputusan Muhammadiyah itu justru “mengurung” Amien Rais dalam memperoleh dukungan dari masyarakat luas di luar Muhammadiyah, padahal Amien adalah aset bangsa.

²⁶ Kelahiran Parmusi merupakan buah dari Khittah Muhammadiyah di Ponorogo (1969). Dalam rumusan Khittah tahun 1969 ini disebutkan bahwa dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dilakukan melalui dua saluran: politik kenegaraan dan kemasyarakatan. Muhammadiyah sendiri memposisikan diri sebagai gerakan Islam amar maruf nahi munkar dalam bidang kemasyarakatan. Untuk saluran politik kekuasaan, Muhammadiyah membentuk partai politik di luar organisasi. Hubungan antara Muhammadiyah dengan partai yang telah dilahirkan ini hanya sebatas ideologis, tidak secara organisatoris. Membaca latarbelakang Khittah Ponorogo tentu tidak lahir secara kebetulan. Dalam hal ini, menurut Haedar Nashir (2007), lahirnya khittah tahun 1969 merupakan sebuah terobosan dalam

Mungkin karena politik praktis terlalu banyak merugikan gerakan MD (kemasyarakatan), maka lewat Khittah Ujung Pandang dirumuskan supaya persyarikatan ini kembali ke barak. Lewat Khittah 1971 ini, agar MD menjaga jarak dengan partai manapun dan juga tidak memiliki afiliasi politik dengan partai manapun.

Sekalipun demikian, Muhammadiyah tetap tidak bisa menutup mata terhadap realitas perpolitikan di tanah air. Sewaktu Amien Rais menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah (1994-1998), Muhammadiyah menjadi “kekuatan politik” yang amat diperhitungkan dalam pentas perpolitikan di tanah air. Bahkan persyarikatan ini dianggap memiliki kontribusi besar terhadap bergulirnya proses reformasi (1998).

Perlu dicatat di sini, sekalipun Amien Rais tidak membawa Muhammadiyah ke dalam pentas perpolitikan di tanah air waktu itu, tetapi statusnya sebagai ketua umum bisa dianggap sebagai representasi politik Muhammadiyah bagi kalangan awam Muhammadiyah. Hal ini belum bisa ditolak sampai hari dan salah satu fakta terkuat adalah jebloknya suara PMB yang mengatakan bahwa PAN masih eksis di lingkaran MD.

e. Kelompok Apolitik

Apolitik mempunyai makna sangat dekat dengan apatisme politik yang menggambarkan situasi dimana seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mempunyai ketertarikan pada gegap gempita politik yang sebenarnya telah menyihir banyak orang, elit untuk mengambil bagian dari proses politik. Dalam kamus disebutkan bahwa *apathy* diartikan sebagai keadaan *absence of sympathy or interest*.²⁷ Azra (2010) menduga bahwa apatisme politik menyeruak di Indonesia bisa disebabkan oleh kelelahan politik (*political fatigue*).²⁸ Hal ini masuk akal manakal kelompok Muham-

rangka merehabilitasi Partai Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia). Khittah ini menjadi legitimasi bagi Muhammadiyah untuk mendirikan Parmusi. Akan tetapi, sayang sekali partai ini gagal dalam perjalanan sejarahnya sehingga Khittah Ponorogo kemudian “*dinasakb*” -meminjam istilah Haedar Nashir- lewat Khittah Ujung Pandang (1971).

²⁷ Lihat AS Homby dalam *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Tanpa tahun.

²⁸ Azyumardi Azra, Apatisme Politik, opini *Kompas*, 3 Agustus 2010.

madiyah lelah setelah kegagalan mengusung kader terbaiknya MAR dalam pilpres 2004. Apatisme tersebut, menurut banyak pengamat politik, berdampak serius terhadap kualitas demokrasi karena menghambat konsolidasi demokrasi kelompok *civil society*.

Kelompok ini ada dua macam yang pertama kelompok yang berteriak Muhammadiyah apolitis dan kelompok Muhammadiyah yang benar-benar apolitis. Mereka tidak mau menuhankan politik dan fokus pada urusan ibadah dan fikih. Biasanya, kelompok ini banyak terjadi di desa-desa Muhammadiyah atau tokoh MD yang merupakan ulama dengan buku-buku agama Islam sebagai referensi, atau disebut pula kyai tradisional atau kyai kampung. Jamaah yang mengikutinya juga mengambang dalam pilihan politik sadarnya, akhirnya memutuskan pilihannya pada hari H pencoblosan. Jumlah kelompok ini banyak dan banyak partai atau kandidat diuntungkan dengan massa mengambangnya MD. Di tingkat PP Muhammadiyah hampir sulit ditemukan yang benar-benar apolitik tapi penulis yakin banyak PP Muhammadiyah yang secara pribadi mengatakan “politik itu kotor”. Sikap apolitis ini mempunyai kelebihan dan kekurangan tapi semua itu pilihan. Menyuarakan apatisme mungkin menjadi persoalan tapi tidak bergabung ke partai tertentu adalah jalan mendekatkan diri pada pintu akses ke pemerintah atau pemberi donor.

Kelompok apolitis sudah puas dengan aktifitas sosial Muhammadiyah sebagai gerakan etis sebagaimana yang digambarkan oleh Nakamura (1983) atau yang ditulis oleh Profesor Kim Hyung-Ju, peneliti tentang MD yang dipublikasikan dengan judul *Reformist Muslims in Yogyakarta Village: the Islamic transformation of contemporary socio-religious life*. Buku yang diterbitkan oleh ANU Press, Canberra Press ini tentang pengembangan ekonomi-sosial di Kauman Yogyakarta yang mendeskripsikan kehidupan penganut pembaharuan Islam, proses bagaimana sekumpulan orang mampu mempengaruhi pandangan religius mereka dan dari keikutsertaan mereka di dalam aktivitas-aktivitas religius dan kegiatan sosial.²⁹

²⁹ Kim, Hyung-Jun. 2007. *Reformist Muslims in Yogyakarta Village: the Islamic transformation of contemporary socio-religious life*. Canberra: ANU E Press.

Sebagai penutup, MD sebenarnya tidak banyak berbeda dengan berbagai perpecahan (fragmentasi), faksionalisme dalam kehidupan organisasi lainnya, partai politik sehingga meminjam konsep faksionalisme menurut penulis ada baiknya untuk memperkaya pemahaman barangkali di MD justru terjadi klik, tendensi, dan faksi. Di Indonesia, demokratisasi membawa intensitas konflik yang tidak hanya berasal dari luar partai politik tetapi gejolak pun terjadi dalam partai politik menurut pendapat Katz & Mair³⁰ bahwa pengorganisasian wajah partai politik tidaklah merupakan satu kesatuan tetapi sebaliknya partai politik merupakan organisasi yang di dalamnya terdapat fragmentasi kepentingan yang berbeda-beda dan hal ini terjadi pada sistem politik modern. Konflik internal partai yang banyak menyebabkan perpindahan elit partai atau terfragmentasinya partai politik karena adanya faktor kepentingan politik, ideologi dan alasan pragmatisme hal ini biasanya disebut dengan Faksionalisme.

Hal ini kemudian memerlukan kajian di luar fragmentasi politik tentu yang menarik juga adalah fragmentasi ideologi, cara pandang elite Muhammadiyah yang kemudian direfleksikan para pengikutnya di akar rumput.

A.2. Spektrum Fragmentasi Internal/Ideologi Muhammadiyah

Jika Dr. Muhadjir, Rektor Unmuh Malang menyatakan ada tiga ordo atau elemen dalam Muhammadiyah yang terdiri dari agamawan (ulama), intelektual (cendekiawan), dan pelayan, yang ketiganya harus saling bersinergis agar tercipta Muhammadiyah yang kuat, solid, dan bermanfaat maka Din Syamsudin menambah satu ordo lagi yang juga sangat berperan dalam Muhammadiyah.³¹ Syamsuddin (2008) menambahkan satu ordo yang tidak termasuk dalam jenis pertama, kedua, maupun ketiga, secara mutlak, tetapi, masuk di antara ketiga-tiganya secara parsial. Ordo ini sebenarnya sudah menjadi khas Muhammadiyah, yaitu ordo penggembira. Di Muhammadiyah,

³⁰ Katz & Mair, dalam Thomas Poguntke, 2002, *Partie without Firm Social Roots? Party Organizational Linkage*. 1995, hal. 594-601

³¹ Din Syamsuddin, Muhammadiyah dan Dialog Pemikiran, *Suara Muhammadiyah* yang dimuat juga di Muhammadiyah.or.id pada 05 April 2008

faksi yang bisa dibilang terbesar adalah faksi penggembira ini. Hanya saja akhir-akhir ini kalau diamati, penggembira yang bahasa arabnya *basyîran-mubasyysir*, mulai agak bergeser menjadi *nadzîran*, *munadzîr*, yang kadangkala sering tidak menyampaikan *tabssîr*, tapi sebaliknya.

Setelah peranan Muhammadiyah dalam berbagai dimensi kehidupan dijelaskan, tentu faktor kepemimpinan sangat perlu diketengahkan. Dimensi kepemimpinan dan figur elite dalam organisasi MD sepanjang sejarah adalah sesuatu yang menarik mengingat itu tidak hanya dari kalangan MD saja, tetapi juga para pengamat di luar MD. Kehadiran elite dari waktu ke waktu mengalami pergeseran, baik dari segi fungsi, peran, dan latar belakang telah mewarnai perjalanan gerakan ini. Dimensi elite dalam kajian ini sangat perlu dipahami untuk memudahkan pengenalan bentuk artikulasi masing-masing elite.

Konfigurasi elite yang memiliki latar belakang, baik dari segi pendidikan, sosial, politik, maupun ekonomi, telah menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang “heterogen” sekaligus membawa implikasi tersendiri bagi upaya penguatan basis gerakan agar tetap menjadi gerakan amal-ilmiah dengan gaya, pola dan kebijakan dari tiap pemimpin yang berbeda-beda. Dalam dimensi kepemimpinan elite MD, setidaknya ada konsep menarik yang penting diketengahkan, yaitu istilah “sepakat untuk tidak sepakat”

Pengelompokan elite dalam kajian berikut ini bukanlah semata-mata ingin memetakan kelompok elite yang beragam profesidan keahlian serta mengabaikan kohesi diantaranya krena perpaduan anantara beragam profesi dan keahlian serta latar belakang itulah yang membawa khazanah tersendiri bagi perkembangan MD. Untuk itu, berikut ini akan diuraikan varian elite gerakan ini kedalam dua bentuk umum, yakni ulama dan cendekiawan serta birokrat dan wiraswasta. Sekali lagi pemisahan ini sebetulnya tidaklah begitu tepat untuk dilakukan, tetapi ada baiknya dijelaskan untuk membantu mengenal lebih jauh sekaligus mengetahui kerja masing-masing elite dalam MD.³²

³² Syarifudin Jurdi, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik, Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2004.

Jurdi (2004) melakukan kategorisasi yang ia sebut sebagai klasifikasi elite kepemimpinan di MD yang terbagi menjadi 3 jenis. *Pertama*, figur ulama dan cendekiawan. Konsep ulama lazim digunakan dalam kehidupan keagamaan bangsa kita. Ulama dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai kedalaman *ma'rifatullah* dan ilmu syari'ah dalam arti yang luas ataupun ilmu kauniyah. Artinya ulama merupakan orang-orang yang sangat dalam pengetahuannya tentang ayat-ayat yang tersurat maupun yang tersirat (ayat kauliyah dan kauniyah). Ulama dapat dikenal melalui kriteria yang dimiliki seperti: kedalaman marifat kepada Allah swt., kedalaman ilmu agama, tingkat ketakwaan yang tinggi, amal sholehnya, dan berakhlak mulia.³³

Peranan ulama dalam dinamika umat dapat dipahami dan didekati dari tiga bentuk kriteria ulama berikut. *Pertama*, ulama adalah pewaris nabi seperti tersebut dalam hadis "*wa annal ulama anhum warastatul anbiya*". Untuk itu, perlu adanya ulama sebagai media transformasi nilai-nilai kesucian karena mereka tidak memiliki ambisi politik, jabatan dan lain-lain. Mereka ikhlas dalam beramal. *Kedua*, ulama adalah sumber teladan (*uswatun hasanah*) bagi setiap masyarakat. *Ketiga*, ulama adalah pemberi informasi yang jelas dapat membawa umat pada kebenaran dan kesejahteraan.

Kalau demikian, penting adanya figur ulama dalam masyarakat dan dalam kelembagaan organisasi. Sebagai organisasi keagamaan, Muhammadiyah mestinya berperan dalam lahirnya ulama-ulama besar bagi peradaban Islam masa depan. Mengabaikan dimensi keulamaan sama dengan membiarkan organisasi ini kehilangan penyangga moral. Kebesaran MD hari ini pun adalah berkat jasa para ulama yang telah membawanya menjadi organisasi yang mengalami kemajuan.³⁴

Sosok ulama dalam Muhammadiyah menjadi langka sejak dekade 1990-an, terutama periode kepemimpinan pasca-Orde Baru. Hal itu melanda MD mulai dari pusat hingga ranting, yang terlihat secara dominan

³³ *Ibid*, Syarifudin Jurdi.

³⁴ Ulama yang dimaksud tidak semata-mata bisa membaca kitab-kitab gundul, kitab kuning, tetapi juga mampu membaca peta dan realitas sosial politik umat yang aktual berkembang di masyarakat. Artinya, ulama yang dimaksud bukannya tipe ulama yang konvensional yang sebagian waktunya dihabiskan di pesantren, masjid, atau tempat-tempat suci dan sama sekali tidak berbaur dengan kehidupan masyarakat.

adalah cendekiawan dan akademisi kampus. Periode ini dianggap pula sebagai fase baru kepemimpinan MD dengan tidak adanya figur ulama yang diorbitkan sebagai pemimpin, atau memang MD untuk sementara mengalami kelangkaan ulama sebagaimana yang lazim di masyarakat kita. Hadirnya cendekiawan menjadi elite pemimpin Muhammadiyah-seperti Amien Rais, Syafii Maarif, Din Syamsuddin, Amien Abdullah, Ismail Sunny, dan Malik Fadjar diikuti dengan kenyataan yang sama di daerah, seperti di daerah Bima. Hal ini menunjukkan bahwa menguatnya cendekiawan dan melemahnya figur ulama, membawa pengaruh tersendiri bagi Muhammadiyah.

Muktamar 1995 di Banda Aceh merupakan momentum paling tepat bagi proses regenerasi dalam MD, yakni pengalihan kekuasaan yang selama ini dihegemoni oleh ulama kharismatik kepada para intelektual-cendekiawan. Selain lincah dan proaktif terhadap realitas kehidupan, mereka juga telah memperoleh pendidikan formal sampai jenjang tertinggi. Hingga kini, mulai Muktamar ke-44 di Jakarta, kader-kader terbaik yang muncul lewat muktamar tersebut masih dipercaya untuk menggerakkan MD. Tradisi keulamaan di MD kini sangat minimal, kalau tidak disebut sudah hilang. Walaupun masalah ulama sempat menjadi perdebatan menarik pada dekade 80-an hingga 1990-an, kehadiran mereka dalam struktur elite MD sangat minimal.

Kehadiran intelektual-cendekiawan yang *concern* terhadap perubahan sosial politik akan memberikan bobot tersendiri bagi MD. Penulis menganggap kehadiran kelompok cendekiawan dalam MD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap aktualisasi gerakan organisasi. Konsep *high politics* dan *tauhid sosial* sangat relevan dalam mengaktualkan ajaran Islam, apalagi kalau dipeerhadapkan dengan dengan kekuasaan yang menyimpang dari nilai-nilai moral keagamaan. Elite MD dalam struktur pimpinan harian secara keseluruhan dapat disebut intelektual-akademisi karena seluruhnya telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi. Aktualisasi peran MD di masa depan bukan lagi pada perjuangan menyelesaikan problem lama yang justru sudah menjadi realitas dan relevansinya pun berkurang, melainkan pada kemampuan mencari dan menemukan

problematika baru yang relevan dan berguna bagi pengembangan masyarakat lebih lanjut³⁵.

Kedua, figur birokrat dan wiraswasta. Laporan penelitian Haedar Nasir (1996) di Pekajangan menegaskan bahwa konfigurasi elite MD beragam, mulai dari ulama, birokrat, hingga wiraswasta. Pada 1970-an MD telah mengalami fase yang berbeda dengan adanya peremajaan politik. Para birokrat dan politisi Golkar telah mask menjadi tokoh atau pemimpin MD. Barangkali fenomena yang dilaporkan Nashir itu tidak hanya berlaku di Pekajangan, tetapi hampir merata dan melanda MD di seluruh Indonesia selama rezim Orba. Fenomena yang sama bisa diketemukan dalam kepemimpinan MD di daerah-daerah seluruh Indonesia. Penetrasi kekuatan politik begitu kuat dalam MD. Hal itu tak bisa dilepaskan oleh sistem politik yang dikembangkan oleh negara.³⁶

Fenomena politik elite MD pada masa Orde Lama dapat disebut sebagai fase banyaknya elite MD yang terlibat dalam politik praktis, sementara pada masa Orde Baru atau mulai dekade '70-an, MD telah banyak diisi oleh para birokrat, baik yang berprofesi sebagai dosen, guru maupun pegawai negeri. Umumnya elite tersebut memainkan fungsi ganda, selain sebagai aktivis sosial keagamaan yang berfungsi melakukan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, mereka berperan juga sebagai aparat pemerintahan yang berfungsi memberikan pelayanan kepada khalayak umum.

Elite swasta, seperti juga jenis elite lainnya, memperoleh kesempatan yang sama untuk memimpin MD. Penyebaran MD sampai ke pelosok Nusantara pun merupakan berkat kerja keras para pedagang atau wira-

³⁵ Ari Anshari, "*Api Pembaruan dalam Muhammadiyah*", dalam M. Rusli Karim (Ed.) *Op. cit.*, hlm.46.

³⁶ Rentang sejarah pergerakan Muhammadiyah memang tidak bisa dipisahkan dari sejarah keterlibatan para pimpinannya dalam birokrasi pemerintahan. K.H. Ahmad Dahlan sendiri adalah priyayi yang sehari-hari berperan sebagai seorang khatib di keraton Yogyakarta walaupun beliau masih bekerja dan berdagang batik. Keterlibatan birokrasi pada periode awal hingga dekade '30-an memang tidak sedominan sebagaimana yang terjadi pada zaman sesudahnya terutama pada masa pemerintahan Orba yang begitu lama dan represif, bahkan intervensi kekuasaan banyak melanda elite organisasi massa keagamaan seperti Muhammadiyah. Langkah tersebut dilakukan oleh rezim agar dapat mendukung kebijakan pemerintah. Dialektika perjalanan Muhammadiyah justru semakin sulit untuk dilepaskan dari kehadiran figur birokrat, terutama paasca Indonesia merdeka.

swasta, MD memiliki basis massa yang kuat di daerah perkotaan dengan anggota yang mandiri secara ekonomi. Kyai Dahlan sendiri adalah seorang pedagang batik selain menjual barang dagangan, beliau juga menyiarkan Islam ke daerah-daerah.

Berdasarkan kategori Abied Al-Jabiri, MD pada dasarnya masih berpegang pada epistemologi *bayani*. Hal ini dibuktikan dengan sentralnya peranan Majelis Tarjih. Di masa Ahmad Syafi'i Ma'arif, nama Majelis Tarjih telah ditambah dengan "Pemikiran Islam" yang dipimpin oleh Dr. M. Amin Abdullah yang berpandangan liberal dan mengembangkan pendekatan hermeneutika terhadap Epistemologi Islam al-Jabiri. Tapi pengembangan Islam ini tidak jalan. Sebuah naskahnya mengenai Tafsir al-Qur'an tentang hubungan antarumat beragama yang memakai pendekatan hermeneutika, dicegah untuk terbit, karena ketakutan akan menimbulkan kontroversi di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa di lingkungan MD tidak ada kemerdekaan berfikir.

Pasca Muktamar Muhammadiyah 2005 di Malang, banyak pengamat meyakini adanya perubahan signifikan dalam tubuh Muhammadiyah. Kemenangan Din Syamsuddin, oleh banyak pihak dianggap sebagai salah satu tonggak paling mendasar dalam perubahan tersebut. Karena peristiwa itu menandai dominasi kaum konservatif dalam organisasi Islam modern terbesar di Indonesia tersebut.³⁷ Pada saat yang bersamaan, dominasi kelompok konservatif itu dengan sendirinya meminggirkan peran kelompok progresif yang selama ini lebih dicurigai sebagai agen penyebar virus liberalisme dan dengan demikian mencemari kemurnian akidah MD.

Di bawah pimpinan DS—yang ikut bertanggungjawab dalam fatwa pengharaman liberalisme, pluralisme dan sekularisme MUI—potensi puritanisme ini berkembang menjadi fundamentalisme. Hal ini ditandai dengan pernyataan DS di salah satu koran lokal di Jawa Tengah, bahwa dirinya adalah pelindung gerakan Islam radikal.³⁸ Walau demikian, pim-

³⁷ Abd.Rahim Ghazali dkk, *Muhammadiyah Progressif, Manifesto Pemikiran Kaum Muda*, Jakarta: Lesfi-JIMM, 2007. hlm. v.

³⁸ M. Dawam Rahardjo, *Mengkaji Ulang Muhammadiyah sebagai Organisasi Islam Berorientasi Pembaruan*, 2010

pinan MD tidak berani berterus terang dalam menantang Liberalisme, Pluralisme dan Sekularisme. Malahan Ketuanya berkali-kali terlibat dalam diskusi dan bahkan menyelenggarakan seminar internasional mengenai Pluralisme.

Sikap tidak tegas inilah yang merupakan sumber munculnya gerakan Islam radikal model salafi. Dalam kecenderungan ini mulailah terjadi penyusupan unsur-unsur gerakan Islam radikal ini ke dalam tubuh Muhammadiyah yang keropos. Bahkan Zuly Qodir, seorang tokoh muda berpandangan liberal di lingkungan MD, mensinyalir adanya gerakan pengambilan aset-aset MD oleh Partai Keadilan Sejahtara (PKS) yang ingin meraih dukungan politis dari umat Muhammadiyah.

Pengamat lain menilai, bahwa menangnya Din Syamsuddin dalam Muktamar yang cukup diwarnai aksi politik dalam Muhammadiyah ini menjadi kabar buruk bagi kubu non politisi sebab *track record* DS yang cukup politik dan akan dibawa kembali MD ke arena politik. Tuduhan ini sedikit banyak telah terbukti pada seputar Pemilu 2009.

Menyikapi banyak ragam orang Muhammadiyah, menurut Din, kegiatan seperti dialog pemikiran perlu untuk dilakukan karena para pemikir MD itu memang sudah beragam. Baik karena pengaruh almamater maupun pengaruh tempat tinggal, daerah, dan lokalitas. Paling tidak, ada dua madzhab besar yang kemudian memunculkan sejumlah labelisasi yang diberikan. Sebelah sana liberal, sebelah sini radikal; konservatif. Istilah-istilah itu setidaknya muncul saat dan setelah Muktamar Muhammadiyah di Malang.³⁹

1. Muhammadiyah Puritan/Konservatif

Mazhab Islam murni (puritan) dalam MD menganggap mazhab kultural tidak *ar-ruju' ila quran* dan As-Sunah sehingga amalannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan, yang lebih memprihatinkan beberapa bagian dari Islam murni menjadikan Himpunan Putusan Tarjih berada di atas segala-galanya. HPT mutlak tidak bisa dikritik, sekalipun tidak mengerti proses perdebatan yang terjadi dalam Manhaj Tarjih.

³⁹ *Op cit.*, Din Syamsuddin.

Kaum konservatif atau disebut juga fundamentalis lebih mencerminkan dirinya sebagai mazhab Islam murni, sementara mazhab progresif-liberal berada pada Islam kultural atau non-Islam murni. Islam murni memang terkesan lebih *rigid* dengan ibadah karena didominasi dengan paham fikih, sementara mazhab progresif-liberal tidak rigid dengan fikih. Di situlah acapkali mazhab kaum kultural disebut heretik, bidah, bahkan “kafir”.

Secara teologis, MD kadang-kadang menyebut diri sebagai gerakan yang secara teologis berada pada kategori salafiyah atau salafisme. Hal itu juga yang menjadi landasan Ahmad Dahlan dalam pendirian Muhammadiyah, salah satu referensinya adalah Tafsir al-Manar dari Rasyid Ridla, tokoh salafiyah abad 20. Itupun juga ada referensi lain, dan pada bidang-bidang tertentu bersatu dengan gerakan Salafiyah. Tapi ketika muncul gerakan salafi sekarang ini, yaitu gerakan yang cara berpakaianya harus memakai jubah, di atas matanya memakai celak, celananya di atas tumit, tata cara shalatnya berbeda, dan jumlah variannya juga banyak. Apakah Muhammadiyah bagian dari salafi yang seperti ini?

Ada lagi titik-titik kategoris salafi lain yang juga tampil di Indonesia, sehingga kita sadar bahwa varian Islam Indonesia itu sangat banyak. Ketika saya ditanya “Apa Muhammadiyah itu salafi?”, saya jawab: “Ya, Muhammadiyah salafi juga”. Ada lembaga luar negeri yang tidak mau bekerjasama dengan kita, kecuali di dalam berita acara ditulis bahwa Muhammadiyah adalah gerakan yang berpegang pada aqidah salafi, yaitu *salafus-salih*. Saya juga bilang “Ya”, tapi mungkin kita sadari salafinya, yaitu salafi tengahan.⁴⁰

⁴⁰ Salah satu ajaran utama itu adalah *ar-ruju’ ila Qur’an was-Sunnah*. Tetapi kegagalan kaum salafiyah, termasuk yang membawa bendera *ar-ruju’ ila Qur’an was-Sunnah* adalah kegagalan mereka dalam merumuskan metodologi kembali pada al-Qur’an dan Sunnah, jadi kuncinya adalah *kaifa narja’*, yakni pada kerangka *kaifiyah*. Ini saya lihat, termasuk Muhammadiyah juga belum berhasil. Mungkin kita tidak pernah berfikir untuk merumuskan kerangka metodologi dan kerangka epistemologis untuk kembali pada al-Qur’an dan Sunnah. Dalam putusan tarjih ada tambahan; *was-Sunnah al-Maqbulah*. Jadi Muhammadiyah ini bukan *inkarus-Sunnah* dan bukan *inkarul-Qu’ran*, tetapi merujuk pada al-Qur’an, dan as-Sunnah Maqbulah. Cuma di situ belum selesai. Sekarang Majelis Tarjih kita mempunyai tugas besar untuk merumuskan *kaifa narja’ ila-Qur’an was-Sunnah*, tapi pada tingkat metodologi dan epistemologi.

Kelompok salafi menginginkan gerakan Muhammadiyah yang murni yaitu bagaimana pelaksanaan syariat Islam dengan sebenar-benarnya menjadi referensi semua warga Muhammadiyah sehingga liberalisasi dalam Muhammadiyah dapat diberantas. Kelompok ini banyak bercokol di daerah dan sebagian ada di level pusat. Kelompok ini sering kali berhadapan dengan kelompok muda dalam kritik dan wacana. Kelompok ini yang banyak bersingungan membangun komunikasi dengan kelompok lainnya seperti HTI, PKS, MMI, DDI, dan Jamaah Tabligh.

Kontestasi intelektual antara Muhammadiyah liberal dan anti-liberal tak dapat dipisahkan dari konteks sejarah kelahiran Majelis Tarjih. Lembaga ini terbentuk pertama kali tahun 1928 atas rekomendasi KH Mas Mansur pada muktamar di Pekalongan tahun 1927. Arah awal ideologisasi Muhammadiyah ke arah anti-liberal mulai bersemi melalui Majelis Tarjih, yang kemudian menjelma menjadi “otoritas keagamaan” yang intervensi terhadap kebebasan asasi manusia.⁴¹ Pergeseran MD ke arah dinamisasi dan liberalisasi pemikiran Islam terjadi pada periode Amien Rais melalui Muktamar Aceh 1995. Namun, Amin Abdullah-lah yang sebenarnya menjadi ideolog liberalisasi pemikiran Islam. Ia ditetapkan sebagai Ketua Majelis Tarjih, yang sejak saat itu lembaga ini diperlebar sayapnya menjadi “Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam”. Ideologi Muhammadiyah liberal mulai berkibar’

2. Muhammadiyah Liberal-Progresif

Kemunculan kelompok yang dicap liberal di Muhammadiyah yang muncul belakangan setelah gegap gempita JIL (Jaringan Islam Liberal) memang merupakan implikasi dari meluasnya wacana liberalisasi dalam pemikiran Islam maupun sosial, politik, budaya. Antipati terhadap JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) wajar manakalah JIL sudah

⁴¹ Perempuan, misalnya, tak diperkenankan ke luar rumah selama sehari atau lebih, kecuali ditemani oleh muhrimnya. Inilah, antara lain, produk keputusan Majelis Tarjih tahun 1932. Begitu pula soal kerudung, aurat, baju, dan seterusnya, diatur sepenuhnya melalui keputusan Majelis yang berorientasi pada fikih dan syariat Islam. Padahal setiap bentuk intervensi terhadap kebebasan individu, dengan sendirinya, melawan semangat liberalisme.

sekian lama harus berhdapan dengan caci makai kelompok Islam garis keras atau fundamental. Tidak jauh berbeda dengan Ulil Abshor yang memang berlatar belakang santri tapi dia tidak di pesantren hal yang sama terjadi di JIMM yang berarti tidak punya otoritas untuk bicara Islam.⁴² JIMM dibalik kelompok aktivis muda Muhammadiyah, di belakangnya terdapat kelompok senior seperti Dawam Raharjo, Syafii Maarif, Muhajir Effendi, Muslim Abdurrahman. Tapi kelompok senior yang dilabeli liberal Munir Mulkhan, Amin Abdullah, yang terpental dalam Muktamar Muhammadiyah di Malang tahun 2005.

Kelahiran JIMM, yang baru beberapa bulan, telah melahirkan keresahan dalam diri gerakan Muhammadiyah. Selain keresahan, beberapa kalangan memang menaruh harapan yang optimis terhadap kelahiran jaringan ini. Letak optimisme itu, misalnya, terwujud dalam ungkapan bahwa dalam Muhammadiyah, dinamika pemikiran Islam mengalami stagnasi. Dengan bahasa yang agak bombastis, bisa disebut bahwa selama perjalanannya yang cukup panjang itu, Muhammadiyah telah mengalami, meminjam istilah Zakiyuddin Baidhaw, *moratorium* tajdid. Sehingga kelahiran JIMM dianggap sebagai upaya menghidupkan kembali ruh pemikiran dalam Muhammadiyah.⁴³

Tidak bisa dipungkiri memang, bahwa kelahiran JIMM, telah membangkitkan sebuah dikotomi dalam MD. Berbagai dikotomi menyangkut Muhammadiyah dari aspek apapun memang sering dan mulai banyak disinyalir. Tetapi, menyangkut JIMM, dikotomi yang paling mengemuka adalah bahwa JIMM adalah “virus liberal” dalam Muhammadiyah. Sehingga dikotomi Muhammadiyah literal dan Muhammadiyah liberal belakangan mulai mengemuka. Kategori ini adalah menyangkut wacana pemikiran Islam. Muhammadiyah liberal biasanya dicirikan dengan penerimaan terhadap hermeneutik, pluralisme agama, kesetaraan gender, dan dakwah kultural. Sedangkan Muhammadiyah literal justru keba-

⁴²Baca Abdurrahman Wahid 'Ulil dengan Liberalismenya' dalam Pengantar buku Ulil Abshar Abdillah, *Menjadi Islam Liberal*, (Jakarta: JIL dan Freedom Institute, Nalar, 2005), hlm.xii

⁴³ Baca juga tesis Moh. Mudzakkir, *JIMM dan Diskontinuitas Pembaharuan Pemikiran Muhammadiyah*, Sosiologi UGM, 2008

likannya, mereka menolak hermeneutika, pluralisme agama, kesetaraan gender, dan sangat berhati-hati dengan gagasan dakwah kultural.

Sementara, Muhammadiyah kultural merujuk kepada sekelompok orang MD yang menjaga jarak dengan -dan bahkan terkesan menghindari-persoalan-persoalan struktural, baik pada tingkatan kenegaraan maupun tingkatan internal MD sendiri. Fokus kelompok terakhir ini adalah pada kerja-kerja intelektual dan mendinamisasi MD sebagai ruh dan *state of mind*. Meskipun sulit disepakati secara bulat, kita memang tidak bisa menampik kenyataan ini. Atas kenyataan ini, maka JIMM seringkali dilabeli sebagai sayap Muhammadiyah liberal dan kultural. Jelas, sebutan itu memang bukan lahir dalam ruang kosong, tetapi ia berdasar pada fakta-fakta empiris yang berkembang selama ini. Bahwa JIMM sebagai gerakan kultural itu memang sesuatu yang nyata dan tidak bisa dihindari oleh siapapun, jika yang dimaksudkan dengan kultural adalah sikap apolitis dan keberpihakan pada domain intelektual. Tetapi dalam hal Muhammadiyah liberal, tampaknya ada kecenderungan distortif dalam memaknai kata ini. Istilah liberal seolah-olah menjadi momok di Muhammadiyah, atau tepatnya sebagian kalangan dalam Muhammadiyah. Umumnya, istilah ini senantiasa dilekatkan kepada gagasan pemikiran *ala* Barat. Islam liberal sendiri, seperti lazim diketahui bersama, diperkenalkan oleh Leonard Binder dan Charles Kurzman.

Wacana anti-liberalisme mewarnai suasana Muktamar MD ke-45 di Malang, Jawa Timur. Liberalisme Islam dinilai sebagai “virus” baru di organisasi itu. Di luar sidang, kita dapat melihat “pojok anti-liberal” di salah satu stan penjualan buku bazar Muktamar. Di sana dijual, misalnya, majalah Tabligh Muhammadiyah dan puluhan buku non-akademis bersemangat anti-liberalisme. Di ruang muktamar sendiri, kita dapat mendengarkan salah satu pandangan umum yang memohon pimpinan pusat supaya “menertibkan” pemikiran liberalisme Islam dalam MD.

Terpentalnya sayap pemikir muslim liberal seperti Munir Mul Khan dan Amin Abdullah dari format 13, juga dapat dibaca sebagai kemenangan anti-liberalisme dalam Muktamar. Secara akademis, kita dapat bertanya: mengapa Muhammadiyah, pada awalnya lahir sebagai gerakan

modernis-reformis, justru melahirkan dua sayap: liberal dan anti-liberal?

Kejayaan MD liberal disinyalir oleh kaum konservatif makin bersinar terang dalam kepemimpinan Syafi'i Ma'arif. Kader-kader mudanya diberi ruang gerak yang sebebas-bebasnya untuk menafsirkan Islam secara progresif dan liberal. Kontestasi terbuka antara sayap liberal dan anti-liberal terjadi di MD sendiri, tidak melalui fisik tentu saja, tetapi melalui wacana dan kontra-wacana.⁴⁴ Gayung bersambut, tanggal 18-20 November 2009 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) JIMM menggelar "Tadarus Pemikiran Islam: Kembali ke Al-Quran, Menafsir Makna Zaman" bisa dikatakan sebagai gebrakan baru di kalangan muda Muhammadiyah dalam sepanjang sejarah berdirinya. Ini merupakan peristiwa kultural yang jarang terjadi buat organisasi Islam yang sangat hegemonik dan formalis.⁴⁵

Perhelatan ini menjadi semakin gereget sebab diadakan oleh komunitas JIMM yang kontroversial lantaran cap liberal anggotanya yang notabene aktivis Muhammadiyah. Ini merupakan peristiwa langka yang akan sangat monumental jika nanti benar-benar menemukan bentuknya yang paling terang, yakni sebagai gerakan kultural yang dicirikan oleh kaum intelektual.⁴⁶

⁴⁴ Buya Syafii Maarif, dikenal sebagai murid pemikir muslim liberal asal Pakistan, Fazlur Rahman, di Universitas Chicago. Syafii Maarif dicap liberal dan merupakan bagian dari kelompok Paman Sam bersama Amin Abdullah dan Munir Mul Khan. Baca Sukidi Mulyadi, Mahasiswa Teologi di Harvard University, Cambridge, AS, "Muhammadiyah Liberal dan Anti-Liberal", Majalah *TEMPO*, edisi. 20/XXXIV/11-17 Juli 2005.

⁴⁵ JIL sebagai sekumpulan anak muda liberal NU, dan JIMM sebagai sekumpulan anak muda Muhammadiyah yang dianggap berhaluan liberal. Dalam kegiatan ini, masalah seperti kesetaraan gender, pluralisme agama, hubungan antaragama, HAM, politik Islam, demokrasi, sampai dengan neoliberalisme menjadi bagian kajian kaum muda antargenerasi ini. Sementara kaum konservatif biasanya lebih memilih tema ibadah ritual yang lebih berorientasi praksis dan amalan sehari-hari. Tentu pilihan kaum konservatif tidak salah, hanya saja hemat saya tidak cukup dengan membahas masalah klasik semacam itu, padahal telah demikian banyak buku/kitab membahas tentang tema tersebut.

Hal ini menjadikan pertempuran atau perang dingin antar faksi dalam Muhammadiyah menjadi semakin sengit setelah pada Mukhtar 2005 Syafii Maarif membela habis-habisan kelompok Anak Muda Progresif yang sering disetarakan dengan JIL

⁴⁶ Zuly Qodir, Opini, Bangkitnya "Second" Muhammadiyah, *Kompas*, Kamis, 20 November 2003

Kelahiran JIMM ini menambah jumlah pengelompokan Muhammadiyah yang kemudian terbagi menjadi Muhammadiyah liberal dan Muhammadiyah literal, Muhammadiyah kultural dan Muhammadiyah struktural.⁴⁷

Banyak pengamat mengkritisi keadaan kontemporer Muhammadiyah, salah satunya adalah peran MD, yang menurut Gumilar (2009), perlu dikembalikan sebagai gerakan pembaharuan Islam yang sadar akan beban sejarah yang dipikulnya. Menurutnya, MD harus lebih dewasa dan matang dalam merespon persoalan krusial dan MD terbuka pada perkembangan pikiran-pikiran progresif-liberatif, sehingga MD tidak menjadi eksklusif-tektualis. Dan MD juga perlu memelopori dialog antargenerasi untuk merumuskan kembali prinsip purifikasi dan dinamisasi Islam dengan berbagai problem dan perkembangan zaman sekarang ini.⁴⁸ Gumilar juga mengingatkan lagi bahwa perkembangan wacana pemikiran Islam yang sedemikian cepat makin menjelaskan bahwa gaya konservatif tidak bisa lagi memadai untuk merespon masalah aktual yang terus bergulir.

3. Kategorisasi lain

Selain varian Muhammadiyah versi Afan Gaffar dalam bab 1, Prof. Dr. Abdul Munir Mul Khan, mantan elite struktural Muhammadiyah 2000-2005 yang didepak akibat diindikasikan terserang wabah sepilis (seku-larisme, pluralisme, dan liberalisme)⁴⁹ akibat pemikirannya sepulang dari negeri Paman Sam. Ia di-*black campaign* di Mukhtar Malang 2005 dan tersingkir dari kursi PP Muhammadiyah.

Walau demikian, ada warisan intelektual yang sangat banyak dalam Muhammadiyah. Salah satunya adalah mengenai varian Muhammadiyah.

⁴⁷ Moh. Mudzakir, *op. cit.*

⁴⁸ Lambatnya kaum konservatif MD merespon masalah-masalah aktual, salah satunya disebabkan adanya monopoli tafsir. Kecenderungan ini merupakan konsekuensi logis dari klaim kebenaran yang menyebabkan sakralisasi terhadap tafsir keagamaan. Sumber: http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1890&Itemid=2

⁴⁹ Istilah yang dikenalkan dan disebarkan oleh MUI yang didukung kelompok Islam konservatif-fundamentalis.

Dalam desertasinya yang berjudul Gerakan “Pemurnian Islam” di Pedesaan (kasus Muhammadiyah) di Jember, ia memperoleh temuan menarik yaitu: di dalam masyarakat desa yang Muhammadiyah, terdapat empat varian antara lain kelompok Al-Ikhlas (Islam Murni), kelompok Kiai Dahlan (Islam murni tapi toleran terhadap praktik TBC, kelompok MUNU (Muhammadiyah-NU) atau neo-tradisionalis), dan kelompok terakhir Munas (Muhammadiyah-nasionalis) atau Marmud (Marhenis-Muhammadiyah).⁵⁰ Kategorisasi ini penting membantu kita memahami bagaimana MD yang selama ini dipahami sebagai sesuatu yang tunggal, padahal banyak varian yang bisa dikaji dan beserta konsekuensi atas varian-varian tersebut dalam politisasi Islam. Bisa jadi, bahan-bahan kampanye yang disiapkan oleh elit politisi MD tidak mengenai sasaran warganya apabila salah mengemas model kampanye politik.

Varian Muhammadiyah yang ada di level *grassroot* yang sangat memungkinkan akan direpresentasikan dalam level pusat (elit atas). Dengan basis analisis tersebut, Hajriyanto Y. Thohari (2001) mengklasifikasikan elite Muhammadiyah pusat seperti Ismail Sunny, Haedar Nashir, dan Goodwil Zubir termasuk kategori Islam murni yang puritan. Syafii Maarif, Yahya Muhaimin, Malik Fajar, dan Amien Rais termasuk kelompok Muhammadiyah Kiai Dahlan, Islam murni yang toleran terhadap praktik TBC. Bambang Sudibyo masuk kelas Munas atau marmud, sedangkan Din Syamsuddin dan Rosyad Soleh masuk dalam kategori MUNU (Muhammadiyah-NU) sesuai *background* masing-masing. Selain itu, Hajriyanto terinspirasi dari Munir Mulkhan juga mengungkapkan kategori lain yaitu Muhyi (Muhammadiyah-priyayi) dan Muwen (Muhammadiyah-kejawen).⁵¹

B. Faktor-Faktor Penyebab Fragmentasi

Ada empat (4) faktor utama yang sangat mempengaruhi dinamika, polarisasi, kontestasi dalam MD yang dicerminkan oleh elit-elit pemegang

⁵⁰ Kuntowijoyo, Jalan Baru Muhammadiyah, dalam Abdul Munir Mulkhan, *‘Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, (Yogyakarta, Bentang, 2000). Hlm.xi-xii

⁵¹ Hajriyanto Y Thohari, Makalah, Marmud: Marhenis-Muhammadiyah, dalam *Kumpulan Makalah MPKSDI PP Muhammadiyah*, 2001, hlm.2

jabatan di MD sebagai organisasi modern yang memandang struktur sebagai otoritas dan bukan personal sebagaimana yang terjadi di tubuh NU. Di NU, kekuatan dan otoritas tersebar di sosok-sosok kyai, baik kyai langit atau bumi, kyai struktural atau kultural, atau apa yang disebut kyai kampung oleh Gus Dur. Mereka adalah para pemegang pengaruh, ibarat satelit yang mempunyai titik edarnya masing-masing. Idealnya, di MD yang sangat birokratis itu, kekuasaan ada di tangan hierarki organisasi, meski sebenarnya juga mengalami dinamisasi dengan munculnya model *patron-clien*, *downline*, jamaah, dan kubu majelis serta ortom-ortomnya. Keempat faktor tersebut sebenarnya bisa dikategorikan sebagai menjadi dua faktor tersebut dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang disebabkan oleh keadaan dalam internal organisasi dengan segala dinamikanya sedangkan faktor eksternal yang ada di lingkungan Muhammadiyah yang meliputi keadaan politik, ekonomi, dan global.

1. Faktor Kontinuitas Sejarah (*Historical Continuity*)

Sejarah MD itu sendiri memberikan andil atas apa yang terjadi hari ini (*fragmented elite*). Dinamika MD menunjukkan kultur yang tidak tunggal dalam politik (tidak monolitik) dari awal-awal berdirinya selalu ada persoalan atau perdebatan antara kelompok yang tertarik terjun di dunia politik kekuasaan dengan yang memperjuangkan nilai dalam artian politik diplomasi atau politik kooperatif. Selain itu, latar pendidikan Timur Tengah yang penuh dengan madzhab dan aliran dalam ber-Islam, meniscayakan fragmentasi dan munculnya aliran-aliran dalam tubuh elite dan massa Muhammadiyah. Di Muhammadiyah kemudian muncul fatsun politik elite yang beragam, lalu memunculkan istilah-istilah Muhammadiyah ideologis, biologis, ada Muhammadiyah konservatif, liberal, progresif, fundamental, salafi, Muhammadiyah politis, Muhammadiyah PAN, Muhammadiyah PMB, Muhammadiyah PKS, Muhammadiyah nasionalis, dan sekuler (dalam partai-partai berazas nasional).

Muhammadiyah meski menyatakan diri sebagai gerakan “amar ma’ruf nahi mungkar” alias gerakan pembaharuan (*tajdid*), dalam perjalanannya

tidak bisa bebas dan tidak pernah bebas dari pergumulan politik. Tetapi yang menarik, di Muhammadiyah adalah bahwa setiap anggotanya diberikan kebebasan untuk memilih partai politik sesuai dengan keputusannya sendiri. Di masa Orde Lama misalnya, kita menyaksikan anggota Muhammadiyah banyak yang menjadi anggota Masyumi. Begitu juga dengan Orde Baru dan Reformasi, polarisasi anggota Muhammadiyah semakin menunjukkan bahwa Muhammadiyah sangat ‘demokrat’ dalam memberikan pilihan kepada setiap anggotanya.

Elite Muhammadiyah dibebaskan berpolitik, bahkan membawa aspirasi Muhammadiyah ke dalam lingkup politik.⁵² Keterkaitan Muhammadiyah dengan gerakan politik memang cukup mendalam, sehingga seringkali ide-ide yang muncul di kalangan politik dan tidak dapat dilaksanakan, seperti pada saat kegagalan pembahasan pendidikan dan pengelolaan keagamaan oleh Boedi Oetomo serta gagalnya penyiapan pendidikan guru oleh agama oleh Sarekat Islam.⁵³

Alfian (1989), dalam disertasinya, menjelaskan bahwa Muhammadiyah hadir dan memainkan perannya dengan cukup penting di kancah sejarah. Kiprah Muhammadiyah selanjutnya dapat dilihat dari tiga peran yang saling terkait. Yaitu, (1) sebagai reformis keagamaan, (2) sebagai pelaku perubahan sosial, dan (3) sebagai kekuatan politik. Dua peranan yang disebut pertama ditarik dari tujuan-tujuan nyatanya sebagai organisasi sosio-relegius. Peranan ketiga adalah akibat baik dari implikasi filosofik modernisme Islam yang dianut oleh Muhammadiyah maupun dari perkembangan gerakannya sebagai salah satu kelompok kepentingan besar.⁵⁴

Lebih jauh, Alfian menjelaskan MD memainkan peran gerakan dan pengaruh politiknya, dengan ledakan-ledakan sikap yang terbilang sangat keras terhadap berbagai kebijakan Belanda. Apalagi kebijakan itu dinilai

⁵² Baca AD dan ART Muhammadiyah dalam *Beritas Resmi Mukhtar Muhammadiyah* di Malang tahun 2005.

⁵³ Pandangan Muhammadiyah tidak berpolitik sebetulnya tidak sepenuhnya benar kalau kita lihat sejarah Muhammadiyah secara komprehensif. Baca juga MT Arifin, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, (Surakarta: Institute Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan Surakarta, 1990), hlm.100.

⁵⁴ Alfian, *Muhammadiyah The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

kontra Islam, atau terutama sekali, jika dirasa menghalang-halangi proses pendidikan dan pengajaran kaum Muslim. Misalnya, keberpihakan Muhammadiyah yang jelas-jelas digerakkan “sepenuh hati” terhadap nasib guru agama yang sengaja dibelenggu kolonial dengan terbitnya kebijakan *Guru Ordonnantie*. Dalam soal yang satu ini, Muhammadiyah memberikan perhatian khusus, bahkan boleh dibilang lebih dari yang lain jika dibandingkan dengan gerakan Islam manapun. Muhammadiyahlah yang pertama kali menyadari benar akan bahaya kebijakan sepihak *Ordonansi Guru* itu, dan karena itu pula mengambil inisiatif pertama untuk menuntut pembatalannya.⁵⁵

Faktor penting yang mendorong MD untuk merambahkan pengaruh gerakannya hingga ke ruang-ruang politik, adalah fakta bahwa posisi umat Islam Indonesia secara terus-menerus terancam oleh logika politik situasional. Dengan berbagai cara pemerintah kolonial yang berkuasa mengasingkan kepentingan umat Islam, sehingga karenanya umat Islam kerap merasa diperlakukan tidak wajar, jika tidak dapat disebut diserang.

Muhammadiyah yang nyata-nyata bersifat non politik mampu masuk dan mengambil peran besar dalam komunitas Muslim Indonesia, serta berhasil menempati posisi gerakan modernis Muslim terbesar dan terorganisasi paling baik di Tanah Air. Maka, keterlibatannya sangat boleh jadi berbeda dengan keterlibatan organisasi-organisasi yang menjadikan politik sebagai profesinya. Sebagai organisasi non-politik, tampaknya MD, bila dimungkinkan kapan saja, berupaya untuk tidak memainkan politik secara langsung. Sebagaimana yang acap di dengungkan kader-kader MD sendiri tentang kecenderungan mereka, hanya dan semata, terpikat menjalankan peran *High Politic*.

⁵⁵ Sikap Muhammadiyah yang berubah terhadap kelompok-kelompok dan pejabat-pejabat non dan anti Islam adalah akibat nyata dari kebangkitan politik Islam melalui Pan-Islamisme yang sudah masuk kedalam tubuh pimpinan SI (Sarekat Islam): sebuah organisasi politik yang banyak sejalan dan memiliki kedekatan tertentu dengan Muhammadiyah. Meskipun dalam perjalanannya kemudian, SI dan Muhammadiyah akhirnya juga berseberangan pandangan secara tajam. Hanya yang perlu digarisbawahi adalah kontribusi terpenting yang pernah diberikan oleh Muhammadiyah kepada SI, tentu saja, berupa dukungan yang tidak ternilai selama masa-masa kritis SI dalam menghadapi orang-orang Komunis. Baca Alfian, *Politik Kaum Modernis, Perlawanan Muhammadiyah Terhadap Kolonialisme Belanda*, Jakarta: al-Wasath, 2010, hlm. 23.

Taruhlah contoh kecil politik diplomasi elit MD sebagaimana yang dicatat Irvan Mawardi (2010), yang mengkisahkan bahwa pada periode KH. Badawi, pada saat beliau bertemu dengan Soekarno di Istana untuk melaporkan hasil Mukhtar Bandung dan pengurus terpilih, KHA. Badawi minta agar presiden bersedia menjadi penasehat atau pengayom. Presiden menyetujui dengan menuliskan tanda 'ACC' di atas kertas daftar susunan anggota Muhammadiyah Pusat itu dengan kata-kata 'Pengayom Agung: Soekarno'. Namun, dalam konteks hubungan MD dengan Soekarno ketika itu, pengayom agung bukanlah gelar, tetapi jabatan kehormatan organisatoris, dan sama sekali tidak mempengaruhi keputusan sebab, faktanya, PP tidak pernah minta nasehat dan tidak pernah pula memberitahukan langkah-langkahnya kepada Pengayom Agung. Jadi, tidak lebih dari jabatan simbolis.⁵⁶ Meski demikian, ini bisa menjadi penanda bagaimana politik simbolis elit Muhammadiyah tersebut bisa menjadi legitimasi secara lebih luas di mata publik.

Karena itu, wajar jika Muhammadiyah dipahami sebagai gerakan sosial-keagamaan yang memiliki serbawajah (*dzu wujub*), baik pada sifat gerakan, dataran kegiatan, maupun tataran aktualisasi dari pada aspek kehidupan masyarakat. Muhammadiyah sendiri mengukuhkan tridimensi gerakannya, yaitu keislaman, dakwah, dan pembaharuan (*tajdid*), tetapi juga melaksanakan kegiatan dalam hampir semua aspek kebudayaan, seperti sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi, tabligh, dan politik. Pada aspek tertentu, kegiatan tersebut dilaksanakan pada tataran berbeda, seperti dalam bidang politik—walaupun hanya bersifat teoritis—diselenggarakan dalam tingkat adiluhung atau *high politics*. (Din Syamsuddin, 2000).

Sebagai setting sejarah politik, penulis memberikan ilustrasi secara bertahap dalam perjalanan dan kiprah Muhammadiyah di Republik ini. Beberapa fase terbagi dalam konteks sejarah Muhammadiyah zaman kolonial pemerintah Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Sebagai rangkuman, perjalanan politik Muhammadiyah dan elitnya bisa dilihat dari zaman ke zaman. *Pertama*, pada era kolonialisme MD

⁵⁶ Irvan Mawardi, makalah Majelis Reboan, *Revitalisasi Peran Penasehat Pimpinan Muhammadiyah*, disampaikan tanggal 6 April 2010

dan elitnya melakukan apa yang disebut politik kooperatif atau politik sebagai strategi dakwah atau politik diplomasi. Hal ini terlihat dari bahwa KHA Dahlan sempat menjalin hubungan dengan pengurus Boedi Oetomo. Setelah dua tiga kali KHA. Dahlan menghadiri rapat pengurus Boedi Oetomo, KHA. Dahlan tertarik karena cocok dengan pikiran beliau, lalu berkeinginan menjadi anggota Boedi Oetomo.⁵⁷ Setelah itu diikuti elit lain pada masa Orde Lama yang menjadi anggota parlemen. Pada era Orde Lama ini, oleh beberapa elitnya, MD dipaksa untuk memilih jalan politik dengan bergabung ke Masyumi, yang mengantarkan MD berada dalam ruang politik *an sich*.

Pada era Orde Baru, elit MD melakukan politik akomodatif lantaran menguatnya negara (*state*) yang ditopang kekuatan militer, dan pada era Reformasi dijadikan momentum oleh elit MD sebagai peluang untuk terjun mengulang jejak elit terdahulunya yang menjadikan politik sebagai sarana dakwah, meski tidak semua elit memilih jalan yang sama. Reformasi itu membuat elit MD berebut terjun dalam dunia politik praktis yang tidak lagi *high politics* tapi *low politics*, atau politik kepartaian. Dengan lahirnya PAN, Muhammadiyah ikut terlibat dalam pusaran politik yang disebut fase ini sebagai transformasi besar gerakan Muhammadiyah.

Beberapa faktor eksternal lainnya juga mempengaruhi konfigurasi, polarisasi, dan fragmentasi (perpecahan, keberagaman) elit dalam sikap dan respon politik antara lain. *Faktor Pertama*, adalah akibat transisi, liberalisasi politik yang melanda negeri ini menjadikan banyak orang tergoda, kepincut untuk berjibaku terjun dalam politik yang keadaannya sedang tidak dalam baik-baik lantaran politik membutuhkan modal besar tidak hanya bisa mengandalkan kekuatan doa, kekuatan Tuhan (*invisible hand*), tapi butuh finansial, butuh citra di media, dengan biaya miliaran rupiah untuk iklan. Tentang modalitas yang sudah dibahas di bagian kedua, ini yang menjadi problematik elit MD, yang sering kekurangan modal finansial/ekonomi meski kelebihan modal sosial, dengan kesimpulan yang pahit: GAGAL ini menjadi kabar buruk bagi para peminat politik di

⁵⁷ Kyai Sudja', *Islam Berkemajuan*, Jakarta: al-Wasat, 2009, hlm.8

lingkungan MD. Namun demikian, banyak pula yang dapat memancing di air keruh.

Faktor kedua, wacana kebangsaan juga membawa pengaruh terhadap konstruksi baru sistem politik Indonesia. Selain melahirkan reformasi tatanan politik dan moral baru dalam perpolitikan juga melahirkan polarisasi dan fragmentasi politik Islam.⁵⁸ Menurut Salim (1998)⁵⁹ ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan munculnya fragmentasi politik Islam. *Pertama*, pada satu sisi terdapat keyakinan bahwa Islam menyediakan visi politik sekaligus memiliki pengalaman politik yang bisa direkonstruksikan dalam keyakinan ideologi yang representatif tanpa meminjam ideologi lain. Respons terhadap keyakinan bahwa Islam memiliki prinsip-prinsip fundamental yang representatif sebagai suatu ideologi ditunjukkan oleh totalitas partai-partai politik baru berlabel Islam, seperti PPP, PKU, Partai Bulan Bintang, PNU, dan PUI, dan lain-lain. Basis ideologi dan sosial partai ini lebih menonjolkan asas keagamaan, karena menggunakan simbol dan idiom agama sebagai acuan utama dalam memperjuangkan program-program dan kepentingannya termasuk dalam merebut massa pemilih.

Kedua, Islam dianggap bukan ideologi alternatif. Islam merupakan sumber ide yang memiliki wawasan politik dan orientasi politik kontekstual dan konstruktif serta inklusif yang menekankan manifestasi substansial nilai-nilai keagamaan serta penampilan pada simbol-simbol politik *inklusif*⁶⁰. Konstruksi ideologi dan sosialnya dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan agama dan kebangsaan, meskipun lebih menonjolkan aspek kebangsaan daripada aspek keagamaan. Selain itu lebih moderat dan realistis dalam menempatkan ideologi dalam negara kebangsaan yang pluralistik. Kekuatan politik ini berusaha merumuskan modal artikulasi politik alternatif di tengah kemajemukan aliran dan kekuatan politik di Indonesia. PAN, PMB, dan PKB merupakan kekuatan politik yang

⁵⁸ Baca juga dalam Gerry Van Klinken, *Perang Kota Kecil*, mengenai fragmentasi Islam politik yang dicerminkan oleh partai-partai Islam yang beragam periode pasca kejatuhan Soeharto.

⁵⁹ Fahrudin Salim, SE, MM, Pengamat politik dan ekonomi, tinggal di Jakarta, dalam *Anatomi Kekuatan-kekuatan Politik Islam*, tanpa tahun.

⁶⁰ Inklusivisme, terbuka dan diterima oleh semua pihak

memiliki basis ideologi Islam yang diintegrasikan dengan pandangan kebangsaan meskipun secara kultural tidak bisa dilepaskan dari basis utamanya: Ormas Islam.⁶¹ Hal ini menjadikan keragaman ideologi bila dihadapkan dengan partai berazas Islam, nasionalis, dan didukung kekuatan etnis tertentu (lokal).

2. Faktor Intervensi Ideologi ‘Asing’

Dalam hal ini ada dua ideologi. Pertama ideologi Islam lain yang masuk dan menyusup ke Muhammadiyah dan yang kedua adalah ideologi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya yang terus saja menjadikan organisasi MD sebagai sesuatu yang perlu diintervensi dan diambil keuntungan sebanyak-banyaknya.

Pertama, tidak bisa dianggap enteng bahwa kemunculan gerakan Tarbiyah yang menjelma menjadi Partai Keadilan (1998) lalu menjadi Partai Keadilan Sejahtera (2002) setelah terjegal oleh *electoral threshold*. Intervensi ideologi ini menjelma menjadi wajah *destructive* sekaligus otokritik bagi elit Muhammadiyah. Banyaknya aktivis muda MD yang hengkang dan memilih PKS sebagai wadah barunya, menunjukkan lemahnya militansi dan kaderisasi di internal MD, seolah ini membuktikan ‘sihir’ baru di zaman baru, bahwa PKS lebih Islami, lebih militan, dan jauh lebih baik proses perkaderannya dibandingkan MD. Tetapi, banyak juga yang tidak melepas MD karena punya jabatan penting dan aktif sebagai aktivis dan pengurus PKS. Tidak ada yang salah dalam perspektif organisasi MD yang membolehkan kader dan pengurusnya secara personal sebagai aktivis partai politik tanpa melibatkan organisasi di dalamnya. Inilah yang kemudian menyumbangkan pembilahan baru kelompok politik MD dalam gegap gempita Pemilu 2009 yang lalu.

⁶¹ Pada dasarnya kedua platform politik tersebut sama-sama mempercayai relevansi agama dengan kehidupan sehari-hari, terutama meyakini pentingnya agama sebagai landasan kritisisme dan perubahan serta menentukan moralitas masyarakatnya.

Tetapi bagi kelompok yang lebih menekankan kepentingan dan simbol-simbol keagamaan cenderung lebih eksklusif, sementara kelompok kedua lebih inklusif karena menempatkan kepentingan dan nilai-nilai yang bersifat lintas kelompok.

Kedua, ideologi penguasa. Rezim penguasa mungkin saja mengambil perannya dalam kerangka politik pecah belah (*divide at empire*) dengan melakukan kooptasi kepada Muhammadiyah dan penaklukan kelompok elit tertentu dalam forum-forum atau diluar forum MD. Menurut Syafiq A. Mughni (2010), ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk intervensi yang berdampak pelemahan dan perpecahan afiliasi politik di tubuh Muhammadiyah. (1) Dengan *brain washing* (cuci otak). Dikesankan bahwa MD sekarang dalam kondisi krisis. Pimpinannya tidak kompak dan terlibat korupsi, program-programnya tidak jalan, tidak disukai pemerintah karena bersikap terlalu kritis, banyak yang sesat karena masuk ke dalam kelompok liberal.⁶² (2) Cara kedua ialah *money politics* (politik uang). Cara ini sering kali efektif untuk mempengaruhi pemilih. Ada sebuah gerakan dengan modal uang sangat besar untuk menentukan pilihan peserta Muktamar terhadap orang-orang yang harus dipilih atau yang harus disingkirkan dari kepemimpinan karena dianggap membahayakan rezim penguasa. (3) Terakhir, dengan operasi intelijen. Mereka mencari orang-orang MD yang potensial untuk direkrut secara sistematis menjadi pelaku untuk menemui elit MD guna mendapatkan dukungan. Mereka memecah keutuhan kelompok dengan menawarkan jabatan, partai politik, dan uang untuk suksesi organisasi yang semuanya dalam rangkah memecah kekuatan besar menjadi kekuatan-kekuatan kecil yang saling berkontestasi pengaruh dan akhirnya sama-sama tidak berdaya. Operasi intelijen tentu menggunakan banyak cara. Jika yang satu tidak efektif, akan dipergunakan cara lain. Bukankah, atas nama keamanan, negara-kekuasaan bisa melakukan apa saja yang dikehendaki untuk mempertahankan basis kekuasaan dan kekuatannya.

3. Faktor Desain Organisasi yang Inklusif dan Otonom

Muhammadiyah sejak didirikan dan sampai sekarang terlihat sebagai organisasi yang *open* dan tidak eksklusif. Hal ini bisa terlihat dari beragamnya

⁶² Syafiq A. Mughni, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur, artikel dimuat Majalah *MATAN* Edisi 47, Juni 2010.

orang di rumah atau ‘tenda’ Muhammadiyah ini. Sebagai implikasinya adalah ketidakseragaman atas sikap dan respon terhadap fenomena atau keadaan politik nasional ataupun lokal. Ciri organisasi yang lainnya adalah sifat otonomi yang diberikan sangat luas kepada organisasi otonom di bawahnya yang meliputi delapan organisasi otonom dan juga beberapa majelis dan lembaganya yang sangat terbuka peluang untuk berbeda sikap dengan elit 13 besar PP Muhammadiyah (populer dengan istilah ‘13 dewa’ yang dipilih dalam forum Muktamar). Ada fenomena yang bisa merepresentasikan keadaan tersebut, misalnya Majelis Tabligh lebih mengarah ke sosok MAR sebagai kiblat politiknya, dan Majelis Hikmah akan lebih condong mendukung manufer DS, dan sebagainya.

Sebagaimana yang kita tahu, bahwa kondisi internal ini tumbuh semenjak organisasi ini berdiri yang dilatarbelakangi pendidikan di Timur Tengah yang masa itu juga terjadi beragam aliran keagamaan dalam Islam. Wahabi dianggap yang dekat dengan Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah. Di dalam Muhammadiyah kelebihan bisa menjadi kelemahan dalam waktu yang bersamaan. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh Kim Hyung-Jun (2010), guru besar Antropologi di Kangwon National University, South Korea, bahwa MD mempunyai titik lemah di lima hal. Pertama, *Management of Organization* yaitu *Collegial system in decision-making* dalam organisasi. Kedua, *Structure of Organization Composition of Leaders Five-leveled structure*. Ketiga, *Leadership Structure, Image of Ideal leader* yaitu penerapan *Bloc Voting*. Keempat, *Main Activities* yang ada di amal usaha yang sangat beragam dan kompleksitas persoalannya. Kelima, *Ideal of managing-Unity Organization*.⁶³

Dari penjelasan Kim (2010) dan hasil diskusi penulis dengan pentolan MD kultural yang tergabung di Majelis Reboan semenjak tahun 2005, tepatnya menjelang Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang, penulis menyusun faktor-faktor yang mengilhami terjadinya perkubuan dan fragmentasi elit Muhammadiyah. Pertama, desain struktur organisasi yang

⁶³ Kim Hyung-Jun, 2010, *Can Muhammadiyah Become a Cradle for New Civil Movement?*, presentasi hasil temuan penelitian di gedung PP Muhammadiyah jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, tanggal 12 Mei 2010.

terpisahkan ke dalam tujuh organisasi otonom yang mempunyai kedaulatan atas rumah tangga masing-masing, termasuk pilihan politiknya yang tidak serta merta dapat dikontrol oleh PP Muhammadiyah sebagai organisasi atau institusi. Dengan pendidikan yang tinggi, tentu pengetahuan elite ortom sangat luas yang memunculkan sifat kritis dan tidak mudah diintervensi oleh kelompok lainnya.

Kedua, kepemimpinan kolektif-kolegial. Muhammadiyah tidak dipimpin satu orang. Di Muhammadiyah ada 13 elite pimpinan struktural dengan basis dukungan masing-masing dan bisa mengambil kebijakan dalam hal yang hanya menjadi wewenangnya, melalui mekanisme rapat yang panjang. Sehingga, menurut Profesor Kim, organisasi MD tidak ‘satu komando’ yang berakibat menjadi organisasi yang tidak kuat dengan leadership karismatik atau radikal. Dalam sikap politik ke-13 ‘dewa’ tersebut tidak selalu kompak seiring sejalan. Ke-13 elite struktural tersebut mempunyai wilayah kekuasaan, rasionalisasi dan basis dukungan masing-masing (konstituen dalam bahasa politik). Jika mau radikal harusnya Muhammadiyah jadi partai politik. Itu saran Profesor Kim kepada MD.

Ketiga, latar belakang pendidikan elite. Umat Islam semenjak pasca Nabi Muhammad terjadi perpecahan, yang kalau sampai sekarang bisa dihitung menjadi ratusan golongan. Bahan bacaan sangat mempengaruhi sikap keagamaan dan politik para elite Muhammadiyah. Pendidikan menjadikan orang berwawasan luas, jika dilakukan dengan dialogis akan membebaskan pikiran-pikiran hitam putih, naif. Sebaliknya, pendidikan doktriner yang ditempa berpuluh tahun akan menghasilkan sosok-sosok yang tidak segan menganggap teman atau orang lain sebagai pengidap virus membahayakan: SEPILIS. Inilah kesimpulan bagaimana elite Muhammadiyah terfragmentasi secara pemikiran agama yang didukung oleh latar belakang pendidikan. Dalam konteks MD, dikotomi produk Amerika dan Timur tengah menjadi perdebatan sengit sampai saat ini.

Terakhir, adalah faktor perebutan amal usaha. Ini persoalan yang sedang terjadi di banyak tempat di level struktur MD mulai dari ranting, daerah, wilayah, sampai pusat. Mengapa? MD dianggap sangat kaya dengan amal usaha pendidikan, ribuan sekolah, ratusan universitas dan akademi, ratusan

balai kesehatan dan rumah sakit.⁶⁴ Hal ini menjadi arena yang basah bagi 'Muhammadiyah pencari makan' (istilah Afan Gaffar) untuk bertarung dan mengadu nasib di persyarikatan. Lebih kronis lagi, jika 'perang' atas kepentingan ekonomi ini berhimpit dengan afiliasi politik, patron, yang berbeda, sebagaimana konflik elite MD yang terjadi di Sumatra Utara menjelang Pemilu 2009, dimana PWM dan ortom terpecah dengan afiliasi kubu PAN dan PMB serta kubu yang berada di luar keduanya. Contoh konflik lain terjadi di Klaten yang mempertemukan kubu Muhammadiyah- PKS dengan Muhammadiyah PAN.⁶⁵ Konflik itu menjadi polemik sampai di tingkat elite pusat, sebab ketiga partai 'Muhammadiyah' tersebut direpresentasikan oleh elitnya di tingkat pusat MD seperti: Anis Matta, Hidayat NW, Amien Rais, Din Syamsuddin, Yunahar Ilyas, Muhammad Muqoddas, dan elite di PP Pemuda Muhammadiyah yang punya hubungan emosional yang dalam dengan PMB.

Polemik ini direspon oleh elite secara berbeda. Ada yang menganggap wajar karena organisasi MD besar sehingga banyak yang tertarik masuk dan tertarik untuk menuai keuntungan di air keruh. Tetapi ada juga yang serius dengan mengusulkan gagasan perlunya MD mempunyai amal usaha di bidang politik. PMB yang dianggap menambah deretan prestasi kegagalan politik orang MD dinilai sinis oleh kubu kultural dan kelompok yang diam-diam membonceng partai-partai "Islam" dan "sekuler".

4. Pragmatisme Politik Elit

Muhammadiyah adalah ormas besar. Anggotanya banyak, kegiatannya komprehensif, demikian juga amal usahanya, dan jaringannya luas, sehingga punya pengaruh di tingkat massa. Kebesaran Muhammadiyah menyebabkannya menjadi sasaran kooptasi. Dalam perhitungan kasar, kekuasaan pasti berminat pada Muhammadiyah: bukan dalam arti memberi du-

⁶⁴ Sumber, *Profil Muhammadiyah 2005*, 2005

⁶⁵ Masih banyak contoh lain, termasuk kasus di Lamongan antara kubu Muhammadiyah struktural dan kultural berbeda dukungan politiknya dalam pilkada 2010 pada tanggal 23 Mei 2010 yang lalu. Hal ini menunjukkan keragaman yang kuat di Muhammadiyah. Contoh lain, di NTB dan Sumbar ada gerakan anti PAN yang dipelopori elite PMB yang juga aktivis Muhammadiyah.

kungan terhadap dakwahnya, tetapi mengkooptasi dan bahkan menaklukkannya. Karena itu, Mukhtar dan berbagai forum permusyawaratan Muhammadiyah akan menjadi ajang untuk kooptasi dan penaklukan itu. Penguasa pasti tidak akan membiarkan Muhammadiyah menjadi lebih besar dari negara, pemimpinnya kompak dan kritis terhadap kebijakan penguasa. Tidak akan! Sehingga paradigma kritis dalam menganalisis faktor ini perlu dimunculkan sebab *state terrorisme* itu nyata adanya.

Dengan masing-masing modalitas atau basis legitimasi yang dimiliki elit Muhammadiyah, mereka mempunyai cara sendiri untuk bermain api dengan politik. Banyak bukti yang sudah penulis himpun di bab-bab sebelumnya, bahwa syahwat politik elit Muhammadiyah pada saat Pemilu 2009 nyata-nyata berhaluan pragmatis, sebagaimana yang diekspresikan Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) yang mendukung JK-WIN lantaran kecewa dengan SBY dan bobroknya mesin politik yang bernama Partai Matahari Bangsa (PMB, didirikan tahun 2006); dan 'Muhammadiyah' dengan 30 juta warganya yang diharapkan seiring dan sejalan dengan Din Syamsuddin nyata-nyata jauh dari harapan. Begitu juga yang dimainkan oleh Syafii Maarif yang mempromosikan JK-Win yang notabene punya masalah dengan penegakan HAM dan juga orde baru: Golkar. Dan yang paling terlihat pragmatis adalah bagaimana Amien Rais yang membungkam diri sendiri terhadap kekritisan dan agenda reformasi yang ia bangun melalui Muhammadiyah, Perhimpunan Amanat Muhammadiyah, sampai lahir Partai Amanat Nasional (PAN).

Diujung perhelatan politik yang bernama pemilihan umum presiden dan wakil presiden itu, Amien Rais dan jajarannya di PAN lalu merapat ke SBY-Budiono dengan berbagai kepentingan di dalamnya termasuk memasukkan menteri dalam kabinet dan membiayai mesin partai agar dapurnya tetap dapat mengepul. Pada saat yang sama, Amien diapresiasi sebagai penyelamat muka Muhammadiyah ketika pasangan capres cawapres yang didukung sebagian besar elit Muhammadiyah itu kalah telak dalam satu putaran Pemilu 2009. Sebagai dampaknya, berbagai gerakan anak muda Muhammadiyah muncul dengan kritik yang sangat keras bahwa Amien Rais dan PAN partai dan tokoh pragmatis sehingga

penolakan itu berujung pada keurungan Amien Rais kembali masuk jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah.

Mungkin beberapa aktivis muda Muhammadiyah bisa bernafas lega? Tapi hubungan politik dengan Muhammadiyah tidak lantas selesai sebab Din Syamsuddin pun dikenal sebagai politisi yang sudah banyak memakan garam. Jadi organisasi ini kedepan akan terus mengalami dinamika politik dan ‘pertarungan’ sengit di antara elit lama, sesama elit baru dalam wadah Muhammadiyah yang sekali lagi tidak monolitik atau heteropolitik.

BAB IV

METODE DAN IMPLIKASI POLITIK ELITE MUHAMMADIYAH DALAM PEMILU 2009

”Muhammadiyah itu tidak ke mana-mana dan menjaga jarak dengan partai politik sehingga akibatnya kita banyak yang ada di luar. Tetapi sekarang ini netralnya aktif, kita tidak menjaga jarak dengan parpol”¹
(Din Syamsuddin)

A. Pendahuluan

Bagian ini, tidak jauh berbeda dengan model bab sebelumnya, akan dimulai dengan kutipan-kutipan yang memberikan gambaran keberagaman (fragmentasi) sikap, pendapat, dan perilaku politik di kalangan elite Muhammadiyah (MD) baik yang pro-politik praktis, kultural, dan yang berada di antara keduanya dalam gegap gempita Pemilu 2009 yang mengusik hampir semua kelompok elite MD. Berikut kutipan-kutipan itu:

Pertama, pernyataan DS: “Muhammadiyah menyatakan ketertarikannya dengan pendekatan ekonomi pasangan capres dan cawapres Partai Golkar dan Partai Hanura Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win). Pendekatan ekonomi yang memfokuskan untuk kesejahteraan rakyat itu dinilai dapat menjadi

¹ Dalam acara Tabligh Akbar di Brebes, Jateng, 6 Maret 2009 yang diikuti peresmian Masjid KH Dahlan di Sirompok yang dimuat <http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/muhammadiyah-netral-dalam-pemilu-2009.html>

solusi dalam perbaikan perekonomian Indonesia. Pak Jk ini sebenarnya merupakan anak dari tokoh Muhammadiyah di Sulawesi Selatan.”²

Kedua, Pernyataan H.M. Junus Anis: “Para politikus suka mengatakan bahwa kalau Muhammadiyah tetap bersikukuh tidak berpolitik tentu akan dimakan politik.”³

Ketiga, Pernyataan politik A. Syafii Maarif: “...JK adalah *the real president*. Saya tidak kampanye, kenyataannya memang begitu. Saya yakin, JK adalah pemimpin masa depan yang tidak lama lagi akan menjadi kenyataan”.⁴

Sedikit *flashback*, banyak pengamat MD menilai bahwa aroma politisasi dalam Mukhtar MD di Malang sangat kuat sebab ada beberapa kepentingan baik kepentingan aktivis Muhammadiyah sendiri atau kepentingan aktivis Partai yang basis massanya ada dalam organisasi Islam modern tersebut bahkan rezim penguasa selalu mempunyai kepentingan dalam siapa menjadi pemimpin organisasi besar ini termasuk juga dalam NU. Sebagaimana pendapat Nakamura (1990; 114) bahwa MD merupakan wadah yang mengembangkan inisiatif masyarakat secara mandiri. Jadi, MD merupakan suatu dinamika tersendiri dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Ini merupakan aset tersendiri dalam mendorong masyarakat Indonesia menuju tahap lepas landas.⁵

Mukhtar MD ke-45 dibuka Presiden dan ditutup Wapres Jusuf Kalla di kampus UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) tahun 2005. Bagi MD, menghadirkan pejabat negara menjadi tradisi yang bisa ditafsirkan berbeda-beda sebagaimana yang dikatakan Geertz bahwa MD

² Sumber: mediaindonesia.com, 11 Mei 2009, dipublikasikan oleh Tim Sukses 1912 untuk JK-Win yang merupakan kelompok aktivis muda Muhammadiyah.

³ Ketua Umum PP Muhammadiyah, disampaikan dalam Khutbah Iftitah Mukhtar ke-35 dan HUT setengah abad Muhammadiyah. (sumber: Hajriyanto Y. Tohari dalam Kumpulan Makalah Baitul Arqom, MPKSDI PP Muhammadiyah, 2001).

⁴ A.Syafii Maarif, mantan Ketua PP Muhammadiyah, penasehat PP Muhammadiyah, Dimuat dalam timorexpress.com 20 Mei 2009, di detik.com dan alat peraga buku kampanye JK-WIN yang dicetak oleh Tim 1912, sebuah tim untuk kemenangan JK yang dimobilisasi oleh elite Angkatan Muda Muhammadiyah, 2009.

⁵ Mitsuo Nakamura, *Bulan Tsabit Muncul dari Balik Pohon Beringin: Studi Pergerakan Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta*, alih bahasa Yusron Asrofie, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.

dalam perilakunya cenderung struktural, simbolis, dan ideologis.⁶ Perhelatan tingkat nasional yang kerap diwarnai politisasi tersebut menghasilkan setidaknya tiga keputusan penting banyak keputusan penting.⁷ *Pertama*, terpilihnya 13 anggota tetap PP Muhammadiyah periode 2005-2010. *Kedua*, penetapan Dien Syamsuddin sebagai ketua umum PP Muhammadiyah. *Ketiga*, terbentuknya dewan penasehat PP Muhammadiyah yang diharapkan menjadi fungsi pengawasan atas langkah-langkah elit MD (13 orang PP Muhammadiyah).⁸

Muktamar Malang, selain suksesi ketua umum, juga memutuskan adanya lembaga penasehat MD. Banyak pengamat menilai munculnya penasehat ini sangat politis sebab ada ketakutan bahwa Din Syamsuddin akan bermain api dengan politik. Penasehat ini berisi tokoh-tokoh tua seperti Amien Rais, Syafii Maarif, Asymuni Abdurrahman, Abdurrachim. Selain hal tersebut, dewan penasehat ini menjadi semacam mahkamah konstitusi ala Indonesia yang menjadi *check and balance* dalam sistem demokrasi agar tidak terjadi penyimpangan yang akut.

Proses sirkulasi elite dengan munculnya elite baru seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentu dengan beragam tipe dan karakter telah memberikan corak tersendiri bagi perjalanan gerakan ini. Dalam MD, kaum elite bisa disebut sebagai elite kolektif yang keputusan dan sikapnya diproses secara bersama. Tanggung jawab bukan menjadi milik pribadi, melainkan milik bersama elite. Untuk mengetahui fungsi-fungsi elite yang terkait dengan kekuasaan politik, dapat digunakan sistem soasial yang

⁶ Clifford Geertz, *op. cit.*, hlm. 442.

⁷ Ada beberapa partai politik yang menurut informasi terjun dan bermain untuk proses pemenangan calon ketua umum PP Muhammadiyah. PAN terlihat cukup mempunyai kepentingan sebab ditengarai jika DS terpilih akan menjadi oposisi bagi PAN atau mengancam eksistensi PAN dengan *move-move* karena DS dikenal seorang politisi ulung. Dari Jogja dicetak ribuan buku yang diberi judul *Raport Hitam Din Syamsuddin* sebagai *black campaign* dalam muktamar.

⁸ Sesuai dengan ketentuan organisasi, 13 orang pimpinan DS itu akan menyusun kepengurusan secara lengkap, termasuk mengangkat beberapa orang pengurus diluar 13 orang tersebut. Di usianya yang masih 48 tahun itu, Dien harus membawa gerbong persyarikatan ini lima tahun ke depan bersama sejumlah tokoh tua seperti Rosyad Sholeh, Malik Fadjar, Muchlas Abror, Bambang Sudibyo, Fasichul Lisan, Sudibyo Markus.

dikembangkan oleh Parsons, yang mencakup empat macam elite: (1) elite dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan, yakni elite yang menata usaha-usaha untuk mencapai tujuan sosial secara umum; (2) elite adaptasi, yaitu elite yang mengembangkan alat untuk mencapai tujuan ini; (3) elite integratif, yaitu elite yang bersangkutan dengan ukuran-ukuran moral yang bersifat umum serta keyakinan; (4) elite yang mempertahankan pola yang mencerminkan moral umum para anggota⁹.

Elite pencapain tujuan dan elite adaptif digambarkan sebagai respons elite dalam memperhatikan berbagai problem umat dan bangsa secara eksternal, sementara elite yang mempertahankan pola sosial dan elite integratif digambarkan sebagai upaya elite untuk mengatasi dan mengelola problem internal organisasi berkaitan dengan perilaku moral anggota dan respons aspirasi individu. Penekanan elite ini lebih pada upaya yang bersifat instrumental dari tanggung jawab sosial elite serta aspek simbolik dengan orientasi pada pembinaan dan mengatasi permasalahan internal organisasi secara cerdas.

Beragam pola dan orientasi tersebut yang tidak bisa dilepaskan dari kehadiran elite, melekat dengan berbagai tanggung jawab dan kekuasaan yang harus segera dilaksanakan mengingat faktor yang sangat krusial berkaitan dengan masalah tersebut yakni, kekuasaan elite. Dalam konteks organisasi sosial keagamaan, hal ini tidak serumit dan sekompleks dalam birokrasi pemerintahan atau tarik menarik kepentingan sebagaimana yang terjadi dalam organisasi politik. Akan tetapi, elite diberi wewenang untuk mengatur berbagai agenda ranah organisasi sehingga menjadi lebih realistis.

B. Metode Politik Elite Muhammadiyah

Metode diartikan sebagai cara, manufer bagaimana elit mempertahankan kekuasaan, merebut, dan memperbesar kekuasaannya. Cara-cara itu beragam yang secara garis besar ada yang dilakukan secara kultural (politik nilai), ada secara struktural dengan masuk ke sistem politik kekuasaan via partai politik, kabinet, kandidat presiden/wapres.

⁹ Suzzane Keller, *op.cit.*, hlm. 378.

Sebelum memasuki bagian yang penting dalam bab ini, perlu dibangun pemahaman terlebih dahulu bahwa ada perbedaan antara politik elit MD dengan politik MD, namun *overlapping* tidak bisa dihindari dalam konstruksi aktor dan arena dan sistem politik yang berjalan sebab aktor selalu tidak bebas dari kepentingan sehingga organisasi menjadi basis legitimasi yang sangat penting. Berebut pengaruh dan kecerdikan antarelite MD sangat nampak sejak berpuluh tahun lalu sedangkan 2009 merupakan arena yang paling kontemporer untuk melihat tarik-menarik dan perang pengaruh antara kubu politik kultural dalam Muhammadiyah dan politik praktis yang selalu muncul dalam setiap panggung pemilu. Para politisi pragmatis akan bilang, “calon kami tidak membutuhkan dukungan Muhammadiyah, tapi kami perlu sekali dukungan warga Muhammadiyah”. Lalu aksi-aksi politik selalu muncul untuk mengamini permintaan tersebut.

Situasi politik masih diwarnai berbagai persoalan substansial di negeri ini meski sudah 10 tahun reformasi bergulir. Beberapa organisasi *civil society* mengalami problematika serius terhadap konsolidasi demokrasi yang mengalami involusi. Kini MD ditantang untuk berperan dalam politik meski secara internal MD tidak pernah monolitik. Pemilu tahun 2009 yang terdiri dari pemilu legislatif pada tanggal 5 April dan pemilu presiden dan wakilnya pada 8 Juli 2009. Bagaimana elit MD melakukan strategi politik dan bagaimana implikasi manufer para elite terhadap posisi MD dalam perannya sebagai gerakan politik kulturalnya? Sedikit banyak tulisan ini akan membantu memberikan penjelasan.

Setiap gerakan Islam memiliki strategi untuk tetap *survive*, ada kalanya gerakan Islam itu mengambil haluan yang murni kultural dan adakalanya menghimpitkan diri dengan kekuasaan politik, tidak sedikit dari gerakan Islam yang dalam periode tertentu berubah menjadi partai politik dan pada periode yang lain tetap sebagai gerakan Islam. Itu mencerminkan dinamika gerakan Islam dan itu dipandang sebagai strategi yang tepat untuk tetap eksis. MD pernah mengalami fenomena seperti itu, ketika gerakan ini menjadi istimewa partai Masyumi pada tahun 1960-an, MD pernah memberikan penghargaan yang tinggi kepada Soekarno dalam bidang tauhid.

Dalam periode pasca pemilu 2009, penulis berpendapat sebagai fase berakhirnya politik akomodatif pemerintah kepada MD dengan tidak adanya representasi menteri dalam kabinet orang elit MD setelah beberapa periode sebelumnya bahkan semenjak Orde Lama tradisi ini dilakukan bersamaan dengan kelompok NU.¹⁰

Mengingat sejarah MD sebagai ormas Islam tidak terlepas dari aktivisme politik tentu sudah banyak makan garam. Misalnya, kepemimpinan Djarnawi dan Lukman tidak berjalan mulus, barangkali pemerintahan baru tidak ingin melihat partai politik yang kuat, melalui suatu rekayasa pembajakan pimpinan Parmusi pada akhir 1960-an, Djarnawi-Lukman yang memperoleh dukungan dari basis partai di akar rumput tersingkir dari pimpinan Parmusi akibat pembajakan dari pimpinan partai yang dilakukan Naro-Kadir, oleh sebagian kalangan menyebut tindakan Naro-Kadir memperoleh dukungan militer. Sejak saat itu Muhammadiyah merumuskan kembali sikap politik, khususnya dalam kaitannya dengan partai politik.¹¹

Pendapat Nashir (2010) perlu dipertimbangkan sebagai representasi salah satu kelompok MD mengenai peran politik MD dalam mengoptimalkan peran MD dalam politik kebangsaan dapat dikembangkan pula jaringan kader politik kebangsaan, baik yang berada dan melalui jalur

¹⁰ Sejarah perpolitikan selalu tidak terpisahkan dengan denyut nadi MD. Lingkungan politik yang berubah akan mempengaruhi situasi MD. Taruhlah catatan tentang masalah asas gerakan MD. MD tidak bisa dilepaskan dari suasana pergulatan majelis konstituante yang bersidang antara 1956-1959. Karena perdebatan tentang dasar negara dalam majelis dinilai gagal oleh penguasa pada saat itu, maka dikeluarkan dekret 5 Juli 1959 dengan perintah kembali ke UUD 1945 serta dengan membubarkan majelis konstituante. Dari situasi itu lalu MD memunculkan asas Islam dalam AD Muhammadiyah yang hendaknya dibaca dalam konteks politik 50-an.

¹¹ Sejak kelahiran MD tahun 1912 yang mendahului kelahiran bangsa (1920-an) dan negara (1945) Indonesia telah menunjukkan bahwa MD merupakan gerakan Islam bercorak dan watak kebangsaan dan nasionalisme yang kuat. Ungkapan nasionalisme memang tidak populer di kalangan MD, tetapi perbuatan yang bersifat nasionalistik telah menjadi wataknya sejak semula kebangkitannya. Keterbukaan terhadap gagasan-gagasan baru telah menjadi sifat MD selama sekian dasawarsa. KHA Dahlan (1868-1923), berkat pergaulannya dengan berbagai kalangan dan pergulatan batinnya yang dengan situasi Islam yang sedang jatuh terkapar telah memaksanya untuk memunculkan pemikiran untuk keluar dari persoalan-persoalan ketertinggalan, kemiskinan dan kebodohan.

partai politik dan lembaga legeslatif, maupun di jalur lembaga eksekutif dan yudikatif serta lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Jika secara kelembagaan MD tidak memainkan fungsi politik-praktis, maka secara fungsional dan non-institusional dapat dikembangkan jaringan kader politik sebagai langkah pengembangan potensi kader di berbagai struktur kelembagaan di luar organisasi.

Pengembangan jaringan kader politik atau kader kebangsaan tersebut berfungsi sebagai kepanjangan tangan atau anak panah gerakan MD. Dengan demikian sekaligus dapat dipecahkan kesenjangan hubungan antara kader bangsa dengan persyarikatan yang selama ini sampai batas tertentu menjadi keluhan sementara pihak. Lebih jauh lagi melalui jaringan kader politik kebangsaan tersebut dapat dioptimalkan misi MD dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui para kadernya di ranah kebangsaan.

Ada hal yang menarik yang pernah diungkapkan Syafii Maarif (mantan ketua PP Muhammadiyah) yang mempertanyakan: jika bangsa ini tenggelam, apakah MD mau turut tenggelam, atau kita telah menyiapkan diri untuk turut menyelamatkan? Lalu, dalam sidang tanwir di Bali tahun 2002 Syafii Maarif mengungkapkan statemennya bahwa jika bangsa ini tersungkur, MD akan turut tersungkur. Dalam pandangannya, MD dengan segala kebesaran dan kelebihanannya belum mewariskan pemikiran alternatifnya untuk bangsa ini.¹² Sehingga, beliau menyampaikan tesisnya agar MD memperkuat wawasan kebangsaannya dengan sekaligus tampil sebagai gerakan ilmu. Hal penting untukantisipasi karena nasionalisme selama ini masih rentan dan sangat gampang berpecah. MD perlu menyiapkan diri untuk terlibat aktif menjaga keutuhan bangsa.

Dalam memposisikan diri dalam percaturan politik dan misi MD tentunya para kader politik MD perlu menjunjung etika politik dan etika gerakan yang positif. Kendati politik itu menyangkut banyak kepentingan praktis, tetapi semestinya kader politik MD tidak larut dalam perjuangan politik yang menghalalkan segala cara dan melupakan misi utama politik

¹² Syafii Maarif, 'Potret Politik Muhammadiyah' dalam buku *Dinamika Muhammadiyah dalam Politik 1966-2006*, karya Syarifudin Jurdi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. viii.

untuk mensejahterakan rakyat dan melupakan misi utama politik untuk kesejahteraan rakyat dan membangun bangsa. Lebih khusus lagi, tidak melakukan politisasi MD untuk kepentingan politik diri sendiri atau partai politik dimana para kader itu berkiprah.

Politik dengan segala kepentingannya tidak boleh memenjarakan MD dan derajat hidup publik. Kader politik MD jangan sampai menjadikan uang dan kekuasaan sebagai panglima dalam perjuangan politik, sehingga berpolitik seolah tidak ada batasnya. Politik dan kekuasaan sebagaimana juga uang itu penting, tetapi bukanlah segala-galanya, apalagi dijadikan ‘dewa’ dalam kehidupan yang menggerus nilai-nilai kebenaran. Politik tetap harus dijalankan dengan etika, moral dan nilai-nilai utama, karena disitulah letak perbedaan yang seharusnya ditunjukkan oleh kader dan aktivis politik MD.

Akhirnya, MD melalui Khittah Perjuangan yang dirumuskannya dapat memberikan garis pembatas dalam menghadapi persoalan-persoalan politik dan memposisikan diri terhadap partai politik, tidak dimaksudkan untuk melarikan diri dan menjadi anti politik. Melalui Khittah, berarti MD melakukan ijtihad politik dengan melakukan rasionalisasi untuk tidak berpolitik praktis, karena fakta sejarah dan pengalaman menunjukkan berkiprah langsung dalam perjuangan politik itu mudharatnya jauh lebih banyak ketimbang maslahatnya dan membuat usaha-usaha dakwah MD dalam lapangan kemasyarakatan menjadi terbengkalai. Melalui Khittah Denpasar 2002, MD bersikap positif terhadap kekuatan-kekuatan lain yang melakukan perjuangan melalui partai politik dengan harapan menjalankan fungsi politik sebagaimana mestinya, sekaligus menjadikan politik sebagai sarana mewujudkan cita-cita nasional. MD juga akan terus melakukan kiprahnya dalam memajukan dan mencerahkan kehidupan bangsa serta peran-peran kemanusiaan, sehingga gerakan Islam ini melalui dakwah dan tajdid yang diperankannya mampu mempengaruhi jalannya sejarah dan peradaban bangsa.

Sebagai kesimpulan bab ini, penulis ingin menegaskan kembali bahwa di MD memang sama sekali bukanlah organisasi yang homogen, baik dalam sisi ideologi dan praktik serta pandangan hidup warganya mengenai

Islam, akan tetapi juga menyangkut perbedaan dan heterogenitas dalam afiliasi dan pandangan politik elit.

Fragmentasi dalam dua bidang tersebut mengakibatkan fragmentasi di level bawah secara politik lebih kompleks lagi, manakala liberalisasi politik juga dipahami secara mandiri oleh warga, dan juga infiltrasi dari aktor-aktor atau agen demokrasi sepuluh tahun terakhir ini, sehingga massa atau non elit membangun rasionalisasi berdasarkan pengalaman dan lingkungan masing-masing. Hal ini dianggap akan membawa dampak fragmentasi elit menjadi lebih kompleks apabila elit berusaha mengkomodasi kelompok-kelompok di tingkat *grass root* Muhammadiyah.

Sebagaimana elit MD, kelompok elit intelektual dalam Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) juga mengalami fragmentasi mengenai sikap politik. Ketika PMB didirikan, suara-suara sumbang dari kubu Yogyakarta bernada pesimis terus diteriakkan, sementara kubu AMM Jakarta yang getol mengusung PMB sebagai partai alternatif terus melobi elit MD seperti Buya Syafii, yang kemudian berkomentar bijak agar PMB membuktikan diri dalam pemilu terlebih dahulu. Walhasil, setelah kekalahan dalam Pemilu 2009 dimana PMB hanya menjadi partai 'nol-koma' dan hanya mendapat beberapa kursi di daerah sebagai partai lokal. Ini menjadi senjata mematikan kelompok anti politisasi MD kepada kubu AMM yang berafiliasi PMB. Ada sinisme dengan mengatakan, "wajar PMB gagal, PMB kan Partai Modal Bismillah. Namun demikian, kubu Jakarta tetap lantang mengatakan, bahwa banyak pelajaran yang bisa diambil dari PMB, terutama ini menjadi laboratorium politik MD.

Banyak elite MD gerah melihat sepak terjang teman seperjuangannya. Menjelang Pemilu 2009, tepatnya di tahun 2007 dan 2008, komunikasi politik mulai terjadi antara Din Syamsuddin dengan PDI-Perjuangan yang sebelumnya sudah diawali dengan komunikasi DS dengan kelompok Golkar, yang memang rekannya sendiri mempunyai posisi yang strategis dan juga *background* DS yang Golkar. Manufer ini sudah dibaca oleh kelompok MD ideologis atau non politis sebagai pertanda MD akan mengalami persoalan lagi di masa-masa dimana politik menjadi pusat perhatian: pemilu. Berbeda dengan Syafii Maarif yang secara kultural

menjadi salah satu penasehat di Baitul Muslimin-nya PDI Perjuangan dan ini tidak merisaukan elit lainnya, bahkan memberi dampak positif untuk membangun gedung sekolah MD karena mendapat gelontoran dana dari Taufik Kiemas (suami Megawati). Syafii Maarif menjabat sebagai penasehat MD, ketua pembangunan Madrasah Muallimin pasca Gempa Yogyakarta, juga pendiri Maarif Institute, yang memang membutuhkan dana operasional cukup besar. Meski demikian, kedekatan dengan Taufiq Kiemas tidak banyak dimaknai sebagai politik praktis atau politik pragmatis.

Secara teoritis, gaya kepemimpinan menentukan apakah seluruh organisasi bisa disebut dinamis dan responsif terhadap realitas perubahan. Masa depan organisasi, apakah berkembang, maju, atau stagnan, akan tergantung pada faktor kepemimpinan walau ada anggapan bahwa faktor kepemimpinan hanya suatu fungsi yang dapat diperankan oleh siapa pun sesuai kondisi lingkungannya. Gaya dan tipe figur pemimpin adalah fakta tersendiri bagi sebuah organisasi. Sebagai misal, kepeloporan KHA Dahlan merupakan fakta sejarah terhadap figur pemimpin yang dengan kemampuan kepemimpinannya dapat menarik kesetiaan para pengikut untuk membentuk sebuah gerakan yang benar. Fakta juga menjelaskan bahwa kemampuan gerakan ini untuk bertahan hampir satu abad dan berkembang tidak terlepas dari figur elite pemimpin yang sekaligus melekat padanya beberapa kekuasaan yang menjadi kekuasaannya.

Jurdi (2004) menuliskan bahwa konfigurasi elite MD pasca Orba mempunyai pengaruh langsung terhadap kekuasaan elite. Peran yang diartikulasikan oleh elite MD sesuai dengan fungsinya untuk mempengaruhi individu atau pihak-pihak lain sehingga usaha itu akan sesuai dengan tujuan ataupun kepentingan elite. Meminjam pandangan Putnam¹³, elite lebih memiliki banyak kekuasaan dibandingkan dengan yang lainnya, dalam MD terdapat tiga kategori kekuasaan elite: *pertama*, kekuasaan elite sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain termasuk anggota dan simpatisan MD; *kedua*, kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan organisasi; *ketiga*, kekuasaan sebagai

¹³ Robert D. Putnam. *op.cit.*

kemampuan untuk mengalokasikan nilai-nilai secara otoritatif.¹⁴

Secara konsepsional, dalam memandang kekuasaannya, elite MD, dalam pandangan beberapa peneliti, menjadi faktor penentu bagi perjalanan MD di masa depan. Dalam hal ini kelompok elite mana saja yang paling berpengaruh dalam struktur kepemimpinan MD yang pada akhirnya akan mempengaruhi orientasi politik MD dan gerakan MD pada umumnya dalam bidang sosial kemasyarakatan serta pembaruan keagamaan sebagaimana yang menjadi cita-cita besar pergerakan ini. Konsep elite yang berkuasa (*the ruling class, the ruling elite, atau the power elite*) sebagaimana yang digambarkan oleh Mosca, Pareto, Mills, dan Lasswell.¹⁵

MD dan NU memang secara nyata memberikan dukungan kepada JK-Win, sehingga banyak warga MD dan NU “tidak tahu” kalo organisasinya mendukung JK-Win. Demikian juga secara hirarki gerakan, sosialisasi juga tidak jalan. Pilpres 2009 sudah usai, kemenangan SBY-Bud adalah suatu kenyataan, berbagai analisis pun muncul dengan berbagai argumen hasil penelitian yang “ilmiah”. Hasil Pilpres 2009 SBY-Bud keluar sebagai jawara, disusul Mega-Pro, baru JK-Win yang didukung banyak ormas Islam dan juga tokoh Islam. Ini membuktikan bahwa isu primordial dan agama sudah tidak laku lagi, setidaknya kata para pengamat, meskipun masjid tambah membludag jamaahnya.¹⁶

Dalam pandangan beberapa kelompok MD, fenomena ini memang perlu dikaji lebih lanjut, JK-Win yang secara nyata lebih baik agamanya dari pada SBY-Budiono. Mereka membuat contoh, Budiono punya kekayaan 20 M, tetapi belum haji. Kemudian, dukungan Parpol “Islam” (PPP, PKS, PAN, PKB, PBB, PMB, dan lain-lain) kepada SBY-Budiono memang membuktikan bahwa partai “Islam” lebih mementingkan bagian kekuasaan (dengan berbagai alasan) daripada membela kepentingan dan marta-

¹⁴ Syarifuddin Jurdi, 2004), *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik, Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah sesudah Orde Baru*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004, hlm. 67.

¹⁵ Lihat beberapa karya berikut ini. T. B. Bottomore, dalam Sartono Kartodirdjo, *op.cit.* hlm.25. Lihat pula Suzzane Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite*, hlm.23. Periksa juga Richard Bellamy, *Teori Sosial Perspektif Itali*, Jakarta: LP3ES,1990, hlm. 54.

¹⁶ Sumber: Milist alumni ipm-irm di alumniipmirm@yahoogroups.com.

bat ummat.¹⁷

Dalam pembahasan ini akan dideskripsikan mengenai dinamika internal MD (antar elite) dalam aksi politik, dan dinamika respon MD sebagai model 'politik' MD. Baik secara struktural, kultural atau praktis.

A.1. Metode Kelompok Khitois dan Moderat Pasif

Dua pertanyaan kunci dalam bagian ini; bagaimana kelompok moderat pasif dan khittois (metode berpolitiknya sama) di MD melakukan penghadangan terhadap dominasi gerakan struktural atau kelompok fundamentalis politik dalam MD? Bagaimana kelompok MD moderat atau MD dengan khittah ini melakukan upaya dekonstruksi atau membangun pemahaman baru mengenai politik alokatif MD (*allocative politics*), untuk membedakan dengan *constitutional politics* model Din Syamsuddin (1990), menerjemahkan kembali gagasan *high politics* yang dikontraskan dengan *low politics* yang dilakukan parpol (Maarif, UQ/1995).¹⁸

Kendati MD bukan merupakan partai politik, tetapi langkah perjuangan MD melahirkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang tidak kalah pentingnya dari kerja-kerja politik melalui jalur kekuasaan. KGPAA Paku Alam VIII pada tahun 1963 memberikan kesaksian, bahwa “meskipun persyarikatan MD itu sejak semula tidak bergerak di lapangan politik, akan tetapi lahirnya MD yang dipimpin oleh almarhum Ahmad Dahlan, sesungguhnya menimbulkan perubahan pandangan yang besar di kalangan masyarakat umum dan dalam lingkungan kaum agama khususnya.” (Departmen Penerangan, 1963: 210). Alfian bahkan menunjuk MD sebagai *political-force* (kekuasaan politik), sekaligus sebagai agen perubahan sosial dan pembaharuan keagamaan, kendati gerakan Islam ini bukan partai politik.

Menurut pandangan kubu khittois yang diwakili oleh Haedar Nashir¹⁹

¹⁷Sumber: Budi Setiawan, dalam milis Angkatan Muda Muhammadiyah

¹⁸ Marpuji Ali, Ketua PWM Jawa Tengah, dalam *Opini*, Reposisi Politik Alokatif Muhammadiyah, yang dimuat di situs <http://news.okezone.com/read/2010/04/28/58/327092/reposisi-politik-alokatif-muhammadiyah-2>.

¹⁹ Haedar Nashir disebut sebagai penjaga gawang ideologi MD karena sikapnya yang selalu taat pada garis haluan organisasi, khittah, dan keputusan-keputusan yang mengikat.

bahwa MD baik dengan khittah maupun tanpa khittah, sesungguhnya telah berada di jalur yang tepat, sebagaimana pihak atau organisasi lain yang mengambil jalur perjuangan politik sama tepatnya manakala semuanya dilakukan dengan terfokus, optimal, sesungguhnya dan lebih penting lagi dengan mengarahkan segala potensi dan berpijak pada idealisme. Kepalan tangan kecil dalam jalur gerakan dakwah kemasyarakatan manakala disatukan dalam ratusan ribu hingga jutaan warga MD dalam menyangga gerakan Islam ini, insya Allah akan melahirkan karya amaliah yang luar biasa. Sesungguhnya kepalan tangan MD tidaklah kecil, karena keberhasilan gerakannya sampai saat ini, secara umum, justru dihasilkan dari kerja-kerja kultural dan kemasyarakatan yang dilakukannya secara terus menerus dan tersistem.²⁰

Elite MD sebagai bagian dari *interest group* selama ini sudah memainkan peran politik lobi, komunikasi politik, sosialisasi politik, pendidikan politik, melakukan kritik atau tekanan publik, dan distribusi kader politik atau kader profesional lainnya yang dapat masuk ke seluruh lini pemerintahan.²¹ Peran kelompok kepentingan tersebut dengan tetap dilakukan berdasarkan spirit dakwah *al-amr bi al-ma'ruf wa nahyu 'an al-munkar*, yang dilakukan dengan pendekatan berwajah kultural, tidak sebagaimana peran politisi dan partai politik yang serba terbuka, vulgar dan sarat tawar-menawar kepentingan pragmatis. Dalam menjalankan fungsi kelompok kepentingan tersebut dapat dilakukan melalui kelembagaan sesuai mekanisme yang

²⁰ Dalam posisi yang demikian maka sebagaimana Khittah Denpasar, MD dengan tetap berada dalam kerangka gerakan dakwah dan tajdid yang menjadi fokus dan orientasi gerakan utama gerakannya, dapat mengembangkan fungsi kelompok kepentingan atau sebagai gerakan sosial *civil-society* dalam memainkan peran bangsa dan bernegara tanpa harus bergumul dalam kancah perjuangan politi praktis sebagaimana partai politik. Kelompok kepentingan ialah kelompok dalam masyarakat diluar pemerintah dan diluar partai politik yang melakukan dukungan dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. MD sebagai gerakan sosial-keagamaan yang memerankan fungsi kelompok kepentingan sebagai kekuatan masyarakat madaniah merupakan format yang tepat dalam memainkan peran politik kebangsaan untuk mewujudkan indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil makmur, sejahtera, bermartabat dan berdaulat sebagaimana cita-cita nasional kemerdekaan tahun 1945.

²¹ Haedar Nashir, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Pembaharuan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010, hlm. 176.

berlaku dalam MD, maupun perseorangan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip, etika dan kepentingan MD.

Kelompok kultural berusaha mengakumulasi modal organisasi: kesatuan, obyektivitas, moralitas atau akhlak dan kearifan dalam menjaga batas-batas prinsip gerakan maupun dalam menjalankan fungsi kelompok kepentingan tetap diperlukan dari seluruh pelaku gerakan MD. Hindari pemaksaan kehendak, berjalan sendiri tanpa memperhatikan koridor organisasi dan sikap berlebihan atau melampaui takaran dalam menjalankan fungsi politik kepentingan atas nama MD. Sebab, manakala peran atau fungsi kelompok kepentingan itu dilakukan melampaui takaran atau kebablasan, maka proses dan hasil akhirnya akan sama dengan fungsi atau peran partai politik dan masuk ke kancah atau jalur perjuangan politik-praktis.

Pada situasi demikian, maka selain selalu memperhatikan spirit bingkai khittah maupun prinsip-prinsip organisasi yang selama ini menjadi manhaj gerakan MD, pada saat yang sama perlu dikedepankan kearifan dan etika dari para elite atau pelaku gerakan kelompok kepentingan dan MD secara keseluruhan. Di sinilah integritas antara koridor organisasi dalam mengoptimalkan peran MD dalam politik kebangsaan, selain itu dapat dikembangkan pula jaringan kader politik kebangsaan, baik yang berada dan melalui jalur partai politik dan lembaga legislatif, maupun di jalur lembaga eksekutif dan yudikatif serta lembaga-lembaga pemerintahan lainnya.

Jika secara kelembagaan MD tidak memainkan fungsi politik-praktis, maka secara fungsional dan non-institusional dapat dikembangkan jaringan kader politik sebagai langkah pengembangan potensi kader di berbagai struktur kelembagaan di luar organisasi. Pengembangan jaringan kader politik atau kader kebangsaan tersebut berfungsi sebagai kepanjangan tangan atau anak panah gerakan MD. Dengan demikian sekaligus dapat dipecahkan problem kesenjangan hubungan antara kader bangsa dengan persyarikatan, yang selama ini sampai batas tertentu menjadi keluhan sementara pihak. Lebih jauh lagi, melalui jaringan kader politik kebangsaan tersebut dapat dioptimalkan misi MD dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui para kadernya di ranah kebangsaan.

Memang, suara ormas Islam besar seperti NU dan MD gampang menjadi pusat perhatian dan rebutan banyak pihak. Meminjam istilah

KH Mustofa Bisri, seringkali NU dan MD terlampaui *ge-er* (*gede rumangsa*). Jika MD terus terlibat aksi dukung-mendukung dan bahkan lebih mempertegas sikap partisansinya, tradisi politik yang kurang baik akan terulang. Maksudnya, jika nantinya ada salah satu pimpinan atau mantan pucuk pimpinan MD punya keinginan yang sama dengan Amien, pasti akan didukung juga. Pada akhirnya, sangat mungkin orang yang ingin menjadi pengurus MD, hanya menjadikan amanah itu sebagai batu loncatan untuk lebih mempermudah menggapai tangga kekuasaan (baca: politik). Warga MD pun, akan terbebani terus-menerus oleh “ambisi” politik para pemimpinnya.

Kulturalis akan selalu teriak bahwa MD bukan dan tidak akan menjadi partai politik. Sekali MD tetap MD, selalu melakukan amar makruf nahi munkar untuk kebaikan masyarakat seluruhnya. Itulah kalimat mantra para kelompok MD kultural yang percaya sepenuhnya dengan jalan dakwah yang dipilihnya di luar politik kekuasaan.

Dari awal mulanya tampaknya organisasi ini memang tidak didesain untuk bergerak di arena politik. Sejak kongres di Solo yang ke-18 sikap MD terhadap politik tidak berubah: netral.²² Tentang urusan politik, demikian keputusan kongres tersebut, MD berpendirian netral. MD tidak mengutamakan salah satu partai politik di atas partai yang lain, malah memberi hormat kepada partai-partai itu dengan kehormatan yang sepadan. Sebuah statemen yang luar biasa diplomatisnya, dan sekaligus menunjukkan ketegaran MD untuk tidak tergoda politik. Namun, tentu melihat politik MD dan elitnya adalah dua hal yang secara teoritik berbeda tapi, meminjam bahasa Syafii Maarif, saling berhimpitan dalam praktik. Kelompok elite MD kultural biasa menambahkan argumen bahwa MD pernah menolak tawaran pemerintah pada awal formasi Orde Baru, agar MD menjadi partai politik sebagai representasi politik kalangan Islam modernis.²³

Kemudian, beberapa tahun berselang konsep itu direvisi oleh DS menjadi netral aktif dalam Pemilu 2009, karena dianggap netral pasif dengan alasan sebagaimana yang dikutip dibawah ini:

“Muhammadiyah itu tidak kemana-mana dan menjaga jarak dengan partai politik sehingga akibatnya kita banyak berada di luar. Tetapi sekarang ini netralnya

²² Hajriyanto Y. Thohari, *makalah*, Muhammadiyah dan Politik, 2001.

²³ *Op. cit*, 2001

aktif, kita tidak menjaga jarak dengan parpol”.²⁴

Kelompok politik moderat dan khittois MD sebenarnya adalah kubu yang sangat kuat dalam MD, sehingga mampu mempengaruhi berbagai keputusan organisasi yang cukup penting. Munculnya dakwah kultural merupakan kemenangan kubu ini mengingat tarikan politik praktis yang sangat kuat. Tapi, dalam waktu bersamaan, kubu MD fundamentalis politik berhasil memutuskan Khittah Denpasar yang berujung pada dukungan MD kepada Amien Rais dalam Pemilu 2004. Kedua kubu ini bersitegang dalam dukungan pada Pilpres 2009 lagi yang menjadi klimaks keterlibatan DS dalam politik praktis. Dalam kasus ini, DS menjadi bulan-bulanan kubu kultural, bahkan DS sempat didemo oleh warga MD di beberapa daerah akibat sikap frontal anti-SBY yang dilakukannya sebagai ketua umum PP Muhammadiyah.

Dakwah Kultural sebagai strategi perubahan sosial dan politik bertahap sesuai dengan kondisi empirik yang diarahkan kepada pengembangan kehidupan Islami sesuai dengan paham MD, yang bertumpu pada pemurnian pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dengan menghidupkan ijtihad dan tajdid. Sehingga, purifikasi dan pemurnian ajaran Islam tidak menjadi kaku, rigid dan eksklusif, tetapi terbuka dan memiliki rasionalitas yang tinggi untuk dapat diterima oleh semua pihak. Dengan memfokuskan pada penyadaran iman melalui potensi kemanusiaan, diharapkan umat dapat menerima dan memenuhi seluruh ajaran Islam yang kaffah, secara bertahap sesuai dengan keragaman sosial ekonomi, budaya, politik dan potensi yang dimiliki oleh setiap kelompok umat.²⁵

Atas dasar pemikiran tersebut dakwah kultural dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu pengertian umum (makna luas) dan pengertian khusus (makna sempit). Dakwah Kultural dalam arti luas dipahami sebagai kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia dengan makhluk berbudaya dalam aan dan berperadaban yang dijiwai oleh pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, yang

²⁴ Sumber: <http://www.pemiluindonesia.com/berita-pemilu/muhammadiyah-netral-dalam-pemilu-2009.html>

²⁵ QS. Ali Imran: 159

murni bersumber dari Al-Quran dan al-Sunnah, dan melepaskan diri dari kultur dan budaya yang dijiwai oleh kemusyrikan, takhayul, bid'ah dan khurafat.²⁶

Adapun dalam pengertian khusus, dakwah kultural adalah kegiatan dakwah dengan memperhatikan, memperhitungkan dan memanfaatkan adat-istiadat, seni, dan budaya lokal, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dalam proses menuju kehidupan Islami, sesuai dengan manhaj MD, yang bertumpu pada prinsip *salafiyah* (purifikasi) dan *tajdidiyah* (pembaharuan).²⁷

Munculnya konsep dakwah kultural, sebagaimana diputuskan oleh Sidang Tanwir Muhammadiyah, Januari 2002, didorong oleh keinginan MD untuk mengembangkan sayap dakwahnya menyentuh ke seluruh lapisan umat Islam yang beragam sosial kulturalnya. Dengan dakwah kultural, MD ingin memahami pluralitas budaya, dakwah yang ditujukan kepada mereka dilakukan dengan dialog kultural, sehingga akan mengurangi benturan-benturan yang selama ini dipandang kurang menguntungkan, namun tetap berpegang pada prinsip pemurnian (*salafiyah*) dan pembaharuan (*tajdidiyah*). Dengan demikian, dakwah kultural sebenarnya akan mengokohkan prinsip-prinsip dakwah dan amar makruf nahi munkar MD yang bertumpu pada tiga prinsip *Tabsyir*, *Ishlah* dan *Tajdid* (TIT). Konsep ini dinilai pesimis oleh Amin Rais, sebagaimana kutipan yang penulis cantumkan di awal bab 1 sebagai konsep pelarian atas kegagalan dalam “perebutan kekuasaan”.

1. Media yang Digunakan

Artikulasi dan agregasi politik kaum khittois dan moderat pasif MD selama ini memang bisa dibilang mengalami involusi (jalan di tempat). Namun, bisa juga dibilang pertahanannya sangat dinamis (banyak arena digunakan) yang memang dipengaruhi oleh modalitas *leadership* dalam MD yang kaya dengan pemikiran, wacana, dan didukung anak muda

²⁶ Tim PP Muhammadiyah, Pedoman Umum Dakwah Kultural Muhammadiyah, 2002, p. 21, diperkaya dengan prasaran dari Lembaga Seni Budaya PP Muhammadiyah.

²⁷ Ibid. diperkaya dengan prasaran dari Majelis Tabligh PP Muhammadiyah.

progresif melalui berbagai penerbitan dan forum pertemuan kultural. Ingat, bahwa MD tidak dipimpin oleh satu orang tapi 13 orang sebagai representasi banyak kepentingan dalam masyarakat MD yang dikenal heterogen dalam berbagai varian dan *background* sosialnya. Dalam konteks ini sangat perlu melihat gerakan politik kultural MD dalam saluran-saluran komunikasi yang digunakan para elite MD.

a. Media Internal Muhammadiyah

MD mempunyai dua model media. *Pertama*, media cetak. MD memiliki media massa cetak yang cukup tua yaitu Suara Muhammadiyah (SM) yang eksis sejak zaman Hindia Belanda (sejak 1915) sebagai corong utama kelompok Islam modernis yang dikenal dengan majalah “SM” baik untuk internal (penguatan organisasi) atau eksternal sebagai *da’wah bil qalam* atau dakwah dengan tulisan, yang tersebar di seluruh penjuru tanah air, di kantor dan amal usaha MD dan di rumah-rumah kader, anggota dan simpatisan MD. Media massa cetak juga dipublikasi oleh ortom, lembaga, majelis, dan MD di daerah sehingga kalau dikumpulkan jumlah penerbitan media syiar yang juga bisa jadi manifestasi pemikiran ini jumlahnya ratusan.²⁸

Media ini terbukti sangat efektif untuk membentuk ideologi dan cara berfikir anggota MD di daerah, bahkan ada elit MD yang mengatakan bahwa bagi warga MD, SM ini menjadi seperti kitab suci kedua setelah al-Qur-an. Ketika Pemilu 2004, corong ini dimanfaatkan untuk mengkampanyekan Amien Rais, dan pada Pemilu 2009 hal ini tidak terlalu kentara lantaran elit-elit MD tidak satu suara soal dukungan ke sosok JK-Win.

Kedua, media media online. Media yang belakangan cukup banyak memberikan *update* berita secara lebih cepat secara online untuk anggota Muhammadiyah di tingkat kota atau cabang istimewa di luar negeri. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa media ini efektif untuk mobilisasi suara dalam pemilu, sebab pengujung media ini sudah merdeka secara politik, dan tidak bisa dipengaruhi begitu saja.

Media yang kedua yang memanfaatkan jaringan internet adalah *www.muhammadiyah.or.id* yang dikomandani oleh aktivis muda MD yang berkantor di Jalan KHA Dahlan 103. Media ini diharapkan menjadi

²⁸ Di Jatim ada Matan, di Jogja ada Suara Aisyiyah, Sinar, Kuntum, Media Nasyiah.

semacam *detik.com* versi MD yang bisa memberitakan beragam kegiatan, pemikiran, MD melalui *cyber space*. Jaringan ini bisa juga untuk kepentingan pendidikan politik bagi anggota dan simpatisan MD. Berdasarkan laporan pengelola website ini, ribuan pengunjung hadir setiap hari, baik dari dalam dan luar negeri.

Selain dimiliki PP Muhammadiyah, media online hampir dimiliki semua ortom, majelis, lembaga, pusat studi, lembaga pendidikan baik dasar, menengah, dan tinggi, di bawah payung persyarikatan MD.

b. Media Massa Publik

DS bisa dibilang elit MD yang paling banyak dicari wartawan TV atau media massa cetak. Kubu MD non politik/apolitik/kultural menganggap DS sebagai politisi ulung, selain sebagai selebritis yang juga sering menggandeng artis (mengelola pengajian kultural yang beranggotakan para artis dan selebritis).

Republika, dan majalah-majalah Islam adalah media yang paling banyak digunakan DS untuk menyuarakan kritik kepada pemerintah atau pendapat/respon MD atas persoalan yang terjadi, misalnya masalah penanganan bencana, BLT, kenaikan harga BBM, DPT yang kacau. DS, layaknya seorang ketua partai, selalu pedas mengkritik pemerintah SBY terlebih menjelang Pemilu 2009.

Selain itu, dalam berbagai media waktu itu, DS menggalang kekuatan poros tengah jilid dua atau poros Islam yang menghimpun partai-partai Islam untuk mengusung calon presiden dan wakil pada Pemilu 2009. Ini memang sudah diluar pakem MD, sebab ada kepanikan pada elit MD akan hilangnya kekuasaan dalam pemerintahan.²⁹ MAR terlihat tidak banyak meng-*counter* tindakan DS, sebab di belakang DS ternyata banyak yang mendukung langkahnya, termasuk Buya Syafii Maarif yang memang satu suara, terutama dalam mendukung JK dan mengkritik SBY. Kepentingan Syafii memang agar ada suksesi kepemimpinan nasional agar diganti orang yang agak 'gila' untuk membawa Indonesia memasuki zaman yang radikal, berani, dan kuat.

²⁹ Baca Majalah *Tempo*, Satu Mentari Dua Warna, Partai Matahari Menantang Pendahulunya, Mengandalkan Din Syamsuddin, Majalah *Tempo* edisi 5 April 2009.

2. Pengaruh Terhadap Keputusan Organisasi

MD bisa dibilang sukses dalam penggunaan media, yang terbukti sangat efektif untuk mentransformasikan gagasan-gagasan organisasi, di luar urusan politik, dari pusat sampai bawah, baik melalui struktur MD, lembaga, maupun organisasi otonom.³⁰ Namun, organisasi ini ternyata juga “sukses” dalam membatasi kadernya terjun dalam politik. Artinya apa? Selama ini struktur organisasi digunakan lebih banyak untuk keperluan non-politik ketimbang politik praktis, meski banyak orang tahu betapa besar potensi MD tersebut. Ini baru kesimpulan awal, di level lokal beberapa elit MD sukses menggunakan jaringan MD untuk mensukseskan calon bupati atau calon anggota legislatif.

MD memang organisasi yang gemuk secara struktur, mulai dari Pusat dengan dewan penasehat, majelis dan lembaga serta organisasi otonom. Itu baru di tingkat pusat, belum ‘guritanya’ sampai ke desa-desa. Hal ini sebenarnya potensial untuk mobilisasi politik dalam pemilu atau menyikapi persoalan lainnya terkait kebijakan negara/pemerintah.

Organisasi Otonom (ortom) didominasi oleh kalangan angkatan muda, selain Aisyiyah ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Hizbul Wathon, dan Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ada juga sayap yang lain seperti JIMM, dan puluhan NGO yang mempunyai ikatan emosional dengan Muhammadiyah, seperti Maarif Institute, al-Maun Institute, PSAP, LaPSI, dan sebagainya. Semua ortom ini mempunyai jaringan sampai ke level bawah.

Meskipun organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan bukanlah organisasi politik, proses-proses politik yang berlangsung pada tingkat kenegaraan selalu memberikan pengaruh bagi eksistensi ormas-ormas keagamaan. Kenyataan itu juga bukan pengecualian bagi MD sebagai salah satu ormas Islam. Dari waktu ke waktu dinamika politik selalu memberikan pengaruh kepada MD, baik positif maupun negatif.³¹

³⁰ Ada 7 organisasi otonom di MD. Silakan dibaca lampiran mengenai pembagian kerja dan lampiran struktur organisasi MD di bagian akhir tesis ini.

³¹ Pradana Boy ZTF, opini, PAN, PMB, dan Muhammadiyah, Sumber: *Harian Seputar Indonesia*, Rabu 1 April 2009.

MD menyelenggarakan Sidang Tanwir 5-8 Maret 2009 di Bandar Lampung, satu purnama menjelang Pemilu 9 April. Tanwir kedua dalam periode kepemimpinan DS (2005-2010) kali ini mengusung tema MD Membangun Visi dan Karakter Bangsa?³² Isu yang berkembang kemudian mengenai pencapresan DS, netralitas MD dalam Pemilu 2009, lalu pertanyaan mengemuka: apakah Tanwir menjadi ajang konsolidasi MD dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

DS seringkali menegaskan sikap politiknya yang diklaim sebagai sikap MD (kadang-kadang secara simbolik), pemahaman mengenai partai politik dan politik itu berbeda sebagaimana rumusan Sidang Tanwir Denpasar (2001). MD mengintensifkan politik kebangsaan dengan tetap terlibat dalam politik. DS menyimpulkan mengenai politik warga MD dalam era multipartai ini terbagi menjadi dua kubu yang tarik ulur. Kubu pertama, yang menghendaki MD dalam politik mengambil posisi netral pasif. Kedua, ada kelompok yang menghendaki MD harus netral aktif. Dalam alam pikiran DS, MD sebagai gerakan dakwah, tidak mungkin lepas dan tidak berpolitik karena Islam sebagai basis keyakinan ideologinya, mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan politik.³³

Memang Tanwir kali ini dilaksanakan di tengah pancaroba politik menjelang pemilu, dengan menghadirkan SBY (presiden) pada pembukaan Tanwir dan Jusuf Kalla (wakil presiden) dalam penutupan sidang. Ini bentuk komunikasi politik atau komunikasi organisasi dalam kerangka legitimasi negara atas keberhasilan dan kebesaran MD. Selain itu, hal ini dimaknai bahwa MD mengakomodasi negara, atau elit MD ingin menunjukkan kiprah MD kepada pemerintah (presiden dan wakilnya).³⁴

Dalam Tanwir yang dihadiri 200-an peserta dari 33 propinsi yang terdiri dari berbagai latar belakang dan asal utusan peserta, mulai dari elite pejabat PP Muhammadiyah, ortom, dan PW Muhammadiyah di 33 propinsi, dengan segala harapan dan kecemasan melihat politik yang

³² Fajar Riza Ul Haq (Direktur Program MAARIF Institute), opini *Republika*, Muhammadiyah dan Suksesi Nasional 2009, 3 Maret 2009.

³³ Diolah dari berbagai sumber di media pemberitaan baik cetak atau online.

³⁴ David Efendi, dalam *Jurnal Tanwir Muhammadiyah*, edisi 2, 2009.

berkembang, sebab Tanwir ini ditengarai syarat muatan politik. Selain itu, penulis membuat *taksonomi* kepentingan peserta dan elite dalam forum tertinggi MD di bawah Mukhtar tersebut. Ada setidaknya empat golongan kepentingan dan sikap politik di forum ini.

Kelompok pertama, kelompok Muhammadiyah politik yang terbagi menjadi dua kubu besar yaitu Muhammadiyah PAN dan Muhammadiyah-PMB. *Pertama*, kelompok Muhammadiyah-PAN. Kubu ini sangat berkepentingan untuk tetap mendapat dukungan elite MD di level pusat atau di forum tanwir, setidaknya tidak ada cercaan untuk mereka yang aktif di PAN. Mereka juga mulai meneropong untuk memenangkan orang-orangnya atau agennya dalam struktur 13 PP Muhammadiyah pada Mukhtar ke-46 di Yogyakarta 2010. Kelompok kedua, Muhammadiyah-PMB, mereka yang kehilangan akses pasca kongres PAN yang juga merupakan arena basah untuk diperebutkan kader-kader politisi MD. Hal ini menjadi penanda bahwa hubungan MD dan partai politik tidak pernah berhenti meski keputusan organisasi membatasi gerak-gerik langkah elitnya.³⁵

Tokoh kelompok ini masih didominasi oleh 'pemilik' dan pendiri PAN, yaitu kubu Amien Rais (MAR) atau disebut kelompok Pandean Sari (dekat dengan Cikeas?). MAR masih mempunyai basis dukungan luar biasa di wilayah MD. Sebagai bukti, undangannya masih *dikarubke* oleh PWM dan PWA. Kelompok ini juga dihuni oleh elite AMM yang kritis dan pragmatis/oportunis. Dalam hal ini bisa disebutkan nama Izzul Muslimin (ketua umum Pemuda Muhammadiyah, belakangan masuk dalam jajaran ketua DPP Partai Hanura), jajaran elite DPP PMB seperti: Imam Addaruqutni (Ketua Umum DPP PMB), Makmun Murod, Mashuri Mashuda, Mujadid Rais, Sanusi Ramadhan, Ahmad Rofik (mantan Ketua DPP IMM, Sekjend PMB).³⁶

Mereka yang tergabung dalam barisan PM (Pemuda Muhammadiyah) bermanuver secara berani meminta agar Sidang Tanwir tersebut membe-

³⁵ Moeslem Abdurrahman (PP Muhammadiyah) pernah terlibat menjadi calon ketua Umum PAN pada kongres PAN di Semarang berkompetisi dengan Hatta Rajasa, Dradjat Wibowo, dan Sutrisno Bachir yang dimenangkan oleh Sutrisno Bachir lalu pada kongres berikutnya dimenangkan oleh Hatta Rajasa (2010).

³⁶ <http://www.arsip.net/id/link.php?lh=BA0ACQtQBAXX>

rikan sikap atas usulan pencapresan DS. Mereka mengklaim, bahwa PM sebagai organisasi akan mengikhlaskan bila kader terbaik MD bisa menjadi pimpinan nasional. Hal tersebut sebagai respon PM atas mengemukanya usulan sejumlah parpol yang menyebutkan ketua umum PP Muhammadiyah, DS, sebagai kandidat capres atau cawapres.³⁷ Mereka, barisan elite PM meminta Sidang Tanwir segera memberikan sikap terhadap aspirasi itu. Menurut Izzul, sikap ini sangat penting agar bisa menjadi pedoman bagi warga MD di seluruh Indonesia pada Pemilu 2009 mendatang. Pihaknya juga berpendapat, jika ada kader terbaik MD yang diusulkan bisa menjadi pimpinan nasional, maka sewajarnya jika MD mengikhlaskan dan mendukungnya sebagai kontribusi MD bagi kepentingan bangsa dan negara.³⁸

Kelompok kedua, kelompok kultural atau disebut juga MD khittois, atau kelompok pendukung dakwah kultural hasil keputusan Tanwir Bali, yang secara bersamaan juga menghasilkan 'khittah politik' Denpasar yang mendukung pencapresan MAR. Kelompok ini bekerja keras, sebagai pekerja tukang ketik, administrator³⁹ bekerja untuk merumuskan keputusan yang bisa menghadang kubu politik termasuk tidak menyinggung terlalu jauh keterlibatan DS dalam capres PMB dan manufer-manufer lainnya.

Kelompok ini bisa dibayangkan, meminjam istilah yang dikenalkan oleh Herbert Feith (1962), seperti seorang 'Bung Hatta' yang administrator, yang pandai membuat rumusan pemikiran ketimbang menjadi *solidarity*

³⁷ Izzul mengatakan, di sejumlah wilayah masih ada yang berbeda pendapat agar Sidang Tanwir memutuskan tentang usulan pencapresan dan pencawapresan DS ini. Diakuinya, parpol yang baru mendukung pencapresan DS hanya dari PMB. Sementara PAN belum menentukan sikap. Sejatinya, Pemuda Muhammadiyah tidak mengusulkan atau meminta pencapresan itu, tapi hanya merespon atas adanya usulan parpol itu saja, sehingga kewenangan itu ada di parpol sendiri. Karena Sidang Tanwir Muhammadiyah 2009 dilakukan sebelum pemilu, pengusulan capres dilakukan agar MD memiliki kejelasan sikap. Sikap MD penting agar masyarakat dan warga MD punya kejelasan sikap soal itu.

³⁸ Sumber berita: M Rizal Maslan, 'Muhammadiyah didesak Putuskan Pencapresan Din Syamsuddin', <http://pemilu09.blogdetik.com/tag/pmb/>.

³⁹ Dari pengantar buku karya Herbert Feith, 1962, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, atau yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Runtuhnya Demokrasi Konstitusi Kami di www.jakartabooks.wordpress.com/2009/09/07/runtuhnya-demokrasi-konstitusional-kami/

maker. Kekuasaannya adalah terhadap keputusan sebagaimana analisa keputusan Putnam. Merekalah yang berperan atas segala rumusan sampai keputusan permusyawaratan dalam puncak MD. Ada pun tokoh kelompok ini antara lain: Haedar Nashir, Rosyad Sholeh, Zamroni, Fasichul Lisan. Mereka berlatar belakang pendidik: dosen, guru, birokrat.

Sebagai hasil kerja keras kubu ini, rumusan hasil sidang tanwir itu terkesan apik dan jauh dari aroma politisasi. Dalam salah satu penggalan rekomendasi Tanwir itu berbunyi: MD mendesak partai politik dan seluruh komponen bangsa untuk tidak menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan belaka yang menjurus pada pragmatisme dan menghalalkan segala cara. Pemilu harus dijadikan momentum untuk menghasilkan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden yang bertanggungjawab dalam menjalankan amanat rakyat mengurus negara atau pemerintah dengan benar. (Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah II 2009 versi lengkap terlampir).

Kelompok ketiga, kelompok semi-kultural atau semi-struktural. Kelompok ini dicerminkan oleh manufer ASM, Bachtiar Effendy, dan DS beserta balatentara pendukungnya. Mereka berhaluan fleksibel dan pandai mencari basis legitimasi di setiap tindakannya. Politik tidak boleh kaku, juga tidak boleh terlalu lunak. Kadang dibutuhkan pemimpin yang 'gila' untuk merubah keadaan dan jangan ada yang terlalu mensakralkan jabatan kekuasaan, sebab kata Natsir yang diyakini ASM, bahwa memimpin itu untuk melepaskan.⁴⁰

3. Hubungan dengan Partai Politik

Kelompok ini berpandangan dan berkeyakinan bahwa MD memang bukan organisasi politik atau mempunyai hubungan organisatoris dengan partai tertentu yang mempunyai tujuan-tujuan politik dalam pengertian *the real politics* yaitu mendirikan partai, menguasai kekuasaan politik, menjadi presiden lalu menteri, bukan itu. Tapi bukan berarti MD tidak mempunyai perhatian terhadap politik, karena tadi itu, MD sadar bahwa banyak persoalan sosial duniawiyah ditentukan oleh variablel-variabel kekuasaan,

⁴⁰ Sumber: Autobiografi ASM, Yogyakarta: penerbit Ombak, 2005, hlm. x.

dan variabel-variabel politik. Misalnya, pada masa sebelum kemerdekaan, MD terus berusaha melakukan koreksi, kritik terhadap ordonansi guru yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dibawah payung besar “politik etis”, tetapi pada saat yang sama MD memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kolonialisme. Pada masa kemerdekaan, MD mengirim wakil-wakilnya dalam PPUPKI, yang terkenal ada Ki Bagus Hadikusumo. Namun, sejarah itu sudah selesai dan MD dianggap sudah dan harus kembali ke jalur yang benar, yaitu menjaga jarak dengan partai politik atau politik kekuasaan.

Elite MD bukanlah kelompok elite kemarin sore yang tidak tahu mana batas lautan dan daratan. Strategi selama ini sudah sangat teruji meski dihantui banyak kegagalan dalam dunia politik, namun secara organisasi terbukti daya juang dan strategi yang luar biasa untuk *survival of the fittes*.

Sebagai organisasi yang, sampai rezim SBY jilid satu, masih mempunyai jatah menteri di kabinet yaitu Bambang Sudibyo (termasuk varian Marmud) sebagai Menteri Pendidikan dan Siti Fadilah Supari sebagai Menteri Kesehatan, MD menyampaikan aspirasinya dengan mudah dan juga MD dikenal sudah membentuk jaringan birokrasi semenjak dahulu. Hal ini banyak keuntungan yang sudah didapatkan MD baik praktis maupun politis.

Meski banyak orang menilai menteri MD itu profesional, namun bisa ditebak bahwa peran Amien Rais sangat kuat untuk penempatan menteri orang MD plus rekomendasi pusat Muhammadiyah (Syafii Maarif). Politisasi birokrasi merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri selama ini di Indonesia, sehingga hal ini menjadi saluran elit MD yang efektif untuk mempengaruhi kebijakan. Bahkan, informasinya, Munir Mulkhan (mantan 13 dewa PP Muhammadiyah) yang menjabat sebagai komisioner Komnas HAM, sempat mengintip dari akses birokrasi mengapa MD tidak diberi jatah menteri? Jawabannya, sebagaimana pernah diungkapkan dalam seminar di kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik di Tiro, MD kini sudah tidak diperhitungkan lagi, alias mempunyai daya *bargaining* yang rendah. Ada yang berspekulasi bahwa hal ini disebabkan politik DS yang frontal melawan Cikeas.

4. Respon terhadap Pemilu 2009

Menjelang Pemilu 2009, kelompok khittois melalui Haedar Nashir di Yogyakarta menyatakan bahwa MD rileks menghadapi Pemilu 2009.⁴¹ Statemen ini sangat kontras jika dibandingkan dengan kelompok fundamentalis politik yang diekspresikan oleh DS yang gegap gempita di kantor pusat Muhammadiyah di Jakarta. Respon dingin dan panas dan setengah dingin atau adem ayem itulah menunjukkan ada intensitas politik yang berbeda antara satu elit dengan elit lainnya.

Majelis Pendidikan Kader menyelenggarakan Dialog Nasional Kader Politik MD atau yang disebut sebagai Forum Politisi MD yang diselenggarakan pada 15 Agustus 2009. Peserta kegiatan ini adalah kader dan simpatisan MD yang menjadi caleg terpilih DPR RI dan DPD RI periode 2009-2014. Dengan kegiatan tersebut, figur atau kader MD yang terjun di dunia politik, diharapkan bisa membawa nilai dan visi Persyarikatan bagi pencerahan peradaban bangsa, disamping mewarnai dunia politik di tanah air yang nyaris tanpa *fatsoen* politik lagi. MD dalam tempo yang tidak lama lagi akan genap berusia seratus tahun, tetap diharapkan oleh umat dan bangsa ini bisa terus menampilkan peran dan fungsinya yang lebih berbobot sesuai dengan identitas organisasi.

Di tengah tantangan dan harapan banyak pihak inilah figur dan kader MD yang ingin ambil bagian di dunia politik sudah sangat mendesak untuk memperoleh penyadaran ideologis, pengayaan wawasan mutakhir dan pencerahan yang memberdayakan, guna mendukung kiprah dan kinerja Muhammadiyah yang lebih signifikan. Dalam kepentingan seperti inilah kegiatan Dialog Nasional Kader Politik MD yang diselenggarakan oleh MPK PP Muhammadiyah itu menjadi urgen untuk direalisasikan.

Adapun tujuan spesifik kegiatan ini adalah penyatuan visi ideologis serta konsolidasi kader politik Persyarikatan; penyegaran dan pendalaman kembali identitas dan budaya organisasi MD; penguatan dan pemberdayaan kader politik MD guna mengimplementasikan visi dan misi Persyarikatan di dunia politik; terbentuknya forum anggota DPR RI dan DPD RI kader politik Muhammadiyah dengan menghadirkan sejumlah elite

⁴¹ Sumber: Muhammadiyah.or.id

penting MD.⁴² Kegiatan ini nampak menjadi ajang komunikasi politik kader dan elite MD yang tergabung dalam kelompok Muhammadiyah kultural atau Muhammadiyah etik. Berikut daftar peserta kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 6 November 2009 tersebut:⁴³

PESERTA DARI ANGGOTA DPR RI Periode 2009-2014

Tabel: IV.1

No.	Nama	Partai	Dapel/Utusan
1	Ir. H. Azwar Abubakar, M.M.	PAN	NAD I
2	Ibrahim Sakti Batubara	PAN	Sumatera Utara I
3	Yahdil Andi Harahap, S.H., M.H.	PAN	Sumatera Utara II
4	Nasril Bahar, S.E.	PAN	Sumatera Utara III
5	Hanna Gayatri, S.H.	PAN	Sumatera Selatan II
6	Ir. Taufiq Kurniawan, M.M.	PAN	Jawa Tengah VII
7	Ahmad Mumtaz Rais, S.E.	PAN	Jawa Tengah VIII
8	M. Najib	PAN	Jawa Timur IX
9	Drs. H. Ach. Rubaie, S.H.,	PAN	Jawa Timur XI
10	H. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.	PAN	Lampung I
11	Ratu Munawarah Zulkifli	PAN	Jambi
12	H. Andi Anzhar Cakra Wijaya	PAN	DKI Jakarta I
13	Ir. H. Rudy Sukendra Sindapati	PAN	Jawa Barat XI
14	H. Nasrullah, S.IP.	PAN	Jawa Tengah II
15	Abdul Rozaq Rais	PAN	Jawa Tengah IV
16	Ir. H. Tjatur Sapto Edy, M.T.	PAN	Jawa Tengah VI
17	Dr. Marwoto Mitrohardjono,	PAN	Jawa Tengah V
18	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si.	PAN	Jawa Tengah IX
19	Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si.	PAN	Jawa Tengah X
20	H. Totok Daryanto, S.E.	PAN	DIY

⁴² Pembicara yang hadir diantaranya; Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A, Dr. H. Haedar Nashir, M.Si. dan H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum, Prof. Dr. H. M. Amien Rais, MA. & Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif, Drs. H. Rosyad Sholeh dan Prof. Dr. H. Malik Fajar, M.Sc.

⁴³ Daftar Nama Peserta Dialog Nasional Kader Politik Muhammadiyah (s/d tanggal 6 November 2009. Sumber: Arsip dan dokumentasi Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.

No.	Nama	Partai	Dapel/Utusan
21	M. Syafrudin, S.T.	PAN	NTB
22	A. Taufan Tiro, S.T.	PAN	Sulawesi Selatan II
23	Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow	PAN	Sulawesi Utara
24	H. A. Bakri HM., S.E.	PAN	Jambi
25	Dra. Mardiana Indraswati	PAN	Jawa Timur VII
26	H. Asman Abnur, M.Si.	PAN	Riau I
27	Hj. Dewi Coryati, M.Si.	PAN	Bengkulu
28	Viva Yoga Mauladi, M.Si.	PAN	Jawa Timur X
29	Amran, S.E.	PAN	Sulawesi Selatan III
30	Ir. A. Riski Sadig	PAN	Jawa Timur VI
31	Taslim, S.Si.	PAN	Sumatera Barat II
32	Indira Chunda TS, M.M.	PAN	Sulawesi Selatan I
33	Ir. Heri Achmadi	PDIP	Jawa Timur VII
34	Budiman Sudjatmiko, M.Phil.	PDIP	Jawa Tengah VIII
35	Prof. Dr. Mahyuddin NS., Sp.OG.	P. Demokrat	Sumatera Selatan II
36	Ir. H. M. Rosyid Hidayat	P. Demokrat	Jawa Tengah VI
37	Jeffrie Geovanie	P. Golkar	Sumatera Barat I
38	H. Hajriyanto Y. Thohari, M.A.	P. Golkar	Jawa Tengah IV
39	H. Ahmad Muzani	P. Gerindra	Lampung I
40	Dr. Hidayat Nur Wahid	PKS	Jawa Tengah V
41	Fahri Hamzah, S.E.	PKS	NTB
42	H. M. Anis Matta, Lc.	PKS	Sulawesi Selatan I
43	H. M. Nasir Djamil, S.Ag.	PKS	NAD I
44	Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz	PPP	Banten III

PESERTA DARI DPD RI Periode 2009-2014

Tabel: IV.2.

No.	Nama	Ormas	Dapel/Utusan
1	Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S.	Muh.	NAD
2	H. Irman Gusman, S.E., MBA.	Muh.	Sumatera Barat
3	Hj. Emma Yohanna	Muh.	Sumatera Barat
4	H. Abdul Gafar Usman, M.M.	Muh.	Riau
5	Dra. Hj. Eni Khairani, M.Si.	Muh.	Bengkulu
6	Drs. H. AM. Fatwa	Muh.	DKI Jakarta

No.	Nama	Ormas	Dapel/Utusan
7	M. Afnan Hadikusumo	Muh.	DIY
8	Ir. H. Abd. Jabbar Toba	Muh.	Sulawesi Tenggara
9	Drs. H. Zulbahri M., M.Pd.	Muh.	Kepulauan Riau
10	Denty Eka Widi Pratiwi, S.E.	Muh.	Jawa Tengah
11	Wasis Siswoyo, S.H.	Muh.	Jawa Timur
12	H. Said Akhmad Fawzy ZB	Muh.	Kalimantan Tengah
13	A. Syaifullah Malonda, S.P.	Muh.	Sulawesi Tengah
14	Ir. H. Iskandar Muda B. Lopa	Muh.	Sulawesi Barat
15	Etha Aisyah Hentihu	Muh.	Maluku
16	Mursyid	Muh.	NAD

Kepentingan pertemuan tersebut adalah membangun pemahaman agar politisi Muhammadiyah bisa menempatkan diri dan menghargai khittah Muhammadiyah yang tidak berpolitik praktis, meski diakui Haedar Nashir bahwa khittah tidaklah sempurna, selalu terdapat celah kurang. Tetapi, menurutnya, dengan khittah terdapat garis-garis pembatas sekaligus bingkai bahwa MD sejatinya berposisi dan berperan sebagai organisasi kemasyarakatan (sosial keagamaan) yang bergerak dalam lapangan pembangunan masyarakat. Sebaliknya, MD bukanlah organisasi politik seperti halnya partai politik dengan segala aktivitasnya dalam perjuangan kekuasaan di ranah negara atau pemerintah. Namun, baik organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik, melalui jalur yang berbeda tetap bertemu dalam satu titik yaitu bersama-sama membangun bangsa dan negara. Karena, baik ormas keagamaan atau kemasyarakatan maupun partai politik, memiliki posisi dan peran yang berbeda tetapi sama-sama penting dan strategis dalam membangun kehidupan bangsa dan negara.⁴⁴

⁴⁴ Melalui Mukhtar Ujung Pandang (Makaasar) 1971, MD menegaskan sikap netralnya terhadap partai politik dan aspirasi politik warganya disalurkan melalui berbagai saluran yang tersedia termasuk melalui kader-kadernya yang aktif di partai politik. Afiliasi kepentingan politik dengan Parmusi dan partai-partai lain tidak lagi dikenal dalam struktur kelembagaan organisasi. Sepanjang Orde Baru sebagaimana yang dibahas dalam buku ini, MD lebih memainkan peran-peran politiknya dengan mengalokasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik kenegaraan dan menjaga sikap netralnya terhadap partai. Haedar Nashir, *op. cit.*, hlm.78

MD akan menjadi salah posisi dan tidak tepat manakala dipandang dan diposisikan dari sudut partai politik atau kepentingan perjuangan kekuasaan yang bersifat praktis. Partai politik dan perjuangan kekuasaan itu penting dan strategis, tetapi juga bukan segala-galanya. Urusan bangsa dan negara terlalu penting hanya diserahkan dan menjadi garapan partai politik dan sekedar kepentingan perjuangan kekuasaan belaka. Lebih dari itu, kenyataan juga menunjukkan bahwa kehidupan partai politik dan perjuangan kekuasaan politik kekuasaan sebagaimana menjadi agenda utama urusan politik, tidaklah serba ideal sebagaimana dibayangkan oleh pendukung politik praktis.

B.2. Metode Politik Kelompok Fundamentalis Politik

Sejak sebelum kemerdekaan, MD pernah menjadi anggota istimewa Masyumi, misalnya. Tapi MD bukan parpol, bahwa kemudian MD menyalurkan aspirasinya lewat Masyumi. Sesudah Orde Baru, bersama-sama kekuatan yang lain MD mendirikan Parmusi. Bahkan, ketika Parmusi harus bergabung dengan PPP, MD juga mengirim orang-orangnya untuk terlibat dalam PPP. Tetapi, sekali lagi, MD bukanlah *under bow*, bagian, atau anak organisasi dari partai politik. Ketika terjadi persoalan-persoalan yang serius di PPP, MD segera menyatakan tidak ada hubungan organisasi dengan parpol. Sehingga, secara historis, MD mempunyai hubungan fungsional bukan struktural dengan partai. MD mempunyai hubungan fungsional dengan negara, dengan kekuasaan. Karena memang, selain sebagai gerakan sosial, MD juga sadar bahwa aktivisnya adalah warga negara. Sehingga yang dimaksud dengan hubungan fungsional adalah bahwa MD bukanlah bagian dari organisasi negara dan politik itu.

Selanjutnya, berikut ini adalah paparan secara detail tentang bagaimana elit Muhammadiyah melakukan aksi-aksi politiknya sebelum, pada saat dan setelah Pemilu 2009, yang penulis rekam dan lengkapi dari berbagai sumber yang relevan dan akurat.

1. Media yang Digunakan

Komunikasi politik kultural dan menyerempet politik praktis seringkali dilakukan oleh elite meski berdalih bahwa hal itu adalah dilakukan semata-

mata individual dan bukan organisasi. Kubu struktural biasa berdalih bahwa politik diperbolehkan oleh MD sebagai hak asasi anggota MD, sementara kubu kultural juga berdalih MD untuk tetap tidak berpolitik praktis. Keduanya mendapat legitimasi organisasi dan sama-sama kuat. Praktik politik tidak bisa dihindarkan, fragmentasi juga meluas dimana-mana mengikuti aliran struktur dan kultur yang pragmatis. Ada kesulitan membedakan metode kultural dan struktural. Diskripsi mengenai hubungan elite dan partai berikut membantu memberikan penjelasan kepada kita.

2. Pengaruh Terhadap Keputusan Organisasi

Kelompok fundamentalis politik dalam struktur dan forum nasional yang diselenggarakan MD seperti tanwir dan muktamar selalu memberikan warna yang sangat nyata dari hasil keputusannya. Katakanlah, Amien Rais yang mampu menyihir peserta Sidang Tanwir di Denpasar Bali 2003, yang menghasilkan Khittah Denpasar yang mendukung pencalonan MAR sebagai capres, secara organisatoris dianggap oleh ASM sebagai peristiwa unik dalam sejarah Muhammadiyah (Maarif, 2004). Sementara, Sidang Tanwir Muhammadiyah 2009 di Bandar Lampung menunjukkan kekuatan kelompok khittois yang menghadang kubu DS mengusung kandidat tertentu agar didukung oleh Tanwir kandas di tengah jalan.

ASM mengatakan, perlunya MD mengambil kesempatan membangun bangsa ini dengan menjadi pemimpin, menjadi imam bangsa, bukan sekedar menjadi muadzin yang hanya didengar oleh rakyat yang bersebelahan dengan surau atau langgar. Kapan langgar-langgar wakil rakyat di jantung ibu kota politik mendapat sentuhan hati suci Muhammadiyah, dan kapan jiwa-jiwa pemimpin bangsa ini mencontoh dari kiprah apa yang telah diberikan MD kepada bangsa ini. Politik harus menjadi sarana mewujudkan keadilan bagi semua. Politik seharusnya menjadi penjaga moralitas dan pemihakan kepada yang lemah. Politik menjadi sekolahan, sebagai madrasah Ilahiyah atau pusat belajar menggambarkan masa depan bangsa, dan ini hanya dimiliki oleh MD untuk mempertahankan diri, mempertahankan optimisme di tengah lautan pesimisme (Maarif, 2005).

Tidak banyak pertentangan antara ASM dan DS. Sehingga DS merasa didukung untuk bermanuver bebas dalam merespon politik nasional. Sempat juga DS mengumandangkan poros tengah jilid dua (jilid satu sukses dikomandani MAR). Menurut DS, kemenangan politik Islam di Indonesia tidak hanya ditandai oleh perolehan suara-suara partai-partai Islam dan penguasaan posisi-posisi politik kenegaraan tapi pada sejauhmana nilai-nilai Islam seperti keadilan, kebenaran, persamaan dapat menjadi bagian dari watak bangsa. Oleh karena itu dia berfikir untuk menghidupkan Poros Tengah Jilid Dua atas nama partai Islam, karena DS merasa mengantongi simbol ulama dan Islam yang diharapkan masih bisa mempengaruhi wacana dan pilihan politik elit dan massa lainnya, setidaknya massa MD sendiri.

Dalam laporan Majalah Tempo edisi 30 Maret-5 April 2009,⁴⁵ suara poros tengah itu disuarakan oleh DS pasca Pileg 2009 yang memenangkan 10 partai konstituan pemilu yang lolos ke parlemen. PMB sendiri yang didukung DS habis-habisan itu akhirnya menyabet perolehan suara menjadi partai “nol koma”. Ia menyuarakan agar partai berbasis Islam bersatu membentuk poros tengah jilid ke-2, dimana jilid pertama dibidani dan sukses berkat kepiawaian MAR. DS mengatakan hal ini sebagaimana yang dikutip media, “Silakan ada perbedaan, ada fragmentasi politik, tapi perlu bersatu dalam isu-isu strategis kebangsaan.”⁴⁶

DS dengan modalitas yang dimilikinya, sangat berani dan lugas -- untuk tidak mengatakan frontal-- menyerang SBY laksana partai oposisi. Ia menilai bahwa janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk meningkatkan kekompakan dan kebersamaan Kabinet Indonesia Bersatu II yang disampaikan pada pelantikan Presiden-Wakil Presiden pada 20 Oktober 2009 hanya basi-basi.⁴⁷ Din mengatakan, kekompakan justru menjadi masalah terbesar yang ada dalam pemerintahan Yudhoyono

⁴⁵ Baca detail di Majalah Tempo edisi 30 Maret-5 April 2009, hlm.68-69.

⁴⁶ Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2010 tentang perlunya koalisi partai Islam, *Sinar Harapan*, 12 Desember 2008 yang dipublikasikan kembali dalam Majalah *Tempo* pada 5 April 2009.

⁴⁷ DS mengatakan: “Sayangnya statemen (meningkatkan kekompakan dan kebersamaan) hanya basi-basi.” ucapnya di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (22/10/2009).

selama ini. Komunikasi politik yang ada selama ini hanya subyektif untuk kepentingan sendiri, bukan kepentingan bangsa. Din menuturkan, dalam 5 tahun pemerintahan sebelumnya, banyak ucapan SBY yang tidak sesuai dengan tindakan. Selain itu, selama ini pemerintah seolah-olah dapat menyelesaikan segala permasalahan tanpa bantuan pihak mana pun.

Kenyataannya, pemerintah masih memerlukan uluran tangan dari banyak pihak, termasuk MD, dalam penanganan bencana alam di berbagai daerah. Oleh karena itu DS mengatakan dengan tegas, masyarakat harus bersikap aktif dalam mengawasi roda pemerintahan lima tahun ke depan. Kalau pemerintahan baik, didukung. Jika salah, akan dikritik.⁴⁸

Sayang, gagasan poros tengah tersebut kandas lantaran karisma politik DS tidak sedahsyat yang dibayangkan olehnya sebagai pemegang posisi puncak pimpinan MD *legitimated* dari muktamirin di Malang tahun 2005. Elit-elit lama yang tetap bermain dan berpengaruh menyulitkan langkah DS, ditambah minimnya pengalaman menjadi *political leader* karena hanya sebatas aktif di Golkar, itupun terbatas.

3. Hubungan dengan Partai Politik

a. Hubungan Elit Muhammadiyah dengan PAN

Menurut Munir Mulkhan (2004), tidak pernah ada dokumen yang menyatakan bahwa MD mendirikan PAN, tidak ada. Bahwa Sidang Tanwir Semarang itu memberikan mandat agar MD melakukan ijtihad politik, sampai sekarang belum pernah ada ijtihad politiknya, jadi anda harus cek dari dokumen itu. Jadi, yang melakukan ijtihad politik mendirikan PAN itu Pak Amien. Bahwa kebetulan Pak Amin itu ketua PP ya, tapi bukan MD. Jadi, itu yang perlu anda cari dokumennya, kan tidak pernah ada. Memang benar, jadi ijtihad individual, lalu Pak Amin menyampaikan ke PP, karena harus aktif memimpin partai maka ia minta untuk berhenti dari ketua PP. Sehingga, sesungguhnya hubungan MD dengan PAN sama dengan (yang) dulu, bahkan lebih jauh lagi dibanding dengan hubungan

⁴⁸ http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2009-10-22/47713/Ketua_Umum_Muhammadiyah:_Pernyataan_SBY_Hanya_Basa-basi_

Muhammadiyah yang “bersifat fungsional”, bahkan cenderung “struktural” itu, dengan Masyumi. Yang fungsional itu lain dengan Parmusi, lalu dengan PPP.

Ketika dikaitkan dengan “suasana psikologis” pada sejarah awalnya, seperti diungkap sedikit di awal tulisan ini, berdirinya PAN memang tidak bisa lepas dari MAR. Sedangkan posisi MAR tidak bisa lepas dari MD. Sebagaimana disampaikan oleh Amien Rais sendiri, tanpa seizin MD, sebagai ketua Muhammadiyah dia tidak mungkin bisa memimpin PAN. Artinya, tak sepenuhnya salah jika ada yang berpendapat bahwa, jika NU yang melahirkan PKB, maka MD adalah yang melahirkan PAN. Sebab, jika dalam Tanwir 1998 di Semarang MD tidak rela melepaskan Amien Rais, mungkin PAN tidak jadi berdiri.

Ilustrasi ini menunjukkan betapa keberadaan PAN tidak bisa dilepaskan dari MD. Apalagi, secara simbolis pun ada kesamaan, seperti tercermin dalam lambangnya yang sama-sama gambar matahari. Nah, posisi demikian itulah yang membawa PAN berada pada dua dilema yang harus dihadapi; di satu sisi, (1) sebagai partai inklusif, PAN meniscayakan pluralisme; (2) sebagai partai reformis, PAN juga harus mengikis budaya fanatisme golongan dan kultus individu.

Sementara itu di sisi lain: (1) PAN membutuhkan institusi MD, sebagai fasilitator berdirinya wilayah, daerah, cabang dan ranting, sekaligus sebagai basis pendukung utamanya, sedangkan MD adalah organisasi dakwah Islam yang getol membendung Kristenisasi, selain itu MD juga tidak rela hanya dijadikan “alat fasilitator” saja oleh PAN; dan (2) sebagai partai yang ikut pemilu, PAN membutuhkan dukungan suara yang banyak dan luas. Padahal PAN juga berada pada situasi masyarakat Indonesia yang masih berada pada level -meminjam istilah Kuntowijoyo- ideologis. Pada masyarakat ideologis, efektivitas penggalangan dukungan hanya bisa dibangun melalui fanatisme ideologis dan fanatisme figur sentral yang mengarah pada kultus individu.⁴⁹

⁴⁹ Abd Rohim Ghazali, fungsionaris PP Pemuda Muhammadiyah dan Presidium Pusat Barisan Muda PAN dalam opini *Kompas*, dilema Hubungan PAN-Muhammadiyah, 12 Februari 2000.

b. Hubungan Elite Muhammadiyah dengan PMB

Keberadaan Partai Matahari Bangsa merupakan bentuk protes dari para aktivis muda MD yang merasa terhambat masuk di kepengurusan PAN.⁵⁰ PMB dalam genealogi Partai Politik yang dimuat di Majalah Tempo masuk ke dalam aliran 'beringinis' atau 'kuningis' seperti warna kakak tuanya (PAN-red) dan diposisikan sebagai sempalan PAN.⁵¹ Di belakang pendirian partai matahari merah ini beberapa petinggi MD terlibat seperti DS, ASM, dan elit-elit lokal. Sementara, Haedar Nashir yang sangat 'anti-politisasi' MD diminta diam dan tidak berkomentar soal PMB. Diamnya Haedar dianggap akan mendatangkan keuntungan dan legitimasi bagi PMB. Banyak nada kekecewaan ini menjadi berita yang heboh di MD, misalnya tentang jumlah caleg di PAN yang banyak non-MD dan isu-isu miring lainnya. Nada-nada rivalitas dengan PAN semakin memanas.

Diantara 13 'dewa' Muhammadiyah yang paling dianggap sahwat politiknya tinggi adalah DS, yang berambisi untuk menjadi presiden atau wakil presidennya. Komunikasi politik dijalin dengan berbagai partai baik Islam (PPP, PKS, PKB) atau nasionalis (PDI-P, Golkar). Sambil menunggu hasil survey tentang popularitas dirinya, strategi membangun perahu politik pun dijalankan dengan diam-diam mendukung pendirian PMB.

DS memberi kepanjangan baru bagi PMB sebagai singkatan dari Progresif, Muda dan Bersih. Hal ini diungkapkan DS, dalam tausiyah pada Rapimnas PMB di Hotel Sahid Jakarta pada tanggal 25 Juli 2008. Menurutnya, PMB yang bernomor urut 18 ini harus bergerak dari paradigma pemikiran sebagaimana yang digariskan oleh MD yaitu:

"Islam yang berkemajuan. Islam yang mencerahkan kebudayaan Indonesia. Politik sebagai sarana dakwah, ibadah kepada Allah. Kekuasaan akan diperoleh sebagai konsekuensi. Jihad demi kemajuan negara dan Islam. PMB harus dapat menjadi penghilang noda di tubuh bangsa ini. Semua harus berawal dari diri sendiri."⁵²

⁵⁰ Majalah *Tempo*, edisi 5 April, 2009, hlm. 68

⁵¹ *Op. cit*, suplemen edisi khusus Pemilu 5 April 2009 yang bertajuk 'Patah Tumbuh, Hilang berganti'.

⁵² <http://www.inilah.com/berita/politik/2008/07/25/40420/din-beri-kepanjangan-baru-bagi-pmb/>

Langkah DS bukan tanpa hambatan, di MD banyak *counter elite* yang mengkritik sepak terjang DS tersebut. Hal ini bisa dilihat bagaimana kubu Yogyakarta melakukan 'penolakan' terhadap berdirinya PMB. Walau demikian, DS tidak patah arang, kemana-mana selalu membawa bendera selain ketua Muhammadiyah juga menjadi seolah payungnya Partai Matahari Bangsa. Ini merupakan strategi elit dalam rangka memperoleh kekuasaan.

c. Hubungan Elite Muhammadiyah dengan Partai Lainnya

Dalam sejarahnya, MD pernah ikut bersama-sama melahirkan Parmusi yang jadi basis PPP dan pernah mengutus wakilnya, baik Lukman Harun maupun Jarnawi Hadikusumo. Ada "hubungan fungsional", namun pada saat yang sama secara tidak langsung MD juga memiliki hubungan dengan partai lain, seperti Golkar. Karena banyak anggota MD yang jadi pegawai negeri, bekerja di birokrasi, yang walaupun asalnya terpaksa atau lalu memanfaatkan dan aktif di Golkar. Ada beberapa puluh orang MD yang aktif di PDI, sehingga dengan tegas dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan organisatoris dengan PAN.

Sejatinya, memang beberapa elemen MD mendorong agar MD tetap menyatakan bahwa MD juga punya hubungan struktural dengan PPP, punya hubungan struktural dengan Golkar, dengan PDI-P. Karena, banyak pengurusnya yang jadi pengurus PDI, Golkar, PPP. Jadi tidak bisa dijadikan legitimasi, ketika ada kasus di satu daerah misalnya pimpinan MD menjadi pengurus PAN, karena yang jadi pimpinan PPP juga banyak, yang jadi pimpinan Golkar juga banyak. Bahkan, di beberapa tempat juga jadi pengurus PDI. Jadi, harus bisa dipilahkan antar kasus, fenomena, dan dengan sikap resmi organisasi.

Sah-sah saja bagi mereka, bahwa organisasi adalah keputusan bersama, maka akan menjadi kebijakan organisasi apabila didukung oleh mayoritas dan kalau anda melihat MD, anda mesti melihat keputusan-keputusan formal yang dilakukan oleh PP. Jadi kalau itu sah, sama sahnya kalau ada kader yang menginginkan MD hanya mendukung PPP atau Golkar atau yang lain. Jadi, seperti kata Munir Mulkhan (2004), MD tidak akan pernah memberikan dukungan formal kepada satu partai.

Apa betul memasukkan kader MD dalam partai politik ini bagian dari strategi politik MD? Menurut Munir Mul Khan, ini hanya klaim orang-orang tertentu saja yang menikmati jabatan. Jadi, meski banyak pengurus MD yang aktif di PAN, tidak bisa dikatakan MD punya hubungan struktural karena dalam waktu yang sama banyak pengurus MD yang aktif di PPP, Golkar, PDI, bahkan ada satu-dua anggota MD aktif di PKB.

Yunahar Ilyas (YI) terbilang paling jarang bicara politik, tapi mungkin karena diilhami kepentingan politik jamaahnya akhirnya dia berucap bahwa, “Memang banyaknya ke PAN waktu itu karena pendirinya adalah tokoh dan mantan ketua PP Muhammadiyah sehingga secara emosional punya ikatan kuat. Tapi bukan ke PAN semua karena ada juga yang ke Golkar, PDIP, PKS dan PPP. Ia mengakui bahwa tidak mudah untuk mengarahkan warga MD untuk ke partai mana.”⁵³

4. Respon Terhadap Pemilu 2009

DS dalam pertemuan audiensi dengan jajaran DPP PMB pada tanggal 20 Februari 2008, berpesan agar partai yang diusung oleh anak “biologis” dan “ideologis” MD ini tidak perlu mengklaim dukungan dari MD. Sebagai “anak kandung” MD, partai berlambang matahari ini jelas didukung secara moral oleh PP Muhammadiyah. Kehadiran partai Islam yang diusung oleh AM ini diharapkan bisa bersinergi dengan MD karena memiliki kesamaan visi dan misi (Ma'mun Murad Al-Barbasy, 2008).

Selain DS, elit-elit MD yang dekat dengan partai politik dan terlibat didalamnya seperti Hajriyanto, Syafii Maarif dengan PDI-P dan PMB, Muhammad Muqodas didekati kader-kader PMB (AMM), Bambang Sudibyo dan Amien Rais, Dahlan Rais dengan PAN, dan sebagainya. Diakui, tidak semua elit Muhammadiyah dekat dengan partai politik, ada yang benar-benar menjaga jarak dengan politik seperti Haedar Nashir, Zamroni dan Fasichul Lisan nampaknya membentengi diri dari ketertarikan dengan partai politik, bahkan enggan berkomentar soal pendirian PMB.

⁵³ Jamaah YI kebanyakan berafiliasi dengan PKS. Bahkan dia dianggap PKS oleh beberapa aktivis Muhammadiyah-PAN, dan Muhammadiyah-PMB,. Koran *Seputar Indonesia*, berita, Kamis, 11 September 2008.

Pergolakan internal ini akan menggambarkan aliansi dan manuver politik antara kubu MD-politik dan MD non-politik (moderat, khittois, apolitis, puritan, salafi, ideologis). Kubu MD politik didominasi oleh sepak terjang Din Syamsuddin, Hajriyanto Thohari, Bambang Sudibyo, Amien Rais, para aktivis AMM yang di PMB dan Pemuda Muhammadiyah, serta aktor-aktor di daerah.

Jauh hari sebelum pilpres dilaksanakan, manufer elit MD sudah mulai menyerang kubu *incumbent* sebagai sikap kritis dan upaya untuk membangun wacana perlunya perubahan kepemimpinan nasional. Syafii Maarif menyebut JK sebagai *the real president* yang memanaskan telinga kubu SBY dan Partai Demokrat.⁵⁴ DS dalam banyak kesempatan menyinggung lemahnya pemerintahan SBY dalam menangani korupsi dan bencana alam. Sementara, MAR terlihat merapat ke SBY, lalu merenggang, lalu merapat lagi. MAR sebagai kiblat politik warga MD memang pengaruhnya masih sangat terasa di MD tingkat akar rumput. Sementara kubu elit MD yang non-politis seperti Haedar Nashir memilih bicara soal revitalisasi ideologi, menulis buku atau artikel di Suara Muhammadiyah. Haedar juga merespon hiruk pikuk politik di kantor Muhammadiyah Jakarta dengan mengatakan MD rileks menghadapi pemilu.⁵⁵

Agar peran kader politik kebangsaan tersebut dapat dioptimalkan bagi kepentingan misi MD maka diperlukan usaha-usaha pemahaman misi ideologi gerakan bagi para kader bangsa tersebut. MD tentu akan terus mendorong para kadernya yang berkiprah di dunia politik-praktis maupun di berbagai jalur kehidupan lainnya secara positif, karena dakwah memang memerlukan penyangga dari seluruh lini dan struktur kehidupan. Namun para kader politik atau kader bangsa dari MD tersebut seyogyanya terus memupuk idealisme, prinsip, etika dan modal dasar yang kuat atau memadai untuk berkiprah di ranah politik-praktis atau di ranah kebangsaan, selain faktor kemampuan-kemampuan objektif yang diperlukan sebagaimana layaknya pelaku politik yang idealis dan profesional.

⁵⁴ Syafii Maarif, detik.com.

⁵⁵ Baca di muhammadiyah.or.id tanggal 12 Maret 2009.

Menurut Haedar (2010), peran kader MD dalam politik kebangsaan yang perlu dikembangkan antara lain sebagai berikut: *pertama*, membawa dan mengaktualisasikan misi dan usaha MD secara objektif dan inklusif. *Kedua*, memelihara integritas, komitmen dan akhlak atau moral politik sebagaimana Kepribadian dan Pedoman Hidup Islami serta nilai-nilai yang berlaku dalam MD. *Ketiga*, ketika berkiprah dan berada dalam lingkungan internal MD lebih menunjukkan kemuhammadiyahannya daripada kepartaiannya, meski menjadi politisi tentu saja perlu meraih simpati, dukungan dan *trust* dari warga MD. *Keempat*, memberikan dukungan dan tolongan terhadap kepentingan MD melalui kiprahnya di dunia politik di ranah perjuangan kekuasaan/pemerintahan. *Kelima*, menjadi politisi yang benar-benar shidiq, amanah, tabligh dan fathanah dengan mengedepankan kewajiban dan tugas utama sebesar-besarnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Terakhir, *keenam*, berkiprah optimal dalam memajukan bangsa dan negara sehingga Indonesia menjadi bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat sebagaimana cita-cita nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa dan tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945.⁵⁶

Dinamika kelompok Islam dalam Pemilu 2009 juga terlihat pada sejumlah tokoh Majelis Ulama Indonesia, MD, dan NU yang berdoa bersama untuk kemenangan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto pada tanggal 7 Juni 2009. Pada acara yang digelar di kediaman JK, Jalan Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat yang dihadiri ketua umum PP Muhammadiyah DS, ketua MUI H. Amidhan dan Ketua PB NU Ahmad Bagja. Dalam sambutannya, mereka menyatakan mendukung dan mendoakan kemenangan pasangan JK-Wiranto dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan diselenggarakan KPU.

Dengan pernyataan DS yang memberi dukungan pasangan JK-Win, berarti DS sudah keluar dari apa yang selama ini digembar-gemborkan yaitu politik alokatif.⁵⁷ Meskipun PP Muhammadiyah tidak secara langsung

⁵⁶ Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010. hlm. 170-171

⁵⁷ Politik alokatif berarti tidak terjun dalam politik praktis, cukup memberikan suara dan pendapat tentang sesuatu masalah, atau membangun kultur politik yang bernilai.

menyebut pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung, namun secara eksplisit jelas mendukung pasangan JK-Wiranto. Dalam pernyataan sikapnya, PP Muhammadiyah hanya membuat kriteria pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung. Sebagai langkah politik nilai, MD berpendapat bahwa secara prinsip organisatoris MD tidak boleh mendukung secara definitif baik nama maupun nomor urut karena ini sudah memasuki politik praktis lagi pula warga MD sudah memahami apa yang tersirat --pemilih cerdas.⁵⁸

Sebelumnya JK-Wiranto memang telah melakukan pendekatan pada jajaran atas MD. Hanya berselang satu hari setelah deklarasi, pasangan JK-Wiranto mendatangi PP Muhammadiyah untuk meminta dukungan. Menurut pendapat DS yang dilontarkan ke media, pasangan tersebut mempunyai kesamaan pandangan dengan MD.⁵⁹

Di depan wakil presiden Muhammad Jusuf Kalla, yang juga calon Presiden RI, PP Muhammadiyah menyampaikan sembilan kriteria bagi calon presiden dan wapres yang layak dipilih oleh warga MD dan bangsa Indonesia. Sembilan kriteria itu tertuang dalam maklumat PP Muhammadiyah yang telah dikeluarkan sebagai panduan untuk memilih capres dan cawapres yang tepat bagi bangsa Indonesia.

Menurut DS, dalam pidato pembukaan Sidang Tanwir ke-II Aisyiyah⁶⁰ di Kampus UMY, Yogyakarta, 12 Juni 2008 tentang kriteria presiden yang layak dipilih antara lain; *pertama*, berjiwa negarawan dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. *Kedua*, karakter yang kuat dengan ditunjukkan antara lain oleh satunya perbuatan dengan perkataan. *Ketiga*, memiliki visi kebangsaan untuk menyelamatkan sumber daya alam dan kekayaan negara. *Keempat*, mampu bekerja keras dan bekerja nyata untuk kemajuan bangsa serta mengendepankan kemandirian ekonomi nasional

⁵⁸ Kriteria PP Muhammadiyah secara implisit mengarahkan pada sosok JK. Hal ini menjadi rahasia umum di lingkungan MD. Dukungan secara simbolis juga dilakukan DS dengan nonton bareng film di bioskop, mengundang dalam tanwir Muhammadiyah dan Aisyiyah, dan sebagainya.

⁵⁹http://www.tempointeraktif.com/hg/Pemilu2009_berita_mutakhir/2009/07/07/brk,20090707-185811,id.html

⁶⁰ Sayap dari Perempuan Muhammadiyah

dan mewujudkan kebijakan ekonomi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *Kelima*, menjaga martabat bangsa dan kedulatan negara dari berbagai intervensi dan kepentingan asing. *Keenam*, mengagendakan perubahan yang konkrit untuk keluar dari transisi dan membawa kemajuan sejalan dengan cita-cita nasional. *Ketujuh*, sosok pemimpin yang melakukan revitalisasi reformasi dan demokrasi yang bersifat mendasar disertai kebijakan-kebijakan nasional yang mengutamakan harkat hidup rakyat. Dan, yang terakhir, *kedelapan*, yaitu akomodatif terhadap aspirasi umat Islam.⁶¹

Dalam acara itu, Kalla disertai istrinya Ny. Mufidah Jusuf Kalla, Wakil Ketua MPR Aksa Mahmud, Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf As'yari, Seswapres Tursandi Alwi, sejumlah staf dan beberapa anggota DPR seperti Yuddy Chrisnandi dan Ali Mochtar Ngabalin. Hadir pula Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah Siti Chamamah Soeratno.⁶²

Amien Rais tidak tinggal diam melihat sepak terjang teman dan rivalnya, DS. MAR juga terus melakukan sesuatu untuk mendukung calon presiden setelah mengumpulkan DPW PAN se-Indonesia (yang loyal kepadanya), MAR kembali mengundang pro-kontra di internal elit PP Muhammadiyah, yaitu dengan mengundang ketua-ketua PWM se-Indonesia di Jakarta yang bertajuk pertemuan dengan Presiden SBY, kegiatan diadakan atas inisiatif Amien Rais tanpa koordinasi dengan PP Muhammadiyah.⁶³ Dalam konteks ini dipersoalkan oleh elit Muhammadiyah karena MAR sebagai anggota penasehat PP Muhammadiyah bertindak di luar ketentuan organisasi. DS yang diundang untuk hadir menolak datang dan memilih beraktifitas lain. Bagi DS, tidak ada kewajiban organisasi untuk hadir memenuhi kegiatan tersebut.

⁶¹<http://nasional.kompas.com/read/2009/06/12/13011093/Di.Depan.JK..PP.Muhammadiyah.Sampaikan.9.Kriteria.Capres>

⁶² Prof. Dr. Chamamah Soeratno, ketua umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, sayap MD, yang menurut beberapa keterangan juga menjadi bagian dari tim sukses JK-Wiranto pada Pemilu 2009.

⁶³ Majalah *Matan*, PWM Jawa Timur, edisi Mei 2010, hlm.44

‘Pergolakan’ internal MD tidak hanya persoalan politik, kubu politisi dan non politisi saja, tetapi juga menyangkut kompleksitas dalam perebutan sumber daya amal usaha Muhammadiyah yang merupakan lahan basah untuk mengeruk keuntungan. Banyak strategi dijalankan elite untuk membawa sekocinya atau menciptakan sekoci baru. Misalnya, menjadi pengurus atau BPH di PTM, atau menjadi dosen. Ada yang memilih mendirikan organisasi NGO baru. Seperti DS, selain di MUI, ia mendirikan CDCC (Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations) dan Orbit (perkumpulan pengajian beranggotakan artis-selebritis) yang dianggap menjadi semacam ‘ortom baru’ oleh kalangan AMM. Ini merupakan pilihan sadar bahwa jabatan di MD tidak abadi sehingga perlu memikirkan kehidupan pasca di MD (struktural).

Manuver-manuver yang tersebar di arena politik tahun 2009 sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena fenomena tersebut sudah pernah dialami MD pada tahun 2004, dan tahun-tahun ketika Orde Lama dan Orde Baru. Elite bisa melakukan upaya apa saja sesuai kepentingannya, dan ini merupakan masalah organisasi yang tidak terpisahkan dengan dinamika politik. Elite, sebagai pemegang kebijakan dan kekuasaan, sebagaimana kekhawatiran kelompok Muhammadiyah non-politik, selalu ada kemungkinan penyimpangan yang diisaratkan oleh Lord Acton bahwa, *power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*.

Menjelang Pilpres 2009, DS kembali menunjukkan syahwat politiknya. DS sangat dekat dengan kalangan AMM terutama yang ada di Jakarta. Keterlibatan AMM dalam tim sukses JK-Win tidak bisa terlepas dari peranan DS sebagai pintu masuk tim JK ke MD, selain melalui ASM dan berbagai calo serta broker dalam MD yang ingin meraup keuntungan. AMM yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi otonom di bawah MD, tidak mau ketinggalan untuk terlibat dalam perpolitikan, entah digerakkan oleh motivasi pragmatis atau ideologis, menjadi satu kajian menarik manakala sayap ini menjadi salah satu tim sukses yaitu Tim 1912, yang sempat memanaskan pergolakan internal MD. Ada yang mengatakan, pembentukan Tim 1912 ini sudah direstui elite MD.

Tim tersebut, dengan didanai tim sukses JK-WIN, membuat berbagai selebaran yang ditujukan kepada warga Muhammadiyah dan juga meng-

gunakan kutipan tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk legitimasi seperti kutipan MAR, ASM, DS dan elite Pimpinan Pusat lainnya.

Berikut penulis kutipkan salah satu isi buku kampanye Tim 1912. Delapan alasan mengapa warga MD layak memilih Jusuf Kalla-Wiranto:

1. Jusuf Kalla adalah calon presiden yang dididik dan dibesarkan dalam kultur MD, mengingat ibunya Hj. Athirah adalah pengerak serta aktifis Aisyiyah Sulawesi Selatan. Istri Jusuf Kalla juga anak tokoh MD.
2. Keluarga JK belasan tahun lalu telah mewakafkan tanah seluas 4,5 hektar disertai kebun mangga kepada Aisyiyah guna pembangunan pondok pesantren Ummul Mukmin.
3. Pimpinan MD di berbagai level memiliki kedekatan dan hubungan dengan Jusuf Kalla. Kedua belah pihak saling menaruh kepercayaan satu sama lain, terbukti JK sering menyalurkan zakat, infaq, shodaqoh melalui MD. Bahkan, JK telah menjadi donatur tetap MD yang besarnya mencapai 100 juta per bulan.
4. Jargonnya, “lebih cepat lebih baik”, yang digunakan diakui terinspirasi oleh doktrin MD “berlomba-lomba dalam kebaikan” (*fastabiqul khairat*) dan doktrin Hizbul Wathan “sedikit bicara banyak bekerja”.
5. Gagasan dan praktik ekonomi yang dilakukan JK memiliki kesamaan dengan hasil keputusan Sidang Tanwir Bandar Lampung (2009) tentang revitalisasi visi dan karakter bangsa: agenda Indonesia ke depan.
6. Jusuf Kalla sangat peduli pada pengembangan kewirausahaan dalam tubuh MD dan merupakan tokoh yang bersedia pasang badan dalam pengembangan dan menyehatkan Bank Persyarikatan Indonesia.
7. Keluarga JK-Wiranto lebih kaffah dalam mengamalkan ajaran Islam dibanding pasangan capres-cawapres yang lain. Misalnya, istri beliau berdua selalu berjilbab, bukan hanya saat ada upacara atau hari raya Islam saja.
8. Wiranto ternyata berasal dari keluarga MD, sebagaimana pengakuan teman masa kecilnya, Drs. Sumarsono, tokoh IMM seangkatan dengan Drs. H. Djazman Alkindi, di TVOne.

Dalam beberapa pamflet disebutkan JK-WIN mempunyai kesamaan *platform* program dengan hasil keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah

di Makasar. Hal ini tentu akan ditolak oleh kalangan MD lain yang menolak politisasi hasil tanwir untuk kepentingan pragmatis. Selain itu, mungkin jutaan stiker yang bertuliskan “JK-WIN pilihan warga MD”. Namun untuk menjaga harmoni, kontroversial di level elite cenderung ditutup-tutupi untuk menjaga kesan bahwa MD tetap utuh dalam Pemilu 2009.

Di tubuh PP Pemuda Muhammadiyah dan PMB terpecah menjadi dua kubu tim sukses, sebagian ke JK-Win dan sebagian lagi ke SBY-Budiono. Secara organisasi, PMB memang mendukung SBY-Budiono dengan kompensasi tertentu. Sebagian kalangan MD terutama di Yogyakarta menilai bahwa motivasi AMM dan PMB di Jakarta sangat pragmatis. Hal ini terlihat ketika diadakan Sidang Tanwir Pemuda Muhammadiyah di Makasar pada tanggal 12 Februari 2008 yang memang banyak didanai JK dan juga waktu itu JK hadir membuka Tanwir.

5. Pemilu 2009: Berebut Pengaruh Antar Elite Muhammadiyah

a. Deklarasi DS Sebagai Capres PMB

DS paling piawai untuk melegitimasi aksi politiknya, termasuk dalam dukungan kepada PMB seperti dengan mengutipkan dokumen sejarah bahwa para pendahulu MD sudah menunjukkan keaktifannya dalam politik, seperti Ahmad Dahlan yang masuk Budi Oetomo atau Mas Mansur yang terlibat dalam BPUPKI. Bagi DS, yang berterus terang dalam setiap pembicaraan publik mengatakan, anggota MD tersebar di berbagai partai, tidak hanya di PAN tapi juga di PMB sebagai sempalan PAN. DS banyak terlibat deklarasi pendirian PMB di daerah, termasuk saat deklarasi PMB mencalonkan dirinya sebagai Capres PMB. Keuntungan DS adalah meningkatkan *bargaining position* dengan partai lainnya termasuk pinangan PDI Perjuangan, dan Demokrat yang ditunggu-tunggu. Untuk melengkapi manufernya, DS menggelontorkan gagasan lama soal koalisi partai Islam dalam tajuk Poros Tengah jilid ke-2. Tapi naas, langkah itu gagal.

Selain DS, elit-elit MD yang dekat dengan partai politik alias kubu Muhammadiyah-Fundamentalis politik dan Moderat, aktif terlibat seperti Hajriyanto, Syafii Maarif dengan PDI-P dan PMB, Muhammad Muqodas didekati kader-kader PMB (AMM), Bambang Sudibyo, Amien Rais dan

Dahlan Rais dengan PAN, dan sebagainya.

Tidak semua elite MD dekat dengan partai politik, ada yang benar-benar menjaga jarak dengan politik seperti Haedar Nashir, Zamroni, dan Fasichul Lisan, nampaknya membentengi diri dari ketertarikan dengan partai politik bahkan enggan berkomentar soal pendirian PMB.

Ada juga kader, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Izzul Muslimin, pasca Pemilu 2009 yang tertarik dan ditarik masuk Partai Hanura yang memang sudah menjadi partner dalam tim sukses JK-WIN. Oleh kalangan politisi MD, hal ini dianggap sebagai investasi MD.

Sejak awal, PMB telah dicurigai oleh kubu non politis MD, akan digunakan sebagai kendaraan politik Din Syamsuddin dan elite MD yang sekubu dengannya. Hal ini terlihat ketika Din selalu menghadiri kegiatan PMB secara nasional maupun lokal. Faktanya, nama DS juga dimanfaatkan oleh pengurus PMB untuk melegitimasi bahwa PMB adalah partainya MD yang ingin menjawab kekurangan dan kelemahan PAN yang dinahkodai MAR. Merapatnya DS ke PMB menjadikan hubungan antara DS dan MAR, selaku penasehat PP Muhammadiyah, semakin memburuk. Namun, hal ini diakali oleh PMB bahwa PMB juga akan mencalonkan MAR jika memang warga MD menghendaki, sehingga PMB melakukan polling bakal capres dan cawapresnya di lingkungan MD. Di desa-desa foto DS selalu bersama logo PMB dan Syafii Maarif.

Sementara itu, PP Pemuda Muhammadiyah tidak mengeluarkan pernyataan secara resmi terkait berdirinya PMB. Namun demikian, menurut Sekretaris Umum PP Pemuda Muhammadiyah Gunawan Hidayat, dalam rapat pleno PP menjelaskan bahwa:⁶⁴

1. Kehadiran partai baru tidak terkait dengan institusi MD maupun organisasi otonom lain, termasuk Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah tetap pada posisinya sebagai non partisan dan bergerak dalam bidang dakwah dan pemberdayaan sosial masyarakat.
2. Pemuda Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada pimpinan atau anggota Pemuda Muhammadiyah untuk aktif di partai apapun/

⁶⁴<http://pdpm sleman.wordpress.com/2007/03/18/sikap-pp-pemuda-muhammadiyah-terhadap-pmb/>

termasuk partai baru/lama untuk membawa misi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah.

3. Posisi Pemuda Muhammadiyah berada pada titik kohesi di antara partai-partai. Dalam hal ini, Pemuda Muhammadiyah akan mendukung kepada partai yang mendukung kepentingan perjuangan Pemuda Muhammadiyah dan umat Islam.

Di dalam manifesto tersebut tertulis catatan: "Bagi pengurus/pimpinan Pemuda Muhammadiyah di semua tingkatan, yang aktif di semua partai politik untuk tidak membawa-bawa urusan partai ke rumah Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah adalah tempat untuk menggodok kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan kenegaraan, rakyat, dan umat Islam."

Namun, apa hendak dikata, nasi sudah menjadi bubur, segalanya sudah terlanjur. Dalam catatan panjang sejarah MD, ternyata ormas ini tidak mampu berkelit dari hingar-bingar politik kekuasaan. Sekalipun Khittah Ujung Pandang sudah membentengi agar MD tidak berpolitik praktis, tidak memiliki afiliasi politik dengan partai manapun (termasuk PMB dan PAN), nyatanya persyarikatan ini sering terperosok ke dalam hingar-bingar politik kekuasaan.

Jika saja MD melakukan aksi isolasi diri terhadap kepentingan kekuasaan, maka sikap tersebut hanya bakal menghambat cita-cita gerakan. Tetapi, terdapat dorongan kuat agar MD tidak terjebak dalam euforia politik yang cenderung mengutamakan kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, MD memang harus sadar bahwa politik merupakan bagian dari kehidupan umat.

Menurut hemat penulis, MD harus bisa mengambil pelajaran (hikmah) dari catatan sejarahnya yang telah berkali-kali terlibat dalam politik kekuasaan. Kata pepatah, "*ni'ma al-muaddib ad-dahr*" (pengalaman adalah guru terbaik). Termasuk dalam konteks menyikapi kelahiran PMB yang merupakan "anak kandung" MD, maka persyarikatan ini harus tetap mampu menjaga jarak.

Namun demikian, MD juga harus bersikap secara bijaksana. Bagaimanapun juga, "syahwat politik" AMM bukan untuk dibendung, tetapi

memang untuk disalurkan. Saluran syahwat politik yang legal dalam konteks kehidupan demokrasi adalah lewat partai. Jika selama ini banyak cendekiawan MD mengkritisi kemunculan partai berbasis MD, maka penulis sangat tidak sepakat. Sebab, syahwat politik bukan untuk dikekang, tetapi disalurkan secara benar sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Tanah Air ini.

Pernyataan DS sewaktu pertemuan audiensi dengan jajaran pengurus pusat PMB baru-baru ini memang layak diafirmasi kembali. PMB sebagai “anak kandung” MD memang harus didukung, tetapi cukup secara moral saja. Sementara, partai berbasis warga MD ini tidak perlu mengharap dukungan secara organisatoris kepada MD, seperti ketika PAN mencalonkan MAR pada Pilpres 2004 yang lalu.

PMB dituntut untuk dapat memberikan “keteladanan politik” bagi bangsa, meminjam istilah Ma'mun Murad Al-Barbasy, harus menjadi *uswatun hasanah* di pentas perpolitikan nasional. Sampai saat ini, para politisi kita masih banyak yang belum memiliki integritas moral. Bahkan, para politisi muslim kita, termasuk para ustad atau kyai yang terlibat dalam partai-partai politik, banyak yang memperlihatkan perilaku tidak *istiqamah*. Hanya karena kepentingan politik, integritas moral digadaikan. “*Esuk dele, sore tempe,*” itu fenomena yang sudah biasa dalam pentas perpolitikan di Indonesia.

Kehadiran PMB yang sudah mempunyai kepengurusan di 32 propinsi, bagi DS harus mampu menampilkan keteladanan politik bagi umat Islam di Indonesia. Karena PMB dilahirkan oleh warga MD, maka visi dan misinya tidak akan berseberangan dengan MD. Dalam hal ini, antara MD dan PMB diharapkan bisa menjalin sinergi gerakan demi menuju cita-cita terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang diridloi oleh Allah swt.

b. DS ke JK, MAR Merapat ke Cikeas

Di penghujung KIB⁶⁵ jilid satu pernah diwarnai konflik dalam memperebutkan citra antara MAR dengan SBY dan Cikeas. Konflik atau lebih

⁶⁵ Dalam KIB I, MAR menitipkan dua menteri di dalamnya yaitu mendiknas dan menteri kesehatan yang juga diklaim sebagai kader MD baik struktural (Bambang Sudibyo) atau kultural (Siti Fadilah Supari).

bisa diartikan secara politik sebagai upaya MAR meningkatkan *bargaining position*-nya kepada Cikeas, karena MAR tahu SBY sangat potensial untuk terpilih kembali. MAR tidak terus frontal menghajar kebijakan publik SBY yang dinilai banyak pengamat melestarikan KKN.⁶⁶ Namun, karena kelihaian MAR sebagai politisi MD kawakan, perang dingin ini sepertinya hangat-hangat tahi ayam atau dalam *game theory* bisa dikategorikan sebagai *chicken game* dan bukan masuk *prisoner dilemma*. Gaya MAR ini sudah dibaca oleh DS yang sudah mulai melirik JK, sebagai sesama kader partai Golkar dan secara politis akan lebih menguntungkan. DS meyakinkan bahwa JK mempunyai latar belakang MD yang sangat kuat perannya dalam pengembangan MD di Sulawesi Selatan.⁶⁷

Apakah elite MD menggunakan *rational choice*? Atau, merasa basis modalitas sudah mencukupi untuk beradu berebut pengaruh dalam panggung politik pemilu? Menanggapi manuver politik kelas tinggi MAR yang mengundang politisi PAN dan orang-orang MD, dianggap DS sebagai hajatan pribadi meskipun gerah karena menggunakan kop surat MD atas nama penasehat MD yang juga pendiri PAN, ketua MPP PAN, dan anggota koalisi partai Demokrat. DS menolak hadir pada hajatan penasehat MD, PAN dan PWM/PWA bersama SBY.

Menurut DS, acara itu bukan acara resmi PP Muhammadiyah. Di MD itu tidak dikenal adanya dewan penasehat semacam majelis pertimbangan parpol. Saya memang tidak hadir, karena memang bukan acara PP Muhammadiyah. Apalagi, acara itu politis karena ada pengukuhan Hatta Rajasa menjadi calon ketua umum PAN.⁶⁸

Dalam pandangan penulis, peristiwa ini menunjukkan senior lama, MAR masih mempunyai pengaruh yang kuat di level elite MD daerah dan mempunyai *bargaining position* di hadapan rezim penguasa. Citra Amien tetap baik di mata daerah bahkan konon dia menyelamatkan muka Muhammadiyah karena masih ada dua menteri dari PAN yang notabene orang MD meski hal ini adalah klaim tanpa dasar menurut kelompok

⁶⁶ Baca buku George Adicondro, *Gurita Cikeas*, yang penuh kontroversi, diambil dari internet dalam bentuk *soft file*.

⁶⁷ Buku Profil HJ Kalla yang diterbitkan oleh PP Aisyiyah.

⁶⁸ Diolah dari berbagai sumber di internet dan media massa.

MD yang sekubu dengan DS, termasuk elit AMM yang berparadigma kritis-transformatif.

Ketika seorang wartawan menanyakan, “Apakah Muhammadiyah menjadi oposisi pemerintah?”, DS menjawab “Kami tetap mendukung pemerintahan. Hubungan Muhammadiyah dengan SBY tidak perlu diragukan lagi. Sikap ini sudah berlangsung sejak era kemerdekaan hingga saat ini. Siapapun presiden dan wakil presidennya, kami tetap mendukung pemerintah,” pungkasnya.⁶⁹

Pasca pemilu 2009 yang dimenangkan pasangan SBY, Din tidak surut langkahnya untuk tetap kritis terhadap penguasa. Dalam sebuah acara di Jawa Timur ia mengatakan, “Kami (Muhammadiyah-red) tidak akan mengemis jabatan kepada SBY. Tapi, kami tetap mendukung pemerintahan terpilih SBY-Boediono. Kami lebih setuju SBY menunjuk menteri dari kalangan profesional yang kompeten di bidangnya dan punya komitmen tinggi”.⁷⁰ Menurut dia, banyak kader MD yang bagus dan kompeten di bidang pertanian, perekonomian dan pemberdayaan perempuan. Tapi ia sadar betul bahwa SBY yang paling berhak menentukan komposisi siapa mendapat apa dan kapan sebagaimana kata Laswell yang kesohor itu. Di akhir berita itu DS mengatakan, “Saya minta kepada parpol koalisi agar tidak menekan-nekan dan memaksa SBY dalam penentuan susunan kabinet menteri, serahkan sepenuhnya kepada presiden.”

DS menegaskan pihaknya tidak akan mengemis dan meminta-minta jabatan dalam susunan kabinet menteri kepada Presiden SBY. Menurut DS, hal ini dikarenakan kelahiran Muhammadiyah lebih dahulu dibandingkan negara ini. Pernyataan ini sangat halus tapi ada misi politiknya (*allocative politics*). Pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB-1), memang ada dua kader MD yang menjadi menteri, yakni Mendiknas Bambang Sudibyo dan Menkes Siti Fadilah Supari. Meskipun hal ini tidak diakui oleh semua elite Muhammadiyah.⁷¹

⁶⁹http://www.beritajatim.com/detailnews.php/6/Politik_&_Pemerintahan/2009-10-20/47577/Muhammadiyah:_SBY_Harus_Konsisten_Kata_dan_Laku_

⁷⁰ DS dalam acara buka puasa di UM Surabaya, Selasa (15/9/2009).

⁷¹ Dari kesimpulan saya diskusi dengan Zamroni, Ph.D., pengurus PP Muhammadiyah, bahwa selama ini menteri tersebut loyal kepada partai dan pemilik partai tertentu, bukan

B.3. Metode Politik Kelompok Moderat Aktif

1. Media yang Digunakan

Kelompok ini selain sebagai akademisi atau ilmuwan di universitas mereka juga aktif berperang wacana dalam perdebatan politik atau issue kontemporer. Kelompok ini tidak puas dengan situasi dan kondisi dan tidak lantas frustrasi tapi mencari jejak dan hal-hal baru yang bisa dijadikan alat analisi untuk kemudian menuliskannya dalam media internal MD atau media nasional seperti Kompas dan juga penerbitan buku. Kemampuan menulis ini dianggap mampu menggerakkan komunitas dan peradaban yang sering menjadi terma dalam hasanah MD.

2. Pengaruh terhadap Keputusan Organisasi

Ahmad Syafii Maarif (ASM), menurut hemat penulis dalam pemikiran dan tindakan politik berada diantara jalur Kultural dan struktural (Mudzakkir, 2010). Sedangkan dalam klasifikasi penulis ASM masuk sebagai kelompok mederat aktif yang selalu mempunyai prinsip dan referensi historis sebagaimana background keilmuannya. Memang diakui kadang juga 'nekad' menjadi tukang kritik dan menjadi partisan politik. Kelompok ini kadang menjauhi ranah politik praktis dan seringkali menghimpitkan diri dalam persoalan politik praktis seperti; Pertama, dalam perumusan Khittah Denpasar 2002, pleno PP yang mengarahkan dukungan MD kepada MAR. Kedua, dalam upaya mempromosikan kandidat JK-Win pada pemilu 2009 yang mengundang kontroversi karena Buya Syafii dianggap akan lebih baik berada di luar barisan elite yang terjungkal dalam politik praktis. Banyak orang menyayangkan sebab kasihan buya lantaran 'kotornya' dunia politik praktis di negeri ini, buya memang sering ditempatkan sebagai guru bangsa, guru kemanusiaan (kadang dibaca kelompok MD konservatif sebagai tokoh liberal atau lebih jauh lagi sepilis).

3. Hubungan dengan Partai Politik

Meski ada nada pesimisme lantaran liberalisasi politik kitu juga berdampak serius pada kondisi internal MD. Ribuan kali penegasan MD

kepada MD dan kontribusinya tidak banyak bahkan bertentangan dengan paradigma MD, misalnya kasus BOS dan BLT. Pertemuan di BLK Panti Asuhan Yatim Aisyiyah Jl. Agus Salim Yogyakarta.

tidak berpolitik praktis tidak menyurutkan langkah elite-elite MD untuk terus berinteraksi politik dan menghimpitkan MD dalam politik sejak pendirinya HA Dahlan yang menjadi anggota Partai Politik, lalu zaman Orde Lama di Masyumi dan Parmusi, serta PAN dan PMB dan dukungan kepada capres tertentu. Tabiat ini sudah disinyalir oleh G.H.Bousquet, orientalis Prancis, “Memang betul bahwa MD tidak campur tangan dalam politik, tetapi anggota-anggotanya terlibat.”⁷² Walau demikian kelompok ini tetap tidak terlalu tertarik untuk masuk dan asik di dunia politik praktis. Sikap moderat bagi kelompok ini akan jauh lebih baik dalam rangkai menjaga peran dan identitas MD sebagai organisasi dakwah dan kader bangsa.

Ada benarnya pendapat bahwa Ormas tidak mungkin 100% terlepas dari pertikaian politik yang bernama proses pemilu ini mungkin ada banyak kebenarannya. Bahkan dibanyak organisasi mendadak membuat pernyataan politik menjelang detik-detik pemilu, termasuk di tubuh MD. Salah satu dokumen penting MD yang dirumuskan dalam sidang Tanwir (sidang tertinggi di bawah Mukhtamar) di Denpasar pada tahun 2002 adalah menghasilkan khittah perjuangan dalam kehidupan bernegara (politik). Salah satu alenia berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dan lapangan perjuangan. *Pertama*, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/kenegaraan (*real politics*, politik praktis) sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat kelembagaan negara. *Kedua*, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pember-da-yaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung (*high politics*) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral (*moral force*) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*).”⁷³

⁷² Ahmad Syafii Maarif dalam tulisan ‘Potret Politik Muhammadiyah’ dalam pengantar buku, Syarifudin Jurdi yang berjudul *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik 1966-2006* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm.vii

⁷³ Sumber: Berita Resmi Muhammadiyah, Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2002 di Denpasar-Bali. Tanwir merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah Mukhtamar dan di atas Musyawarah Wilayah, Daerah, Cabang, dan Ranting.

Dengan demikian MD berpandangan bahwa berkiprah dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu perwujudan dari misi dan fungsi melaksanakan dakwah amar makruf nahi munkar sebagaimana telah menjadi panggilan sejarahnya sejak zaman pergerakan hingga masa awal dan setelah kemerdekaan Indonesia. Peran dalam kehidupan bangsa dan negara tersebut diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan taktis sesuai kepribadian, keyakinan dan cita-cita hidup, serta khittah perjuangannya sebagai acuan gerakan sebagai wujud komitmen dan tanggungjawab dalam mewujudkan “*Baladatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafur*”. Haedar Nashir berpendapat yang serupa bahwa peran MD bisa dijalankan tanpa terjun langsung dalam politik kekuasaan (partai politik), jalur non politik masih terbuka lebar.⁷⁴

Ini merupakan salah satu alasan mendasar mengapa MD berani peras keringat, banting tulang untuk memenangkan MAR sebagai calon presiden pada pemilu 2004 yang lalu. Keputusan organisasi ini ditafsirkan menjadi banyak pengertian oleh kelompok warga MD. Beberapa golongan MD ada yang menanggapi dengan sinis mengenai rumusan politik untuk melegitimasi tindakan MD dalam panggung politik.

4. Respon terhadap Pemilu 2009

Mengenai dukungan ASM ke JK mempunyai latar belakang yang panjang dan sudah terjalin kedekatan personal semenjak kasus BP (Bank Persyarikatan) yang terancam dibubarkan lantaran ada kejahatan di dalamnya, semacam korupsi atau perampokan uang MD yang jumlahnya miliaran rupiah. JK-lah orang yang menyelamatkan muka ASM dan juga perekonomian MD.⁷⁵

Kontroversi itu dimulai dari sebuah opini pribadi “mengapa beliau mempromosikan JK dalam Pilpres 2009?” yang dimuat Kompas pada

⁷⁴ *High politics* berarti tidak menjadi partai politik atau bagian partai politik sedangkan *low politics* dianggap sebagai perbuatan politik praktis kepartaian. Definisi *high politics* ditafsirkan beragam di kalangan MD. Haedar Nashir dalam makalah Seminar, “Khittah Muhammadiyah dan Peran Politik di Indonesia”, 22 April 2009.

⁷⁵ Kisah BP dan JK ini diuraikan secara detail pada buku autobiografi ASM, *Titik-titik Kisar kehidupanku*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2005), hlm.

tanggal 25 Juli 2009. Menarik mengkritisi pernyataan Buya ASM terutama persinggungannya dengan MAR sebagai salah satu kontestan Pilpres 2004 lalu.⁷⁶

Dalam pemaparannya, ASM membeberkan apa yang disebutnya “rahasia” dapur politik pribadinya. Buya menyebut nama MAR yang pernah didukungnya pada putaran pertama Pilpres 2004 ternyata kandas dan Buya merasa tak sedap dengannya. Pernyataan ini dinilai pengamat (mungkin pendukung MAR) kehilangan konteks dan relevansi, tidak menambahkan bobot pernyataannya, dan sebaliknya malah justru dapat merusak hubungan silaturahmi dan kebersamaan dalam keluarga besar persyarikatan MD sendiri. Cara “buka-bukaan” atau “blak-blakan” gaya ASM dianggap bukan gaya khas orang Timur, tetapi lebih sebagai sekadar justifikasi terhadap apa yang diyakini ASM sebagai upaya memperjuangkan dan menyehatkan kultur demokrasi.⁷⁷ Beberapa fakta mengenai kiprah politik ASM antara lain perlu dicermati sebagai analisa.

Pertama, pada Pilpres 2004, Buya Syafii pernah mengatakan bahwa “Muhammadiyah netral, boleh memilih siapa saja”. Tetapi dalam Pilpres Putaran II, Buya Syafii berkampanye untuk pasangan SBY-JK di Aceh. Semua keluarga Muhammadiyah di Aceh mengetahuinya dan menjadi saksinya. *Kedua*, salah satu statemen yang disukai Buya Syafii berbunyi, “Muhammadiyah adalah tenda besar, tidak boleh berpolitik”. Tetapi buya sendiri malah menjadi pimpinan atau anggota Baitul Muslimin PDIP, sebuah lembaga politik yang dianggap sebagai sayap dakwahnya. *Ketiga*, pada Pilpres 2009, beliau terang-terangan mendukung pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-WIN). Alasannya, karena ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik.

⁷⁶ Robby H. Abror, wacana, Di Balik Dapur Politik Syafii Maarif, *Suara Merdeka*, Jum’at, 31 Juli 2009.

⁷⁷ Tetapi kalau dalam kamus politiknya, Buya Syafii memang sengaja menerapkan demitologisasi politik tabu, maka dalam konteks ini fakta tentang Buya agaknya perlu juga untuk disingkapkan agar tersampaikan pesan-pesan keterbukaan (baca: “buka-bukaan”) yang fair, dan dapat juga dimaknai sebagai wahana saling menyapa di muka umum atau sekadar wacana tanding, Robby H. Abror, wacana, Di Balik Dapur Politik Syafii Maarif, *Suara Merdeka*, Jum’at, 31 Juli 2009

Sekian tahun lalu, manuver gaya politik ASM seperti di atas mungkin masih dianggap layak. Tetapi sekarang, ketika masyarakat makin melek politik, mereka menjadi lebih mengetahui bahwa dengan gembar-gembar netral politik seperti itu menunjukkan bahwa sebenarnya Buya Syafii sedang bermain api politik. Dengan langkah politiknya, orang bilang, “kasihan Muhammadiyah, juga kasihan buya”, tapi bagi pendukung pemikiran ASM akan mengatakan, demi MD, demi perubahan Bangsa yang lebih baik! ASM menegasikan harga dirinya untuk kepentingan yang diyakininya jauh lebih substansial.

B.4. Metode Politik Kelompok Apolitik

1. Media yang digunakan

Ada satu kelompok yang mengklaim sebagai kelompok kultural yang bermarkas di sekitar kantor pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Majelis ini menamakan dirinya sebagai mejelis kultural yang dihuni sebagian besar anak muda yang ‘apolitik’ dalam artian agak sentimen dengan gerakan politik yang merambah ke tubuh organisasi MD. Kelompok ini didominasi anak-anak Muda Muhammadiyah yang secara kultural berkumpul dan membicarakan apa saja terkait dengan MD. Mereka bertemu setiap Rabu Malam dengan tempat yang berubah-ubah sesuai dengan siapa yang kebagian menjadi ‘shohibul bait’ atau tuan rumah yang akan menyediakan snack dan makanan. Majelis Reboan sudah beraktifitas semenjak sebelum Muktamar 2005 di Malang. Beberapa saluran komunikasi seperti milis, ponsel, dan pertemuan di forum formal Muhammadiyah menjadikan kelompok kultural ini tetap eksis. Kubu ini yang pernah berpolemik dengan teman-teman AMM lain yang aktif di PMB. Bagi teman-teman di MR, politik bukan jalan satu-satunya untuk menghidupkan MD. Buktinya MD, bisa eksis tanpa harus bersentuhan dalam politik praktis selama ini. Itu dalih kultural ala MR.

2. Pengaruh terhadap keputusan Organisasi

Kelompok ini tidak bisa dibilang tidak punya pengaruh sebab setiap level kepengurusan kelompok ini selalu hadir bahkan di tingkat pusat pun direpresentasikan aktor tertentu. Jumlah kelompok ini bisa dikatakan besar dan dalam banyak kebijakan organisasi kelompok ini seiring dan

sejalan dengan kelompok khittois. Kelompok ini akan sangat mendukung keputusan yang tidak partisan, yang independen dan tidak dipolitisasi. Kasus Tanwir Lampung menjadi saksi pengaruh kelompok ini pada keputusan Tanwir dengan koalisi bersama kubu khittois.

3. Hubungan dengan Partai Politik

Kelompok ini tidak mengikatkan diri pada kepengurusan partai politik atau kegiatan yang sifatnya politik praktis seperti tim sukses dan sebagainya walau sempat berpengalaman pahit pada pemilu 2004 yang lalu. Sehingga muda dibaca pada tahun 2009 kelompok ini tidak mau pusing mengurus pemilu. Kelompok ini sepengetahuan penulis, banyak dihuni oleh para akademisi MD yang bukan termasuk disiplin ilmu politik dan juga ada beberapa rektor yang masuk kelompok ini. Mungkin posisi apolitis itu menguntungkan sebab dengan demikian akan selalu dekat dengan birokrasi pemerintahan dan penguasa dalam arti yang luas.

4. Respon terhadap Pemilu dan Tim Sukses

Kelompok ini terakhir ada pecah kongsi karena sebagian masuk dalam politik praktis dan merapat ke elit pengikut madzab fundamentalisme politik yang merasa bahwa politik adalah lahan dakwah. Tentu pembuktian kata-kata itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kelompok apolitis sebenarnya mengidap persoalan serius yang over generalis yang sering mengatakan bahwa warga MD jenuh dengan urusan politik. Faktanya, di masyarakat warga MD menunggu intruksi dari pusat. Walaupun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar warga MD berimam politiknya pada MAR dan bukan DS. Akhirnya kelompok ini juga ada yang tertarik menjadi tim sukses dari kandidat yang didukung oleh elitnya sebagai patron-klien baru di organisasi modernis.

C. Implikasi Politik Elite Muhammadiyah

Banyak elit MD gerah melihat sepak terjang teman seperjuangannya. Menjelang pemilu 2009, tepatnya waktu itu masih di tahun 2007 dan 2008 komunikasi politik mulai terjadi antara DS dengan PDI-Perjuangan yang memang sebelumnya sudah diawali dengan komunikasi Din dengan kelompok Golkar yang memang rekannya sendiri mempunyai posisi yang strategis dan juga background DS yang Golkar.

Setidaknya, secara umum berdasarkan pembacaan dan pengamatan, ada dua implikasi dari kegaduhan elite MD dalam Pemilu 2009 yang lalu yang merupakan konsekuensi logis dari upaya menghimpit diri dengan politik praktis yang juga pernah dialami pada Pemilu 1955, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009. Berikut penggambaran implikasi tersebut yang meliputi dampak manufer politik elit terhadap internal MD dan lingkungan eksternal secara umum dalam perpolitikan nasional. Besaran pengaruh memang tidak diukur secara kuantitatif tapi dengan basis penjelasan yang detail setidaknya ada pemahaman yang lebih clear tentang daya pengaruh politik MD, politik elit MD, dan politik para *free rider* dalam atau golongan yang memanfaatkan MD untuk kepentingan pribadi.

1. Implikasi Internal Muhammadiyah Sebagai Institusi

Salah satu implikasi yang perlu disoroti adalah semakin menyebarnya apatisisme politik warga MD dikarenakan trauma dari kegagalan politik masa silam termasuk yang sangat memukul warga MD adalah kegagalan pada pemilu 2004 juga 2009 yang kemudian disimpulkan secara gegabah oleh elite kelompok apatis bahwa MD memang bukan habibatnya di politik praktis sehingga tidak perlu berharap atau bermain-main dalam jagad politik. Ini memang *debatable* tapi bahwa dampak kegagalan elite membawa kemenangan politik itu nyata dirasakan warga MD. Mereka akan muda jenuh dan bosan ketika diajak mendiskusikan perihal politik dan pemilu. Tapi bagi kelompok fundamentalis politik dalam MD akan dengan muda mengatakan bahwa kegagalan akan memberikn banyak hikmah dan pelajaran bagi warga dan MD pada umumnya. Beberapa aktifis PMB mengatakan bahwa PMB adalah “laboratorium” politik MD. Tidak ada kata meratapi kekalahan.

Manufer politik kaum elite ini sudah dibaca oleh kelompok MD ideologis atau non politis sebagai pertanda MD akan mengalami persoalan lagi di masa-masa dimana politik menjadi pusat perhatian: pemilu. Berbeda dengan ASM yang secara kultural menjadi salah satu penasehat di Baitul Muslimin-nya PDI Perjuangan dan ini tidak merisaukan elit lainnya dan bahkan dampak positif untuk membangun gedung sekolah

Muhammadiyah dapat gelontoran dana dari Taufik Kiemas (suami Megawati SP). ASM punya jabatan sebagai penasehat MD, ketua pembangunan Muallimin pasca Gempa Yogyakarta, dan juga pendiri Maarif Institute, yang memang membutuhkan dana operasional cukup besar. Meski demikian, kedekatan dengan Taufiq Kiemas tidak banyak dimaknai sebagai politik praktis atau politik pragmatis.

Secara teoritis, gaya kepemimpinan menentukan apakah seluruh organisasi bisa disebut dinamis dan responsif terhadap realitas perubahan. Masa depan organisasi, apakah berkembang, maju, atau stagnan, akan tergantung pada faktor kepemimpinan walau ada anggapan bahwa faktor kepemimpinan hanya suatu fungsi yang dapat diperankan oleh siapa pun sesuai kondisi lingkungannya. Gaya dan tipe figur pemimpin adalah fakta tersendiri bagi sebuah organisasi. Sebagai misal, kepeloporan Ahmad Dahlan merupakan fakta sejarah terhadap figur pemimpin yang dengan kemampuan kepemimpinannya dapat menarik kesetiaan para pengikut untuk membentuk sebuah gerakan yang benar. Fakta juga menjelaskan bahwa kemampuan gerakan ini untuk bertahan hampir satu abad dan berkembang tidak terlepas dari figur elite pemimpin yang sekaligus melekat padanya beberapa kekuasaan yang menjadi kekuasaannya.

Hasil penelitian Marsudi mengatakan bahwa Perilaku politik praktis yang telah dilakukan oleh DS adalah merupakan peran individual, yang sangat terkait erat dengan kelembagaan yang dipimpinnya yaitu MD. MD secara jelas menolak perilaku politik praktis yang dilakukan oleh kadernya yang membawa-bawa nama MD kedalam ranah politik praktis. Khittah Muhammadiyah yang dirumuskan dalam berbagai format sejak tahun 1956-2002 merupakan formulasi dari posisi dan peran MD yang sejak awal kelahirannya hingga perkembangannya merupakan organisasi yang bergerak dibidang dakwah dan bukan bergerak dalam wilayah politik praktis.⁷⁸

⁷⁸ Skripsi, M. Sholeh Marsudi, *Perilaku Politik Praktis Din Syamsuddin dalam Perspektif Khittah Muhammadiyah*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 dalam kesimpulan penelitian.

2. Implikasi Internal terhadap Warga Muhammadiyah

Ada ungkapan yang menjadi bahan pembicaraan umum di lingkungan kantor Muhammadiyah Yogyakarta, “belum sepenuhnya sembuh dari trauma kegagalan politik pada Pemilu 2004, sudah ditambahi lagi kegagalan yang orang luar menyebut kegagalan MD mengusung Jk-Win, meski padahal hanya elit-elit tertentu saja yang ngebet di panggung Pemilu 2009.”. lalu sebagian kelompok lainnya, teriak, “saatnya kembali ke khittah Muhammadiyah,” saatnya mengatakan, “Muhammadiyah yes! Politik, no!”.

Pasca pemilu 2009 yang memenangkan SBY-Budiono dan Demokrat beberapa kalangan MD menyalahkan sikap DS yang frontal melawan SBY dan mendukung JK hal ini dianggap menjadikan MD gagal mendapatkan posisi menteri dalam kabinet. Hal ini ternyata penting di level *grass root* sebab selama ini MD selalu akomodatif terhadap pemerintahan dan sebaliknya. Politik elit MD yang dinakhodai DS tidak membuahkan hasil. Justru, benih-benih oposisi terus dikobarkan. Bagi kalangan aktifis MD yang progresif dan liberal ini justru baik adanya sebab MD sebagai *civil society* akan semakin kuat untuk memberikan koreksi dan kritik kepada pemerintah. Ini pun jika tidak dipahami orang kebanyakan sebagai politik pelarian MD.

Menurut sebagian pengamat politik, kalahnya JK-Win adalah salah satu indikator tidak lakunya NU dan MD dalam menggalang dukungan untuk JK. Sokongan itu pasti tidak ada di SK atau intruksi PP. Namun dalam beberapa kesempatan, misalnya Tanwir ‘Aisyiyah di UMY yang dihadiri JK, “dukungan itu” tidak bisa dikatakan tidak eksplisit. Juga pada kesempatan-kesempatan lainnya, dukungan itu sangat muda dibaca.

Persoalannya, tidak semua warga MD tertarik dengan politik, orang MD yang tertarik dengan politik sudah di PAN, wajar kalau di kampung kampung MD juga menang SBY yang didukung oleh PAN. Ada banyak warga Muhammadiyah di desa beriman politik kepada Amien Rais dan bukan kepada DS apalagi elit Muhammadiyah (lokal) yang PNS hampir dipastikan akan berkampanye secara sukarela untuk SBY.

Bagi kubu MD non-politis kekalahan JK itu dianggap sebagai kewajaran sebab sejarah membuktikan, hal itu hanya memperboros energi umat. Jika dukungan itu memperoleh hasil, imbalan (*reward*) yang diberikan

pada organisasi lebih kecil dibandingkan dengan apa yang dinikmati oleh elitnya. Sebaliknya, jika gagal maka hukuman (*punishment*) secara psikologis dan moral, umumnya akan lebih banyak dibebankan pada warganya. Tanpa dukung mendukung pun, organisasi masyarakat seperti NU dan MD, terbukti bisa berkiprah maksimal. Di MD mungkin berlaku mantra kedua: Politik bukan panglima! Sehingga tidak perlu berjibaku diperjuangkan. Haedar Nashir termasuk mengajak anggota Muhammadiyah ‘rileks’ dalam menghadapi pemilu.

Ada benarnya, bahwa peran yang tepat bagi MD adalah menjaga jarak dengan kekuasaan, memperteguh independensi, untuk berkontribusi secara nyata terhadap bangsa dan memperkuat *civil society*. Tradisi *civil society* yang sudah berjalan di MD lewat jalur pendidikan dan amal usaha, tentu amat sayang bila ditinggalkan begitu saja. Justru, dengan menjadi “oposan” yang baik, mereka akan lebih leluasa untuk bekerjasama dengan siapa saja tanpa kehilangan sikap kritisnya. Toh, tanpa berkuasa pun, MD tidak akan kehabisan cara untuk berkiprah menyumbangkan yang terbaik bagi bangsa seperti yang selama ini dijalannya. Politik romantisme dan ketidakpercayaan diri dengan mengorbankan independensi sebuah organisasi dan membebani para anggotanya, sudah selayaknya diakhiri.⁷⁹

Abdul Mu’ti (2010)⁸⁰ membuat catatan setelah beberapa hari menjelang pengumuman Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, SMS kalangan internal MD yang intinya mengharapkan agar “tradisi” Menteri Pendidikan Nasional dijabat oleh kader MD tetap dapat dipelihara dan diperjuangkan. Mukti menbalas dengan menuliskan bahwa ‘kewenangan penentuan jabatan menteri itu sepenuhnya ditangan presiden’. Menurutnya, tidak etis apabila MD merekomendasikan nama menteri sementara pada saat

⁷⁹ Ahmad Fuad Fanani, Membendung “Syahwat” Politik Muhammadiyah, *Kompas*, tanpa tahun.

⁸⁰ Abdul Mu’ti, Muhammadiyah sebagai gerakan *Civil Society* yang tidak anti Pemerintah, *Jurnal Pemikiran Maarif*, vol. XII 2010, hlm 69-70.

⁸¹ Ketika presiden mengumumkan nama-nama menteri KIB II secara resmi, saya menerima sms dengan nada berbeda-beda. Sebagian besar bernada marah dan pesimistis. “Gara-gara berpolitik, sekarang MD kena batunya. Gigit jari tidak satupun mendapatkan jatah menteri.” *Kecian deh lu*”. Demikianlah antara lain pesan pendek yang bernada marah.

pemilihan presiden, MD mendukung calon lain yang ternyata kalah.”⁸¹ Secara kelakar, hal ini wajar karena MD ‘tidak berpolitik kok minta menteri.’ Kalau mau jabatan menteri ya berpolitik.” Ketika Mukti katakan bahwa jabatan menteri juga penting untuk “*kebanggaan*” dan memperkuat dakwah, politisi MD tersebut menjawab: ”Sudahlah. Dulu, pada jaman Belanda, MD tidak memiliki menteri, bahkan MD juga ditekan oleh penjajah Belanda. Dalam situasi demikian, *tob* MD bisa hidup dan berkembang dengan baik.”

Dalam konteks gerakan MD, menurut Abdul Mukti (2010) dialog singkat di atas bukanlah sekedar curahan hati atau pikiran tetapi lebih jauh memiliki makna yang menggambarkan pandangan internal MD mengenai relasi MD dengan negara. Dan ini akan berpengaruh pada model politik MD di hari-hari yang akan datang.

Dampak lainnya, selain trauma politik bagi kalangan adalah ada rasa ‘dendam’ ketika kubu politik secara tidak langsung disindir oleh kelompok Muhammadiyah non-politis dan Muhammadiyah politik di luar PMB. Aktivis PMB mengaku tidak dihargai dan merasa kecewa. Sebagai konsekuensi, aktivis PMB menyebar ke berbagai partai yang dianggap akan bisa menghidupi dan menyalurkan bakat politiknya. PMB, bagi mereka, adalah eksperimen politik alternatif MD yang paling mutakhir, dan banyak hal yang dapat diambil hikmahnya. Terutama bagi peminat politik praktis yang berlatar MD sejati.

3. Implikasi Eksternal Terhadap Politik Indonesia

Sikap netral politik MD dengan tidak mengaitkan diri dengan partai politik tertentu hingga seratus tahun umurnya kini, menjadikan MD merupakan salah satu gerakan Islam yang tidak pernah menjadi partai politik, pengalaman politik Masyumi yang tidak mulus dan berbagai situasi yang

Pesan pendek yang bernada pesimistis antara lain berbunyi: “Setelah Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional dijabat oleh kader-kader NU, tamatlah riwayat pendidikan MD”. Tetapi selain mereka yang menumpahkan kemarahan dan pesimisme, saya menerima juga SMS yang ksatria dan optimistis. “Ketika Mendiknas dan Menag tidak lagi dipegang oleh kader MD, kini saatnya kita bangkit, tegak berdiri di luar pemerintahan. MD kini bebas merdeka”. *Op. cit*, hlm. 70.

menyebabkan partai politik menjadi tidak berdaya, inilah yang memberi bobot politik MD. Oleh sebab itu, MD yang telah menyatu dengan denyut nadi bangsa ini dengan filsafat sosialnya yang telah teruji tidak akan pernah putus asa dan patah harapan. Bangsa ini adalah milik kita semua. Kita tidak akan lari meninggalkan bangsa yang sedang dililit banyak masalah ini.

Menurut Haedar (2010), tradisi MD sebagai gerakan Islam demokratik-egalitarian harus terus dipertahankan dan dipelihara, MD telah menerapkan tradisi musyawarah sejak awal berdiri, demokrasi yang dipraktikkan MD merupakan penjabaran dari prinsip syura yang diajarkan al-Qur'an untuk menengakkan sebuah kehidupan yang egaliter. Saya juga mengharap agar Pemuda Muhammadiyah menjadi bagian inti dari persyarikatan yang punya misi untuk menggarap masalah-masalah kepemudaan yang sering tidak kurang kompleksnya dibandingkan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh generasi yang lebih tua, termasuk masalah yang berkaitan dengan politik yang kini menghinggapi sebagian besar kaum muda bangsa ini, khususnya kaum muda MD.

Dengan filosofi seperti itu, MD terlibat aktif dalam memecahkan masalah seperti keterlibatan MD dalam proyek resolusi konflik pada empat daerah rawan konflik yakni Aceh, Papua, Ambon dan Poso. Filosofi itu yang memandu aktivitas MD untuk terus memperkuat identitasnya sebagai gerakan sosial yang mandiri dan terbebas dari pengaruh partai politik. meski ditemukan beberapa problem dalam hubungan MD dengan politik pasca Orde Baru, namun secara umum MD berhasil menjaga kemandiriannya dari intervensi politik tertentu. Kendati dalam realitasnya banyak warga MD terlibat dalam kepengurusan partai mulai dari pusat sampai daerah-daerah, namun keterlibatan mereka bersifat individu dan tidak terkait dengan organisasi.

Pada 2004, MD melalui suatu pertemuan nasional yang mengundang seluruh ketua pimpinan wilayah dan pimpinan pusat mengambil suatu kebijakan strategis bagi bangsa Indonesia yang maju dan demokratis, yakni berkaitan dengan pemilihan presiden secara langsung yang pertama dilakukan di Indonesia. Pada saat yang sama ada tokoh MD yang maju sebagai capres, oleh banyak kalangan menilai sikap MD tersebut dianggap

sebagai partisipan dan sudah masuk dalam ranah politik praktis dengan terlibat aktif dalam menyukseskan MAR. Saya katakan bahwa itu tuduhan tersebut tidaklah benar, karena dalam kebijakan tersebut, MD secara jelas mendorong warga MD agar terlibat aktif dalam proses demokrasi melalui pemilu dengan memilih elite bangsa yang dapat dipercaya dan memiliki visi yang jelas untuk membangun dan memperbaiki bangsa ini.

Dalam sejumlah hal, untuk tidak menyatakan banyak hal, ranah politik kekuasaan bahkan seringkali syarat masalah, sehingga bukan sekedar dunia yang indah. Seorang pemimpin politik di negeri ini berangkat dari pengalaman di lapangan bahkan sempat menyatakan bahwa politik itu dalam praktiknya sungguh sangat jahat dan kotor, kendati tentu saja dalam sisi lain politik itu juga menunjukkan nilai luhur terutama ketika di bingkai moral dan sepenuhnya memperjuangkan hajat hidup bangsa dan negara.

Kerja politik dapat menghasilkan menteri atau posisi strategis di kekuasaan, tetapi pada saat yang sama kehilangan menteri atau jabatan kekuasaan karena tawar-menawar politik selalu disertai pertukaran kepentingan akhirnya dapat satu kehilangan satu. Perjuangan di ranah politik pun selalu diwarnai pragmatisasi yang luar biasa sehingga konflik, intrik, saling jegal, politik uang, dan masalah-masalah perebutan kepentingan menjadi sangat vulgar dan terbuka. Hal-hal yang demikian jangan diabaikan dari neraca politik, sehingga dunia politik kendati sekali lagi penting dan strategis, tidak seindah yang diagungkan para pejuang politik kekuasaan.

Untuk membantu memudahkan pembacaan terhadap manufer politik elite MD sebelum, pada saat, dan setelah Pemilu 2009 tabel IV.3 ini sekiranya perlu dijadikan referensi pembacaan empiris.

Tabel IV.3

Nama Elit	Metode Politik/Manufer	Implikasi
MAR	a. Mendukung SBY melalui PAN b. Secara tidak langsung mendukung JK (personal) c. Mengumpulkan DPW PAN di rumahnya d. Mengundang PWM bertemu SBY	Tetap dekat dengan penguasa, mendapat apresiasi dari basis massa MD, dianggap penyelamat muka MD. Radius pengaruh di ranah agama dan politik

Tabel IV.3 (lanjutan)

DS	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung JK-WIN b. Berposisi dengan SBY dgn mengkritisi DPT bersama dua pasangan c. Menggunakan nama MD menyuarakan opininya d. Menunggu dipinang sbg cawapres d. Dibalik pendirian PMB untuk menaikkan <i>bargaining position</i>-nya 	<p>Gagal jadi cawapres</p> <p>MD dihapus dari jatah menteri, tdk ada <i>bargaining position</i> yg di atas PAN, DS mendapat kecaman karena kecerobohnya berposisi dgn SBY shg Muh tidak dapat jatah menteri lagi sementara di bawah, pejabat MD selalu dekat dgn dinas pendidikan daerah. Pengaruh lemah di politik dan kuat dalam organisasi/ agama</p>
ASM	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempromosikan JK b. Menggunakan media, Secara tidak langsung bisa dikatakan melakukan politik praktis c. 'Menyerang' SBY, "JK the real President" 	<p>Mendapat perlawanan dari kubu Muhammadiyah-PAN karena buya berpolitik praktis/partisan</p> <p>Pengaruh di khsanah pemikiran dan wacana intelektual</p>
HN	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat aturan organisasi agar terhindar dari politik praktis melalui SK, instruksi PP b. Memilih politik diam ketika PMB didirikan atau kalah c. Menyuarakan politik kebangsaan dengan menulis buku dan opini media, forum politisi MD 	<p>Bertahan dalam garis organisasi, menguatnya kelompok apolitis di MD yang dianggap tidak realistis, tdk berperan dalam politik. Muncul gagasan amal usaha di bidang politik. Sebagai penjaga gawang ideologi MD</p>
YI	<ul style="list-style-type: none"> a. Sepak terjang di MUI lebih banyak b. Mengelarkan fatwa golput Haram c. Dekat dengan orang PKS, HTI 	<p>Menguatnya jamaah baru MD yang lebih berurusan dengan masalah fikih bukan persoalan kebangsaan. Pengaruh di jamaah MD yang puritan</p>
BS	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendukung SBY (sbg menteri) b. Secara tidak langsung mendukung JK 	<p>Tidak banyak implikasi sebab tidak mempunyai basis jamaah yang kuat, melainkan berada dalam jamaah MAR</p>
MM	<ul style="list-style-type: none"> a. lebih dekat kepada kubu puritan/fundamental MD. b. Pernah diminta dukungan kepada PMB 	<p>Dihapus dari posisi menteri, BS tipe birokrat yang lebih menunjukkan profesionalisme (menteri), BS banyak dipuji oleh kalangan bawah MD</p>

BAB V

KESIMPULAN

“Bagi seorang muslim kegiatan politik harus menjadi bagian integral dari kehidupannya. Mengherankan kalau kita menjauhi dan membenci politik, suatu bidang yang sangat menentukan arah dan nasib kita...”

(M. Amin Rais, 1988: 87)¹

“Aku berlindung kepada Allah dari politik dan segala sesuatu yang berkaitan dengan politik”

(Muhammad Abduh, 1845-1905)²

Dalam bagian kesimpulan ini, penulis mencoba memberikan deksripsi yang singkat dan jelas. Ada dua hal penting yang penulis hasilkan dari penelitian ini. *Pertama*, spektrum fragmentasi politik elite Muhammadiyah. *Kedua*, sebab-sebab terjadinya fragmentasi elite di tubuh Muhammadiyah.

Menurut pandangan saya dan mungkin beberapa peneliti lainnya bahwa kemunculan kelompok dalam Muhammadiyah bukanlah hal yang sama sekali baru. Namun, penulis yakin bahwa seiring dinamika politik

¹ Dalam buku, *Islam dan Dakwah: Pergumulan Antara Nilai dan Realitas*, 1988, hlm. 87, yang dikutip dalam makalah Hajriyanto Y. Thohari, dalam *Amien Rais dan Politik Muhammadiyah*, 2001. baca juga tulisan Amien Rais, dkk. dalam ‘Gerakan Islam Internasional dan Pengaruhnya bagi Gerakan Islam Indonesia (Prisma, No. Ekstra 1984), dan ‘Dakwah dan Politik’, terbit tahun 1987, ‘Islam di Indonesia, sebuah Ikhtiar Mengaca Diri’ (1986).

² Muhammad Abduh sangat mempengaruhi KHA Dahlan sebelum berdirinya Muhammadiyah. Trauma Abduh dalam persoalan politik nampaknya seperti yang dialami kelompok Muhammadiyah yang antipati terhadap politik dan menolak politik praktis.

dan sosial yang terjadi di Indonesia ada beberapa hal yang perlu direvisi terkait varian kelompok yang terus beragam dan juga perilaku atau karakter politik yang tidak monoton, seragam, dan monolitik. Kelompok ini muncul dalam rentan sejarah Muhammadiyah dan *complicated* pada saat Pemilu 2009 dengan munculnya PMB maka itulah klimaks sahwa politik atau yang disebut sebagai “fundamentalisme politik” yang karakternya berbeda dengan kelompok fundamentalis agama/ideologi di Muhammadiyah yang lahir sebelumnya.

Ada pun varian itu antara lain, *pertama*, fundamentalis politik atau disebut juga kubu ‘pragmatisme politik’. Kelompok ini direpresentasikan Din Syamsuddin, dan beberapa tokoh lain seperti Bambang Sudibyo, Amien Rais, Imam Addaruqutni, Anis Matta, Hidayat Nur Wahid, Muslim Abdurrahman, dan sebagainya. Dalam sejarah perpolitikan dan kepartaian seperti tokoh-tokoh Muhammadiyah di Masyumi, mereka tidak pragmatis, mereka sangat ideologis dengan keyakinan bahwa perjuangan Islam harus lewat negara, tidak ada kata tidak, seperti Mas Mansur, Kasman Singodimedjo, Agus Salim. Dalam Pemilu 2009 kubu ini berjuang mati-matian untuk meyakinkan massa Muhammadiyah terhadap pilihan tertentu dengan cara-cara yang halus dan tidak mendikte, karena warga Muhammadiyah dianggap sudah cerdas membaca kemana arah politik elit mereka. Ini tidak bekerja dengan baik sehingga harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kekalahan kelompok ini dalam Pemilu 2009 adalah yang kedua kali setelah Pemilu 2004 dimana Muhammadiyah melalui Khittah Denpasar memberikan legitimasi untuk menyokong kader terbaiknya menjadi capres.

Kedua, kubu moderat pasif. Kubu ini sering mengatakan di tempat umum bahwa Muhammadiyah dan dirinya adalah *ummatan wasathan*, berada ditengah-tengah umat dan tidak menghendaki perpecahan atau pertengakaran. Keyakinan mereka adalah bahwa dakwah jauh lebih penting dari urusan dunia politik. Mereka juga berkeyakinan bahwa “politik itu memecah dan dakwah itu merangkul”. *Ketiga*, kubu moderat aktif. Bedanya dengan moderat pasif adalah kelompok ini aktif mencari, mengumpulkan berita dan menganalisisnya sebagai bahan untuk menentukan pilihan

politik sadarnya dan para pengikutnya. Kelompok ini mungkin banyak direpresentasikan oleh kelompok-kelompok yang berada di tengah yaitu kubu yang pernah mendukung MAR menjadi capres karena alasan situasional seperti Syafii Maarif. Termasuk kategori kelompok ini misalnya Yunahar Ilyas, Muhammad Muqoddas, Zamroni.

Keempat, kubu khittisme. Kelompok ini cenderung fleksibel tetapi punya basis argumen, perspektif dan prinsip. Apa kata organisasi mereka akan taat “*sami’na waathob’na*”. Artinya, mereka selalu menggunakan khittah sebagai tolak ukur perjuangan dalam ranah politik. Pengikut kubu ini jumlahnya cukup banyak, karena kata-kata Muhammadiyah tidak berpolitik praktis itu cukup kuat tertanam di Muhammadiyah, apalagi dimanfaatkan oleh politisi yang aktif di partai-partai besar, menengah, dan sebagainya. Dalam praktis tindakan politik, mereka cenderung menjaga jarak dan tidak mau terjebak dalam “lumpur” politik yang dianggapnya penuh intrik. Kelompok yang menonjol adalah termasuk Haedar Nashir, Rosyad Sholeh dan beberapa elite Muhammadiyah di ranah lokal. Kelompok ini juga mengklaim bahwa berdakwah lewat Muhammadiyah juga tidak kalah mulia dengan berjuang di tempat lain seperti arena politik. Bahkan, melalui organisasi Islam ini jauh lebih bisa membuktikan teologi keikhlasan atau yang kerap disebut teologi al-maun, sementara di ranah politik banyak hal selalu dikonversikan dengan nilai anggaran mata uang.

Terakhir, *kelima*, adalah kelompok apolitis. Kelompok ini ada dua macam, kelompok yang berteriak Muhammadiyah apolitis dan kelompok Muhammadiyah yang benar-benar apolitis. Mereka tidak mau menuhankan politik dan fokus pada urusan ibadah dan fikih. Biasanya kelompok ini berada di desa-desa Muhammadiyah atau tokoh Muhammadiyah yang merupakan ulama dengan buku-buku fiqih, agama Islam sebagai referensi atau disebut pula kyai tradisional atau kyai kampung. Jamaah yang mengikutinya juga mengambang dalam pilihan politik sadarnya, sehingga akhirnya memutuskan pilihannya pada hari H pencoblosan. Jumlah kelompok ini banyak dan banyak partai atau kandidat diuntungkan dengan massa mengambang Muhammadiyah. Di tingkat Pimpinan Pusat Muhammadiyah hampir sulit ditemukan yang benar-benar apolitis,

tapi penulis yakin banyak pengurus pusat Muhammadiyah yang secara pribadi mengatakan “politik itu kotor”.

Hal lain yang penting dijadikan wacana dan diskusi adalah bahwa penulis menarik kesimpulan akhir mengenai sebab musabab terjadinya perkubuan atau perpecahan karakter politik di kalangan elite Muhammadiyah yang memang sejak dulu tidak monolitik, atau meminjam bahasa Prof. Kim bahwa Muhammadiyah memberikan ruang bagi kelompok, walau mereka saling berlawanan dalam pendapat dan tindakan. Secara ringkas sebab itu antara lain dapat dijelaskan, *pertama*, kontinuitas sejarah. Fenomena *changing continuity* itu terjadi di organisasi yang umurnya 100 tahun ini. Sejarah kemarin membuahkan apa yang terjadi hari ini, dan apa yang terjadi sekarang adalah cerminan apa yang akan terjadi di hari-hari depan. Kenyataan bicara demikian, di belantara sejarah bahkan semenjak organisasi lahir ini tidak berada di ruang hampa tapi situasi politik, strategi dan komunikasi politik nyata-nyata menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dengan elit-elit Muhammadiyah era “*assbiquna al-awwalun*” atau orang-orang yang hidup pada generasi pertama Muhammadiyah antara tahun 1912-1945. Bisa diklarifikasi, bukankah sejak semula Muhammadiyah melahirkan atau ada di dalamnya para politisi yang cukup berpengaruh? Mereka bisa dikatakan politisi plus ideologi dakwah.³ Sementara politisi Muhammadiyah hari ini bisa dikata meski mengandung resiko, sebagai politisi yang minus ideologi atau pragmatisme politik, atau meminjam bahasa Syafii Maarif (2008), politik sebagai mata pencaharian.

Kedua, intervensi ideologi ‘asing’. Tidak bisa dianggap enteng bahwa kemunculan gerakan Tarbiyah yang menjelma menjadi Partai Keadilan (1998) lalu menjadi Partai Keadilan Sejahtera (2002) setelah terjegal oleh *electoral threshold*. Intervensi ideologi ini menjelma menjadi wajah destruktif sekaligus otokritik bagi elite Muhammadiyah. Banyaknya aktivis muda Muhammadiyah yang hengkang dan memilih PKS sebagai wadah barunya menunjukkan lemahnya militansi dan kaderisasi internal Muhammadiyah, seolah ini membuktikan sihir baru di zaman baru, bahwa PKS lebih Islami, lebih militan, dan jauh lebih baik proses perkaderannya dibandingkan Muhammadiyah. Tetapi, banyak juga yang tidak melepas Muhammadiyah

karena punya jabatan penting dan aktif sebagai aktivis dan pengurus PKS. Tidak ada yang salah dalam perspektif organisasi Muhammadiyah, yang membolehkan kader dan pengurusnya secara personal sebagai aktivis partai politik tanpa melibatkan organisasi di dalamnya. Inilah yang kemudian menyumbangkan pembilahan baru kelompok politik dalam Muhammadiyah dalam gegap gempita Pemilu 2009.

Perseteruan dan perang dingin sempat terjadi antara elite Muhammadiyah yang ‘anti-PKS’ dengan kelompok Muhammadiyah di PKS, seperti Anis Matta (Majelis Hikmah), Hidayat Nur Wahid (Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus) yang merupakan pengurus pusat Muhammadiyah dan menjadi penggerak perkaderan di Partai Keadilan Sejahtera.

Ketiga, desain organisasi yang inklusif dan otonom. Muhammadiyah sejak didirikan dan sampai sekarang terlihat sebagai organisasi yang *open* dan tidak eksklusif. Hal ini bisa terlihat dari beragamnya orang di rumah atau ‘tenda’ Muhammadiyah ini. Sebagai implikasinya adalah ketidakseragaman atas sikap dan respon terhadap fenomena atau keadaan politik nasional ataupun lokal. Ciri organisasi yang lainnya adalah sifat otonomi yang diberikan sangat luas kepada organisasi otonom di bawahnya yang meliputi delapan organisasi otonom dan beberapa majelis, badan dan lembaga (badan pembantu pimpinan) yang sangat terbuka peluang untuk berbeda sikap dengan elite 13 besar PP Muhammadiyah (populer dengan istilah ‘13 dewa’ yang dipilih dalam forum Mukhtamar). Ada fenomena yang bisa merepresentasikan keadaan tersebut, misalnya Majelis Tabligh lebih mengarah ke sosok Amien Rais sebagai kiblat politiknya, dan Majelis Hikmah akan lebih condong mendukung manufer Din Syamsuddin, dan sebagainya.

Keempat, pragmatisme politik elite. Dengan masing-masing modalitas atau basis legitimasi yang dimiliki elite Muhammadiyah, mereka mempunyai cara sendiri untuk bermain api dengan politik. Banyak bukti yang sudah penulis himpun di bab-bab sebelumnya, bahwa syahwat politik elite Muhammadiyah pada saat Pemilu 2009 nyata-nyata berhaluan pragmatis, sebagaimana yang diekspresikan Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) yang mendukung JK-WIN lantaran kecewa

dengan SBY dan bobroknya mesin politik yang bernama Partai Matahari Bangsa (PMB, didirikan tahun 2006) dan tidak terkonsolidasinya kekuatan 'Muhammadiyah' dengan 30 juta warganya yang diharapkan seiring dan sejalan dengan preferensi politik Din Syamsuddin. Begitu juga yang dimainkan oleh Syafii Maarif yang mempromosikan JK-Win yang notabene punya masalah dengan penegakan HAM dan juga Orde Baru: Golkar. Dan, yang paling terlihat pragmatis adalah, bagaimana Amien Rais yang membungkam diri sendiri terhadap kekritisan dan agenda reformasi yang ia bangun melalui Muhammadiyah, Perhimpunan Amanat Muhammadiyah, sampai lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN).

Di penghujung perhelatan politik yang bernama pemilihan umum presiden dan wakil presiden itu, Amien Rais dan jajarannya di PAN lalu merapat ke SBY-Budiono dengan berbagai kepentingan di dalamnya, termasuk memasukkan menteri dalam kabinet dan membiayai mesin partai agar dapurnya tetap dapat mengepul. Pada saat yang sama, Amien Rais diapresiasi sebagai penyelamat muka Muhammadiyah, ketika pasangan capres-cawapres yang didukung sebagian besar elite Muhammadiyah itu kalah telak dalam satu putaran Pemilu 2009. Sebagai dampaknya, berbagai gerakan anak muda Muhammadiyah muncul dengan kritik yang sangat keras, bahwa Amien Rais dan PAN adalah politisi dan parpol, sehingga penolakan itu berujung pada keurungan Amien Rais untuk kembali masuk jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Mukhtamar Satu Abad Muhammadiyah tahun 2010.

Mungkin beberapa aktivis Muhammadiyah beranggapan ada perbaikan hubungan Muhammadiyah dan politik, akan tetapi hubungan antara politik dengan Muhammadiyah tidak lantas berubah dalam sekejap, sebab Din Syamsuddin pun dikenal sebagai mantan politisi yang sudah banyak memakan garam. Jadi, kedepan organisasi ini akan terus mengalami dinamika politik dan 'pertarungan' sengit diantara elite lama, sesama elite baru dalam merespon dinamika politik nasional dan lokal. Hal ini memperlihatkan derajat otonomi elit dan warga Muhammadiyah yang sekali lagi tidak monolitik. Ini telah dicatat beberapa ahli sebagai kekuatan dan kelebihan organisasi Islam modern terbesar ini[]

Daftar Pustaka

Buku

- Alfian, *Muhammadiyah The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization Under Dutch Colonialism*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Abdallah, Ulil Abshar, *Menjadi Muslim Liberal*, Jakarta: Nalar-Freedom Institute, 2005.
- Asfar, Muhammad, *Pemilih dan Perilaku Memilih*, Surabaya: Eureka, 2006.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama, Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara XVII & XVIII*, Jakarta: Prenada Media, 2001.
- Arifin, MT, *Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1987.
- _____, *Muhammadiyah Potret yang Berubah*, Surakarta: Institute Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependidikan Surakarta, 1990.
- Amin, M. Masyhur, dkk., *Kelompok Elite dan Hubungan Sosial di Pedesaan*, Jakarta: Pustaka Grafika Kita dan YIIS, 1988.
- Ali, A. Mukti, *Metode Memahami Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Azra, Azyumardi, *Menuju Masyarakat Madani*, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Asrofie, M. Yusron, *Kyai Haji Ahmad Dahlan Pemikiran dan Kepemimpinannya*. Yogyakarta: Penerbit LPI, 1983.
- Baehaqi, Imam (ed), *Agama dan Relasi Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Binder, Leonard, *Islam Liberal: Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, Penerjemah: Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

- Bottomore T.B., *Elite dan Masyarakat* (terj), Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006.
- Budiman, Arief, *Negara dan Pembangunan, Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*, Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas, 1991.
- Christenson. Reo M. et.al., *Ideologies and Modern Politics*, New York: Dodd Mead & Company, 1975.
- Cribb, Robert (ed), *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundation of the Netherlands Indies 1880-1942*, Leiden: KITLV Press, 1994.
- Darban, Ahmad Adaby, *Sejarah Kauman, Menguak Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Tarawang, 2000.
- Deni, Aji, *Konsolidasi Demokrasi, Menuju Keberlanjutan Politik Indonesia Pasca Soeharto*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006
- Djaenuri, Achmad. *Ideologi Kaum Reformis Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal (1912-1942)*, Surabaya: LPAM, 2002.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Eko, Sutoro, *Transisi Demokrasi Indonesesia*, Yogyakarta, APMD Press, 2003.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Terj. Aswab Mahasin, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Ghazali, Abdul Rahim (ed), *Amien Rais dalam Sorotan Generasi Muda Muhammadiyah*, Bandung: Mizan, 1998.
- _____, *Muhammadiyah Progressif, Manifesto Pemikiran Kaum Muda*, Jakarta: JIM-LESFI, 2007.
- Gaffar, Afan, *Javanese Voters, A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Hamid, Edy Suandi (peny), *Rekontruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban*, Yogyakarta: UII Press-PP Muhammadiyah, 2000.
- Haryanto, *Kekuasaan Elite, Suatu Bahasan Pengantar*, Yogyakarta: PLOD-JIP UGM, 2005.

- Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991, 1997.
- Hefner, Robert W, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: ISAI dan TAF, 2001.
- Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, terjemahan, Yogyakarta: Qalam, 2001.
- Jay, Robert R, *Religion and Politics in Rural Java*, Yale University: New Haven, 1965.
- Jurdi, Syarifudin, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- _____, *Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik, Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah sesudah Orde Baru*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Johnson, Doyle Paul, *Teori Sosiologi, Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1988.
- Kato, Hisanori, *Agama dan Peradaban: Islam dan Terciptanya Masyarakat Demokratis yang Beradab di Indonesia*, diterjemahkan oleh Ismu M. Gunawan, Jakarta: Dian Rakyat, 2002.
- Karim, M. Rusli, *HMI MPO dalam Kemelut Modernisasi Politik di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1997.
- Karim, A. Gaffar, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LkiS, 1995.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung, Mizan-Majalah Ummat, 1997.
- Kim Hyung-Jun, *Reformist Muslims in Yogyakarta Village: the Islamic Transformation of Contemporary Socio-religious Life*, Canberra: ANU E Press, 1996.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1991.
- _____, dkk, *Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru*, Bandung: Mizan, 1995.

- Latif, Yudi, *Intelegensia Muslim dan Kuasa, Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*, Bandung: Mizan, 2005.
- Lane, Max, *Bangsa yang Belum Selesai, Indonesia, Sebelum dan Sesudah Soeharto*, Jakarta: Reform Institute, 2007.
- Lindbad, J. Thomas (ed), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002.
- Ma'ruf, Farid, *Pendjelasan Tentang: Maksud dan Tudjuan Muhammadiyah*, Djakarta: Jajasan Santakam Djakarta, 1966.
- Maarif, A. Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985 .
- _____, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Jakarta: GIP, 1996.
- Maliki, Zainuddin, *Agama Rakyat, Agama Penguasa, Rekontruksi tentang Realitas Agama dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2000.
- _____, *Penaklukan Negara Atas Rakyat, Studi Resistensi Petani Berbasis Religiopolitik Santri Terhadap Negaranisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 1999.
- Mohtar, Mas'oed dan Collin Mc. Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001.
- Malik, Dedy Djameluddin, Idi Subandy Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia, Pemikiran dan Aksi Politik, Abdurrahman Wahid, Amiern Rais, Nurcholis Majid, Jalaluddin Rakhmat*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- _____, *Warisan Intelektual K.H. Ahmad Dahlan dan Amal Usaha Muhammadiyah*, Yogyakarta: Persatuan, 1990.
- _____, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, Yogyakarta, Bentang, 2000.
- _____, *Runtuhnya Mitos Politik Santri, Strategi Kebudayaan dalam Islam*, Yogyakarta: SIPRESS, 1999.

- _____, *Menggugat Muhammadiyah*, Yogyakarta, Fajar Pustaka, 2000.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif* (revisi), Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Maryadi (ed), *Muhammadiyah dalam Kritik*, Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS, 2000.
- Nakamura, Mitsuo, *Bulan Tsabit Muncul dari Balik Pohon Beringin: Studi Pergerakan Muhammadiyah di Kota Gede Yogyakarta*, Alih Bahasa: M. Yusron Asrofi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.
- Nashir, Haedar, *Dinamika Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta: Bigraf Publisng, 2001.
- _____, *Dialog Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah* Yogyakarta: BPK PP Muhammadiyah, 1992.
- _____, *Ideologi Gerakan Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2001.
- _____, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010
- _____, *Arogansi Kekuasaan dalam Budaya Politik*, Yogyakarta, Lentera, 1997.
- Neil, Robert Van, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Jakarta, Pustaka Jaya, 1960.
- Peacock, James L., *Purifying The Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam*, California: The Benjamin Publishing, 1978.
- Peter Burnham, *Research Metdhods in Politics*, New York: Palgrave McMilan, 1988.
- PP Muhammadiyah-Partnership, *Fikih Anti Korupsi, Perspektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: Majelis Tarjih dan Tadjid PP Muhammadiyah, 2002.
- Rais, M. Amien, *Suksesi dan Keajaiban Kekuasaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- _____, *Membangun Politik Adiluhung, Membumikan Tauhid Sosial Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

- _____, *Melangkah Karena Dipaksa Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- _____, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1995.
- _____, dkk, *Muhammadiyah dan Reformasi*, Yogyakarta: Aditya Media, 2000.
- _____, *Hubungan antara Politik dan Da'wah, Berguru kepada Natsir*, Bandung: Mujahid Press, 2004.
- Raharjo, M. Dawam, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES-LSAF, 1999.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Penerbit Serambi, 2005.
- Ruth, Mc Vey, (ed), *Kaum Kapitalis Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus, Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Misi Kristen di Indonesia 1912 Hingga Masa Kini*, Terjemahan Ihsan Ali Fauzi, Bandung: Mizan, 1998.
- Suwondo, Kutut, *Civil Society di Aras Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Percik, 2003.
- Sjuja', *Muhammadiyah dan Pendirinya*. Yogyakarta: Majelis Pustaka PP Muhammadiyah, 1989.
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- _____, *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Stodaard, Philip H. dkk (eds.), *Change and the Muslim World*, Sycaruse: Sycaruse University Press, 1981.
- Sujarwanto, dkk. (Ed), *Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan: Sebuah Dialog Intelektual*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Suwarno, *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Syamsuddin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2000.

- _____, *Islam dan Politik: Era Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001.
- Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Jakarta: Grafiti, 1997.
- Sutherland, Heather, dkk., *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2004.
- Thaba, Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tim Penyusun Universitas Muhammadiyah Malang, ed., *Muhammadiyah, Sejarah, Pemikiran, dan Amal Usaha*, Yogyakarta: Tiara Wacana dan UMM Press, 1990.
- Tibi, Bassam, *Ancaman Fundamentalisme: Rajutan Islam Politik dan Kekacauan Dunia Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000.
- Tante, Richard R., Kenneth Young, Nur Iman Subono, dkk (ed), *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Tim 1912, *JK dan Muhammadiyah*, (Buku Kampanye), 2009.
- Uchrowi, Zaim, M. Amien Rais, *Memimpin dengan Nurani*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Zainuri, Achmad, *Ideologi Kaum Reformis: Melacak Pandangan Keagamaan Muhammadiyah Periode Awal*, Surabaya: LPAM, 2002.

Dokumen Muhammadiyah

- Hoofdbestuur Moehammadijah, *Boeah Congres Moehammadijah Seperempat Abad Tahun 1936*, Djogjakarta: Hoofdbestuur Congres Moehammadijah, 1936.
- _____. *Tafsir Langkah Moehammadijah*, Djogjakarta: H.B. Moehammadijah Madjlis Taman Pustaka, 1939.
- Peringatan Sidang Madjlis Tanwir di Pekajangan Tanggal 21-24 Djuli 1955 *Isi Pelaporan Tentang: Konsepsi Negara Islam Oleh A. Kahar Muzakkir*, Dokumentasi Pusat Pimpinan Muhammadiyah Jogjakarta.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Bermuhammadiyah*, Yogyakarta: PP. Muhammadiyah BPK, 1992.

_____, *Berita Resmi Muhammadiyah*, BRM. No. 04/2003 Rajab 1424 H/September 2003, Yogyakarta: PP. Muhammadiyah, 2003.

_____, *Berita Resmi Muhammadiyah* No.04 tahun 2007 tentang Tanfidz keputusan Tanwir Muhammadiyah 2007.

_____, *Berita Resmi Muhammadiyah* No.06 tahun 2009.

_____, *Berita Resmi Muhammadiyah* No. 01 tahun 2005 tentang Tanfidz Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 di Malang.

_____, *Berita Resmi Muhammadiyah*, Tanfidz Keputusan Tanwir, 2009.

Majalah/Makalah/Buletin

Journal TANWIR, edisi Perdana, Vol 1, No. 1, Mei 2003. PSAP.2003

Journal PROFETIK, vol. VI, No.1, tahun 2002.

Journal PROFETIK Mei 2003.

Panjimas Edisi 05/Th I 27 Nov-12 Des 2002

Suara Muhammadiyah No. 22 Tahun ke-65, 1985, edisi bulan Nopember tahun 1998, edisi

Desember 2002, no.21/TH ke-91/1-15 November 2009

Harian Kompas Selasa 29 Januari 2002.

TEMPO, 11 November 2001, TEMPO, 10 September 2000

Republika, 7 September 2001.

Majalah Tempo edisi 30 Maret-5 April 2009

Maarif Institute, 100 Tahun Muhammadiyah, Civil Society dan tantangan Gerakan Islam Transnasional, Jakarta, Jurnal Maarif, Vol.4. No.2/ Desember 2009

Republika, 6 Mei 2010, Opini, kelas menengah Islam Baru, Azumardi Azra

Suara Muhammadiyah edisi 16-31 Maret 2009, 16-31 Mei 2009, 1-15 Juni 2009, 16-30 Juni 2009.

Abdul Munir Mulkhan, makalah, Muhammadiyah Rindu Kuasa?, dalam seminar Muhammadiyah dan peran Politik Kebangsaan, 22 April 2009, di Yogyakarta.

Materi Tanwir Muhammadiyah tahun 2007 di Yogyakarta

Suara Muhammadiyah, edisi no.10/TH.ke-94/16 Mei 2009

Suara Muhammadiyah, edisi no.12/TH.ke-94/16-30 Juni 2009

Suara Muhammadiyah, edisi no.6/TH.ke-94/16-31 Maret 2009

Suara Muhammadiyah, edisi no.10/TH.ke-94/16 Mei 2009

Majalah Gontor, Edisi 03 Tahun VII Juli 2009

Internet/Website/Milist

http://www.m-amienrais.com/news/one_news.asp?IDNews=139

<http://islamlib.com/id/artikel/kepemimpinan-santri-dan-dilema-kekuasaan/>

<http://oki-sukirman.blogspot.com/2009/03/komunikasi-politik.html>

<http://sakha140887.multiply.com/journal/item/6>

www.muhammadiyah.or.id

<http://www.ahmadheryawan.com/opini-media/sosial-politik/2792-pan-pmb-danmuhammadiyah.html>

<http://www.tribun-timur.com/read/artikel/98999/Komunikasi-Politik-Ala-Muhammadiyah>

http://www.muhammadiyah.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1990&Itemid=2

www.ipm.or.id

<http://pdpmsleman.wordpress.com/2007/03/18/sikap-pp-pemuda-muhammadiyah-terhadap-pmb/>

Milist alumniipm-irm@yahoogroups.com